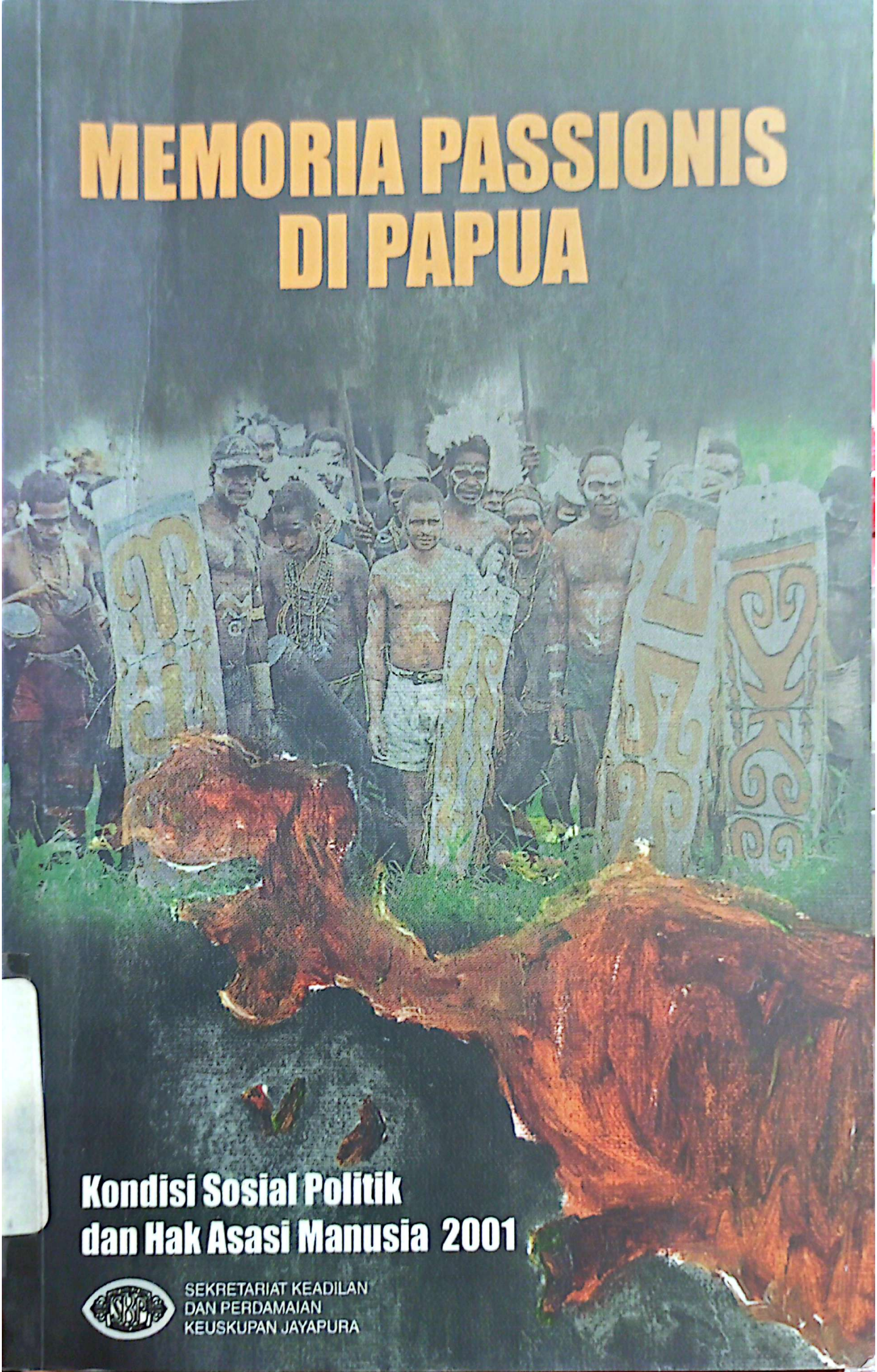
MEMORIA PASSIONIS DI PAPUA



Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia 2001

SEKRETARIAT KEADILAN
DAN PERDAMAIAN
KEUSKUPAN JAYAPURA

I. 7. 3.2

MEMORIA PASSIONIS DI PAPUA

Kondisi Sosial-Politik dan Hak Asasi Manusia 2001



MEMORIA PASSIONIS DI PAPUA

Kondisi Sosial-Politik dan Hak Asasi Manusia 2001

Theo van den Broek ofm
J. Budi Hernawan ofm
Frederika Korain, S.H.
Adolf Kambayong ofm

Diterbitkan atas kerjasama:

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian
Keuskupan Jayapura

Lembaga Studi Pers dan Pembangunan

2003

MEMORIA PASSIONIS DI PAPUA
Kondisi Sosial-Politik dan Hak Asasi Manusia 2001

Penulis
Theo P.A. van den Broek ofm, J. Budi Hernawan ofm,
Frederika Korain, S.H., Adolf Kambayong ofm

Editor
Darpan Ariawinangun
Sandra Kartika

Rancang Sampul & Tata Letak
Muid Mularnoidin

Foto Sampul
Koleksi **Yayasan Sejati** yang diambil dari buku *Irian Jaya: Membangun Masyarakat Majemuk,* Djambatan, 1994.

Cetakan Pertama, Maret 2003

Hak Cipta © SKP Keuskupan Jayapura, 2003

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
van den Broek, Theo P.A., *et. al.*
MEMORIA PASSIONIS DI PAPUA, Kondisi Sosial-Politik dan Hak Asasi Manusia 2001/Penulis: Theo P.A. van den Broek ofm, *et. al*/
Editor: Darpan Ariawinangun, Sandra Kartika/
-- cet. I -- Jakarta: LSPP, 2003;
xiii + 277 hlm.; 14 x 21 cm

ISBN 979-9381-32-0

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura
Jl. Kesehatan No. 4 Dok II Jayapura
Tel./Fax. (62) (967) - 534993
Email: skkp@jayapura.wasantara.net.id

Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)
Jl. Pejernihan I, Kompleks Keuangan No. 12
Pejompongan - Jakarta Pusat, 10210
Tel.: (62) (21) - 5746656, 5746276; Fax. (62) (21) - 5746276
Email: lspp@centrin.net.id; lspp@indo.net.id

Diterbitkan atas kerjasama LSPP dengan SKP Keuskupan Jayapura



Daftar Isi

Kata Pengantar vii
Daftar Singkatan ix

Pendahuluan 1
Bagian 1
KRONOLOGI 2001..... 5

Bagian 2
GAMBARAN SOSIAL-POLITIK 2001..... 161

Bagian 3
KONDISI HAK ASASI MANUSIA 2001..... 201

Bagian 4
MENYELAMI FAKTA, MERAJUT MASA DEPAN.. 253

Lampiran..... 261

Kata Pengantar

WALAUPUN telah melampaui tahun 2002, Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura masih tetap berkeinginan untuk menyajikan gambaran dinamika sosial politik di Papua selama 2001. Niat ini merupakan wujud dari perhatian kami dalam mendokumentasikan ingatan sosial masyarakat Papua yang mudah ditelan oleh "budaya melupakan" yang tetap bercokol kuat dalam masyarakat Indonesia.

Buku ini merupakan edisi no. 13 dari seri *Memoria Passionis* yang tetap mengikuti kerangka dan gaya yang sama dengan dua buku sebelumnya. Maksud kami adalah supaya bahan-bahan yang ada dalam buku ini dapat dengan mudah menjangkau seluas mungkin khalayak pembaca. Karena itu kami berusaha sedapat mungkin menghindari istilah teknis, gaya bahasa yang formal, akademis, atau uraian yang amat berat, tanpa mengurangi bobot yang terkandung di dalam uraian bab demi bab. Kami berharap khalayak pembaca masih mendapati gaya tuturan, ungkapan-ungkapan bahasa keseharian, atau uraian yang singkat dan terbatas.

Secara khusus kami haturkan banyak terimakasih kepada rekan-rekan kerja kami. Khususnya kepada Dr. Chris Ballard (*Australian National University*) yang telah mengizinkan kami untuk mempergunakan kronik yang dimilikinya, juga kepada Dr. Jaap Timmer (*Australian National University*) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan catatan dan komentar terhadap tulisan kami ini. Kepada rekan-rekan di LSPP Jakarta, kami amat menghargai kerja keras dan kerja sama yang telah dibangun bersama-sama dalam upaya menerbitkan buku ini.

Akhirnya, kami tak lupa menyatakan bahwa seluruh isi dan kekurangan buku ini merupakan tanggung jawab kami. Oleh sebab

itu kami membuka diri atas tanggapan kritis, masukan, atau saran apapun untuk perbaikan buku ini.

Selamat membaca!

Jayapura, 16 Desember 2002

Drs. Theo van den Broek ofm

Direktur SKP Keuskupan Jayapura

Daftar Singkatan

Adpel : Administratur Pelabuhan
ALDP : Aliansi Demokrasi untuk Papua
AMA : *Associated Mission Aviation*
Amor : Amungme –Komoro
AMP : Aliansi Mahasiswa Papua
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BAP : Berita Acara Pemeriksaan
Bapedalda : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Baperjakat : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBM : Bahan Bakar Minyak
BKO : Bawah Komando Operasi
BP : *British Petroleum*
BPG : Balai Pelatihan Guru
CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil
CPO : *Crude Palm Oil*
Dansatgas : Komandan Satuan Tugas
DAU : Dana Alokasi Umum
DOM : Daerah Operasi Militer
DPRD : Dewan Pewakilan Rakyat Daerah
Ebtanas : Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional
Ekososbud : Ekonomi, sosial, budaya
Elsham : Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia
FKPPD : Forum Komunikasi Pengusaha Putra Daerah
Foker LSM : Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat
Fok-Pam-Akor : Forum Komunikasi Penyalur Aspirasi Masyarakat Amungme-Komoro
Formed : Forum Merauke untuk Demokrasi
Gerasem : Gerakan Aspirasi Merdeka

GIDI	: Gereja Injili Di Indonesia
GKI	: Gereja Kristen Injili
GKII	: Gereja Kristen Injili di Irian Jaya
GOR	: Gedung Olah Raga
HAM	: Hak Asasi Manusia
HPH	: Hak Penguasaan/Pengelolaan Hutan
HPI	: Himpunan Pengusaha Indonesia
HPPMMS	: Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Maybrat – Sorong
ICRC	: *International Committte of the Red Cross*
IDT	: Inpres Desa Tertinggal
Irjen	: Inspektur Jenderal
ITB	: Institut Teknologi Bandung
Itwilprov	: Inspektoral Wilayah Provinsi
JKPIT	: Jaringan Kerja Perempuan Indonesia Timur
JPS	: Jaringan Pengaman Sosial
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
Kapendam	: Kepala Penerangan Daerah Militer
Kapolda	: Kepala Kepolisian Daerah
Kapolres	: Kepala Kepolisian Resort
Kasad	: Kepala Staf Angkatan Darat
Kejari	: Kejaksaan Negeri
Kejati	: Kejaksaan Tinggi
KKN	: Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KKW	: Kelompok Kerja Wanita
Kodam	: Komando Daerah Militer
Kompol	: Komisaris Polisi
Kontras	: Komisi Orang Hilang dan Anti Kekerasan
Kopermas	: Konsorsium Pemberdayaan Masyarakat
KPAD	: Komisi Penanggulangan AIDS Daerah
KPP HAM	: Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia
KSB	: Kelompok Sparatis Bersenjata
Lanut	: Pangkalan Utama
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
Lemasa	: Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme
LMA	: Lembaga Masyarakat Adat
LP3A-P	: Lembaga Pengkajian, Pemberdayaan Perempuan

& Anak - Papua
LP3BH : Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Bantuan Hukum
LPPMA : Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat Adat
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MA : Mahkamah Agung
MAF : *Mission Aviation Fellowship*
Mamta : Mamberamo – Tami
MRP : Majelis Rakyat Papua
Mubes : Musyawarah Besar
MUI : Majelis Ulama Indonesia
NTT : Nusa Tenggara Timur
OPK : Operasi Pasar Khusus
Opsus : Operasi Pasar Khusus
Ornop : Organisasi Non pemerintah
Ortal : Organisasi Tata Laksana
Otda : Otonomi Daerah
Otsus : Otonomi Khusus
P3W : Pusat Pengkajian & Pemberdayaan Wanita
PAD : Pendapatan Asli Daerah
PAHAM : Pusat Advokasi Hak Azasi Manusia
Pangdam : Panglima Daerah Militer
Pansus : Panitia Khusus
Parpol : Partai Politik
PBB : Pajak Bumi dan Bangunan
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDIP : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDKB : Partai Demokrasi Kasih Bangsa
PDP : Presidium Dewan Papua
Pemkab : Pemerintah Kabupaten
Pepera : Penentuan Pendapat Rakyat
Perda : Peraturan Daerah
PGBI : Persatuan Gereja Baptis Indonesia
PN : Pengadilan Negeri
PNG : Papua New Guinea
PNS : Pegawai Negeri Sipil
Pokja : Kelompok kerja

PSDH	: Pajak Sumber Daya Hutan
PSK	: Pekerja Seks Komersial
PT	: Perseroan Terbatas
PTFI	: PT Freeport Indonesia
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RUU	: Rancangan Undang-Undang
Satgas	: Satuan Tugas
SBM	: Susunan Bertempur Musuh
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIL	: *The Summer Institute of Linguistic* (Lembaga Amerika yang Meneliti Bahasa-bahasa di Papua)
Sipol	: Sipil dan Politik
SKP KAM	: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke
SMPT	: Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi
Sonamapa	: Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua
TKBM	: Tenaga Kerja Bongkar Muat
TPKKRP	: Tim Pembela Kebenaran dan Keadilan untuk Rakyat Papua
TPN/OPM	: Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka
Uncen	: Universitas Cendrawasih
UNHCR	: *United Nation High Commission for Refugee*
UNICEF	: *United Nation for International Children Fund*
USAID	: *United States Agency for International Development*
UUD	: Undang-undang Dasar
Wakasad	: Wakil Kepala Staf Angkatan Darat
Walhi	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WWF	: *World Wide Fund for Nature*
Yabimu	: Yayasan Sosial Bina Mandiri Utama
Yahamak	: Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan
YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
ZEE	: *Zona Economy Exclusif*

PETA PAPUA (Indonesia)



Pendahuluan

MESKIPUN alur perkembangan sosial politik di Papua masih terlihat sebagai sesuatu yang berkesinambungan, namun jika dilihat satu per satu seluruh peristiwa yang terjadi selama 2001 merupakan fenomena yang serba baru. Misalnya saja adanya penyelidikan KPP HAM Papua, Pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua, atau hiruk-pikuk seputar Undang-undang Otonomi Khusus untuk Papua. Oleh karena itu, analisis yang kami sajikan di dalam buku ini, mencoba mengikuti perkembangan baru yang menghiasi wajah Tanah Papua. Dengan mengikuti kerangka yang sudah kami pakai sebelumnya. Buku ini berisikan empat bagian utama yang rangkaiannya sebagai berikut:

Bagian Pertama memaparkan kronologi peristiwa selama 2001. Kronologi ini disusun dari berbagai sumber, baik media massa cetak maupun *on-line*, laporan-laporan yang dikeluarkan oleh kalangan LSM, lembaga HAM, atau analisis dari lembaga terpercaya. Lazimnya kami membatasi diri dengan mengutip inti dari pemberitaan atau laporan, tanpa mengambil alih seluruh detail. Perhatian khusus ditujukan pada berita-berita yang menyangkut terwujud tidaknya hak-hak asasi manusia serta penegakan hukum di Papua dewasa ini.

Bagian Kedua kami berupaya membuat analisis sederhana mengenai situasi sosial-politik di Papua berdasarkan data-data yang disajikan dalam kronologi tahun 2001. Dalam analisis ini secara khusus diberikan perhatian kepada [1] persiapan serta pengesahan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua, [2] berkembangnya "budaya korupsi serta mental proyek" di Papua, [3] seluk-beluk pemilihan pejabat tinggi seperti bupati/walikota serta wakilnya, [4] kekerasan di wilayah kecamatan Wasior, dan [5] pembunuhan terhadap Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay. Dalam buku ini juga telah diupayakan untuk menempatkan

kebijakan Otonomi Khusus di dalam konteks sosial-politik yang lebih luas. Tujuannya agar masyarakat memahami sejauh mana sasaran Otsus dan sejauh mana pelaksanaannya di kemudian hari. Adapun analisis pembunuhan terhadap Ketua Presidium Dewan Papua, menjadi salah satu bagian dari gambaran yang lebih menyeluruh mengenai terjadinya kekerasan di Papua selama 2001. Dalam analisis ini, juga disertakan pola-pola penyelesaian masalah (baca: pola represif-militeristik) yang diandalkan pihak berwajib dalam "berurusan" dengan aspirasi-aspirasi yang sedang disuarakan oleh masyarakat Papua.

Bagian Ketiga khusus menguraikan dinamika sosial politik di Papua pada 2001 dalam kacamata HAM (Hak Asasi Manusia). Di samping gambaran yang menyeluruh, perhatian khusus diberikan pada tindak lanjut kasus Abepura (7 Desember 2000), terutama menyoroti upaya pencarian keadilan yang dilakukan KPP HAM Papua. Melalui analisis ini masyarakat diharapkan menjadi lebih sadar bahwa HAM bukan hanya berkaitan dengan hak-hak politik, melainkan meliputi suatu rangkaian hak-hak yang jauh lebih luas. Kami memperoleh kesan bahwa sampai saat ini hak-hak asasi manusia di bidang sosial-ekonomi dan budaya yang sebetulnya sama pentingnya dengan hak-hak asasi manusia di bidang sipil dan politik sering dilupakan.

Bagian Keempat adalah bagian penutup dari seluruh analisis kami. Dalam bagian ini secara khusus kami mau menarik perhatian pembaca pada "gaya kepemimpinan" yang sedang berkembang di Papua. Dari seluruh perkembangan selama 2001 muncul kesan bahwa mutu kepemimpinan di segala tingkat mulai dipertanyakan. Kesan ini muncul oleh beberapa kemungkinan. Misalnya karena kurang adanya koordinasi antar berbagai komponen kepemimpinan, karena kepentingan sekelompok atau pribadi yang menonjol lebih dominan dari pengabdian pada kepentingan masyarakat; atau karena adanya ketidakjelasan siapa sebenarnya yang memerintah di Papua. Atau juga karena kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah tidak disosialisasikan, sehingga hanya membingungkan masyarakat. Bagian penutup ini diakhiri dengan sejumlah saran yang mungkin patut diperhatikan secara serius jika kita ingin mengubah sejumlah perkembangan yang kurang menguntungkan masyarakat, menuju pada suasana yang lebih baik di masa-masa

mendatang.

Kami berharap buku ini dapat membantu siapa saja yang berniat memahami dengan lebih cermat pokok permasalahan di Papua, kendala, dan peluang jalan keluarnya. Yang sangat menentukan adalah kesungguhan kita, lebih-lebih mereka yang dipercaya sebagai pemimpin-pemimpin bangsa, dalam mencari jalan penyelesaian yang didasari penghargaan atas martabat setiap manusia, dan pengakuan akan keadilan dan kebenaran. Dalam sikap demikian, tidak ada tempat bagi dominansi kepentingan kelompok/segelintir orang, juga tidak ada tempat bagi penggunaan kekerasan sebagai tanggapan atas aspirasi rakyat yang sedang berkembang. Harapan kami, semoga selama tahun 2002 / 2003 kita bisa bersama-sama melakukan suatu perubahan menuju Papua yang betul-betul dapat dinamakan sebagai PAPUA TANAH DAMAI.

Bagian 1

KRONOLOGI 2001

JANUARI 2001

1 Januari

❖ Sekretaris Umum Tim Advokasi Kasus Theys H. Eluay dkk., Anthon Raharusun, S.H., menilai pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pihak Kepolisian ke Kejaksaan Negeri Jayapura bernuansa politis. Menurutnya, dalam memproses kasus makar, pemerintah diharapkan tidak mengutamakan kepentingan politik dan mengabaikan proses hukum dari kasus tersebut. Pihaknya meminta Kejaksaan supaya mengkualifikasikan mana di antara tindakan dan kegiatan Theys dkk. yang diduga memiliki unsur makar. Apakah peristiwa Mubes (musyawarah besar) Papua, Kongres Rakyat Papua, Deklarasi 12 November 1999, atau kegiatan pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2000. Jika Kejaksaan tidak mengkualifikasikan keempat kegiatan tersebut, dikhawatir kan proses hukumnya tidak akan terselesaikan dengan baik.

2 Januari

❖ Ketua Forum Komunikasi Penyalur Aspirasi Masyarakat Amungme–Kamoro (Fok-Pam-Akor), Thommy Kum, B.A., menilai penggunaan dana *crash program* oleh pemerintah untuk Kabupaten Mimika tidak mengenai sasaran. Misalnya proyek

pembuatan irigasi oleh pemerintah Kabupaten Mimika yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Menurutnya, *crash program* hanya menambah kekayaan para pejabat pemerintah di kabupaten tersebut.

3 Januari

- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, H. Bismar Mannu, S.H., memastikan Theys dkk. terkena dakwaan makar, karena bukti-buktinya sudah jelas, yakni berkaitan dengan sikap para anggota Presidium Dewan Papua (PDP) yang menyatakan keinginannya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. F.X. Soemardi, mengatakan bahwa tahun 2001 masih akan diwarnai oleh kegiatan bernuansa politik, sehubungan dengan masih menonjolnya berbagai kasus penyampaian aspirasi merdeka oleh masyarakat Papua selama tahun 2000. Kapolda meminta semua pihak agar memahami betul apa yang diinginkan masyarakat yang menyuarakan aspirasi merdeka, yakni adanya peningkatan kesejahteraan. Pihaknya juga menginginkan agar masyarakat Papua benar-benar makmur. Namun bila ada yang memperjuangkan sesuatu yang lain, diingatkannya agar tidak melanggar hukum.
- Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Papua, Drs. Abner Kambuaya, mengatakan bahwa pada tahun 2001 pihaknya akan memberdayakan kembali potensi pariwisata di Papua. Namun, untuk menyukseskan program tersebut, pihaknya akan minta dukungan dari aparat keamanan untuk menjamin keberhasilan program ini.

4 Januari

- Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. F.X. Soemardi, memerintahkan semua Kapolres untuk melakukan operasi pengejaran terhadap TPN/OPM (Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka), mulai Januari 2001.
- Dalam pernyataannya di Gereja Rehobot (GKII – Gereja Kemah Injil di Irian Jaya) Dok VII Jayapura, Gubernur Papua Drs. J.P. Salossa, M.Si., menilai masih banyak masyarakat Papua yang terbelakang. Menurutnya, diberlakukannya otonomi khusus

merupakan jalan terbaik agar masyarakat Papua merasa dihargai. Ia menegaskan, semua potensi sumber daya manusia yang ada di daerah Papua harus memberi manfaat kepada masyarakat setempat, agar mereka merasa memiliki dan menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Mereka juga harus mampu membangun infrastruktur publik yang bisa dinikmati oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasa dilayani secara baik dan tidak dianaktirikan.

- Meskipun ada dana JPS (Jaring Pengaman Sosial) berupa JPS beras operasi khusus (opsus), JPS kesehatan, JPS ekonomi, JPS pendidikan, dan lain-lain, Bupati Jayapura, Ir. Yan Pieter Karafir, M.Ec., tetap mengharapkan agar masyarakat tidak tergantung pada dana-dana tersebut. Ia menyarankan agar masyarakat mencari sagu yang diperoleh secara gratis, tanpa harus dibayar.
- Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Habel Suwae, mengatakan bahwa dari hasil kunjungan kerjanya banyak ditemukan kecamatan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Ia menyebut Kecamatan Sarmi dan Kecamatan Tor Atas yang perlu mendapat perhatian dari Pemda kabupaten, terutama menyangkut masalah sarana transportasi. Di kecamatan ini, untuk sekali angkut dengan mobil kijang, ongkosnya mencapai Rp. 250.000, yang tentunya sangat mahal bagi masyarakat. Selain adanya kerusakan fasilitas umum seperti jalan raya, juga ada kantor Koramil, Polsek, gedung SD, dan perumahan masyarakat yang umumnya dalam keadaan rusak berat.
- Ketua Dewan Adat Mamberamo-Tami (Mamta) Bidang Organisasi dan Politik, Forkorus Yaboisembut, S.Pd., menolak pernyataan Kajati Papua, H. Bismar Mannu, S.H. , yang menyatakan bahwa Theys dkk. tersangka kasus dugaan makar. Karena, yang dilakukan Theys dkk. adalah memperjuangkan pelurusan sejarah dan pengakuan terhadap kedaulatan bangsa Papua pada 1 Desember 1961.

5 Januari

- Pengamat Politik Universitas Cenderawasih, Drs. Ferry Pioh, menilai Otonomi Daerah (Otda) di Papua baru terlaksana nol koma sekian persen dari target. Persentase ini didasarkan pada: *Pertama,* belum ada kesiapan secara kelembagaan dan struktur,

khususnya dalam aparatur pemerintahan. *Kedua*, di bidang personalia, masih ada jabatan-jabatan yang perlu diisi dan perlu pengangkatan pegawai baru. *Ketiga*, masalah pendanaan Otda yang belum jelas. Menurutnya, konsep yang dikirim dari pemerintah pusat itu terkesan dilakukan terburu-buru, padahal situasi dan kondisi di daerah belum memungkinkan untuk menerima otonomi daerah. Tetapi, karena tekanan pihak pemerintah pusat, konsep tersebut diharuskan untuk dilaksanakan di Indonesia.

- Menyikapi pernyataan Kapolda Papua, Irjen. Pol. Drs. F.X. Soemardi yang memerintahkan para Kapolres untuk mengejar TPN/OPM, Willem Onde yang menyebut dirinya Panglima TPN/OPM di Merauke mengatakan, "Silakan kalau aparat kepolisian mau mengejar anggota TPN/OPM. Tetapi perlu diingat bahwa TPN/OPM adalah organisasi politik yang terbentuk karena adanya Trikora pada 1965. Saat itu hak kedaulatan Bangsa Papua direbut oleh Indonesia. Maka dibentuklah OPM untuk mewadahi aspirasi untuk memperjuangkan kembali hak Bangsa Papua Barat."
- Para PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Papua, digembirakan dengan rencana pemerintah pusat yang akan menaikkan gaji PNS sebesar 200-300%. Rencana tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan para pegawai yang merosot akibat krisis moneter (krismon) yang berkepanjangan di Indonesia. Berita rencana kenaikan gaji tersebut ditanggapi para pedagang dengan menaikan harga barang di pasaran tanpa ada keputusan resmi dari pemerintah.
- Menanggapi adanya keluhan masyarakat di Kecamatan Sarmi dan Kecamatan Waris berkaitan dengan masalah macetnya penyaluran beras operasi khusus, Kepala Bagian Perekonomian Daerah Kabupaten Jayapura Drs. Mustaming, mengatakan bahwa pihaknya akan menegur Camat dan distributor dari kedua wilayah tersebut agar segera mencari jalan keluarnya.
- Ketua Komite Pemuda Papua Barat, Isaak Yapsenang, mengatakan bahwa pihaknya siap mengembalikan dua pucuk senjata api yang dirampas oleh pihak TPN/OPM pimpinan Max Rumbiak pada akhir Desember 2000 di Tor Atas. Namun pihaknya menuntut Pemerintah Propinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten

Jayapura agar dalam pemilihan Bupati Jayapura periode berikutnya, calonnya harus berasal dari lingkungan masyarakat yang berdomisili di empat wilayah kecamatan di Jayapura, yakni Kecamatan Urunumguai, Lereh, Nimboran, dan Kemtuk Gresi. Ia juga menyebut seorang figur putra terbaik yang diinginkan masyarakat, yakni Alexander Geriapon, yang dinilai berwawasan luas dan mengerti tentang arah perubahan masyarakat.

- Dalam arahannya pada pejabat otonom di Sasana Krida Dok II Jayapura, Gubernur Papua Drs. J.P. Salossa M.Si. menyikapi maraknya kasus tanah adat yang muncul di Kota Jayapura. Ia mengatakan, "Tanah-tanah yang bermasalah atau dasar hukumnya tidak jelas harus diselesaikan melalui pengadilan sesuai proses hukum yang berlaku." Gubernur menilai, pemerintah sudah banyak dirugikan oleh masyarakat yang menuntut ganti rugi atas bidang tanah yang diklaim sebagai haknya. Oleh karena itu pihaknya akan bersikap keras dan tegas.
- Wagub Papua drh. Constan Karma dan Wakil Ketua DPRD Papua Drs. John Ibo, mengatakan bahwa hingga Januari 2001 Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua belum diterapkan. Sebab, RUU-nya sendiri masih dalam proses pembahasan oleh Pemda dan DPRD Propinsi Papua.

8 Januari

- Pesawat Cassa 212 milik TNI-AL dengan nomor penerbangan U614, mengalami kecelakaan di sekitar Kecamatan Kurima, Kabupaten Jayawijaya, dalam perjalanan dari Timika menuju Jayapura. Kecelakaan tersebut mengakibatkan semua awak dan penumpangnya meninggal dunia. Para penumpang merupakan Anggota Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) Propinsi Papua yang hendak kembali ke Jayapura seusai menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Mimika. Mereka adalah Ketua DPRD Papua, T.N. Kaiway, S.H., Pangdam TNI XVII/Trikora Tommy A. Rompis, Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. F.X. Soemardi, Kajati Papua Bismar Mannu, S.H. dan Ajudan Gubernur Papua Bripka J. Djitmau. Sedangkan para awak pesawat adalah Mayor Penerbang Sutopo Waluyo, Lettu Penerbang Deddy Haryanto, Sertu Sultan dan Gunawan.

9 Januari

- Penyidik Polda Papua kembali menyampaikan surat panggilan kepada empat orang tokoh PDP (Presidium Dewan Papua) untuk diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan makar. Keempat tokoh tersebut adalah Wakil Sekjen PDP Agus Alue Alua, M.Th., Anggota PDP Ny. Pdt. Ketty Yabansabra, Ny. Beatriks Koibur, dan Mediator PDP Drs. Willy Mandowen.
- Wakil Gubernur Papua, drh. Constant Karma, mengatakan bahwa Pemda Papua tidak akan memberikan fasilitas apapun kepada para mantan anggota Kamra (Keamanan Rakyat), termasuk dalam tes penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).

10 Januari

- Komnas HAM mengumumkan rencana pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Papua untuk menyelidiki Insiden Abepura, 7 Desember 2000.

11 Januari

- Anggota Tim Pengacara Kasus Wamena Berdarah tanggal 6 Oktober 2000, Betshie Pesiwarissa, S.H., menyatakan bahwa pihaknya siap mendampingi para terdakwa dalam persidangan pada 15 Januari 2001 di Pengadilan Negeri (PN) Wamena. Ia mengatakan, tim pengacara ini merupakan gabungan advokad dari LBH Jayapura dan Elsham Papua yang tergabung dalam Tim Kemanusiaan Wamena. Tim ini dibentuk melalui kerja sama LSM dengan Gereja-Gereja di Jayapura.

15 Januari

- Sidang perdana Kasus Wamena Berdarah 6 Oktober 2000 digelar di PN Wamena. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuduh para terdakwa telah melakukan provokasi, penghadangan jalan, pelemparan batu terhadap rumah-rumah penduduk dan gedung perkantoran milik pemerintah, serta telah melakukan aksi perlawanan terhadap petugas keamanan dengan tujuan mempertahankan bendera Bintang Kejora dan Posko-posko Satgas Papua di Wamena.
- Bupati Jayapura, Ir. Yan Pieter Karafir, M.Ec., menerangkan bahwa proyek pembangunan bendungan untuk irigasi dan

persawahan yang dilakukan pemda Propinsi Irja di Kecamatan Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, terbengkalai dan hanya merugikan masyarakat adat setempat yang lahannya telah diambil alih pemerintah untuk proyek tersebut.

- Juru Penerangan Kecamatan Nimbokrang, Albert Denyso, menilai aksi pemalangan jalan raya di Desa Berab, yang dilakukan oleh 14 suku pemilik tanah adat di wilayah itu, sebagai aksi protes dan ungkapan kekecewaan masyarakat terhadap sikap PT You Liem Sari (perusahaan HPH) yang tidak menepati janjinya untuk menyelesaikan masalah ganti rugi lahan dalam pembangunan jalan raya tersebut. Masyarakat menginginkan adanya pengakuan hak pakai untuk lokasi pembuatan jalan oleh pihak perusahaan.
- Polsek Nimbokrang membuka kembali jalan raya di Desa Berab yang dipalang oleh masyarakat dari 14 suku pemilik hak ulayat tanah adat di Kecamatan Nimbokrang. Akibatnya, masyarakat pemilik tanah adat mendatangi kantor Polsek Nimbokrang dan menuntut Kapolsek Nimbokrang agar bertanggung jawab terhadap pembongkaran palang jalan tersebut.

16 Januari

- Kejaksaan Tinggi Papua meminta Ketua PN Jayapura untuk memperpanjang masa penahanan Theys dkk. Wakajati Papua, D.H. Panjaitan, S.H., kemudian menyatakan bahwa penahanan terhadap para tokoh PDP yang memperjuangkan Papua Merdeka itu direncanakan diperpanjang hingga 16 Februari 2001.
- Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing, S.H., menjelaskan bahwa penangkapan terhadap tiga oknum anggota 'gerombolan bersenjata' di Sarmi merupakan hasil dari upaya penggerebekan yang dilakukan anggotanya yang bertugas di daerah tersebut. Mengenai tertembaknya Bastian Wasiat oleh aparat, Sihombing mengatakan bahwa pihaknya terpaksa menembak yang bersangkutan karena melawan petugas dan berusaha merampas senjata milik aparat.

17 Januari

- Wakil Ketua PDP, Tom Beanal, dipanggil Tim Penyelidik Polda Papua untuk diperiksa pada 20 Januari 2001 sebagai tersangka dalam dugaan kasus makar.

- Kadispen Polda Papua, Kompol Drs. Zulkifli A.R., membenarkan bahwa pihak kepolisian belum memiliki bukti-bukti yang cukup untuk melakukan sebuah proses hukum terhadap Tom Beanal. Namun pihaknya akan menghadirkan Wakil Sekjen PDP, Agus Alue Alua, M.Th., untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
- Dalam audiensinya dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Irja, Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si., menilai Otonomi Khusus (Otsus) sebagai 'pintu emas' menuju kemakmuran. Oleh karena itu ia menghimbau masyarakat Papua agar menyambutnya dengan baik. Sementara mengenai aspirasi Papua Merdeka yang selama ini diperjuangkan oleh sebagian rakyat Papua dengan tujuan memisahkan diri dari NKRI, Solossa mengatakan bahwa memperjuangkan kemerdekaan dengan tujuan mendirikan negara sudah bukan jamannya lagi. Bahkan hukum internasional telah mengakui wilayah kedaulatan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ia menegaskan bahwa akan lebih baik bagi Papua jika tetap bergabung dengan Indonesia dan menikmati hidup sejahtera melalui program Otsus yang ditawarkan pemerintah. "Pemerintah Indonesia tidak mungkin melepaskan sejengkal tanahnya untuk dijadikan sebuah negara baru. Seluruh kekuatan pemerintah akan dikerahkan untuk mempertahankan kedaulatan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan jika itu terjadi, berarti masyarakat sendiri, termasuk yang tidak bersalah pun, akan menjadi hancur."

18 Januari

- Anggota Panel PDP Utusan Daerah Yapen Waropen, Yusuf Tanawani, dipanggil Polda Papua untuk diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan kasus dugaan makar. Yusuf menyatakan siap memenuhi panggilan pihak Penyidik Polda Papua.
- Panglima Operasi TPN/OPM Papua Barat wilayah Merauke, Willem Onde, mengatakan bahwa pihaknya tidak menyakiti para sandera yang berjumlah 18 orang dan seluruhnya adalah karyawan PT Korindo Group. Tetapi pihaknya telah membawa para sandera ke perbatasan RI – PNG di Kali Fly sambil menunggu tanggapan dari pemerintah Indonesia. Pihaknya juga menuntut uang tebusan sebesar 1 juta USD dan menuntut agar

anggota Brimob segera ditarik dari kecamatan-kecamatan se-Merauke. Di samping itu juga, dikeluarkan maklumat untuk Kapolda Papua agar menarik pernyataannya yang melarang keberadaan TPN/OPM dan sejenisnya.

19 Januari

- Satu regu anggota Polsek Betaf dan satu regu anggota Brimob dari Polres Jayapura yang ditugaskan di Betaf, Kecamatan Pantai Timur, Jayapura, melakukan penggrebekan dan pengejaran terhadap anggota TPN/OPM kelompok Maks Rumbiak. Namun upaya aparat kepolisian yang melakukan pengejaran ini digagalkan pihak TNI Kopassus Pos Tribuana Betaf yang dipimpin Kapten Inf. Johny Hasibuan dan Danramil Betaf Muh. Yajib.
- Tim Negosiasi Pembebasan Sandera Merauke yang dipimpin Wakil Bupati Merauke, dr. Benyamin Simatupang, M.Ph., gagal menemui Willem Onde yang menyandera 18 orang karyawan PT Korindo Group.
- Kakanwil Departemen Transmigrasi Papua, Ir. Budi Sinulingga, menerangkan bahwa pihaknya akan melakukan program Transmigrasi Lokal (Translok) secara besar-besaran di Propinsi Papua. Program Tahun Anggaran 2001 ini menargetkan 1.100 kepala keluarga (KK) untuk ditransmigrasikan secara lokal, dengan sumber dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dikonsentrasikan ke daerah. Pihaknya juga mengemukakan bahwa dari seluruh warga transmigrasi di Propinsi Papua (transmigrasi umum dan transmigrasi lokal), sekitar 15.000 KK di antaranya teridentifikasi sebagai transmigran yang berada di bawah garis kemiskinan. Sinulingga mengharapkan, program Translok tersebut dapat diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para transmigran.

20 Januari

- Ketua PDP Theys Hiyo Eluay, yang berstatus tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Abepura, mengalami gangguan jantung sehingga dievakuasi ke Jakarta untuk menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta Pusat.
- Sidang lanjutan terhadap 17 orang terdakwa kasus dugaan makar

pada peristiwa Wamena Berdarah 6 Oktober 2000, digelar kembali di PN Wamena untuk yang ketiga kalinya. Dalam sidang itu, terdakwa dan penasehat hukum mendengarkan bantahan dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), N. Simanjuntak, S.H., dkk. atas eksepsi tim Penasehat Hukum tertanggal 18 Januari 2001.

22 Januari

- Tom Beanal menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Papua selama dua hari dengan 58 pertanyaan seputar kegiatan PDP. Di antaranya: Deklarasi di kediaman Theys Hiyo Eluay (12 November 1999), kegiatan pengibaran bendera Bintang Kejora di Taman Imbi Jayapura (1 Desember 1999), Kegiatan Musyawarah Besar Papua (25 - 28 Februari 2000), dan Kongres Rakyat Papua II di GOR Cenderawasih Jayapura (Mei – Juni 2000).
- Wakasad Mayjen (TNI) Kiki Syahnakri membantah isu yang berkembang di kalangan masyarakat, yang menyebutkan bahwa penyanderaan yang dilakukan TPN/OPM kelompok Willem Onde di Merauke adalah rekayasa pasukan elite TNI (Kopassus-Satgas Tribuana). Menurutnya isu tersebut sama sekali tidak benar. Meskipun selama ini Willem Onde dan PT Korindo nampak sangat dekat dengan Kopassus, tetapi bukan berarti Kopassus yang merekayasa penyanderaan tersebut. Kedekatan yang harmonis antara pihak TNI (Kopassus) dengan TPN/OPM pimpinan Willem Onde adalah persoalan pendekatan yang sesuai dengan prosedur. Bahkan TNI pun akan tetap melakukan upaya pendekatan untuk pembebasan para sandera di Merauke.
- Mayjen (TNI) Mahidin Simbolon dilantik oleh Letjen Kiki Syahnakri sebagai Pangdam XVII/Trikora yang baru.
- Menteri Pertahanan, Mohamad Mahfud, mengingatkan bahwa Amerika Serikat dan Australia mempunyai maksud tertentu dengan wilayah Papua.

23 Januari

- Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing, S.H., mengatakan bahwa pihaknya menduga TNI (Kopassus) mendukung keberadaan pasukan TPN/OPM yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura. Dugaan tersebut dikuatkan dengan adanya upaya

penggagalan atas penggrebekan dan pengejaran anggota TPN/OPM kelompok Maks Rumbiak yang dilakukan jajaran Polres Jayapura pada 19 Januari 2001 di Betaf, Pantai Timur. Saat itu anggota Polsek dan Brimob di Betaf hendak menangkap beberapa anggota TPN/OPM, di antaranya 'Kolonel' Maks Rumbiak, 'Kapten' Adam Samram, 'Kapten' Burmanus Damur, dan Ny. Maks Rumbiak beserta anaknya. Tetapi, upaya tersebut digagalkan oleh Kopassus. Menurut laporan, pasukan Kopassus yang menghalangi aparat kepolisian saat itu dipimpin oleh Kapten TNI Inf. Johny Hasibuan dan Danramil Betaf Muhammad Yajib.

- Maks Rumbiak dkk. ternyata diterbangkan oleh Kopassus dengan menggunakan pesawat helikopter TNI menuju Jayapura. Padahal, kelompok TPN/OPM Betaf itu sudah diincar pihak kepolisian sejak 25 Desember 2000, setelah kelompok tersebut melakukan perampasan senjata di Betaf.
- Maks Rumbiak dkk. yang diterbangkan oleh Kopassus ke Jayapura menyerahkan dua pucuk senjata api secara langsung kepada Kodam XVII/Trikora.
- Kepolisian Papua New Guinea (PNG) menangkap 19 orang anggota TPN/OPM di Kamp Grisa, Vanimo. Mereka yang ditangkap adalah Mathias Wenda, pimpinan kelompok, dan 18 pengikutnya.

24 Januari

- Pengadilan Papua New Guinea (PNG) di Vanimo menjatuhkan vonis enam bulan penjara terhadap 18 orang pengikut Mathias Wenda, ditambah kerja paksa di Lembaga Pemasyarakatan Vanimo (*The National Corps Niniwe Vanimo*). Alasannya, kegiatan TPN/OPM itu telah mengganggu keamanan di PNG dan dianggap kegiatan militer yang ilegal. Sementara mengenai Pimpinan TPN/OPM Mathias Wenda, setelah ada koordinasi antara pemerintah RI dan PNG, masih dalam proses pemeriksaan dan sesudahnya akan diajukan ke pengadilan setempat, yang direncanakan dilakukan pada 17 Februari 2001.

25 Januari

- Kapendam XVII/Trikora Letkol Inf. Drs. R. Siregar, membantah jika pihaknya mendukung TPN/OPM kelompok Maks Rumbiak

di Betaf. Ia mengatakan dibawanya Maks Rumbiak dkk. ke Jayapura hanyalah upaya pengamanan semata-mata, bukan untuk melindungi TPN/OPM di Jayapura atau Papua.

- Sekretaris Urusan Perbatasan RI-PNG, Drs. F.X. Suryanto membenarkan kabar tertangkapnya anggota TPN/OPM kelompok Mathias Wenda di PNG yang kemudian ditahan di Vanimo. Namun belum jelas apakah kasus itu akan dilimpahkan ke Indonesia atau tidak. Pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah Vanimo, PNG.
- Ketua DPRD Kapupaten Jayapura, Drs. Habel Suwae, mengatakan bahwa nasib Maks Rumbiak dkk. belum ditentukan, karena belum ada kesepakatan di tingkat Muspida. Pihak kepolisian bersikeras ingin memprosesnya secara hukum, sedangkan Pemda Jayapura menginginkan agar anggota TPN/OPM itu dikembalikkan ke daerah asalnya di Betaf.
- Di Aula Elsama Numbery SPN (Sekolah Polisi Negara), Brigjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika dilantik menjadi Kapolda Papua. Menurut Kapolda yang baru, pihaknya siap menyelesaikan masalah penyanderaan di Merauke melalui jalan damai.
- Tom Beanal mengaku bosan dengan pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polda Papua mengenai kasus dugaan makar. "Pemerintah Indonesia dan Polri itu sebenarnya sudah tahu bahwa rakyat Papua melalui PDP benar-benar menginginkan kemerdekaan, tetapi mereka masih *tanya-tanya* dalam pemeriksaan," katanya.

26 Januari

- Kelompok Willem Onde yang menyandera 18 orang karyawan PT Korindo di Merauke menyatakan siap menerima kedatangan Tim Negosiasi Pembebasan Sandera dari Indonesia. Onde juga menegaskan kembali tuntutannya, yakni agar anggota Brimob yang ada di kecamatan-kecamatan supaya ditarik, dan maklumat Kapolda Papua yang akan melakukan pengejaran terhadap TPN/OPM juga harus ditarik. Selain itu, untuk membebaskan para sandera Tim Negosiasi harus menyediakan uang tebusan sebesar 2 miliar USD. Pesan tersebut disampaikan melalui Marius Mure, kurir Tim Negosiasi Pembebasan Sandera Merauke yang sempat menemui Willem Onde dan para sandera.

- Mengenai masalah penanganan lima anggota TPN/OPM Betaf, yakni Maks Rumbiak dkk., Kapolres Jayapura, Drs. Daud Sihombing, S.H., mengatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia harus ditegakkan. Oleh karena itu TPN/OPM kelompok Maks Rumbiak harus tetap diproses secara hukum." Kapolres juga mengatakan bahwa pihaknya menyetujui usulan Pemda Jayapura untuk membiarkan Maks Rumbiak dkk. kembali ke daerahnya, sehingga bisa dibina dengan baik sebagai warga masyarakat. Tetapi jika hal ini dikehendaki oleh masyarakat juga. Kapolres menegaskan, jika tidak melalui hukum negara yang prosesnya melalui Pengadilan Negeri, masih bisa menggunakan hukum adat dan kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat. Sebab, tidak semua pelanggaran hukum bisa masuk ke pengadilan dan penjara. Yang jelas, bagaimanapun Maks Rumbiak dkk. harus diproses secara hukum demi penegakan hukum itu sendiri.
- Kelompok TPN/OPM pimpinan Willem Onde melepaskan dua orang sandera. Sisanya masih disandera di Kamp 59 Asiki, Merauke.

27 Januari

- Maks Rumbiak dkk. yang menamakan dirinya anggota TPN/OPM dilepas kembali ke Betaf, tanpa melalui proses hukum. Mereka dilepas setelah dicapai kesepakatan bersama antara pihak aparat keamanan dengan pemerintah dalam pertemuan para anggota Muspida Kabupaten Jayapura dan Muspika Kecamatan Pantai Timur.

28 Januari

- Willem Onde akhirnya melunak dan mau melepaskan lagi 13 orang sandera. Sedangkan tiga orang sandera lainnya akan ditahan sebagai jaminan sampai pihak Tim Negosiasi yang mewakili Pemerintah RI mau memenuhi tuntutannya, termasuk memfasilitasi Willem Onde ke Jakarta untuk bertemu Presiden RI.

29 Januari

- Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia, Richard Gosney, bertemu dengan Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si., dan

para anggota Muspida Papua di Gedung Negara Propinsi Papua. Gosney menyatakan pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid untuk menerapkan desentralisasi di berbagai bidang di seluruh Indonesia serta penerapan otonomi khusus untuk Propinsi Papua.

30 Januari

- Sekitar 400 warga Jayawijaya mengungsi ke PNG akibat munculnya isu yang mengancam keamanan mereka. Isu itu menyebutkan bahwa keadaan di Jayapura dan Wamena sedang kacau. Mereka melintasi perbatasan RI - PNG menuju Vanimo.
- Gempa berkekuatan 5,8 skala Richter mengguncang Manokwari, Biak, dan Sorong.

FEBRUARI 2001

1 Februari

- Dosen Kriminologi Universitas Cendrawasih (Uncen), Basir Rohrohmana, S.H., M.H., menilai aksi kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Papua akhir-akhir ini dalam menghadapi berbagai masalah, menunjukkan bahwa masyarakat telah hidup tanpa norma dan nilai. Masyarakat tidak lagi percaya kepada lembaga-lembaga sosial dan hukum yang ada beserta aparatnya. Untuk merubah kondisi seperti itu, perlu sejumlah langkah, seperti merubah mental aparat, menciptakan sistem hukum yang memadai, menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat untuk menegakkan kembali norma-norma yang ada, dan sebagainya.

3 Februari

- Pos Kopassus Satgas Tribuana di Kampung Kuefa, Desa Betaf, Kecamatan Pantai Timur Jayapura, diserang oleh sekelompok orang bersenjata tidak dikenal. Kelompok bersenjata itu merampas senjata dan sejumlah perlengkapan aparat keamanan. Penyerangan tersebut mengakibatkan empat anggota Kopassus dan seorang dari kelompok bersenjata yang bernama Mesak Kareni, meninggal dunia.

4 Februari

❖ Dalam upaya membebaskan tiga sandera karyawan PT Korindo, dilangsungkan pertemuan antara Willem Onde dan anak buahnya dengan Mr. Lee Hon dan Mr. Kyun dari PT. Korindo. Dalam pertemuan tersebut Willem Onde berjanji akan membebaskan para sandera setelah bertemu dengan Bupati Merauke, Drs. Yohanes Gluba Gebze. Selain itu Willem Onde juga berpesan agar diupayakan pertemuan antara dirinya dengan Presiden Abdurrahman Wahid.

5 Februari

❖ Pimpinan TPN/OPM Mathias Wenda yang ditangkap dan ditahan kepolisian PNG sejak 26 Januari 2001, akhirnya disepakati akan diproses di wilayah hukum PNG. Kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan antara pihak RI dan PNG.

❖ Bupati Manokwari, Drs. Dominggus Mandacan, meletakan batu pertama pembangunan monumen Salib Agung di Pulau Mansinam Kabupaten Manokwari, dan menyatakannya sebagai tanda diperlakukannya zona damai di Tanah Papua.

❖ Bhrada Polisi Sugiarto, anggota Brimob BKO Mabes Polri, ditembak oleh kelompok misterius saat berpatroli di Km 65 Sentriko, Kecamatan Uwapa-Topo, Kabupaten Nabire.

6 Februari

❖ Setelah berminggu-minggu terkatung-katung di pelabuhan Jayapura, akhirnya kapal niaga Golden Coast yang memuat 406 kendaraan mobil bekas Jepang membongkar muatannya.

❖ Wartawan *New York Times* mengalami kesulitan mengunjungi Timika untuk menyusun suatu riwayat tentang Freeport.

7 Februari

❖ Setelah membuat kesepakatan dengan Direktur PT Korindo, Mr. Lee Hon dan Mr. Kyun, Kolonel TPN/OPN Willem Onde memenuhi janjinya membebaskan tiga sandera yang masih ditahan.

8 Februari

❖ Masyarakat Kecamatan Bonggo, Kabupaten Jayapura,

mengeluhkan jalan yang kabarnya direncanakan akan diperbaiki, namun hingga kini perbaikan itu belum terealisasi. Menurut Ondoafi Bonggo, Seblon Werbabkay, perusakan jalan tersebut bukan dilakukan oleh PT Wapoga Timber, sebuah perusahaan HPH di daerah itu, tetapi oleh perusahaan-perusahaan kayu lainnya yang beroperasi secara ilegal.

10 Februari

- Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Papua ke-7 tahun 2001 yang berlangsung di Hotel Relat Indah, Jayapura, dibuka oleh Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tanjung. Musda mengharapkan terpilihnya pengurus baru dan Ketua Golkar Propinsi untuk menggantikan kursi pimpinan DPRD Papua yang lowong setelah ditinggalkan almarhum Nathaniel Kaiway, S.H.

11 Februari

- Setelah peristiwa penyerangan Pos Kopassus pada 4 Februari 2001 di Desa Betaf, Kemacatan Pantai Timur, Kabupaten Jayapura, tim gabungan TNI dan kepolisian Papua menangkap lima orang yang diduga terlibat peristiwa penyerangan tersebut. Kelima orang yang ditangkap itu diduga anggota TPN/OPM.
- Yohanis Ronsumbre, aktivis LSM Kota Biak, menilai ramainya perjudian di Kota Biak harus menjadi tanggung jawab Pemda yang kebijakannya terkesan amburadul. Menurutnya, kebijakan yang tidak tepat itu telah mengakibatkan munculnya efek-efek lain, salah satunya adalah perjudian. Dampak lainnya, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi persoalan perjudian itu.

12 Februari

- Musda Golkar Papua ke-7 di Jayapura, secara demokratis memilih Drs. John Ibo sebagai Ketua DPRD Propinsi Papua menggantikan almarhum Nathaniel Kaiway.
- Petemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah PNG yang diadakan di Hotel Matoa Jayapura, dihadiri oleh utusan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara. Menurut Wagub Papua, drh. Constan Karma, pertemuan tersebut membicarakan kerja sama bilateral yang sudah berjalan dengan

baik sejak 1990 di bidang sosial, ekonomi, politik, perbatasan, dan pelintas batas antar kedua negara, tetapi tidak mendiskusikan keberadaan TPN/OPM.

- Wakil Gubernur Papua, drh. Constan Karma, menegaskan bahwa TPN/OPM tidak akan dilibatkan dalam seminar pembahasan RUU Otsus di Jayapura. Alasannya, mereka lebih merupakan kelompok pemberontak yang menyuarakan aspirasinya tidak dengan cara dialog.
- Sidang kasus "Wamena Berdarah" di Pengadilan Negeri Wamena berlangsung tertib dengan penjagaan ketat dari kepolisian dan satuan Brimob yang di-BKO-kan ke Polres Jayawijaya. Sidang tersebut menghadirkan 5 orang terdakwa, yakni Obet Komba, Murjono Murip, Yafet Yelemaken, Yudas Meage, dan Amelia Jigibalon. Para terdakwa umumnya didakwa melakukan pelanggaran primer pasal 110 junto pasal 106 KUHP dan Subsider pasal 154 junto pasal 55 ayat 11.
- Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika, menyatakan bahwa 'pimpinan' TPN/OPM Matias Wenda bersama beberapa anggotanya yang ditangkap kepolisian PNG, akan tetap diadili di PNG. Mereka belum bisa diekstradisi ke Indonesia karena belum ada perjanjian ekstradisi antara kedua negara.
- Seratus orang warga yang mewakili 1209 jiwa warga transmigrasi Desa Karya Bumi, Kecamatan Nimboran, Kabupaten Jayapura, mendatangi kantor DPRD Jayapura untuk mengadukan masalah pemalangan sawah dan irigasi oleh masyarakat lima suku dari Besum. Sementara, lima suku itu menuntut ganti rugi atas tanah ulayat mereka di Besum/Desa Karya Bumi seluas 315 ha yang oleh pemerintah diberikan kepada para transmigran. Pemalangan sudah berlangsung selama 3 tahun 7 bulan dan belum diselesaikan hingga aksi demo itu dilakukan.

13 Februari

- Lima tokoh Presidium Dewan Papua, Theys Eluay, Thaha Moh. Alhamid, Herman Awom, Don Flassy, dan John Mambor, meminta agar kasus makar yang dituduhkan kepada mereka secepatnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura. Menurut mereka, kasus tersebut sudah terlalu lama diproses namun hingga saat ini belum juga disidangkan. Kelima tersangka juga menolak

menandatangani BAP perpanjangan masa penahanan mereka oleh Kejaksaan Tinggi Papua.

- Penangkapan lima orang sipil yang diduga sebagai anggota TPN/OPM pada aksi penyerangan di Betaf, Pantai Timur, mengakibatkan meluasnya isu penyerangan yang akan dilakukan TPN/OPM terhadap Polsek Tor Atas. Menurut Camat Tor Atas, Michael Wutoy, hampir semua aparat yang bukan penduduk setempat meninggalkan tempat tugasnya karena takut isu penyerangan susulan itu benar-benar terjadi.
- Pieter Awut Wenda, yang dituduh membawa anak panah dan kapak di daerah perbatasan RI - PNG tanpa surat izin, disidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura. Terdakwa divonis dengan pidana penjara 1 bulan 20 hari dipotong masa tahanan.
- Willem Onde, yang menamakan dirinya pimpinan TPN/OPM wilayah Merauke, menyatakan bahwa tindakannya menyandera karyawan PT Korindo bukan untuk mencoreng nama pemerintah Indonesia, tetapi hanya ingin "membangunkan pemerintah yang sedang tidur".

14 Februari

- Direktur LBH Jayapura, Demy Wakman, S.H., menilai perpanjangan masa penahanan terhadap lima anggota PDP yang didakwa makar lebih bernuansa politis daripada hukum. Menurutnya, para tersangka berhak untuk meminta kasusnya segera diproses di pengadilan, karena berdasarkan pengalaman, ada kasus makar yang proses hukumnya pernah terkatung-katung selama hampir dua tahun.
- Dua Komandan Satgas Papua, Boy M. Eluay dan Alex Baransano, disidangkan di PN Jayapura. Untuk keamanan jalannya persidangan, kejaksaan telah meminta bantuan resmi dari pihak kepolisian.

15 Februari

- Bupati Merauke, Drs. Yohanes Gluba Gebze selaku ketua tim negosiasi pembebasan sandera karyawan PT Korindo, bersama Willem Onde dan rombongan, bertemu dengan Presiden Abdurrahman Wahid di Jakarta. Aspirasi yang disampaikan Willem Onde kepada Presiden adalah: *pertama*, meminta agar

Papua lepas dari Indonesia (merdeka); *kedua*, meminta tahanan politik asal Papua dibebaskan; dan *ketiga*, minta agar pasukan non-organik ditarik dari Papua. Menjawab permintaan tersebut, Presiden Gus Dur mengatakan bahwa hal itu akan dibicarakan dengan para menteri. Selain bertemu Presiden, rombongan juga bertemu dengan Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Manuel Kaisiepo.

- Pimpinan redaksi harian *Papua Post*, Abdul Munip, yang didakwa melakukan pencemaran nama baik Kakanwil Transmigrasi Papua, Ir. Budi Sinulingga, akhirnya divonis bebas murni oleh PN Jayapura setelah melalui proses persidangan selama hampir setahun tiga bulan. Gugatan itu berawal dari pemberitaan *Papua Post* mengenai dugaan penyalahgunaan keuangan (korupsi) di Departemen Transmigrasi yang dipimpin Budi Sinulingga.

16 Februari

- Dalam penutupan pertemuan bilateral antara Indonesia dan PNG, Wakil Ketua Delegasi RI yang juga Deputi Leader Menlu RI Urusan Perbatasan, Yusbar Djamil, mengatakan bahwa RI dan PNG sepakat membubarkan kamp-kamp Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) dan menghentikan aktivitasnya, baik yang berada dalam wilayah hukum RI maupun yang berada di Wilayah Hukum PNG. Selain itu kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan pengawasan di perbatasan dengan menambah pos-pos perbatasan, terutama di wilayah yang banyak dilintasi warga kedua negara. Juga disepakati pemulangan 371 orang Indonesia asal Papua yang merupakan pelintas batas ke PNG. Kedua belah pihak juga sepakat mengembangkan hubungan ekonomi dan pariwisata, serta meninjau kembali perjanjian repatriasi (pemulangan orang kembali ke tanah airnya) yang sudah pernah disepakati.
- Pemalangan jalan di Kecamatan Waris, Jayapura, akhirnya dibuka kembali setelah tercapai kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan kayu mengenai perbaikan jalan. Perusahan kayu sebagai pemakai jalan bersedia untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat aktivitas pengangkutan kayu di daerah tersebut.

18 Februari

- Terjadi bentrokan antara kesatuan 'BKO' Brimob Irja dan Kodim 1702/Yonif 713 Wamena di Wamena. Akibat bentrokan tersebut, Kodam XVII/Trikora dan Polda Papua mengirim tim untuk mempelajari sebab-sebab terjadinya bentrokan. Sebagai tindak lanjut, pihak kepolisian telah memeriksa tiga orang anggota Brimob yang diduga sebagai pelaku.
- Setelah menjadi tahanan Polda Papua selama 20 hari dan tahanan Kejaksaan Tinggi Jayapura selama 30 hari, masa penahanan lima pengurus PDP akan diperpanjang selama 30 hari. Terhadap rencana perpanjangan masa penahanan itu pihak PDP menghadap Ketua Kejaksaan Tinggi Jayapura dan mengajukan keberatan. Kepada Kejaksaan Tinggi Jayapura, PDP meminta agar kasus dugaan makar segera diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan. PDP merasa dipermainkan dengan penambahan masa penahanan tersebut.
- Aliansi Perempuan Papua (APP) Dewan Adat Mambaramo-Tami (Mamta) mengirim surat kepada Kejaksaan Tinggi Jayapura. Isinya memohon kepada Kejaksaan Tinggi agar menerbitkan surat dakwaan kepada pengurus PDP: Ketua Presidium Dewan Papua Theys Eluay, Sekjen Thaha Alhamid, Moderator Pdt. Herman Awom, Drs. Don A.L. Flassy, dan John Mambor, serta segera diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan. Surat permohonan APP Dewan Adat Mamta itu disertai ancaman bahwa jika perpanjangan masa penahanan pengurus PDP jadi diberlakukan maka para perempuan Papua akan mengadakan demonstrasi dan akan menduduki kantor Kejati Jayapura.
- Empat tokoh Melanesia Barat, masing-masing Albert Kailele, Yordan Iek, Zadrak Wanggai, dan Herman Harry Wanggai, mulai disidangkan di PN Jayapura dengan dakwaan pemerasan. Kasus ini bekaitan dengan surat permintaan bantuan dana yang dikeluarkan para terdakwa selaku panitia perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Melanesia Barat. Dengan berbekal surat tersebut mereka meminta sumbangan kepada masyarakat di sekitar Kota Jayapura.

19 Februari

- "Komandan" Operasi TPN/OPM wilayah Merauke, Willem Onde, menyampaikan aspirasinya kepada Ketua MPR RI Amien Rais,

Ketua DPR RI Akbar Tandjung, dan Ketua Fraksi Utusan Daerah MPR RI, Dr. Oesman Sapta, di Gedung MPR/DPR RI Jakarta. Pada kesempatan itu Akbar Tandjung mengatakan, "Kami tetap menghormati aspirasi tersebut. Namun kalau berbicara mengenai status politik, maka kami pikir yang terbaik adalah mengisi pembangunan dengan otonomi khusus, dan pelaksanaan pembangunan tersebut tetap dalam bingkai NKRI". Sementara Amien Rais menambahkan, "Dalam pemerintahan yang lalu, memang banyak kezalimam-kezaliman dan ketidakadilan terhadap masyarakat Papua. Saya sendiri ikut sedih. Karena itu marilah kita perbaiki bersama masalah ini."

20 Februari

❖ Pemaparan konsep Otonomi Khusus (Otsus) oleh tim perumus dari Uncen kepada tokoh adat, mahasiswa, dan organisasi masyarakat, dilangsungkan di kediaman Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay, di Sentani, Kabupaten Jayapura. Wakil Ketua DPRD Irian Jaya, Drs. John Ibo, yang hadir dalam forum itu mengatakan bahwa Otsus merupakan salah satu strategi masyarakat Papua untuk mencapai kemerdekaan. Perjuangan tanpa strategi sangat sulit mencapai tujuan. Oleh karena itu, Otsus merupakan suatu strategi yang bagus, selain aman juga ilmiah, bukan dengan hanya berteriak-teriak di jalan.

21 Februari

❖ Meskipun mendapat tekanan dari kalangan masyarakat mengenai perpanjangan masa penahanan lima orang pengurus PDP, Pengadilan Tinggi Papua tetap mengeluarkan surat penetapan perpanjangan masa penahanan bagi para pengurus PDP itu. Ketua Pengadilan Tinggi Papua, Drs. Tonggo Sihite, S.H. mengatakan, "Kami menolak keberatan yang diajukan anggota PDP. Sebab berdasarkan penjelasan dari jaksa, perkara makar ini sangatlah penting dan mendapat perhatian penuh dari masyarakat. Karena itu harus ditangani secara sungguh-sungguh."

22 Februari

❖ Kendati para anggota PDP tersangka Kasus Makar tidak menerima

keputusan Pengadilan Tinggi Papua atas perpanjangan masa penahanan mereka seperti disampaikan melalui kuasa hukumnya, namun pihak Kejaksaan Tinggi seperti diutarakan Wakajari Papua, Drs. D.H. Panjaitan, S.H., tetap konsisten melakukan perpanjangan masa penahanan.

- Suku Patipeme dan Masyarakat Adat Skow Yambe mengadakan aksi demonstrasi di kantor Walikota Jayapura. Hanock Rollo, juru bicara aksi tersebut, menyampaikan bahwa kedatangan rombongannya untuk menanyakan tindak lanjut dari pertemuan mereka dengan PT Hanurata pada tahun 2000. Pertemuan itu membicarakan kompensasi pemakaian tanah adat di Holtekamp yang belum diselesaikan oleh pihak PT Hanurata. Masyarakat adat meminta kompensasi sebesar 25 miliar dengan sistem pembayaran yang akan dibicarakan bersama. Sekda Kota Jayapura, Drs. Pasaribu, M.Si. mengatakan "Bukannya PT Hanurata tidak mau membayar, tetapi kepada siapa dan kepada suku mana mesti dibayar?"
- Direktur Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPPMA) Jayapura, Sadrak Wanebu, S.H., mengeluarkan tanggapannya atas pemaparan Otsus yang dilakukan di kediaman Theys Eluay serta fenomena "O" dan "M" yang terus berkembang. Menurutnya pertemuan pemaparan Otsus yang dibawakan oleh tim perumus dari Uncen yang kemudian menimbulkan reaksi penolakan dari para peserta, bukan merupakan suatu kegagalan, tetapi merupakan proses dinamika demokrasi. Ia menambahkan, masyarakat sebenarnya telah terjebak dalam istilah "O" dan "M" yang selama ini telah dipolitisir oleh kelompok-kelompok tertentu. Sehingga, kalau berbicara mengenai otonomi – walaupun belum dibicarakan substansinya – masyarakat kemudian menilainya sebagai sesuatu yang negatif.

23 Februari

- Pangdam XVII/Trikora, Mayjen TNI Mahidin Simbolon, mengatakan bahwa siapa saja yang menyatakan dirinya sebagai anggota TPN/OPM atau GPK tidak akan ditolelir. Sebab gerakan kelompok tersebut adalah gerakan separatis yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, Polda Papua dan Kodam XVII/Trikora akan melakukan pembongkaran kamp-kamp TPN/

OPM. Pihaknya akan membuat kesepakatan pembagian tugas dengan Polda. TNI dari Kodam XVII/Trikora menurutnya akan bertugas membubarkan TPN/OPM.

- Pemerintah Kabupaten Manokwari membangun perumahan bagi para pengungsi dari Maluku Utara yang datang ke kabupaten itu. Para pengungsi yang dievakuasi dalam tahap pertama itu jumlahnya sebanyak 9 KK. Sedangkan kelompok yang akan dievakuasi dalam tahap kedua sebanyak 24 KK. Pengungsi tersebut adalah orang-orang Manokwari yang merantau dan menetap di Maluku Utara.

25 Februari

- Menyikapi rencana pemeriksaan oleh KPP HAM terhadap institusi Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran HAM dalam Kasus Abepura pada 7 Desember 2000, Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika menyatakan bahwa pihaknya siap untuk diperiksa.
- Rencana pembubaran kamp-kamp TPN/OPM membuat Willem Onde (pimpinan TPN/OPM Merauke) menjadi marah. Willem Onde mengatakan bahwa pernyataan Pangdam XVII/Trikora dan Kapolda Papua adalah pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Kata Willem Onde, "*Dorang dua* tidak benar. Pernyataan tersebut tidak bertanggung jawab. Jangan pura-pura tidak tahu posisi kita, lalu terus berbicara seenaknya."

26 Februari

- Ketua KPP HAM Papua Albert Hasibuan beserta rombongan melakukan serangkaian pertemuan dengan Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, dan Pangdam XVII/Trikora, Mayjen Mahidin Simbolon. Pertemuan itu dimaksudkan untuk melaporkan keberadaan KPP HAM di Papua dan akan bekerja selama Maret hingga April 2000. Mereka meminta dukungan Pangdam XVII/Trikora dan Kapolda Irian Jaya untuk kelancaran kerja KPP HAM Papua.
- Polisi menembak mati Robert Ongge di Jayapura, karena dianggap mau melakukan pemerasan terhadap seorang pemilik toko.

27 Februari

- Lima anggota Panel dan PDP Jayawijaya, masing-masing Pdt. Obet Komba, Murjono Murip, Yafet Yelemaken, Amelia Jigibalon, dan Yudas Miage, yang menjadi terdakwa dalam kasus 6 Oktober 2000 di Wamena, dituntut tujuh tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan itu didasarkan pada alasan bahwa mereka terbukti telah melanggar primer pasal 110 ayat 1 junto pasal 106, junto pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP primer, dan subsider pasal 154 junto 55 ayat 1 KUHP.
- Jalan pertambangan PT Freeport Indonesia dipalang masyarakat di Mile 27. Pemalangan itu dimaksudkan untuk menuntut janji PT yang akan menggunakan dan membayarkan 1% dana operasionalnya bagi masyarakat Suku Kamoro.

28 Februari

- Keluarga besar Suku Ongge bersama seluruh warga Kampung Harapan Sentani, Jayapura, melakukan aksi pemalangan jalan raya Abepura – Sentani. Aksi tersebut dimaksudkan untuk menuntut pertanggungjawaban pihak kepolisian atas tewasnya Robert Ongge yang ditembak oknum aparat kepolisan di Toko Asahan Abepura pada 26 Februari 2000 lalu. Dalam aksi itu terjadi bentrokan antara aparat dengan masyarakat yang mengakibatkan dua anggota polisi dan tiga warga sipil menderita luka-luka. Selain itu, delapan warga sipil ditangkap dan ditahan oleh aparat di Mapolsek Sentani. Tiga warga sipil yang menderita luka-luka adalah A. Ohee (70 th), Tomo (41 th) dan seorang siswa SLTP bernama Irjawanto (14 th).
- Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing, S.H., mengatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap delapan warga sipil dalam aksi pemalangan jalan di Kampung Harapan, Sentani, dilakukan karena mereka tertangkap basah menyerang petugas dengan lemparan batu. Untuk sementara delapan orang itu ditahan di Polsek Sentani untuk dimintai keterangan.
- Pemerintah daerah Propinsi Papua, melalui Wagub, drh. Constant Karma, mengatakan bahwa pada 15 atau 20 Maret 2000 akan diadakan seminar RUU Otsus untuk Papua. Seminar tersebut merupakan kerja sama antara Pemda Propinsi Papua dan Uncen sebagai penyelenggara.

MARET 2001

3 Maret

- Tim sosialisasi otonomi khusus utusan Uncen, Elly Lawelisa, S.H., M.M. dan Drs. Bram Rumsumbre, menyosialisasikan otonomi khusus di kantor DPRD Wamena. Acara tersebut menjadi kacau ketika masyarakat meminta agar opsi merdeka dan proses hukum lima anggota Panel dan PDP yang ditahan juga dibahas pada kesempatan itu.
- Permohonan penangguhan penahanan Ketua Panel dan PDP Merauke, Drs. Januarius Wiwaron, yang ditahan pihak penyidik Polres Merauke sejak 2 Desember 2000 dalam kasus dugaan makar, dikabulkan pihak penyidik.

5 Maret

- Aparat kepolisian PNG melakukan aksi penyerangan terhadap para pengungsi asal Irian Jaya di kamp pengungsian dekat gedung Gereja Katolik.
- Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kasus makar Theys dkk. belum dapat diajukan ke pengadilan untuk disidangkan karena masih harus menunggu keputusan Menteri Kehakiman RI di Jakarta. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Y.M. Tahya, S.H.

6 Maret

- Menurut anggota MPR RI Utusan Daerah Propinsi Papua, Budi Baldus Waromi, pembahasan RUU Otsus untuk Papua terkesan terburu-buru dan dikhawatirkan tidak dapat menampung aspirasi seluruh masyarakat Papua. Ia mengatakan, sangat penting untuk memperhatikan aspirasi masyarakat dalam proses tersebut agar nantinya masyarakat bisa mengerti dan mendukung pelaksanaan Otsus, serta untuk menghindari penilaian bahwa Otsus hanya menjadi kata-kata kosong yang tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Papua.

7 Maret

- Kadiskum Polda Papua, Kombes Pol. Untung, mendatangi Sekretariat KPP HAM di Jl. Jeruk Nipis No. 117, Furia, Kotaraja, Jaya-

pura, tanpa diundang atau tanpa tujuan yang jelas. Menurut KPP HAM, Kombes Untung, telah mengganggu proses pemeriksaan terhadap para saksi korban yang sedang dilangsungkan saat itu.

8 Maret

- Tim Pansus Kerukunan Nasional DPR-RI bertemu dengan para pimpinan instansi di lingkungan pemerintah Propinsi Papua di Jayapura. Pertemuan itu dimaksudkan untuk menerima berbagai masukan berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di daerah Papua.
- Kakanwil Kehutanan Propinsi Papua, Ir. Marthen Kayoi, mempertanyakan dibentuknya Pansus Kerukunan Nasional DPR-RI. Marthen membantah jika di Papua ada masalah yang berkaitan dengan kerukunan. Menurutnya, justru pemerintah pusat yang harus mengurangi intervensi ke daerah-daerah, termasuk ke Papua, dan konsekuen dalam melaksanakan UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan.
- Salah satu hasil dari *Special Border Liaison Meeting* (SBLM) antara pemerintah RI dan PNG adalah penundaan pemulangan 371 warga negara RI yang hingga kini masih mengungsi di Vanimo, PNG. Menurut Sekretariat Urusan Wilayah Perbatasan RI-PNG, Drs. F.X. Suryanto, penundaan didasarkan pada alasan kekhawatiran pemerintah PNG akan terulangnya peristiwa 1 November 1982. Pada peristiwa itu terjadi penyanderaan terhadap delegasi RI yang mengunjungi kamp pengungsi di perbatasan Jayapura-PNG.
- Bupati Manokwari, Dominggus Mandacan, mengancam akan menindak tegas 17 perusahaan HPH yang masih menunggak pajak PBB senilai Rp. 13 Miliar dalam kurun waktu 1995-2000. Bupati di antaranya menyebut 12 HPH penunggak PBB sektor perhutanan, yakni PT Antika Optima Inti Unit II (menunggak Rp 868.577.259), PT. Agoda Rimba Irian (menunggak Rp 1,14 miliar), PT Wapoga Mutiara Timber (menunggak Rp 1,5 miliar), PT Bintuni Utama (menunggak Rp 1,27 miliar), PT Murni Wood (menunggak Rp 1,27 miliar), PT Ukira Sari (menunggak Rp 751 juta), PT Dharma Mukhti Persada (menunggak Rp 763 juta), PT Hendrison Iriana (menunggak Rp 250 juta), PT Yotefa Sarana

Timber (menunggak Rp 583 juta), PT Kayu Arthas Mas (menunggak Rp 2,8 miliar), PT Teluk Bintuni Makmur (menunggak Rp 1,9 miliar), dan PT Wana Iriana Perkasa (menunggak Rp 601,5 juta).

9 Maret

- Tim Komisi Nasional Dialog Masalah Papua yang dibentuk di Jakarta dan disponsori pemerintah pusat, merencanakan menggelar acara dialog pada akhir Maret 2001 dan melibatkan PDP. Dialog yang bertujuan mencari solusi dan menyelesaikan masalah Papua ini, dinilai Sekjen PDP Thaha Alhamid bukan forum yang tepat untuk menyalurkan aspirasi merdeka bagi bangsa Papua. PDP hanya menginginkan adanya dialog nasional dan internasional untuk membahas aspirasi tersebut.
- Satu Kompi anggota Satuan Brimobda Jawa Timur yang di-BKO-kan di Polres Manokwari sejak 11 Agustus 2000 ditarik dari Manokwari dan kembali ke kesatuan asalnya.
- Satu Kompi yang terdiri dari 80 personel anggota Satuan Brimobda Kotaraja, Irja, tiba di Timika, Kabupaten Mimika.

10 Maret

- Majelis hakim dari PN Wamena menjatuhkan hukuman penjara kepada para terdakwa kasus Wamena Berdarah, 6 Oktober 2000. Para terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana makar dan berkeinginan memisahkan diri dari NKRI, serta terbukti menghasut masyarakat dalam peristiwa tersebut. Hukuman itu masing-masing empat tahun penjara untuk lima anggota Panel PDP, dan masing-masing dua tahun penjara untuk 17 terdakwa lainnya. Para terhukum menyatakan tidak menerima putusan tersebut dan menyatakan banding.
- Nota kesepahaman bersama (MOU) tentang pengelolaan lingkungan di Papua ditandatangani oleh Bapedal Daerah Irja, PT Freeport, *British Petroleum* (BP) Indonesia, WWF *(Wild World Fund)*, USAID *(United States Agency for International Depelovement)*, dan yang lainnya.

11 Maret

- Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan

rencana penempatan pasukan keamanan untuk menumpas gerakan separatis di Papua dan Aceh.

13 Maret

- Kakanwil Kehakiman dan HAM Propinsi Irja, M.B. Aronggear, mempertanyakan keabsahan hukum dari keberadaan KPP HAM Papua untuk Kasus Abepura. Menurutnya, KPP HAM melakukan kegiatan hukum tanpa surat keputusan (SK) yang seharusnya ditembuskan kepada Kanwil Kehakiman dan HAM setempat.
- Empat tokoh Melanesia Barat, masing-masing Zadrak Wanggai, Albert Kailele, Yordan Iek, dan Herman Harry Wanggai dibebaskan melalui putusan sela majelis hakim PN Jayapura.

15 Maret

- Pihak Kejaksaan Negeri Jayapura menangguhkan penahanan Theys H. Eluay dan empat anggota PDP lainnya, yang dijadikan tersangka dalam kasus Makar. Meski demikian, sehari dalam seminggu, yakni setiap Senin, mereka dikenakan wajib lapor kepada pihak Kejaksaan Negeri Jayapura.
- KPP HAM Papua melakukan pemeriksaan terhadap Wakapolda Papua Brigjen Pol. Drs. Moersoetidarno Moerhadi D., Dansat Brimobda Papua Kombes Pol. Johnny Wainal Usman, dan Kapolres Jayapura AKBP Drs. Daud Sihombing, S.H.
- Kapolda Papua, Drs. Made Mangku Pastika, menanggapi pernyataan KPP HAM Papua yang menuding tindakan pemanggilan 28 orang saksi korban oleh pihak Polres Jayapura sebagai upaya untuk menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung. Kapolda mengatakan, pemanggilan itu dimaksudkan untuk menegakkan hukum. Ia menambahkan bahwa pihak Kepolisian tidak bermaksud menghalang-halangi tugas KPP HAM yang juga sedang menjalankan sebuah proses hukum.
- Empat orang mahasiswa Papua mulai disidangkan di PN Jakarta Pusat dengan tuduhan melakukan kejahatan melawan negara.

16 Maret

- Akibat hasil penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dinilai masyarakat tidak adil dan berbau KKN, ratusan peserta tes CPNS yang tidak lulus mendatangi Kepala Biro Kepegawaian

Setda Propinsi Papua, Drs. W.D. Ochmbair, untuk meminta penjelasan. Namun karena penjelasannya tidak memuaskan, mereka mengancam akan menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Papua. Mereka menganggap bahwa nasib mereka dipermainkan oleh pemerintah Propinsi Papua.

19 Maret

- Wakil Ketua KPP HAM Papua, Sita Aripurnami, M.Sc., menerangkan bahwa pihaknya telah memeriksa 12 orang anggota Polda Papua yang diawali dengan pemeriksaan terhadap para perwira. Sedangkan jumlah saksi korban yang telah dimintai keterangannya mencapai 59 orang. Dengan demikian KPP HAM Papua telah menghadirkan dan memeriksa 61 orang berkaitan dengan peristiwa 7 Desember 2000 di Abepura yang diduga mengandung unsur pelanggaran HAM berat di dalamnya.
- Papua dilanda gelombang aksi unjuk rasa akibat pengumuman hasil penyaringan CPNS yang dinilai tidak memuaskan. Sedikitnya tiga aksi unjuk rasa terjadi secara serempak di tiga Kabupaten, yakni di Manokwari, Jayawijaya, dan Jayapura. Aksi unjuk rasa itu digelar di kantor pemerintah dan kantor DPRD masing-masing Kabupaten, kecuali di Kabupaten Jayapura yang digelar di Kantor Gubernur Irja, Dok II. Para demonstran menolak hasil pengumuman tes CPNS tahun 2000/2001 yang diumumkan Gubernur Irja pada 16 Maret 2001. Mereka menilai hasil tersebut tidak adil dan berbau KKN. Oleh karena itu mereka memaksa pemerintah agar membicarakan masalah itu dengan Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta melalui telepon.
- Bentrokan terjadi antara aparat kepolisian dengan massa di Manokwari sebagai buntut dari aksi unjuk rasa memprotes hasil penyaringan CPNS. Dalam aksi itu puluhan kantor pemerintah di Wamena dan Manokwari juga dipalang oleh massa pengunjuk rasa.

20 Maret

- KPP HAM Papua untuk Kasus Abepura memeriksa mantan Kapolda Papua, Brigjen Pol. Drs. S.Y. Wenas di kantor Komnas HAM Indonesia, Jakarta.
- Ir. August Rumansara, M.A., salah seorang anggota KPP HAM

Papua, memastikan dugaan adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 7 Desember 2000 di Abepura, meskipun penyelidikan yang dilakukan komisi itu hasilnya belum final. Menurutnya, dugaan itu didasarkan pada adanya proses pembiaran (*violation by omission*) dan keterlibatan langsung (*violation by comission*) para pimpinan dan anggota Polda Papua dalam peristiwa tersebut. Menanggapi pernyataan Kepala Kanwil Kehakiman dan HAM Propinsi Papua, M.B. Aronggear, yang mempertanyakan keabsahan hukum dari KPP HAM Papua, Agus mengaku bahwa pihaknya telah mengajukan keberatan kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI, Baharuddin Lopa di Jakarta. KPP HAM Papua berkeberatan atas pernyataan pejabat Kehakiman yang dinilai dapat menghambat kegiatan KPP HAM yang pro justitia itu.

- Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si., mendesak para pemegang ijin dan pengusaha HPH agar segera menyelesaikan tunggakan utang PSDH (Pajak Sumber Daya Hutan), Dana Reboisasi, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2000.
- Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si., mengatakan bahwa nilai kompensasi untuk pemilik hak ulayat yang harus dibayarkan kepada masyarakat dinaikkan dari Rp 5.600/m2 menjadi Rp 86.000/m2. Menurut Gubernur, hal itu dilakukan sebagai upaya menyikapi tuntutan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat atas kawasan hutan yang dikelola para pemegang HPH di Papua.
- Saat meresmikan Kantor Camat Sentani Timur, Bupati Kabupaten Jayapura, Ir. Yan Pieter Karafir, M.Ec., menekankan agar hak-hak masyarakat adat harus tetap mendapat perhatian berupa perlindungan oleh pemerintah daerah dalam sistem otonomi khusus Papua. Karafir juga menegaskan bahwa hak-hak sipil masyarakat harus dilindungi pemerintah yang selama ini di Indonesia terkesan dilupakan, khususnya untuk masyarakat Papua. Selain itu Karafir juga mengatakan, khusus di Pemkab Jayapura, sudah dibuat Perda tentang pelarangan penebangan pohon-pohon sagu, agar populasi hutan dan tanaman sagu tidak punah di Papua.
- Warga Aranday, Kecamatan Bintuni, mengancam akan menutup ladang gas yang dioperasikan *British Petroleum* (BP) Indonesia jika perusahaan itu tidak membayar ganti rugi lahan hutan sagu

di daerah itu yang rusak akibat kegiatannya.

21 Maret

- Presiden Abdurrahman Wahid di Istana Merdeka Jakarta meminta OPM dengan sayap militernya agar membubarkan diri dan selanjutnya dinyatakan sebagai organisasi terlarang.
- Menindaklanjuti aksi-aksi demonstrasi yang melanda Papua berkaitan dengan masalah penyaringan CPNS, DPRD Papua membentuk Pansus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pansus akan melibatkan pihak eksekutif dan masyarakat. Tetapi keputusannya, tetap menjadi kewenangan pihak eksekutif, karena dalam Pansus tersebut pihak legislatif hanya sebatas menjadi fasilitator.

22 Maret

- Kapolda Irja, Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika, menilai sikap KPP HAM Papua cenderung bersifat tendensius dan provokatif. KPP HAM mengambil kesimpulan yang seolah-olah sudah sangat pasti dan benar mengenai adanya pelanggaran HAM berat pada kasus Abepura. Penilaiannya itu didasarkan pada tudingan KPP HAM yang mengatakan bahwa aparat Polda Papua tidak terbuka dan cenderung tertutup dalam proses pemeriksaan, dengan hanya mengeluarkan jawaban 4T (tidak tahu, tidak ingat, tidak ada, dan tidak pasti). Kapolda juga menyayangkan KPP HAM yang mempublikasikan hasil pemeriksaan yang sebenarnya bersifat rahasia dan tertutup bagi masyarakat. Kapolda khawatir, kesimpulan tersebut akan menyesatkan opini publik dan tidak menjunjung asas praduga tak bersalah.
- Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Andreas Anggaibak, meminta masyarakat supaya tidak menyoroti kinerja DPRD atau mencampuri urusan pemerintah dalam hal pencalonan bupati dan wakil bupati Mimika. Menurutnya, yang perlu dipertanyakan dan dibela adalah hak-hak adat masyarakat, seperti pengambilan hasil hutan, hasil laut, dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Freeport, termasuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Kabupaten Mimika.
- Dansatgas Papua, Mikael 'Boy' Eluay, yang didakwa dengan tuduhan memberi ijin kepada anggotanya melakukan pemerasan

terhadap masyarakat, dinyatakan bebas murni oleh Majelis Hakim PN Jayapura.

- ❖ Ketua Komisi A DPRD Propinsi Papua, Yance Kayame, menjelaskan bahwa rencana pembentukan Pansus oleh DPRD untuk mengusut masalah penerimaan CPNS formasi 3000, tahun 2000/2001 dibatalkan. Menurutnya, pembatalan itu dilakukan karena aspirasi yang dimasukkan oleh pengunjuk rasa selama aksi demo yang digelar di Papua, tidak mencakup data-data otentik yang bisa dijadikan bukti adanya indikasi KKN.
- ❖ Ketua *Organizing Committee* Tim Perancang RUU Otsus Papua, Dr. J.R. Mansoben, menerangkan bahwa RUU Otsus telah dibahas oleh tim pakar dari beberapa institusi. RUU tersebut mencakup delapan *draft*. Karena *draft* itu bukan hasil akhir, maka pihaknya masih meminta masukan dari seluruh komponen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, LSM, dan PDP untuk pembahasan ulang dan perbaikan.

23 Maret

- ❖ Sita Aripurnami, M.Sc., anggota Komnas Perempuan, menilai tindakan kekerasan terhadap perempuan Papua cukup tinggi. Sita mengaku jika pihaknya belum melakukan survei secara sistematis untuk masalah tersebut di Papua, tetapi dari berbagai informasi dan diskusi menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan Papua lebih banyak terjadi dalam keluarga atau di lingkungan rumah tangga.
- ❖ Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si., mengumumkan akan meneruskan rencana pembangunan sejumlah mega proyek, di antaranya pembangunan pabrik semen di Jayapura, proyek pembangkit listrik di Mamberamo, dan proyek gas alam Tangguh di Bintuni.

27 Maret

- ❖ Berkaitan dengan akan berlangsungnya seminar yang akan membicarakan *draft* RUU Otsus di GOR Cenderawasih Jayapura mulai 28 Maret 2001, Gubernur Papua Drs. J.P. Solossa, M.Si. mengharapkan agar semua komponen masyarakat dapat menciptakan keamanan di seluruh Papua, khususnya di Jayapura.
- ❖ Menyikapi akan diselenggarakannya seminar pembahasan *draft*

RUU Otsus untuk Papua, Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay, mengatakan bahwa seminar tersebut adalah 'permainan kotor' para elite politik di Jakarta. Ia menegaskan, PDP pada prinsipnya tidak menolak seminar Otsus, karena Otsus juga untuk kepentingan rakyat Papua. Tetapi Theys meminta agar pihak Pemda Irja juga peka terhadap hasil Kongres Rakyat Papua. Selain itu ia juga menegaskan, jika RUU Otsus itu tidak membawa perubahan bagi kesejahteraan rakyat Papua, maka pihaknya akan menolak UU Otsus tersebut. Menurutnya komitmen PDP sudah jelas, yakni mengharapkan adanya dialog nasional dan internasional, bukan seminar RUU Otsus.

- Menyongsong dilangsungkannya kegiatan Forum Kajian RUU Otsus untuk Papua, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Uncen menggelar acara Debat Akbar Mahasiswa di halaman gedung Administrasi FKIP Uncen, Abepura. Acara itu melibatkan sekitar 500 mahasiswa yang terdiri dari para aktivis kampus perguruan tinggi negeri dan swasta di Jayapura. Turut hadir sekitar sembilan orang aktivis mahasiswa dari Sorong dan sejumlah perwakilan masyarakat dari Kabupaten Biak, Paniai, dan Nabire. Debat itu bertujuan menghimpun seluruh ide dan kritik berkaitan dengan kebijakan Otsus yang terkesan 'dipaksakan' oleh pemerintah Indonesia.
- Pada akhir kegiatan Debat Akbar Mahasiswa di Uncen, para peserta mengeluarkan lima butir pernyataan sikap. Pernyataan itu dibacakan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Papua, Syahrid Fadhal Alhamid, didampingi Ketua SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi), Kaleb O. Imbiri. Lima butir pernyataan sikap itu adalah: *Pertama*, segenap mahasiswa Papua di Jayapura menyatakan menolak dengan tegas kebijakan Otsus yang dipaksakan oleh pemerintah Indonesia untuk diterima rakyat Papua sebagai bentuk penyelesaian status politik Papua Barat, karena belum adanya forum internasional yang setara, adil dan jujur untuk membicarakan akar masalah yang terjadi di Papua. *Kedua*, mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera menghentikan segala bentuk pembahasan mengenai Otsus, karena hal demikian menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. *Ketiga*, mendesak pemerintah RI dan seluruh pihak Internasional yang terkait dengan masalah status politik

bangsa Papua Barat untuk segera menggelar dialog internasional di mana orang Papua dihadirkan sebagai subyek yang berhak menentukan masa depannya sendiri. *Keempat,* kepada segenap rakyat Papua Barat untuk tetap setia terhadap cita-cita luhur perjuangan bangsa Papua Barat, yaitu merdeka dan berdaulat penuh sebagaimana bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. *Kelima*, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati isi pernyataan ini dan seluruh bangsa Papua Barat.

27 Maret

- Rencana repatriasi (pemulangan) 371 warga Papua yang mengungsi ke Vanimo, PNG, pada Desember 2000, sedang dinegosiasikan dengan pemerintah PNG dan Konsulat RI di Vanimo. Menurut Sekretaris Urusan Perbatasan RI-PNG, F.X. Suryanto, Pemda Irja telah membentuk satu tim yang beranggotakan tokoh agama dan tokoh adat, untuk bertugas mengajak para pengungsi kembali ke Papua.
- Ratusan massa dan kaum intelektual Jayawijaya menolak hasil penyaringan CPNS formasi 3000, tahun 2000/2001 karena dinilai tidak adil dan berbau KKN. Aksi massa tersebut dilanjutkan dengan memalang Kantor Bupati Jayawijaya.

28 Maret

- Forum Kajian Ilmiah RUU Otsus diselenggarakan oleh Pemda Irja dan Uncen di GOR Cenderawasih, Jayapura. Acara itu dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat se-Propinsi Irian Jaya dalam bentuk utusan-utusan atau delegasi-delegasi daerah dan kelompok perwakilan masyarakat adat.
- Ketua *Steering Commitee* (SC) RUU Otsus Papua, Ir. Frans A. Wospakrik, M.Sc., dalam sambutannya menyimpulkan bahwa rakyat Papua menghendaki perubahan dari keadaan seperti selama ini menuju ke arah kesejahteraan, keadilan, dan mencapai kemakmuran di atas tanah sendiri. RUU Otsus harus berpihak dan mengarah menuju kesejahteraan rakyat Papua.
- Sementara itu Gubernur Propinsi Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si., dalam sambutannya menekankan tiga hal yang menurutnya sangat penting dan harus dicermati dengan baik dalam RUU Otsus. Ketiga hal tersebut adalah: *Pertama*, forum kajian bukan

untuk mempertentangkan antara 'O'(tonomi) dengan 'M'(erdeka), namun dibuat sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di mana semua komponen masyarakat diberi kewenangan dan kesempatan untuk berbicara tentang hak-haknya. *Kedua*, RUU Otsus yang saat ini dibuat, masih membutuhkan dukungan masyarakat untuk diajukan ke pemerintah pusat. *Ketiga*, Tanah Papua sampai saat ini masih dalam kerangka NKRI, walaupun disadari bahwa ada pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu.

- Ratusan massa terdiri dari mahasiswa dan masyarakat yang memadati halaman GOR Cenderawasih Jayapura ramai berorasi menolak Otsus. Mereka juga menyampaikan aspirasinya dengan menggelar spanduk, yang di antaranya bertuliskan, "Awas, Forum Kajian RUU Otsus adalah Pepera Kecil" dan "Nasib orang Papua hanya bisa dirubah oleh orang Papua sendiri". Setelah diterima dan masuk ruang persidangan para aktivis diberi kesempatan untuk menyatakan sikapnya, yakni menolak Otsus. Ketika diajak untuk berdiskusi lebih lanjut, para aktivis melakukan *walk out* sambil mengajak utusan-utusan daerah yang ada di GOR untuk bergabung dengan mereka. Sejumlah anggota delegasi daerah menanggapi ajakan itu dengan bergabung melakukan *walk out*.
- Adanya perbedaan pendapat dalam menyikapi RUU Otsus dalam Forum Kajian yang digelar di GOR Cenderawasih, Jayapura, berbuntut *walk out* mahasiswa dan bentrokan antara aparat keamanan (pasukan gabungan TNI/Polri) dengan massa yang menolak otonomi khusus untuk Propinsi Papua. Akibat bentrokan tersebut, sembilan anggota Polisi Dalmas Polres Jayapura menderita luka-luka dan 14 orang massa yang terdiri dari masyarakat dan mahasiswa ditangkap dan 12 orang di antaranya ditahan di Polda Papua. Sementara dua orang lainnya ditahan di Polres Jayapura.

29Maret

- Dari 14 orang yang ditangkap pasukan pengamanan gabungan TNI/Polri dalam bentrokan di GOR Cenderawasih Jayapura, seorang di antaranya, yakni Philipus Murib, meninggal dunia, dua orang dibebaskan, dan tiga orang resmi dijadikan tersangka oleh Polres Jayapura. Sedangkan yang lainnya masih ditahan untuk menjalani proses pemeriksaan.

- Direktur RSUD Dok II Jayapura, dr. Clemens Manyakori, Sp.P., menjelaskan bahwa Philipus Murib (30 tahun) yang meninggal di RSUD Dok II, meninggal akibat adanya pembengkakan dan pendarahan pada limpa.
- Sekjen PDP, Thaha Alhamid, menilai aksi-aksi penolakan otonomi khusus yang digelar massa dan mahasiswa, baik yang terjadi di GOR maupun di kampus Uncen, sebagai refleksi luka lama rakyat Papua. Menurut Thaha, pemerintah tidak boleh menyepelekan aspirasi-aspirasi yang muncul dari masyarakat yang menolak Otsus untuk Papua.
- Anggota *Steering Commite* Forum Kajian RUU Otsus, Barnabas Suebu, S.H. dan Pdt. Karl Phil Erari, menyayangkan aksi penolakan Otsus yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Menurut kedua tokoh itu, aksi penolakan masyarakat Papua terhadap Otsus menunjukkan masyarakat memang hanya menginginkan 'M' (merdeka) dan menganggap Otsus hanya akan menghambat cita-cita kemerdekaan. Penolakan juga muncul karena masyarakat belum mengerti betul apa itu Otsus. Merdeka dan atau otonomi menurut kedua tokoh itu bukan merupakan suatu opsi yang harus dipertentangkan, melainkan harus dinilai saling melengkapi dalam mencapai cita-cita masyarakat Papua.
- Berkas kasus makar Theys, dkk. akhirnya dilimpahkan Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri Jayapura untuk disidangkan.

30 Maret

- Wakil Ketua III DPRD Propinsi Irja, Drs. John Ibo, seperti dituturkan oleh anggota tim *Steering Commitee* (SC) RUU Otsus, Abdul Hakim Achmad, menilai bahwa *draft* RUU Otsus sudah mencakup berbagai aspirasi yang ada di kalangan masyarakat Papua. Menurutnya, Forum kajian yang digelar di GOR Cendrawasih selama dua hari telah memberikan tantangan pemikiran bagi orang Papua, yakni bagaimana menempatkan 'O'(tonomi) dan 'M'(erdeka) secara proporsional. Ia juga menegaskan bahwa RUU Otsus sifatnya tidak bertentangan dengan keinginan "merdeka" rakyat Papua, karena Otsus adalah jembatan bagi pergerakan rakyat Papua untuk menuju ke arah yang baru. Ia meminta dengan tegas kepada masyarakat Papua supaya tidak menolak Otsus dan meminta merdeka. Menurutnya, Otsus sudah

mencakup amanat Kongres Rakyat Papua II sehingga jika orang Papua menolak Otsus, berarti telah menolak keputusan Kongres Rakyat Papua juga.

- Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika, mengatakan bahwa pihaknya akan mulai menertibkan segala atribut yang berkaitan dengan Bintang Kejora. Kapolda menjelaskan, operasi razia atribut Bintang Kejora itu sama dengan operasi rutin terhadap senjata tajam.
- Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari, digemparkan oleh penyerangan sekelompok orang bersenjata terhadap karyawan PT Darma Multi Persada yang mengakibatkan tiga orang karyawan perusahaan itu meninggal dunia. Satuan Brimob kemudian melakukan operasi pengejaran. Dalam pengejaran itu empat orang warga sipil (masyarakat) ditembak mati, dua orang luka-luka, dan 16 orang lainnya ditangkap dan kemudian ditahan di Polres Manokwari.
- Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Papua, Drs. Marsono, B.A., mengakui bahwa lapangan kerja untuk masyarakat di Papua masih terbatas. Menurutnya hal itu menjadi masalah yang serius karena banyak pencari kerja masih menganggur atau belum tertampung, baik di instansi negeri maupun swasta. Dengan hadirnya perusahaan besar seperti *British Petroleum* (BP) Indonesia yang akan memproduksi LNG di Teluk Bintuni, pihaknya optimis para pencari kerja akan terbantu. Menurutnya, jika sudah beroperasi perusahaan LNG itu akan menyerap 5.000 tenaga kerja. Pihaknya juga berencana akan memfungsikan Balai Latihan Kerja sebagai sarana untuk pelatihan tenaga kerja siap pakai di perusahaan-perusahaan. Selain mengharapkan banyak pencari kerja terserap oleh sektor negeri dengan menjadi PNS, Marsono juga mengharapkan sektor swasta dapat menyerap lebih banyak lagi pencari kerja agar masalah pengangguran dan kemiskinan dapat ditanggulangi.
- Perjanjian untuk mendirikan pabrik semen dengan memanfaatkan *tailing* Freeport ditandatangani oleh Pemda Timika dan pemerintah negara bagian Northern Territory (Australia).

APRIL 2001

1 April

- RUU Otsus untuk Propinsi Papua versi pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri di Jakarta, telah diajukan ke DPR RI. Langkah itu diprotes oleh anggota DPR RI asal Papua, Lukas Degey, Alex Litay, dan S.P. Morin. Mereka beralasan bahwa RUU tersebut tidak mewakili aspirasi masyarakat Papua. Mereka juga meminta DPR RI agar sebaiknya lebih memperhatikan RUU Otsus yang sedang dipersiapkan Pemda Papua dan DPRD Propinsi Papua bersama komponen masyarakat Papua lainnya.
- Razia atribut Bintang Kejora yang direncanakan Polda Papua diminta oleh Sekjen PDP Thaha Alhamid agar dikaji ulang untuk kemudian dikoordinasikan dengan semua pihak yang berkepentingan.
- Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Mamberamo menolak rencana pemerintah untuk membangun mega proyek PLTA Mamberamo. Menurut Ketua LMA Mamberamo, Wempi Bilasi, rencana tersebut belum pernah didialogkan dengan masyarakat setempat yang nanti akan terkena dampak langsung dari proyek tersebut. LMA meminta keseriusan pemerintah untuk terlebih dahulu menyiapkan SDM dari warga Mamberamo yang umumnya masih buta huruf, ketimbang mengejar proyek yang menurut pengalaman selama ini hanya mengejar keuntungan ekonomis semata tanpa terasa manfaatnya oleh masyarakat kecil.

2 April

- Ketua II PDP, Tom Beanal, mengatakan bahwa RUU Otsus yang sedang disiapkan oleh tim perumus dari Papua sebaiknya menyampaikan aspirasi rakyat yang sebenarnya. "Jangan menipu rakyat bahwa seolah-olah Otsus telah diterima oleh Rakyat Papua."
- Usulan peninjauan ulang razia atribut Bintang Kejora dari PDP ditanggapi secara positif. Menurut Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika, rencana razia masih bersifat wacana dan bukan sebuah keputusan. Rencana itu adalah langkah yang coba diambil untuk menjawab pertanyaan dan keluhan dari masyarakat lain bahwa pemakaian atribut-atribut tersebut

dimaksudkan untuk memisahkan diri dari NKRI dan dapat digolongkan sebagai tindakan makar.

- Rencana pemekaran wilayah Kerom di Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten tersendiri didukung oleh lima kecamatan, yakni Arso, Waris, Senggi, Ubrub dan Muara Tami.
- Salah seorang anggota TPN/OPM, Peter Simon Alom, ditangkap oleh petugas keamanan PNG di Vanimo.

3 April

- Tim Pembela Kebenaran dan Keadilan untuk Rakyat Papua (TPKKRP) yang selama lima bulan menangani kasus makar Theys H. Eluay dkk., dinyatakan bubar oleh Direktur LBH Jayapura, Demianus Wakman, S.H. Alasannya, TPKKRP dinilai mandul dalam melaksanakan tugasnya.
- Satu peleton pasukan Brimob dari Jayapura dan Sorong dikirim untuk membantu mengendalikan situasi di Kecamatan Wasior Kabupaten Manokwari. Menurut Kapolda Papua, pasukan itu diberangkatkan karena jumlah pasukan yang ada di tempat kejadian sangat terbatas.

4 April

- Tiga orang pencari kayu gaharu di Kali Kopi Timika, yaitu Uyang Kunang (21 tahun), Hengki Masud (25 tahun) dan Burhan (21 tahun), tewas dibantai kelompok orang tidak dikenal.
- Sebanyak 5.300 liter minuman beralkohol merk *Cap Tikus* yang disusupkan melalui pelabuhan Biak dan Desa Samber, Kecamatan Supiori Selatan, Kabupaten Biak –Numfor, berhasil disita dan dimusnahkan oleh Polres Biak-Numfor.
- Tiga anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya yang sedang melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Oksibil disandera sekelompok pemuda. Para sandera dibebaskan setelah melakukan dialog dengan para pemuda. Dialog itu menghasilkan tuntutan yang berisi agar bupati memperhatikan wilayah timur Jayawijaya dengan mengangkat tenaga guru dari wilayah tersebut. Juga berisi himbauan kepada bupati agar proyek-proyek yang dilaksanakan di daerah tersebut melibatkan masyarakat setempat.
- Bank Dunia menyiapkan dana bantuan untuk Propinsi Papua sebesar US 2,2 Miliar.

- Terjadi perkelahian massa di pasar Abepura – Jayapura yang mengakibatkan Richardo Itaar (11 tahun) meninggal dunia. Korban sebenarnya tidak terlibat dalam perkelahian massa tersebut.

5 April

- Kapolres Jayapura AKBP Drs. Daud Sihombing S.H., diperiksa oleh KPP HAM Papua berkaitan dengan kasus Abepura pada 7 Desember 2000. Pemeriksaan yang dilakukan untuk kedua kalinya itu dimaksudkan untuk mengklarifikasi data yang sudah diperoleh dalam pemeriksaan sebelumnya.
- Presiden Abdurrahman Wahid memberikan bantuan sebesar Rp 70 juta kepada Ketua Presidium Papua, Theys H. Eluay, untuk biaya pengobatannya selama dirawat di Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta.

6 April

- Tiga karyawan perusahan HPH PT Dharma Mukti Persada (Grup Kayu Lapis Indonesia), yakni Hari Suwaji, Suratmin, dan Nelson Turnip, ditemukan tewas di dekat Desa Wondama, Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari. Mayat mereka ditemukan oleh satuan kepolisian yang bertugas menjaga perusahaan tersebut. Polisi menduga pelaku penyerangan dan pembunuhan terhadap ketiga korban adalah kelompok TPN/OPM.

8 April

- Menteri Perundang-undangan dan HAM, Baharuddin Lopa, SH, bersama rombongan tiba di bandara Sentani Papua. Kunjungan Menteri untuk melihat jalannya pelatihan HAM bagi para aparat hukum kepolisian, termasuk kepada Kapolres-Kapolres se-Irian Jaya.
- Setelah Gedung DKIJ disita oleh kepolisian dan menangkap beberapa pemimpin Satgas (1 Des. 2000), nama Satgas mulai menghilang. Namun Theys H. Eluay selaku pemimpin besar rakyat Papua menghimbau agar Satgas Papua segera diaktifkan kembali.

9 April

- Polres Jayapura menghentikan sementara pemeriksaan terhadap

kasus dugaan korupsi dalam proyek talud Bapedalda Irja Tahun Anggaran 1999/2000. Sikap kepolisian itu membuat kecewa mantan staf proyek Bapedalda, Willy Ayomi, yang juga sebagai pelapor dugaan korupsi tersebut.

- ❖ Salah seorang tokoh masyarakat, Rex Simbiak, meminta Bappeda Biak-Numfor untuk segera menjawab 500 proposal yang telah dimasukkan oleh masyarakat sejak adanya *crash program* hingga berakhirnya program tersebut.
- ❖ Masyarakat Desa Aikima, Kecamatan Kurulu, Jayawijaya, merasa terganggu oleh keberadaan proyek pengembangan dan konservasi sumber air di lokasi Gunung Supula, Jayawijaya. Mereka beralasan, gunung tersebut merupakan tempat yang dihormati (dikeramatkan) dan bersejarah bagi masyarakat di sekitarnya.
- ❖ Presiden Abdurrahman Wahid mengusulkan didirikannya pangkalan utama TNI Angkatan Udara di Biak, sebagai pangkalan terbaru bagi Komando Angkatan Udara Wilayah IV.

10 April

- ❖ KPP HAM untuk Kasus Abepura 7 Desember 2000, mengumumkan hasil investigasinya. Dari hasil pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa kasus Abepura mengandung unsur pelanggaran HAM berat, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan.

16 April

- ❖ Setelah melalui tahapan yang melelahkan akhirnya DPRD Irian Jaya mengambil keputusan untuk segera membawa *draft* RUU Otsus kepada pemerintah pusat. Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si., Wakil Ketua DPRD Propinsi Papua, John Ibo, beserta rombongan berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan *draft* RUU Otsus kepada pemerintah.
- ❖ Para tersangka kasus Wamena berdarah yang oleh PN Jayawijaya divonis hukuman tiga tahun penjara, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Papua.
- ❖ Penganiayaan terhadap petugas pengamanan PT Freeport Indonesia di Timika, yang diduga dilakukan oleh anggota TNI AL, mendapat tanggapan serius dari Dan Lantamal V Malirja, Brigjen Marinir Yusuf Solichien, M.Phd., dengan membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus tersebut.

17 April

- Sekum Gereja Baptis Irja, Pdt. Socrates Sofyan Yoman, yang hadir dalam sidang Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa, menyampaikan komentar negara-negara yang menyoroti perkembangan yang terjadi di Propinsi Papua dan Aceh. Pdt. Socrates mengatakan, negara-negara Uni Eropa dalam pernyataan resminya di Sidang Komisi PBB di Jenewa, seperti disampaikan Duta Besar Johan Molander, yang juga Ketua Delegasi Uni Eropa asal Swedia, menyatakan bahwa pihaknya tetap mendukung keutuhan RI. Namun mereka mendesak pemerintah RI agar membebaskan rakyat Aceh dan Papua yang ditahan oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah Belanda melalui Menteri Luar Negeri HE Josias Van Aertsen, mendesak agar pemerintah Indonesia mencari akar penyebab masalah kekerasan di Aceh dan Papua, dan hendaknya masalah tersebut diselesaikan secara damai dengan jalan dialog.
- Mantan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua, dr. A.J. Dimpudus, yang diduga terlibat kasus korupsi dana-dana kesehatan, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Hein Berhitu, S.H. hukuman penjara 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar 10 juta rupiah, subsidair 6 bulan kurungan dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 143 juta lebih di PTUN Jayaura
- Mabes Polri mengajukan protes terhadap hasil investigasi Kasus 7 Desember 2000 di Abepura, Kabupaten Jayapura, yang dikeluarkan oleh KPP HAM.

18 April

- Menurut Kepala Bidang Desban Kanwil Kesehatan Papua, drg. Didik Irawan, M.Ph., jumlah penderita HIV/AIDS di Papua setiap tahun terus meningkat. Dari data terakhir, di seluruh Propinsi Papua terdapat sebanyak 338 penderita HIV dan 209 penderita AIDS. Kabupaten Merauke menempati urutan pertama dari 13 kabupaten dan kotamadya di Papua. Pada tahun 1999/2000 di Merauke terdapat 17 orang penderita HIV dan 84 orang terinfeksi AIDS.
- Jajaran Polda Papua melancarkan Operasi Wanalaga yang dilaksanakan serentak di daerah hukum masing-masing Polres pada 13 sampai 22 April 2001. Menurut Kadispen Polda Papua, Komisaris Pol. Zulkifli A.R., operasi itu bertujuan untuk menang-

gulangi perdagangan kayu ilegal yang semakin marak. Operasi juga dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Bagi Irian Jaya, Operasi Wanalaga merupakan operasi tahap awal. Dalam operasi tersebut sebanyak 15 tersangka pembawa kayu ilegal diperiksa.

19 April

- Gubernur Irian Jaya, Drs. J.P. Solossa, M.Si., mengadakan jamuan minum kopi bersama 20 pengacara di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura. Pada kesempatan itu gubernur mengakui bahwa pihaknya mengalami kesulitan dalam membuat peraturan daerah (perda) karena kurangnya keterlibatan para praktisi hukum. Namun gubernur juga merasa heran karena kebanyakan sarjana hukum ingin menjadi pegawai negeri dan jarang ada yang mau jadi pengacara.
- Dendy Akbar Pamungkas, anggota Brimob yang ditugaskan di Asiki, Merauke, tertembak mati setelah makan malam dan mabuk bersama dengan sejumlah karyawan PT Korindo. Untuk mengusut tuntas kasus tersebut, dua orang warga Asiki, Theodorus Aitokok dan Cosmos Kapeng (tuan rumah saat makan malam), ditahan aparat kepolisian dari Polres Merauke.

20 April

- Sebagian dari 371 orang pengungsi di Vanimo, PNG, berkeinginan pulang kembali ke Irian Jaya. Sekretaris Urusan Perbatasan RI-PNG, Drs. F.X. Suryanto, mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk memulangkan para pengungsi yang ingin kembali ke Indonesia secara sukarela. Namun sebagian pengungsi berkeberatan untuk kembali karena pemerintah belum menjawab sejumlah tuntutan mereka sebagai persyaratan untuk kembali ke Irja.
- Menurut Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si., penggunaan dana RAPBD Tahun Anggaran 2001 rencananya sebagian besar akan diarahkan pada tiga prioritas pembangunan. *Pertama*, membiayai instansi/lembaga hasil integrasi bekas kanwil dan restrukturisasi di lingkungan Pemda Propinsi. *Kedua*, untuk program pembinaan politik daerah yang meliputi konsolidasi dan rekonsiliasi kepada masyarakat. *Ketiga*, dana dialokasikan untuk

mengakomodasikan program-program strategis dan menjadi prioritas, sesuai dengan visi dan misi pembangunan.

- Wakil Kapolda Papua Brigjen Pol. Drs. Moersoetidarno Moerhadi, membantah keras jika ada yang mengatakan bahwa pelaku yang diduga mencabut senjata dan menembak Bharada Dendy Akbar Pamungkas adalah dari kelompok TPN/OPM pimpinan Willem Onde. Dikatakannya, sebenarnya kejadian yang menewaskan anggotanya di Asiki itu dilakukan bukan atas nama kelompok manapun. Peristiwa ini hanyalah kejadian insidentil yang sifatnya kasuistik dan bukan penyerangan.

22 April

- Pada tahap awal telah dipulangkan sebanyak 163 pengungsi asal Maluku di Sorong. Tahap kedua dipulangkan sebanyak 40 KK. Pemulangan pengungsi ke daerah asalnya di Kecamatan Bacan, Maluku Utara, dilakukan dengan menggunakan KRI Kakap. Petugas Polres Manokwari menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam kasus penyerangan pos keamanan di Kecamatan Wasior – Manokwari. Kedua tersangka ditangkap di sebuah rumah di Desa Rasiei, yang berjarak 20 kilometer dari kota kecamatan.
- Satu lagi pencari kayu gaharu kembali menjadi korban penganiayaan di Kali Kopi, Iwaka – Timika. Korban yang bernama Uli itu, ditemukan dalam keadaan hidup namun penuh luka di sekujur tubuhnya.

23 April

- RUU Otsus Papua yang mencantumkan permintaan nama, bendera, lagu dan lambang sendiri (Bab II pasal 3), termasuk permintaan mengatur penempatan pasukan TNI di Propinsi Irian Jaya (Bab IV pasal 6 ayat 4), dinilai kalangan DPR RI sebagai usulan yang mengarah kepada makar. Namun Ketua Komisi A DPRD Propinsi Papua, Adolf Gim Perangin, menyatakan tidak setuju dengan penilaian DPR RI tersebut.
- Ibu Yosepha Alomang, aktivis Suku Amungme, menerima penghargaan "The Goldman Environmental Price" (manusia yang memperhatikan lingkungan hidup) atas upayanya menentang pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Freeport Indonesia.

24 April

- Ketua Presidium Dewan Papua, Theys H. Eluay tidak menerima tindakan polisi yang telah mengusir Satgas Papua dari Gedung DKIJ (Dewan Kesenian Irian Jaya), termasuk pemotongan tiang bendera yang digunakan untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora berdampingan dengan bendera Merah Putih. Sebagai wujud dari sikap tersebut, PDP melalui kuasa hukumnya akan menggugat Polda Irian Jaya ke PN Jayapura.
- Ketua *Steering Comitee* RUU Otsus Papua, Ir. F.A. Wospakrik, M.Sc., dengan dingin menanggapi tudingan DPR RI mengenai RUU Otsus Papua yang dinilai makar karena mencantumkan permintaan bendera, lagu dan lambang sendiri. "Saya melihat itu sebagai pandangan pribadi dari anggota DPR RI, bukan dari lembaga DPR RI," katanya.
- Bendera Bintang Kejora yang dikibarkan di Kecamatan Wasior sejak 1 Juli 2000, akhirnya diturunkan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan di beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Babo, Ransiki, dan Bintuni, proses penurunannya masih dinegosiasikan aparat kepolisian dengan masyarakat setempat.
- Buntut dari peristiwa penyerangan di Kecamatan Wasior yang menewaskan tiga orang karyawan PT Dharma Mukti Persada, menimbulkan dampak yang cukup besar. Seluruh karyawan dan ratusan keluarganya dipulangkan ke Kota Manokwari.

25 April

- Ribuan peserta Ebta/Ebtanas di Propinsi Papua yang berharap menikmati pembebasan biaya ujian seperti yang dijanjikan pemerintah propinsi, mulai meragukan janji itu. Pasalnya, sekolah-sekolah masih tetap menarik biaya untuk Ebtanas.

26 April

- Karena alasan keamanan, anggota DPRD Propinsi Irian Jaya, Ernest Piet Suwuh, mengusulkan agar persidangan dugaan kasus makar yang melibatkan Theys H. Eluay dkk., dilaksanakan di Mapolda Irian Jaya atau di Makodam Trikora. Namun Kasdam XVII/Trikora, Brigjen TNI Agustadi, S.P., menolak usulan tersebut dengan alasan bahwa Kodam tidak mau berpolitik praktis.

- Lima orang aktivis Gerakan Papua Merdeka, yakni Isak Baho, Lukas Tenau, Dance Iek, Azer Sagas, dan Lukas Iha, diadili di PN Fakfak. Mereka diduga sebagai pengibar bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2000 di Kota Fakfak.

27 April

- Komandan Satgas Papua Wilayah Bonggo, Oskar Wamey, divonis lima tahun penjara potong masa tahanan, setelah dinyatakan bersalah membawa empat buah amunisi dan sebuah pisau badik. Oskar ditangkap oleh pihak kepolisian setelah melakukan *sweeping* pada 1 Desember 2000 di depan kantor BPD Jayapura Papua.
- Untuk menarik investor ke Papua, Gubernur Papua Drs. J.P. Solossa, M.Si. bersama rombongan mengadakan kunjungan ke Taiwan dan China.
- Polres Jayapura menyelenggarakan pelatihan HAM dan Hukum Pengungsi selama 12 hari, sejak 27 April sampai 9 Mei 2001. Polda Papua bertindak sebagai fasilitator/pelatih.

29 April

- Temuan DPRD Kodya Jayapura tentang dugaan penyelewengan beras Operasi Pasar Khusus (Opsus) di wilayah Kecamatan Jayapura Utara dan Selatan mendapat perhatian serius dari Pemda Kota Jayapura.
- Bupati Merauke, Drs. Johanes Gluba Gebze, membuka Musyawarah Muhammadiyah Daerah IV Merauke. Tema yang dipilih dalam musyawarah tersebut adalah menjalin Ukhuwah Islamiah dan Ukhuwah Wathaniah. Dalam sambutannya bupati mengatakan bahwa agama diturunkan bukan untuk berperang tetapi untuk menjalankan kebenaran.
- Bupati Manokwari, Dominggus Mandacan, mengeluarkan ultimatum bagi para camat yang tidak menjalankan tugas dan mondar-mandir di Kota Manokwari. Perintah tersebut dituangkan dalam Instruksi Bupati No. 800/322 yang diberlakukan sejak 1 Mei 2001, yang isinya antara lain: para camat dan staf dilarang meninggalkan tempat tugas tanpa alasan yang jelas, kecuali telah mendapat izin dan panggilan dari bupati.

30 April

- Sekretaris Eksekutif Foker (Forum Kerja Sama) LSM Papua, Budi Setyanto, S.H., membantah tuduhan Menteri Pertahanan Mahfud, M.D. bahwa LSM telah menggerakkan separatisme. Tuduhan itu dinilainya tidak sesuai fakta, karena keberadaan LSM memiliki visi dan misi yang jelas, yakni berpihak kepada soal penindasan, ketidakadilan, dan harkat kemanusiaan. Menurutnya, tuduhan semacam itu bukanlah barang baru bagi LSM karena sudah ada sejak jaman Orde Baru. Budi juga mengatakan, ada dua kemungkinan dari munculnya tuduhan semacam itu: datang dari orang yang tidak tahu tentang visi dan misi LSM, atau oleh kelompok tertentu dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian.
- Wakil Ketua DPRD Propinsi Papua, Drs. John Ibo, mengatakan bahwa tim pengkaji RUU Otsus sudah mendirikan sekretariat di Jakarta, untuk melakukan terobosan dan lobi dalam memperjuangkan RUU Otsus yang diajukan Pemda Irja agar diterima dan disahkan oleh DPR RI.

MEI 2001

1 Mei

- Dipicu oleh rencana penurunan bendera Bintang Kejora oleh aparat keamanan, massa melakukan pemalangan di Jl. Gunung Salju dan Jl. Palapa yang dijadikan Posko Induk Satgas Papua di Manokwari. Tindakan tersebut dilanjutkan dengan pencegatan mobil, antara lain mobil ditumpangi Kepala Kantor Sospol dan Sekda Manokwari. Mobil Kakansospol berhasil lolos dari kepungan, sementara mobil Sekda dibakar massa. Polisi kemudian bertindak dengan membubarkan massa dan mengeluarkan tembakan yang mengenai lima warga masyarakat. Bendera Bintang Kejora yang berkibar di kediaman Kepala Suku Arfak, Manokwari, Barnabas Mandacan, juga diturunkan oleh aparat keamanan. Penurunan itu dipimpin Wakapolres Manokwari, Kombes Pol. Drs. Tavib Yulianto, sekitar pukul lima sore. Tindakan tersebut diperotes keras oleh masyarakat dengan cara melemparkan batu dan panah. Tindakan itu kemudian dibalas dengan tembakan peluru karet oleh aparat keamanan.

- Fraksi-fraksi di DPRD Propinsi Papua menyatakan menerima dan menyetujui nota keuangan RAPBD tahun 2001 sebesar Rp 618.591.554 yang disampaikan Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si. RAPBD selanjutnya ditetapkan menjadi Perda tentang APBD tahun 2001.
- Wakil Ketua DPRD Propinsi Papua, Drs. John Ibo, menegaskan jika pemerintah pusat tidak menghendaki Otsus yang telah dibuat oleh rakyat Papua, maka ada tawaran lain dari Papua, yakni referendum. "Hampir 40 tahun pusat menurunkan perintah kepada orang Papua untuk membangun. Tapi pusat sendiri telah menghadirkan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan lain-lain. Sekarang pusat inginkan apa lagi? Jadi kalau dia tidak mau Otonomi Khusus, Referendum akan kita lakukan," katanya.
- Supervisor Elsham, John Rumbiak, menyampaikan laporan mengenai pelanggaran HAM di Papua dalam Sidang Komisi HAM PBB di Genewa.

2 Mei

- Situasi kota Manokwari mulai membaik. Pasar, toko, dan perkantoran telah buka kembali. Angkutan umum juga beroperasi kembali. Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, mengatakan bahwa kerusuhan tersebut merupakan dampak dari upaya aparat keamanan untuk menurunkan bendera Bintang Kejora. Aksi penembakan terpaksa dilakukan karena masyarakat sudah menyerang, tidak hanya dengan batu dan anak panah, tetapi dengan dopis (bom ikan).
- Direktur LP3BH (Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Bantuan Hukum) Manokwari, Yan Chris Warinussy, S.H., menegaskan bahwa dalam kerusuhan Manokwari nyata-nyata terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Brimob, Polres Manokwari, dan masyarakat.
- Di Melbourne, Moderator PDP wilayah Pasifik, Franzalbert Joku, bersama dua rekannya yakni Clemens Runawary dan Wilhelm Zonggonau, menyambut baik keputusan Forum Negara-negara Pasifik untuk mengundang Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) forum negara-negara tersebut pada Agustus 2001. Langkah itu dinilai sebagai upaya positif untuk melakukan dialog internasional untuk penyelesaian masalah Papua.

3 Mei

- Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, menegaskan bahwa cepat atau lambat pihaknya akan membersihkan bendera Bintang Kejora di seluruh Papua karena dinilai sebagai lambang gerakan separatis dan pengibarannya merupakan tindakan melanggar hukum. Tindakan tersebut telah dimulai di Manokwari dan kemudian di Puncak Jaya.
- KapolsekManokwari dan dua anggotanya diperiksaProvost Polres Manokwarisebagai tindak lanjut dari tertangkapnya dua anggota Polres Manokwarioleh Bupati Manokwari, Domings M. Dua anggota Polres itu tertangkap basah ketika melakukan penebangan di hutan lindung
- Delegasi PDP yang dipimpin Tom Beanal mengunjungi negara Nauru untuk berbicara dengan Presiden Nauru, Rene Harris, mengenai masalah Papua. Kunjungan itu merupakan langkah persiapan menyongsong pertemuan Forum Negara Kepulauan Pasifik yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2001.
- Dewan Gereja-Gereja PNG mengeluarkan desakan tegas kepada pemerintah PNG agar mengakui dan menerima pengungsi dari Papua.

4 Mei

- Moderator PDP, Pdt. Herman Awom, mengemukakan bahwa sejalan dengan penelitian sejarah Papua oleh tim independen di Belanda, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membuka diri dalam hal pelurusan sejarah itu. Hal ini dikemukakan karena agenda pelurusan sejarah yang dilakukan oleh PDP belum mendapat tanggapan serius dari pemerintah pusat.
- Tim pemulangan warga transmigran Bonggo mengatakan bahwa pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah LSM yang peduli terhadap warga transmigran, juga dengan Wakil Gubernur Papua mengenai rencana pemulangan warga transmigran. Dikatakannya, secara pribadi wagub menyambut baik langkah ini sebagai upaya kemanusiaan, termasuk menyetujui proposal dana yang diajukan untuk biaya pemulangan. Warga transmigran yang berjumlah 68 KK (280 jiwa) tersebut, untuk sementara bermukim di halaman kantor LBH Papua di Jayapura.

- Tiga anggota PDP, yakni Theys H. Eluay, Don Flassy, dan Pdt. Herman Awom, menemui Gubernur Papua di Gedung Negara. Pertemuan itu merupakan pertemuan silaturahmi, yang di antaranya dimaksudkan untuk menanyakan situasi keamanan, karena PDP tidak menginginkan adanya keributan di Papua. Menanggapi sejumlah upaya penurunan bendera Bintang Kejora seperti yang terjadi di Merauke, Puncak Jaya, Manokwari, Jayapura, dan Yapen-Waropen, Pdt. Herman Awom meminta agar upaya tersebut dilakukan dengan cara persuasif. Pemerintah dengan PDP hendaknya duduk bersama dan mengambil jalan yang tepat sehingga tidak harus ada korban.
- Penurunan bendera Bintang Kejora oleh kepolisian mendapat dukungan dari Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si. Kesepakatan antara Muspida Papua dan PDP pada 9 November 2000, dijadikan alasan oleh kepolisian untuk menurunkan bendera.

7 Mei

- Sekretaris Itwilprop (Inspektorat Wilayah Propinsi) Papua, Marthinus Ayomi, S.H., mengatakan bahwa dalam tahun anggaran 2001 Itwilprop mengajukan anggaran sebesar Rp 2 miliar lebih untuk membiayai kegiatan operasionalnya dalam mengawasi berbagai instansi dan badan-badan serta para bupati dalam mengelola keuangan negara. Dalam tahun anggaran 1998-2000, kerugian negara diperkirakan mencapai milyaran rupiah akibat kasus-kasus KKN yang belum diselesaikan.

8 Mei

- Pelaksana harian Dinas Kesehatan Propinsi Papua, drg. Suyono Angkasa, M.P.H., mengatakan bahwa cara-cara penanggulangan HIV/AIDS di Propinsi Papua belum mampu menghambat perkembangan virus mematikan itu. Hal ini terbukti dari jumlah penderita HIV/AIDS yang terus meningkat. Hingga April 2001 tercatat sebanyak 597 pasien HIV/AIDS, terdiri dari 388 kasus HIV dan 209 kasus AIDS. Dari jumlah tersebut 116 orang di antaranya meninggal dunia.
- Penduduk Desa Makbalim, Kecamatan Salawati, Sorong, hampir selama tiga bulan resah akibat jatah beras operasi khusus yang

harus diterima tidak wajar. Sebelumnya, masyarakat yang tergolong pra-sejahtera setiap bulannya menerima jatah beras 20 kg per kepala keluarga. Tetapi beberapa bulan terakhir jatahnya dikurangi menjadi 10 kg per kepala keluarga dengan harga Rp 1.000/kg. Kemudian dikurangi lagi hingga menjadi 4 kg per KK dengan harga Rp. 1.250/kg. Demikian dinyatakan oleh Saidin, anggota DPRD Kabupaten Sorong pengganti antar waktu dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

10 Mei

- Pra Konferensi Perempuan Papua yang tertunda akhirnya terlaksana setelah ada perundingan antara Ketua PDP, Theys H. Eluay, dengan Kapolda Papua. Sementara Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, menjelaskan bahwa kepolisian berusaha menunda kegiatan tersebut berdasarkan tiga alasan. *Pertama,* polisi mengindikasikan adanya kelompok-kelompok yang menyusup dan memboncengi pra konferensi untuk membentuk gerakan separatis. *Kedua*, menjadi kewajiban polisi untuk mencegah dan mengingatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang cenderung melanggar hukum. *Ketiga*, merupakan kewajiban polisi untuk mencegah setiap upaya kelompok manapun yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Menurut Kapolda, aturan itu termaktub dalam UU No. 9 tahun 1998 pasal 6 tentang kewajiban menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
- Ketua DPRD Kota Jayapura, Drs. T. Bonay, mengatakan bahwa belum ada perhatian khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi terhadap pembangunan di Kotamadya Jayapura. Oleh karena itu, tiga kelompok dari anggota DPRD Kotamadya Jayapura akan berangkat ke luar Papua untuk melakukan studi banding.
- Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jayapura, George Nelson Tabitu, mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura periode 2001-2006. Pihaknya melihat adanya kelemahan dewan, yakni membiarkan munculnya primordialisme suku dan pengkotak-kotakan dalam penjaringan calon. Hal itu bisa dilihat dari aspirasi yang masuk ke DPRD Jayapura.
- Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal Pusat, Sonny

Keraf, meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) agar serius menangani *tailing* yang mematikan sumber daya alam dan ekosistem di kawasan Timika. Pihaknya mengakui data-data mengenai pengaruh dan dampak *tailing* yang disampaikan kalangan LSM mempunyai bukti kuat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, PTFI tidak bisa mempertahankan posisinya bahwa mereka bisa menangani pengaruh dan dampak *tailing,* sebab jelas-jelas telah terbukti aneka ragam ekosistem hancur, kayu, dan hutan sagu kering. Pemerintah memberikan dua alternatif kepada PTFI, yaitu: *Pertama*, *tailing* ditampung dulu di pabrik pengolahan biji lalu disalurkan melalui pipa dan ditampung menjadi bahan baku semen seperti telah diteliti oleh ITB. *Kedua*, perusahaan bisa membuang limbah ke sungai atau laut asalkan tidak mengandung bahan kimia yang mematikan *mollusca* air.

❖ Konferensi para Uskup Katolik PNG dan Kepulauan Solomon menyambut baik segala bantuan yang diberikan oleh pemimpin Gereja Anglikan dan Lutheran di PNG untuk membantu sekitar 500 orang pengungsi Papua di Vanimo-PNG yang tidak memiliki kejelasan status dan hidup dalam ketidakpastian.

11 Mei

❖ Pra Konferensi Perempuan Papua I di Jayapura ditutup oleh Ibu Cory Alhamid (isteri Sekjen PDP Thaha Alhamid) dengan menghasilkan beberapa agenda dan program kerja. Di antaranya memuat hasil pandangan umum para peserta dari kabupaten-kabupaten, khususnya mengenai pelanggaran HAM. Untuk konferensi mendatang, akan memperhatikan dua agenda, yakni harga diri dan pelanggaran HAM. Juga akan disiapkan komisi-komisi kerja untuk membahas masalah kekerasan yang dialami dalam keluarga, atau membahas pandangan agama mengenai pelanggaran HAM di Papua.

❖ Ketua Komisi F DPRD Propinsi Papua, Pdt. Augustina Iwanggin Tanamal, menyatakan kepada kalangan LSM bahwa sumber daya adat milik rakyat seharusnya dilindungi dari tangan-tangan serakah yang terus memburu kekayaan di Papua. Selama dua tahun sejak terbentuknya komisi F, pihaknya banyak mendapatkan laporan pelanggaran HAM dan kerusakan

lingkungan hidup yang dilakukan aparat keamanan dan sejumlah pengusaha HPH.

- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta menggugat PT Freeport Indonesia (PTFI) ke PN Jakarta Selatan atas dua persoalan: *Pertama*, PTFI tidak menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup ditimbulkan operasi pertambangannya. *Kedua*, PTFI dianggap dengan sengaja menutup-nutupi serta memberikan informasi yang tidak benar tentang longsornya tumpukan batuan di Danau Wanagong, Timika. Oleh karena itu Walhi menilai PTFI telah melanggar pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Ketua Komisi F DPRD Propinsi Papua, Pdt. Augustina Iwanggin Tanamal, mengemukakan bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, Ir. M.L. Rumadas, ditangkap dan ditahan Polda Metro Jaya berkaitan dengan ribuan kubik kayu milik masyarakat Sorong yang diselundupkan ke luar Papua.
- Ketua Ikatan Intelektual Jayawijaya Barat Tiom, Nichel Yigibalon, menyatakan sangat menyesal dengan proses penerimaan CPNS tahun 2000 untuk Kabupaten Jayawijaya. "Putera asli kelahiran Jayawijaya tak satupun diterima. Pemda Tingkat I Papua telah melumpuhkan pemberdayaan manusia di Kabupaten Jayawijaya," katanya. Oleh karena itu, pihaknya menolak upaya pemekaran Kabupaten Jayawijaya menjadi tiga kabupaten karena sumber daya manusianya belum siap. Selain itu, sarjana-sarjana senior belum dimasukkan ke dalam jabatan birokrat.

12 Mei

- Untuk menghadapi digelarnya persidangan pertama kasus tuduhan makar yang melibatkan Theys H. Eluay, dkk. di PN Jayapura, Presidium Dewan Papua (PDP) mengeluarkan seruan. Inti seruan itu menyatakan, karena sidang terbuka untuk umum, maka seluruh anggota masyarakat berhak hadir dan menyaksikan jalannya persidangan, tetapi sekaligus berkewajiban menjaga dan ikut menciptakan ketenangan, ketertiban, dan suasana yang aman. Pihak PDP menyadari bahwa proses pengadilan yang jujur dan adil, akan menjadi pendidikan hukum yang terbuka dan gratis bagi rakyat, karena di situ rakyat berhak menilai apakah proses

dan keputusan pengadilan sudah sesuai dengan rasa keadilan dan jeritan hati nurani mereka atau belum.

13 Mei

- Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, mengatakan bahwa Polri tidak akan mentolerir atau bersikap lunak terhadap gerakan-gerakan separatis.
- Terjadi bentrokan antara anggota Yonif 753/Paniai dengan anggota Polres Nabire di Nabire.

14 Mei

- Sidang perdana kasus dugaan makar yang melibatkan Theys H. Eluay, dkk. dilaksanakan di PN Jayapura. Sidang berjalan dengan aman dan tertib. Theys H. Eluay dituduh dengan dakwaan primer, yakni rangkaian perbuatan yang dilakukan sejak 12 November 1999 yang mencetuskan Deklarasi 12 November 1999, kegiatan pengibaran bendera Bintang Kejora 1 Desember 1999, kegiatan Mubes Papua 23-26 Februari 2000 yang mencetuskan Komunike Politik Papua, serta Kongres Rakyat Papua II pada 29 Mei - 4 Juni 2000 dalam upaya memisahkan Propinsi Papua menjadi Negara Papua Barat yang berdiri sendiri terpisah dari NKRI.
- Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing, S.H., menjelaskan bahwa untuk pengamanan sidang perdana terhadap tokoh PDP, Polres mengerahkan sekitar 500 orang personil.
- Sekretaris Pusat Masyarakat Ekonomi Kerakyatan Papua, John Kabey, mengecam keras pernyataan Kepala Bapedalda Papua, Ir. H.E. Mackbon, yang mengatakan bahwa Kopermas dikhawatirkan menjadi biang rusaknya hutan di wilayah Irja. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan isu murahan yang tidak disertai fakta dan data.
- Meskipun mendapat subsidi sebesar Rp 18 miliar per tahun dari Pemda Propinsi Papua, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura tetap kekurangan dana operasional. Menurut Direktur RSUD Dok II Jayapura, dr. Clemens Manyakori, pihaknya membutuhkan biaya sekitar Rp 30 - 40 miliar per tahun agar operasionalisasi RSUD berjalan dengan baik.
- TNI-Angkatan Udara merencanakan akan mendirikan pangkalan Angkatan Udara terbesar di Biak.

15 Mei

- Meski diwarnai perdebatan, akhirnya Komnas HAM di Jakarta memutuskan untuk mengadopsi dan merekomendasikan keputusan dan kesimpulan KPP HAM Papua mengenai peristiwa Abepura 7 Desember 2000, bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat yang digolongkan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Hasil tersebut akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti dengan proses penyidikan. Dalam laporannya, KPP HAM merekomendasikan 25 orang sebagai tersangka dalam tiga tingkatan: pelaku langsung, penanggung jawab operasi lapangan, dan penanggung jawab komando atau pemberi perintah.
- Masyarakat PIR (Perkebunan Inti Rakyat) III Timika yang diwakili oleh Benny Tsenawatme, mantan direktur Lemasa (Lembaga Masyarakat Adat), akan menggugat PT Freeport Indonesia (PTFI) senilai Rp 17 milyar dengan alasan bahwa PTFI telah memanfaatkan lahan garapan di PIR III seluas 203 hektar untuk kepentingan penambangan, yang merupakan hak masyarakat.
- Setelah melalui proses pemilihan yang alot di kantor DPRD Kabupaten Paniai, Enarotali, pasangan Januarius Doo dan Naftali Yogi akhirnya terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Paniai periode 2001-2005. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paniai, Yan Tebay, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa ada kemungkinan masyarakat akan menolak bupati terpilih karena selama bertugas banyak melakukan penyimpangan.
- Sekretaris Eksekutif Forum Kerja Sama (Foker) LSM Papua, Budi Setyanto, S.H., menanggapi kasus persidangan tokoh-tokoh PDP. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh rakyat Papua melalui elit Papua itu masih dalam konteks wacana dan juga ada unsur persetujuan dari Presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid). Oleh karena itu, jika hal tersebut dianggap makar, berarti cap yang sama juga diberikan pada pemerintah karena pemerintah telah memberi ruang yang pada akhirnya menciptakan unsur makar seperti yang dituduhkan.
- Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Ermaya Suriadinata, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian, Lemhanas menganggap tidak perlu ada UU Khusus Nangroe Aceh karena yang penting adalah bagaimana menyejahterakan

masyarakat Aceh. "Kalau ada UU Khusus Nangroe Aceh, maka daerah lain akan menuntut juga," katanya.

❖ Bupati Merauke, John Gluba Gebze, mengemukakan bahwa pihaknya akan menggugat perusahaan HPH yang tidak membayar pajak hingga ke meja hijau. Jumlah tunggakan yang harus dibayar perusahaan HPH masing-masing:

- PT Sagindo Lestari tahun 1995-2000 sebesar Rp 767.894.000.
- PT Prabu Alaska tahun 1999-2000 sebesar Rp 1.729.000.000.
- PT Artika Optima Inti Satu tahun 1998-2000 sebesar Rp 4.752.000.000.
- PT Artika Optima Inti Empat tahun 1998-2000 sebesar Rp 1.171.000.000.
- PT Digul Daya Sakti Satu (sudah tutup) tahun 1998-2000 Rp 1.703.000.000.
- PT Digul Daya Sakti Dua tahun 1999-2000 sebesar Rp 344.000.000.
- PT Kayu Pusaka Bumi Makmur tahun 1998-2000 Rp 1.501.000.000.
- PT Rimba Megah Lestari tahun 1997-2000 sebesar Rp 2.341.000.000.

16 Mei

❖ Kapolres Jayapura, AKBP Daud Sihombing, S.H., menyatakan bahwa dalam kasus Abepura 7 Desember 2000, pihak polisi sudah berada dalam posisi yang benar dan rekomendasi KPP HAM Papua perlu dibuktikan serta dijawab secara hukum.

17 Mei

❖ Koordinator *Indonesian Human Rights Network* (LSM masalah Indonesia yang berbasis di Amerika Serikat), Kurt Biddle, mendesak pemerintah AS untuk melakukan intervensi terhadap masalah HAM di Indonesia, termasuk di Papua. Menurutnya, Kongres telah meminta pemerintah AS untuk menekan pemerintah RI agar mengijinkan LSM Internasional yang peduli HAM dan lingkungan mendapat akses untuk masuk ke wilayah-wilayah seperti Aceh, Maluku, Kalimantan, dan Papua.

18 Mei

- Bupati Sorong, John Piet Wanane, mengatakan bahwa pencopotan Ir. M.L. Rumadas dari jabatan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, secara tidak langsung menunjukkan bahwa yang bersangkutan bersalah. Namun yang dapat menentukan Rumadas bersalah atau tidak hanyalah hakim. Rumadas sedang menjalani proses hukum karena diduga terlibat dalam kasus penyelundupan kayu log di Sorong.

20 Mei

- Kapolda Papua, Irjen. Pol. Made Mangku Pastika, menilai bahwa insiden Abepura 7 Desember 2000 tidak melanggar HAM karena memenuhi tiga ukuran. Yakni *pertama*, tindakan polisi didasarkan atas perintah yang jelas. *Kedua*, tujuannya jelas yakni berusaha menangkap para pelaku penyerangan Polsek Abepura yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan pembakaran ruko. *Ketiga*, tindakan polisi itu untuk memenuhi prosedur pencegahan agar konflik tidak meluas.
- PDP melalui sekjennya, Thaha Alhamid, meminta agar rakyat Papua tidak melakukan tindakan yang dapat berakibat diberlakukannya darurat sipil di Papua. Ia mengemukakan hal itu berkaitan dengan konflik elit politik di Jakarta. Dikatakannya, sekarang ini ada pihak tertentu yang berusaha untuk menciptakan situasi tidak aman di Papua.
- Bupati Merauke, Johanes Gluba Gebze, menganggap bahwa kabupaten lebih mampu mengurus daerah dibandingkan dengan propinsi, karena daerah akan dapat memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu bila Otonomi Khusus tetap dipusatkan di propinsi, maka Kabupaten Merauke akan memisahkan diri dari Propinsi Papua.
- Lima pejuang Papua asal Fak-fak yang terlibat dalam pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2000, divonis 18 bulan penjara oleh PN Fak-fak.

21 Mei

- Kuasa hukum Theys H. Eluay, dkk. membacakan eksepsinya dalam sidang lanjutan tokoh-tokoh PDP. Pada intinya eksepsi

tersebut mengatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap salah satu tokoh PDP, Drs. Don Al Flassy, M.A., dinilai kuasa hukum PDP harus batal demi hukum. Alasannya, surat dakwaan itu selain tidak cermat dan tidak jelas juga dinilai masih kabur. Eksepsi yang diberi judul "Mengadili Sebuah Obsesi" itu menguraikan fakta-fakta situasi demokrasi di Papua. *Pertama*, menjadi ironi bahwa dalam suasana dan era reformasi masih terjadi pengadilan dengan tuduhan makar. *Kedua*, Mubes dan Kongres Papua tidak pernah dinyatakan dalam suatu keputusan atau aturan kegiatan yang terlarang, bahkan justru mendapat restu dari pemerintah Indonesia. *Ketiga*, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinilai tidak lengkap dan sepihak karena menyembunyikan fakta mengenai kejadian pengibaran bendera Bintang Kejora yang telah diketahui oleh seluruh rakyat dan aparat keamanan.

- Sekretaris Irwilprop Papua, Martinus Ayomi, S.H., menyatakan bahwa sekitar 70% proyek pembangunan di Papua yang dibiayai dana APBD dinilai gagal. Alasannya, *pertama,* perencanaan proyek tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat; *Kedua,* tidak ada petunjuk teknis; Dan *ketiga,* kurang pengawasan sehingga dana sudah habis sebelum proyek selesai.

22 Mei

- Mantan Kadinkes Propinsi Papua, dr. A.J. Dimpudus yang didakwa melakukan korupsi sebesar Rp 140 juta, divonis bebas murni oleh PN Jayapura karena JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya secara sah dan meyakinkan.
- Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika, menjelaskan bahwa Polda Papua tidak lagi mendatangkan pasukan Brimob dari luar untuk di-BKO-kan di Propinsi Papua.
- Enni Dimor, Kepala Suku Pulau Masi-Masi di Kecamatan Pantai Timur, Kabupaten Jayapura, menyatakan bahwa masyarakatnya menuntut PT Sumalindo Lestari Jaya III sebesar Rp 2,5 miliar karena perusahaan tersebut telah menjadikan Pulau Masi-Masi sebagai pelabuhan singgah tanpa persetujuan masyarakat.

24 Mei

- Kadispen Polda Papua, Komisaris Pol. Zulkifli, A.R., mengakui

bahwa pihaknya masih banyak menemui kendala dalam mengatasi penyelundupan kayu. Soalnya, proses penyelundupan selalu melalui laut, sedangkan sarana dan prasarana Polda di laut sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk melakukan operasi setiap hari. Mengenai penangkapan terhadap Kadinas Kehutanan Kabupaten Sorong, Ir. M.L. Rumadas, oleh Mabes Polri, pihaknya menilai hal tersebut wajar-wajar saja karena Mabes punya kewenangan di seluruh Indonesia.

25 Mei

- Menanggapi kasus dugaan *money politics* dalam pemilihan Bupati Paniai, Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, mengatakan bahwa kasus tersebut akan ditangani oleh pihaknya.
- Anton Raharusun, S.H., salah seorang praktisi hukum di Papua, menjelaskan bahwa secara hukum proses pemilihan Bupati Paniai dinilai sah karena sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Jika ada indikasi penyuapan, maka pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini harus diperiksa oleh yang berwajib.
- Pertentangan antara pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Sorong berdampak buruk terhadap kinerja dinas-dinas yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Sorong. Dampak buruk itu misalnya dapat dilihat dari belum diajukannya RAPBD 2001 oleh pihak eksekutif ke DPRD Kabupaten Sorong.
- Kepala Biro Pemerintahan Setda Propinsi Papua, Drs. E. Fonataba, mengatakan bahwa usul pemekaran 16 wilayah tingkat II (Kabupaten/Kota) di Propinsi Papua masih harus diteliti pemerintah pusat agar jangan sampai menimbulkan masalah baru. Pemekaran itu seharusnya dapat memberi kemakmuran bagi masyarakat. Wilayah-wilayah yang diusulkan untuk dimekarkan adalah Sarmi, Digul Atas (Tanah Merah), Digul Bawah, Kaimana, Kerom, Raja Ampat, Bintuni, Sorong Selatan, Asmat, Waropen, Pegunungan Bintang, Tolikora, Yahukiumo, Wasior, Kota Manokwari, dan Kota Merauke.

28 Mei

- Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si., mengatakan, "Sekarang, masalah putera asli yang harus ditradisikan menjadi pimpinan di daerahnya sudah termuat dalam RUU Otonomi

Khusus, dalam ketentuan mengembalikan hak-hak dasar orang Papua, yakni memberikan hak kepemimpinan daerah kepada putera asli."

29 Mei

- Menanggapi perintah Kapolri untuk memberlakukan siaga I di seluruh wilayah Indonesia, Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, mengatakan bahwa situasi dan kondisi yang tengah terjadi di Papua belum dapat dijadikan alasan bagi pihak kepolisian untuk memberlakukan status Siaga I, karena situasi kamtibmas dan perkembangan situasi lainnya di Papua dinilai sangat kondusif dan aman.
- Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si., menemui Presiden Abdurrahman Wahid di kediaman presiden untuk menyampaikan pernyataan dari seluruh komponen masyarakat Papua yang diwakili oleh 20 tokoh agama, tokoh masyarakat, intelektual, tokoh LSM, dan tokoh adat, berkaitan dengan situasi politik akhir-akhir ini di Jakarta. Dalam pernyataan yang juga disampaikan kepada Wapres Megawati dan Ketua DPR RI Akbar Tandjung itu ditegaskan bahwa rakyat Papua merasa prihatin atas konflik elit yang berlangsung dan menjalar ke propinsi-propinsi tertentu dan mengorbankan masyarakat. Konflik para elit tersebut sama sekali tidak memberi manfaat kepada rakyat di Tanah Papua. Jika berkelanjutan, dikhawatirkan penderitaan rakyat akan semakin berkepanjangan.
- Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, maupun Polres Sorong belum mampu menangkap terdakwa mantan Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sorong, Benny Benyamin, untuk dihadirkan dalam persidangan atas tuduhan tindak pidana korupsi bernilai miliaran rupiah. Tersangka dinyatakan kabur dan masuk dalam daftar pencarian orang pada pertengahan tahun 2000.

30 Mei

- Ketua PDP, Theys H. Eluay, mengancam akan membentuk pemerintahan transisi di Papua jika Presiden Abdurrahman Wahid digulingkan dalam Sidang Istimewa MPR.
- Ketua Fraksi PDIP DPRD Propinsi Papua, Drs. Ishak Tabuni,

memberikan tanggapan terhadap permintaan sejumlah bupati agar propinsi tidak mencampuri otoritas daerah sesuai UU Otonomi Daerah. "Pernyataan bahwa propinsi tidak perlu mengatur daerah seperti dilontarkan oleh beberapa bupati, sangat keliru. Karena selama ini yang kita harapkan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat. Kalau memang daerah menginginkan demikian, maka lama kelamaan DAU akan berkurang. Jika daerah hanya mengandalkan pendapatan asli daerah, bagaimana dengan daerah yang miskin. Daerah seperti Timika, Sorong, dan Manokwari mungkin bisa. Tetapi bagaimana dengan Puncak Jaya atau Paniai?" katanya.

- Sekretaris Komisi D DPRD Propinsi Papua, Drs. Laurens Kulalein, menyatakan bahwa persediaan bahan bakar Avigas di Papua tinggal 350 drum. Persediaan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yayasan-yayasan penerbangan sosial seperti MAF yang membutuhkan 270 drum/bulan, AMA 175 drum/bulan, Advent 22 drum/bulan, SIL 105 drum/bulan, dan Tariku 50 drum/bulan. Oleh karena itu pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Deperindag, Wagub, wakil dari penerbangan swasta, dan Pertamina.
- Demianus Gobay, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Paniai, menuntut agar ditunjuk caretaker bupati untuk Kabupaten Paniai berkaitan dengan adanya dugaan *money politics* dalam pemilihan Bupati Paniai beberapa waktu lalu. Ia bersama 175 orang yang terdiri dari masyarakat biasa, menegaskan tidak akan kembali ke Paniai jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.
- Cina membantah jika dikatakan mendukung kemerdekaan Papua.

31 Mei

- Menyikapi pernyataan Theys Hiyo Eluay yang berniat membentuk pemerintahan transisi jika Persiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilengserkan dari kursi kepresidenan RI, Socrates Sofyan Yoman (tokoh muda dari Jayawijaya) mengatakan bahwa pernyatan ketua PDP itu sangat tidak proporsional dalam konteks perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*). "Kemerdekaan rakyat Papua tidak ada hubungannya dengan kapasitas Gus Dur sebagai presiden atau bukan," katanya.

- Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika, menilai pernyataan Theys H. Eluay tidak rasional, sehingga tidak perlu dipercaya oleh masyarakat.
- Mantan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi Papua, Daryono S.K.M., M.Kes., yang menjadi terdakwa kasus korupsi divonis pidana 10 bulan penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 14.145.337 dan biaya perkara sebesar Rp 5.000.
- Menanggapi adanya 113 Sekolah Dasar (SD) di Merauke yang dipastikan terancam tidak akan mengikuti Ebtanas, Kanwil Depdiknas Papua, Jerry Haurissa, mengaku belum tahu karena belum ada laporan. Tetapi mengenai akar persoalannya, Haurissa mengatakan bahwa kemungkinan besar terjadi akibat kurangnya perhatian pemerintah atas kesejahteraan para guru.

JUNI 2001

1 Juni

- Transmigran Eksodus Armopa VIII, Kecamatan Bonggo, Kabupaten Jayapura, menggelar pertemuan di aula Keuskupan Jayapura dengan menghadirkan pihak keuskupan dan para wartawan media cetak lokal dan nasional. Sukimin, Koordinator 26 KK transmigran umum, menuntut LBH Papua sebagai kuasa hukum mereka untuk menindaklanjuti masalah struktural tersebut ke pengadilan dan kepada Kanwil Deptrans Papua agar memulangkan mereka ke daerah asal masing-masing, yakni ke Jawa dan NTT.
- Ibu-ibu Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Jayawijaya berunjuk rasa di Wamena. Mereka memprotes keberadaan WTS (Wanita Tuna Susila) di Wamena karena merusak nama baik daerah.

4 Juni

- Di Hotel Matoa Jayapura, Theys Hiyo Eluay, mengutarakan niatnya yang akan mundur dari Ketua PDP dan Pemimpin Besar Bangsa Papua. Niatnya itu akan dibicarakan pada 11 Juni 2001. Menanggapi hal itu, Tom Beanal di Timika menyatakan bahwa

wajar kalau Theys menyampaikan hal itu. Tetapi pernyataan itu selalu dapat berubah-ubah setiap waktu sesuai figur Theys yang sangat kontroversial.

5 Juni

- Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Federasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Propinsi Papua, L.C. Hamadi, menilai UU Ketenagakerjaan masih belum sempurna sehingga pihak pekerja atau buruh selalu ditekan dan dikalahkan oleh para pengusaha dan majikan, terutama bila para pekerja atau buruh mempertanyakan atau menuntut hak-haknya.
- Kepala Dinas Kesehatan Nabire, dr. Tjondro Indarto, dicopot dari jabatannya oleh Bupati Nabire dan sekaligus melantik Otniel Aronggear, S.K.M. sebagai Kadinkes Nabire yang baru. Pencopotan dan pelantikan itu dinilai Kadinkes Propinsi Papua, drg. Soejono A., M.P.H. sebagai hal yang tidak sah karena dilakukan bupati tanpa berkoordinasi dengan pihaknya, sekalipun itu adalah wewenang bupati.
- Hak ulayat atas tanah adat di Gunung Meja, Manokwari, sebagaimana dituntut oleh pemilik tanah adat kepada PDAM Manokwari, diselesaikan melalui sebuah kesepakatan bersama. Bupati Manokwari Drs. Dominggus Mandacan, didampingi Ketua DPRD Daud Mandowen dan Direktur Utama PDAM Artin Sirait, menyetujui pembayaran ganti rugi sebesar Rp 4,6 Miliar.

7 Juni

- Dua orang warga negara Belgia, Johan Elia Theo van Eynde (47) dan Phillipe R.D. Simon, hilang di sekitar Desa Paluga, Kecamatan Illaga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Kedua orang itu berada di Puncak Jaya dalam rangka berwisata. Mereka dicurigai oleh masyarakat karena membawa kamera untuk mengambil gambar di Ilaga dan sekitarnya.
- Direktur Elsham Papua, Yohanis G. Bonay, dalam konferensi persnya di gedung Pusat Pembinaan dan Pengembangan Wanita (P3W) Abepura menyatakan bahwa pihaknya mencium adanya pengiriman pasukan TNI dan Polri secara besar-besaran ke Papua. Kapendam XVII/Trikora, Letkol Siregar, membenarkan hal itu dan mengatakan bahwa pengiriman pasukan tersebut

dimaksudkan untuk mengawal wilayah perbatasan RI-PNG.

8 Juni

- Tiga organisasi kewartawanan di Papua, yakni PWI Papua, PWI Reformasi Papua, dan AJI Biro Papua mengecam tindakan oknum anggota Ditserse Polda Papua terhadap wartawan *Timika Pos*. Tindakan itu dinilai sebagai sikap arogansi aparat kepolisian negara.
- Tiga anggota TPN/OPM yang berinisial IT, SB dan KI membantah dakwaan ikut menyerang Pos Kopassus Betaf. Bantahan itu disampaikan melalui tim kuasa hukumnya yang diketuai Zainal Sukri, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Independent di PN Jayapura.
- PT Sumalindo Lestari Jaya bersepakat dengan Masyarakat Pulau Masi-Masi, Kecamatan Pantai Timur, Jayapura, untuk menyelesaikan masalah hak ulayat tanah adat yang digunakan untuk pelabuhan kapal milik perusahaan tersebut. Kesepakatan diambil melalui sebuah pertemuan yang difasilitasi oleh Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura. Awalnya masyarakat menuntut ganti rugi sebesar Rp 2,150 miliar, tetapi sesuai hasil kesepakatan masyarakat menyetujui pembayaran sebesar Rp. 11.500.000.

10 Juni

- Aksi mogok kerja karyawan PT Bina Balantak Utama (BBU) Sarmi, Jayapura, selama empat hari (1 - 4 Mei 2001) ternyata tidak mendapat tanggapan yang memuaskan dari pihak perusahaan. Mereka menuntut perbaikan sistem pembayaran upah yang berada di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR) dan kontrak kerja.
- Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, membantah pernyataan Elsham tentang adanya pengiriman pasukan non-organik secara besar-besaran (15.000 - 20.000 personil) ke Papua. Menurutnya, pernyataan Elsham tak berdasar dan mengada-ada, karena saat ini pihaknya tidak lagi menambah jumlah pasukan di Papua, tetapi justru semakin mengurangi jumlah pasukan dengan memulangkan pasukan Brimob yang di-BKO-kan di Irja.
- Menurut Yustinus Tabuni, salah seorang tokoh Pemuda Wamena,

keputusan DPRD Kabupaten Jayawijaya untuk tidak mengusir WTS dari Wamena dinilai telah melegalkan keberadaan pekerja sex itu. DPRD dinilai keliru dan tidak menanggapi secara serius masalah yang disampaikan melalui aksi ibu-ibu GOW yang menolak WTS beberapa waktu lalu.

❖ Tokoh Masyarakat Desa Napisndi Biak, Roberth Kafiar, mengatakan bahwa ada tiga Puskesmas Pembantu (Pustu) di kecamatan Supiori Utara yang sejak Januari hingga Juni 2001 tidak aktif lagi melayani masyarakat. Pustu ditutup karena ditinggalkan petugas kesehatan tanpa alasan yang jelas.

11 Juni

❖ Ketua Umum Forum Komunikasi dan Perhimpunan Ahli Kesehatan Papua, Drs. Wempi Aronggear, M.Sc., mempertanyakan dibebaskannya mantan Kadinkes Papua, dr. A.J. Dimpudus dari segala dakwaan oleh pihak pengadilan. Menurut Wempi, sebenarnya yang harus dibebaskan adalah bawahannya, yakni Daryono S. K. M, M. Kes., bukan A.J. Dimpudus. Wempi menyetujui langkah yang diambil pihak kejaksaan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

❖ Gubernur Irja, Drs.J.P. Solossa, M.Si., menilai banyak pemegang dan pengusaha HPH (Hak Penguasaan Hutan) "mbalelo". Gubernur mengakui, meskipun selama ini sektor HPH merupakan salah satu pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi hanya sedikit masyarakat yang menikmati hasil dari usaha tersebut.

❖ Sekitar 200 warga masyarakat dan mahasiswa Puncak Jaya yang tinggal di Jayapura mendatangi kantor Gubernur Papua. Mereka meminta gubernur agar membatalkan terpilihnya Eliezer Renmaur sebagai Bupati Puncak Jaya periode 2001-2005. Menurut mereka, Bupati Puncak Jaya harus dipilih dari putera daerah. Menanggapi tuntutan itu, Gubernur Papua Drs. J.P. Solossa, M.Si., mengatakan bahwa pada dasarnya ia tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Puncak Jaya. Gubernur meminta supaya DPRD Kabupaten Puncak Jaya bertanggung jawab terhadap munculnya konflik emosional di antara masyarakat.

12 Juni

- Tudingan "mbalelo" dari Gubernur Papua terhadap sejumlah pengusaha dan pemegang HPH, dinilai Ketua Masyarakat Perhutani Indonesia (MPI), Bosco Fernandez, benar adanya. Bosco mengaku pihaknya tidak bisa membantah dan tidak berkeberatan atas tudingan gubernur. Namun menurutnya tidak semua pengusaha dan pemegang HPH "mbalelo".
- Dua warga negara Belgia, Johan Elia Theo van den Eynde dan Philippe R.D. Simon, yang dikabarkan hilang di Ilaga, Puncak Jaya, diisukan disandera sekelompok orang tak dikenal. Penyandera diduga kecewa dengan sikap polisi yang telah menurunkan bendera Bintang Kejora di Ilaga.

13 Juni

- Lima orang anggota Brimob dan seorang warga sipil diduga tewas diserang pasukan tidak dikenal di Desa Wondiboi, Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari, Kelima anggota Brimob itu adalah bagian dari pasukan Brimob di Kotaraja, Jayapura, yang bertugas di Pos Pam CV Vatika Papuana Perkasa (VPP). Sedangkan korban dari warga sipil yang tewas, yakni Briyadi Umasugi, adalah karyawan Kopermas Imanuel.
- Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika membenarkan adanya penyerangan terhadap pos Brimob di Wasior. Menurut Kapolda, penyerangan yang dilakukan oleh kelompok tak dikenal itu merupakan tindakan yang sudah membahayakan, sehingga harus diusut sampai tuntas.
- Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, S.H., mengatakan bahwa kejadian yang menewaskan lima anggota Brimob dan seorang warga sipil di Wasior itu awalnya didahului aksi kontak senjata antara pasukan Brimob Pam CV VPP dengan sekelompok oknum bersenjata tak dikenal.

14 Juni

- Kelompok bersenjata tidak dikenal yang menyerang Pos Brimob di Wasior, Manokwari, disebut aparat kepolisian sebagai kelompok separatis bersenjata atau GPK/OPM. Kapolres

Manokwari, AKBP Drs. Bambang Budi Santoso, mengakui bahwa dalam penyerangan itu ada senjata milik Brimob yang hilang dan diduga dirampas oleh kelompok GPK. Kapolres Manokwari akan berusaha merebut kembali senjata api dari kelompok tak dikenal itu dalam keadaan hidup atau mati. Oleh karena itu pihaknya telah memblokir perbatasan Nabire dan Fakfak dan berkoordinasi dengan aparat Polres di kedua daerah itu, khususnya di Kaimana, untuk mempersempit ruang gerak GPK yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika, mengatakan bahwa pihaknya akan menambah pasukan ke Manokwari yang didatangkan dari Sorong, Biak, dan Jayapura. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengampuni para pelaku peristiwa tersebut.

- Melalui siaran pers, Elsham Papua dan Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBI) menyesalkan dan mengutuk kelompok tidak dikenal yang melakukan penyerangan di Wasior.

15 Juni

- Melalui siaran pers yang dikeluarkan di Jayapura, para pimpinan agama di tanah Papua menyikapi situasi di Papua yang semakin diwarnai oleh kekerasan seperti yang terjadi di Wasior. Mereka menyampaikan seruan kemanusiaan sebagai rasa keprihatinan terhadap keadaan di Tanah Papua. Para pimpinan agama yang turut menandatangani siaran pers itu antara lain: Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt. Herman Saud, M.Th., Uskup Jayapura Mgr. Leo Laba Ladjar ofm, Ketua Sinode GKII Pdt. John Gobay, S.Th., Ketua Sinode GIDI, Pdt. Mestian Towolom, S.Th., dan Sekum Persekutuan Gereja Baptis Papua, Pdt. Sofyan Yoman, serta Ketua MUI Papua, Drs. H. Zubeir D. Hussein.

16 Juni

- Tiga Kompi Batalyon TNI Kostrad 725 Kendari tiba di Pelabuhan Pangkalan Utama (Lanut) TNI Angkatan Laut Porasko APO Jayapura dengan KRI Teluk Manado 573. Menurut Kapendam XVII/Trikora, Letkol R. Siregar, pasukan Batalyon 725 yang terdiri dari ratusan personil ini adalah pasukan non-organik yang dikirim ke Jayapura untuk menggantikan Batalyon 713 yang sudah bertugas selama 6 bulan (purnawaktu) di Papua. Siregar

menegaskan bahwa kedatangan Batalyon 725 ini bukan penambahan pasukan, tetapi hanya rotasi biasa.

18 Juni

- Wakil Ketua PDP, Tom Beanal, mendesak dan meminta Presiden Abdurrahman Wahid, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Baharuddin Lopa untuk segera menggelar sidang pelanggaran HAM berat kasus Abepura sebelum Sidang Istimewa (SI) MPR dilaksanakan. Jika tidak, PDP akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional. Mengenai peristiwa di Wasior, Tom mengatakan bahwa pada prinsipnya PDP tidak menghendaki penggunaan cara-cara kekerasan, baik yang dilakukan oleh aparat maupun rakyat sipil bersenjata. Sedangkan mengenai upaya penetapan RUU Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua oleh DPR-RI yang masih diperten-tangkan, Tom menghimbau para cendekiawan dan birokrat Papua agar kembali ke Jayapura dan bersama-sama dengan DPRD Papua dan rakyat mempersiapkan referendum.
- Aparat Polres Manokwari menangkap NW (52) dan YW (40), yang diduga kuat sebagai pelaku penyerangan pos Brimob di Wasior, Manokwari. Kedua orang ini kemudian ditahan untuk menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolres Manokwari.
- Jaksa Agung RI, Baharuddin Lopa, mengumumkan susunan ke-anggotaan tim penyidik dari Kejaksaan Agung untuk kasus Abepura, 7 Desember 2000, yang selanjutnya akan menin-daklanjuti hasil penemuan yang dilaporkan oleh KPP HAM Papua. Tim tersebut dipimpin oleh H.M.A. Rachman.

19 Juni

- Para terdakwa kasus Wamena Berdarah 6 Oktober 2000, memperoleh penangguhan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Jayapura.
- Gereja-Gereja di Manokwari memperkirakan keberadaan sekitar 300-600 personil pasukan dari TNI dan Polri di Manokwari, berkaitan dengan munculnya kasus Wasior.
- Komandan Sabhara Polres Manokwari, Komisaris Polisi Seminar Sebayang, mengancam akan menembak Yan Warinusi, S.H., aktivis HAM dan pengacara hukum Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH)

Manokwari. Intimidasi itu muncul berkaitan dengan kasus Wasior yang sedang menjadi perhatian dari LP3BH, juga karena wilayah Wasior masih dalam status isolasi oleh aparat kepolisian setempat.

22 Juni

- Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay, didampingi Moderator PDP, Pdt. Herman Awom S.Th., serta anggota PDP Agus Alue Alua, Marthinus Werimon, Yorris Raweyai, dan Ismail Rajabauw, bertemu dengan Presiden Abdurrahman Wahid di Jl. Irian No. 7 Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu disampaikan dua permintaan PDP yang dibuat dalam bentuk surat. *Pertama*, meminta presiden supaya segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di Abepura yang berkasnya sudah berada di tangan Kejaksaan Agung. *Kedua*, pernyataan sikap dan kebijakan politik PDP yang meminta referendum.
- Sekjen PDP, Thaha Alhamid, menyatakan bahwa ide awal sikap politik PDP yang meminta referendum kepada Presiden Abdurrahman Wahid dilatarbekangi oleh pernyataan DPRD Propinsi Irja yang meminta referendum bagi Papua jika pemerintah pusat menolak RUU Otsus. Thaha menegaskan bahwa PDP hanya menindaklanjuti pernyataan yang telah dikeluarkan oleh DPRD. Namun Thaha mengakui jika referendum hanyalah sebuah kendaraan untuk mencapai kemerdekaan sebagai tujuan utama.
- Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Advokad Indonesia (Ikadin) Cabang Papua, Anthon Raharusun, S.H., menilai tindakan intimidasi dari oknum kepolisian di Manokwari terhadap Yan Warinusi, S.H., aktivis HAM dan pengacara dari LP3BH Manokwari, sangat melecehkan profesi pengacara.

24 Juni

- Para Pimpinan Gereja baik Gereja Katolik maupun Gereja Protestan menunjuk dua orang wakil, yakni atas nama Br. Drs. Theo van den Broek ofm (Direktur SKP Keuskupan Jayapura) dan Pdt. Dr. Benny Giay (Ketua Sekolah Tinggi Teologi GKII), untuk bernegosiasi mengenai penyanderaan terhadap dua orang asing asal Belgia di Ilaga. Kedua utusan itu ditunjuk berdasarkan

permintaan pihak penyandera yang kemudian disetujui oleh pihak-pihak lain.

- ❖ Aparat Polres Manokwari menangkap dan menahan 17 orang warga untuk diperiksa berkaitan dengan kasus pembunuhan di Wondiboi, Wasior, Kabupaten Manokwari.
- ❖ Hubertus Wresman (26), warga Desa Nengke, Kecamatan Tor Atas, diduga diculik dan dibunuh oleh anggota Kopassus yang bertugas di Betaf, Jayapura.

25 Juni

- ❖ Upaya pengejaran dan penyisiran terhadap pelaku penyerangan pos Brimob di Wasior Kabupaten Manokwari yang dilakukan aparat kepolisian daerah Papua dituding telah melanggar HAM oleh Ikatan Mahasiswa Manokwari di Jayapura. Melalui siaran persnya, Ikatan Mahasiswa Manokwari mengutuk tindakan aparat Brimob yang sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil di daerah konflik tersebut. Para mahasiswa juga menuntut agar Kapolres Manokwari segera membuka isolasi wilayah Wasior bagi tim Pastoral dari Sinode GKI untuk memberikan pelayanan iman ke daerah tersebut. Sedangkan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Manokwari, mereka menuntut supaya segera mengungsikan masyarakat desa yang tinggal di Wasior, dan apabila jatuh korban di pihak masyarakat maka pemerintah kabupaten harus bertanggung jawab.
- ❖ Menteri Pertahanan dan Kemanan, Mahfud M.D., menyikapi pernyataan sikap para anggota PDP yang menyatakan terbukanya kemungkinan referendum untuk Papua. Menhan menegaskan bahwa referendum itu ada aturannya dan tidak gampang. Sementara menurutnya belum ada persoalan mendasar yang dapat dijadikan alasan untuk menuntut referendum bagi Papua.

26 Juni

- ❖ Tim Asistensi Otonomi Khusus dari Papua yang dipimpin Wagub Papua, drh. Constant Karma dan Ir. Frans Wospakrik, M.Sc., bertemu Menko Polsoskam Agum Gumelar di Jakarta. Dalam pertemuan itu Agum mengatakan bahwa hadirnya Otsus di Papua dengan sendirinya akan menjawab semua keinginan masyarakat yang selama ini menjadi masalah, termasuk keinginan

masyarakat setempat untuk memisahkan diri dari NKRI.

27 Juni

- Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si., mendesak agar Rancangan Undang-undang (RUU) Otonomi Khusus untuk Propinsi Papua segera dibahas. Gubernur sependapat dengan Menko Polsoskam Agum Gumelar bahwa Otsus merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di Papua selama ini.

JULI 2001

1 Juli

- Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, meminta kepada kelompok TPN/OPM yang beroperasi di Kecamatan Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, agar melepaskan dua warga Belgia yang di sandera di kecamatan tersebut.

3 Juli

- Tuntutan ganti rugi atas tanah ulayat milik Suku Ongge di Kampung Harapan Sentani, Jayapura, yang diminta oleh Henock Ohee dari pemerintah, akhirnya dinyatakan menang oleh MA setelah terkatung-katung sekian tahun lamanya. Pemerintah akan membayar ganti rugi sebesar Rp18, 6 miliar kepada Henock Ohee. Untuk tahap pertama akan dibayarkan Rp 2 miliar karena pertimbangan kas daerah yang sangat terbatas.
- Polres Manokwari menahan empat orang yang diduga kuat sebagai anggota kelompok penyerang pos keamanan di Wasior, Kabupaten Manokwari.
- PT Freeport Indonesia mengadakan pertemuan dengan DPRD Propinsi Papua untuk membicarakan kebijakan perburuhan di perusahaan itu. Masalah yang dibicarakan kedua belah pihak berkaitan dengan tuntutan buruh yang telah dikeluarkan dari PT Freeport dan mendesak untuk dipekerjakan kembali. Namun, PT Freeport menolaknya.

4 Juli

- Menteri Negera Lingkungan Hidup menyetujui kerangka acuan Amdal terpadu untuk Proyek Tangguh yang mencakup berbagai kegiatan studi lingkungan dan sosial. Persetujuan tersebut merupakan langkah maju bagi perkembangan lingkungan hidup di Indonesia. Menurut Manager Senior Proyek LNG Tangguh Pertamina, Inonce, Pertamina dan BP memiliki komitmen untuk mencapai standar lingkungan yang tinggi dalam melaksanakan proyek Tangguh. Bagi Bappedalda Papua, proyek tersebut merupakan proyek pertama yang melakukan konsultasi secara aktif dan intensif untuk masyarakat lokal di 51 desa.
- Bupati Nabire Drs. A.P. Youw, mengungkapkan bahwa dirinya tahu persis oknum-oknum yang memasok minuman keras secara ilegal ke wilayah Kabupaten Nabire. Bupati meminta dukungan masyarakat untuk membasmi minuman keras karena hanya membawa malapetaka bagi masyarakat.
- Menurut Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika, untuk mendeportasi tokoh TPN/OPM Mathias Wenda dari PNG ke Indonesia sangat tergantung dari kebijakan pemerintah PNG. "Pemerintah PNG tidak berkewajiban mendeportasi yang bersangkutan karena belum ada perjanjian ekstradisi. Namun jika PNG menganggap Wenda dapat menimbulkan keonaran dan mengganggu keamanan, seharusnya yang bersangkutan dikirim ke Indonesia," katanya.

5 Juli

- Masa pendukung bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Philipus Wakerkwa dan Ignasius Adi, S.Pd., melakukan pawai damai di kantor DPRD Mimika. Masyarakat Suku Dani, Damal, Moni, Nduga, Lani, dan Ekari berharap kedua calon yang diajukan ke DPRD itu terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
- Penduduk Desa Takar, Kecamatan Pantai Timur, Kabupaten Jayapura, mendesak perusahaan HPH PT Sumalindo Lestari Jaya, agar membayar ganti rugi hak ulayat atas tanah yang dikuasai perusahaan. Masyarakat menuntut ganti rugi atas tanah tersebut sebesar Rp 2 miliar.

6 Juli

- Elsham Papua dan Amnesty Internasional yang berkedudukan di London, Inggris, minta agar 22 orang tahanan politik yang masih dipenjarakan di Wamena segera dibebaskan. Kepada penguasa Indonesia, kedua lembaga itu meminta agar menyelidiki dan mengadili polisi serta pejabat yang diduga bertanggung jawab terhadap tahanan yang meninggal di dalam ruang tahanan.
- Mahasiswa dan mahasiswi Papua yang tergabung dalam Aliansi Demokrasi untuk Papua, mendatangi DPRD Propinsi Papua dan meminta agar lembaga itu memberi perhatian kepada penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM yang belum diselesaikan di Papua. Mahasiswa yang peduli HAM itu dalam aksinya memikul sebuah peti mati sebagai simbol ketidakpedulian DPRD terhadap masalah HAM di Papua.
- Dua orang korban penembakan pada peristiwa Wasior di Kabupaten Manokwari, yakni Mandinus Wonda dan Musa Kulua, dicari-cari oleh keluarganya. Korban awalnya oleh Polres Manokwari dikirim untuk mendapat perawatan di RSUD Dok II Jayapura. Ternyata, kedua korban telah dikembalikan ke tahanan Polres Jayapura setelah menjalani pengobatan beberapa hari di rumah sakit.

7 Juli

- Karena desakan dan permintaan masyarakat dan mahasiswa, DPRD Propinsi Papua akhirnya membentuk Pansus Pelanggaran HAM. Pembentukan Pansus dimaksudkan untuk mengusut berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

8 Juli

- Semiloka mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua diadakan di Jayapura. Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing, yang menjadi salah seorang pembicara dalam semiloka itu mengatakan bahwa kasus penganiayaan dan kekerasan di Papua paling banyak terjadi di wilayah hukum Polres Jayapura. Kebanyakan kasus penganiayaan dan kekerasan terjadi di dalam lingkungan keluarga. Salah satu penyebabnya karena si pelaku mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk.

9 Juli

- Lima puluh orang kepala suku dari 14 kabupaten di Papua menyatakan diri berdiri di belakang Presiden Abdrurrahman Wahid dan tetap mendukungnya sebagai Presiden RI hingga tahun 2001. Sikap ini diambil oleh para kepala suku karena Gus Dur dinilai sebagai tokoh demokrat yang mau memperhatikan segala aspirasi, termasuk aspirasi masyarakat Papua yang berkeinginan untuk merdeka.
- Terjadi bentrokan fisik antara anggota TNI Korem 171/PVT Sorong dengan anggota Polres Sorong. Bentrokan itu mengakibatkan Serda Jamrik, anggota Korem 171/PVT, mengalami luka-luka. Berkaitan dengan peristiwa itu, Dandim Sorong meminta agar Denpom mengusut tuntas persoalan tersebut, dan bila perlu pelakunya dibawa ke pengadilan militer.

10 Juli

- Upaya pencarian pelaku penyerang pos keamanan di Wasior, Kabupaten Manokwari, terus diperluas sampai ke daerah Sanoba, Kabupaten Nabire, melalui operasi penyisiran yang dilakukan aparat Brimob. Akibat dari operasi itu, rumah Yotam Aronggear yang diduga menjadi tempat persembunyian OPM/GPK dan tiga motor Jonson milik masyarakat dibakar secara semena-mena oleh aparat.

11 Juli

- Pangdam XVII/Trikora, Mayjen Mahidin Simbolon, menerima laporan dari Gereja GKI mengenai hilangnya tiga warga Pantai Timur, Kabupaten Jayapura. Diduga pelakunya adalah aparat TNI (satuan Kopassus) yang bertugas di wilayah tersebut.
- Aparat keamanan yang ditugaskan untuk mengamankan PT Freeport di Timika, mengantisipasi berkembangnya isu akan adanya rencana penyerangan oleh kelompok OPM terhadap perusahaan raksasa itu.

13 Juli

- Menurut Ketua DPR Akbar Tandjung, DPR RI sepakat untuk menindaklanjuti pembahasan Otsus Papua. Dalam proses pembahasan, DPR RI akan menggunakan *draft* yang dibuat oleh

masyarakat Papua. Sedangkan *draft* dari pemerintah pusat akan dijadikan sebagai pelengkap.

- Forum Mahasiswa Peduli Tragedi Wasior, Manokwari, mendatangi kantor DPRD Propinsi Papua di Jayapura. Para mahasiswa menyatakan sikapnya berkaitan dengan perkembangan situasi keamanan pasca peristiwa Wasior. Isi pernyataannya adalah: [1] Hentikan operasi penyisiran di Wasior, Fakfak, dan Nabire; [2] Tarik mundur pasukan aparat keamanan yang sedang melakukan operasi; [3] Buka wilayah tersebut bagi pekerja kemanusiaan dan HAM untuk membantu masyarakat sipil yang terkena dampak operasi; [4] Mendesak Komnas HAM agar segera turun untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan mengumumkan hasilnya secara terbuka. [5] Usut dan proses secara hukum aparat yang terlibat dalam pelanggaran HAM.

15 Juli

- Jajaran Kodam Trikora dan Gereja GKI berkunjung ke Desa Betaf, Kecamatan Pantai Timur, Kabupaten Jayapura, untuk memeriksa kebenaran laporan mengenai warga desa yang hilang, yang diduga dilakukan oleh aparat TNI. Pangdam XVII/Trikora, Mayjen TNI Mahidin Simbolon, mengatakan bahwa dugaan tersebut rupanya tidak benar.

15 Juli

- Tim monitoring yang dibentuk Bupati Sorong untuk memantau penebangan kayu liar di seluruh wilayah Kabupaten Sorong, menemukan keterlibatan oknum polisi yang melakukan penebangan tanpa ijin resmi.
- Polres Nabire menangkap tiga orang warga Desa Sanoba, Kabupaten Nabire, karena diduga terlibat dalam penyerangan pada 13 Juni 2001 di Desa Wondiboi, Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari.
- Rencana pemekaran Kabupaten Jayawijaya ditanggapi tokoh masyarakat Jayawijaya, Izak Wenda. Ia mengatakan, saran dan pendapat hendaknya tidak tertutup bagi orang Jayawijaya saja. Tetapi juga harus dibuka peluang bagi orang pantai dan orang non-Papua yang lahir dan tinggal di Jayawijaya. Karena, mereka mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapat,

terlebih lagi mereka sudah mengetahui kondisi geografis Jayawijaya.

15 Juli

❖ Drs. Eliezer Renmaur dan Lukas Enumbi, S.I.P terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya. Obaja Warkerwa, yang mewakili kelompok muda Puncak Jaya, menilai bahwa apa yang dilakukan DPRD Kabupaten Puncak Jaya dalam proses pemilihan telah sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berada di enam kecamatan dan telah sesuai pula dengan aturan yang berlaku.

18 Juli

❖ Pertikaian dalam tubuh TPN/OPM terjadi antara kelompok pimpinan Mathias Wenda dengan kelompok Therianus Yaram di sekitar Skotyau. Dalam peristiwa itu dua orang meninggal dunia dan satu orang dirawat di Rumah Sakit Vanimo. Dari pihak Mathias Wenda yang menjadi korban adalah Simon Alom, Muli Wenda, dan Mathias Kogoya.

19 Juli

❖ Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Soetardjo Soerjogoeritno, mengesahkan terbentuknya Pansus RUU Otonomi Khusus Papua yang beranggotakan 50 anggota dewan.

❖ Aktifis HAM dan rohaniawan melakukan siaran pers dan menyerukan kepada pihak-pihak yang menyebarkan dan melakukan teror serta intimidasi kepada aktifis HAM dan rohaniwan agar menghentikan perbuatannya itu. Kepada aparat TNI dan Polri mereka meminta agar memberikan rasa aman kepada rakyat sipil yang ada di Irian Jaya. Siaran pers itu ditandatangani oleh Pdt. Willem Rumsarwir, Budi Setyanto, S.H. (Foker LSM), Demianus Wakman, S.H. (LBH Papua), Petrus Ell (Kontras Papua), Edison Robert Giay (PT PPMA), Anton Raharusun (praktisi hukum), Ferry Nupapaty (Yali Papua), dan Anita Sihombing, S.H. (LP3A Papua), menyerukan kepada pihak-pihak yang menyebarkan dan melakukan teror dan intimidasi kepada aktifis HAM dan rohaniwan agar berhenti berbuat demikian. Kepada aparat TNI dan Polri diminta agar memberikan rasa aman kepada rakyat sipil

yang ada di Irian Jaya.

- Dalam menyikapi beragam persoalan di Propinsi Papua, LBH Jayapura menyampaikan lima butir usulan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. *Pertama*, menghentikan seluruh proses hukum dan membebaskan 12 orang warga sipil yang ditahan dalam peristiwa Wasior, termasuk tujuh orang dalam peristiwa 12 Mei 2001 di Manokwari, serta merehabilitasi nama baik mereka. *Kedua*, menghentikan segala macam bentuk provokasi dan intimidasi terhadap rakyat Papua. *Ketiga*, membuka isolasi Manokwari-Wasior agar petugas kemanusiaan dapat masuk dan bekerja melayani masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan. *Keempat*, memulai suatu upaya nyata bagi pemulihan rasa keadilan rakyat Papua atas sejumlah kasus pelanggaran HAM di masa lalu. *Kelima*, membangun komunikasi yang intensif dengan kelompok-kelompok masyarakat di Papua, sebagai landasan bagi proses penyelesaian masalah melalui cara-cara damai.
- Setelah bertemu dengan kelompok TPN/OPM Titus Murib dan menyampaikan tuntutan penyandera kepada pemerintah RI, dua mediator utusan gereja, yakni Br. Drs. Theo van den Broek ofm dan Pdt. Dr. Benny Giay, tiba kembali ke Kecamatan Ilaga. Kedatangan mereka untuk melanjutkan negosiasi agar kedua sandera asal Belgia segera dibebaskan.

20 Juli

- Ramses Wali mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Calon Bupati Jayapura. Surat pengunduran diri itu diajukan kepada pimpinan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jayapura. Ramses Wali menyatakan, ia mengundurkan diri karena kinerja DPRD Jayapura tidak transparan dalam menerima masukan dan menentukan aspirasi masyarakat.
- Pihak penerbanganAssociated Mission Avation (AMA) milik empat keuskupan di Papua, terpaksa mengambil kebijakan tidak melakukan penerbangan ke Waghete, Kabupaten Paniai, untuk sementara waktu. Kebijakan itu diambil setelah masyarakat setempat berulah melempari pesawat AMA.
- Kepala Suku Wondama, Kecamatan Wasior, Daan Yairus Ramar (51 tahun), yang ditangkap di Pulau Yapen pada 15 Juli 2001,

gai Ketua Umum Forum Perempuan Papua. Juga dipilih Yusan Yeblo sebagai wakil Ketua, Ny. Greet Jolment Wenerungan sebagai Sekretaris Umum, dan Evi Kobogau sebagai Sekretaris II.

- Konferensi Perempuan merekomendasi tiga hal yang dialamatkan kepada tiga pihak. *Pertama* kepada Ondoafi, bahwa mas kawin adalah sesuatu yang berharga, bukan sebagai alat penindas. *Kedua* kepada tokoh agama, bahwa perlu keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan serta dalam pembinaan mental dan spiritual. *Ketiga* kepada pemerintah, diminta untuk memperhatikan kepentingan generasi mendatang dengan memperhatikan pendidikan, penyuluhan gender, membuat Perda menyangkut minuman keras, narkoba, penyakit menular seksual, dan VCD porno, serta memulangkan pekerja seksual dan menutup tempat-tempat prostitusi.

29Juli

- Muspida Propinsi Papua berkunjung ke Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari, untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat di kecamatan itu pasca peristiwa kekerasan yang melanda daerah tersebut.

30 Juli

- Ratusan guru SD se-Kota Sorong berunjuk rasa di kantor Walikota Sorong menuntut sisa gaji yang belum dibayar. Mereka mengancam tidak akan mengajar jika tuntutannya tidak dipenuhi.
- Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Luk Darras, tiba di Papua untuk memenuhi tuntutan penyandera yang masih menyandera dua warga Belgia di Ilaga. Namun ia tidak diizinkan oleh pemerintah pusat untuk mendatangi tempat kejadian dan tertahan di Jayapura.

AGUSTUS 2001

1 Agustus

- Pemerintah RI menolak campur tangan pihak internasional dalam upaya membebaskan dua sandera warga Belgia. Menko

Polsoskam Agum Gumelar memutuskan menyerahkan kasus penyanderaan Ilaga kepada aparat keamanan dan pemerintah daerah Papua. Pemerintah RI akan mengupayakan pembebasan dua sandera warga Belgia itu melalui pendekatan dialog secara intensif.

- Penggunaan dana APBD secara ilegal oleh oknum Pemda Paniai diperkirakan mencapai Rp 60 miliar. Pencairan dan pengambilan dana baik rutin maupun ilegal telah berlangsung tanpa adanya pemeriksaan dari Inspektorat Wilayah Propinsi Papua.
- Sebuah Nota Kesepahaman Bersama (MOU) ditandatangani antara Lembaga Masyarakat Adat (Lemasa) Amungme dan Lembaga Masyarakat Adat Kamoro dengan PT Freeport Indonesia. Menurut Ketua Lemasa, Tom Beanal, dengan kesepakatan itu hak dasar orang Amungme dan Kamoro menyangkut lingkungan hidup, pengembangan sumber daya manusia dan yang lainnya akan ditingkatkan di masa yang akan datang.
- Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari, tertutup bagi pekerja kemanusiaan. Mengenai sikap kepolisian ini Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika, mengatakan bahwa tidak ada halangan bagi pekerja kemanusiaan untuk masuk ke wilayah tersebut. Namun, mengingat daerah Wasior sangat rawan, aparat harus melakukan pemeriksaan bagi pendatang baru untuk mencegah masuknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

2 Agustus

- Setelah BAP kasus Abepura dinyatakan belum lengkap oleh Kejaksaan Agung, KPP HAM Papua menyatakan akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam peristiwa 7 Desember 2000 itu.
- Tokoh aspirasi "M", Sem Yaru, menyesalkan jika elit politik PDP memanfaatkan perjuangan Papua untuk mencari keuntungan. Baginya perjuangan Papua berharga sangat mahal. Maka, cara-cara seperti itu tidak akan diterima oleh masyarakat Papua.
- Masyarakat Suku Kuri, Desa Wagura, Kecamatan Babo, Kabupaten Manokwari, menerima kompensasi pembayaran hutan milik suku sebesar Rp 75 Juta dari perusahaan HPH PT Wukirasasi. Pembayaran itu langsung diserahkan kepada Kepala Suku Agustinus Tahuta.

3 Agustus

❖ Warga Polimak II, Jayapura, mengeluhkan buruknya pelayanan air minum dari PAM Jayapura yang tidak mengalir beberapa bulan terakhir. Mereka juga mengeluhkan prosedur pembayaran air dan pajak-pajak yang kurang jelas, sebagaimana pengalaman dialami seorang warga. "Itu memang benar, untuk mendapatkan air bersih kami harus membayar sejumlah uang kepada petugas," katanya.

4 Agustus

❖ Untuk ketiga kalinya, dua mediator Gereja Br. Drs. Theo van den Broek ofm dan Pdt. Dr. Benny Giay berangkat ke Ilaga untuk melakukan perundingan lanjutan dengan para penyadera warga Belgia pimpinan Titus Murib.

6 Agustus

❖ Semiloka Konferensi Hak-Hak Anak resmi dibuka oleh Wagub Papua, drh Constan Karma, di hotel Sentani Indah, Jayapura. Konferensi itu bertujuan untuk menyamakan persepsi pihak-pihak terkait tentang hak-hak anak di Papua.

❖ Puluhan anggota DPR RI yang menjadi anggota Pansus RUU Otsus Papua tiba di Jayapura. Mereka datang dengan maksud mendengar secara langsung aspirasi masyarakat Papua dan membuat pendataan sebelum membahas dan menyetujui RUU yang diajukan menjadi UU Otsus.

7 Agustus

❖ Pansus HAM DPRD Papua melakukan investigasi di kota Manokwari dan Kecamatan Wasior. Hasil investigasi menunjukkan bahwa masyarakat di tempat itu diliputi ketakutan akibat aksi aparat keamanan.

❖ Upaya kedua negosiator untuk dapat bertemu dengan kedua warga Belgia yang disandera di Ilaga, berhasil. Pemimpin penyanderaan, Titus Murib, mempertemukan keduanya dengan Johan Elia Theo van den Eynde dan Philippe R. D. Simon, warga negara Belgia yang disandra Titus dan kelompoknya sejak Juni 2001 lalu.

❖ Otoritas Nauru menolak memberikan visa kepada para aktivis

Papua Barat, serta melarang mereka untuk menghadiri Forum Negara-Negara Pasifik Selatan. Alasannya, perbedaan internal di antara mereka berpotensi menimbulkan gangguan.

- Empat mahasiswa Papua yang ditahan dalam aksi demonstrasi memperingati hari kemerdekaan Papua 1 Desember 2000 di Jakarta, dinyatakan bebas dari tuduhan melakukan perlawanan terhadap negara. Tetapi mereka dinyatakan bersalah telah mengganggu ketertiban umum dan dijatuhi hukuman penjara terhitung sejak Desember 2000, yakni selama masa penahanan mereka. Namun para penasehat hukum keempat mahasiswa menyatakan banding atas putusan tersebut.

8 Agustus

- Anggota Pansus RUU Otsus Papua dari DPR RI merencanakan akan mengunjungi tiga daerah di Papua. Yakni Kabupaten Jayawijaya, Biak, dan Timika. Ketiga daerah tersebut menjadi prioritas kunjungan karena keterbatasan waktu.
- Puluhan warga Paniai melakukan aksi unjukrasa damai di Mapolda Irja, Jayapura. Mereka menuntut ditundanya pelantikan Januarius Douw sebagai Bupati Paniai karena diduga terlibat politik uang. Seorang anggota DPRD Paniai, Damianus Gobay, menunjukkan kwitansi senilai Rp 100 juta yang diberikan bupati terpilih kepadanya sebagai barang bukti.
- Polemik mengenai pemilihan Bupati Puncak Jaya akhirnya dapat diselesaikan melalui SK Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Dalam SK tertanggal 20 Juli 2001 itu, menetapkan Drs. Elieser Renmaur sebagai Pejabat Bupati Puncak Jaya, Sedangkan Lukas Enembe ditunjuk sebagai Wakil Bupati Puncak Jaya yang akan menjabat selama lima tahun.

9 Agustus

- Janda dan duda pensiunan PNS melakukan aksi unjukrasa di kantor DPRD Kabupaten Sorong. Mereka menuntut agar tunjangan perbaikan penghasilan tidak dihentikan oleh instansi pemerintah. Mereka juga mempertanyakan alasan dihentikannya tunjangan perbaikan penghasilan dan besar kenaikan gaji yang sebenarnya.

10 Agustus

❖ Kunjungan tim Pansus Otsus Papua dari DPR yang sedang mencari dan menguji data di Wamena, disambut unjukrasa masyarakat setempat yang menolak Otonomi Khusus buat Papua. Untuk mengamankan tim dan mengamankan daerah itu, pihak kepolisian menurunkan dua peleton personil keamanan yang sempat melepaskan beberapa kali tembakan untuk menenangkan massa.

12 Agustus

❖ Presidium Dewan Papua bersama masyarakat Papua merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Papua dengan visi "Papua Baru". Acara diisi dengan doa bersama di kediaman Ketua PDP Theys H. Eluay di Sentani, Jayapura. Pada kesempatan tersebut, Pdt. Dr. Benny Giay mengatakan bahwa semua orang yang ada di Papua, baik sipil maupun militer, harus mempunyai kesadaran dan pemahaman baru tentang Papua.

13 Agustus

❖ Drs. Willy Mandowen dijadikan saksi dalam kasus dugaan makar para petinggi PDP.

❖ Selandia Baru melakukan protes terhadap keputusan otoritas Nauru yang melarang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk ikut dalam Forum Negara-Negara Pasifik Selatan.

❖ Di Jakarta, Presiden Megawati dan Perdana Menteri Australia John Howard mengadakan pertemuan bilateral yang berlangsung selama 30 menit. Pertemuan menghasilkan 15 butir *Joint Communique*. Pada kesempatan itu, Perdana Menteri John Howard menyatakan dukungannya terhadap integrasi teritorial dan kedaulatan Indonesia atas Irian Jaya dan Aceh.

❖ Sidang pertama kabinet Presiden Megawati menghasilkan 'resolusi' tentang gerakan separatis di Papua dan Aceh. Hasil itu kemudian akan dijadikan fokus perhatian pemerintah untuk masa kerja lima bulan pertama.

14 Agustus

❖ Akibat kurangnya sarana transportasi, 300 warga Kecamatan Sarmi, Kabupaten Jayapura, mendesak perusahaan perikanan CV Bintang Mas di DOK IX, Jayapura, yang melakukan penangkapan

ikan di perairan Sarmi, agar memfungsikan kapal-kapalnya untuk sementara sebagai kapal penumpang. Desakan itu ditanggapi Direktur CV Bintang Mas, Ghani Gan, dengan mengatakan bahwa pihaknya berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, pihaknya ingin melayani masyarakat, namun di sisi lain pihaknya akan berhadapan dengan pihak berwenang, yakni Navigasi dan Administrator Pelabuhan, yang tidak memperbolehkan kapal penangkap ikan dijadikan kapal penumpang.

❖ Ratusan karyawan PT Usaha Mina Cabang Sorong, melakukan unjukrasa di kantor DPRD Kabupaten Sorong. Mereka menuntut agar perusahaan memperhatikan nasibnya yang ditelantarkan oleh pimpinan perusahaan baik di Jakarta maupun di Sorong.

16 Agustus

❖ Setelah melalui perundingan yang alot antara pimpinan penyandera Titus Murib dan tiga mediator, yakni dua dari pihak Gereja Br. Drs. Theo van den Broek ofm dan Pdt. Dr. Benny Giay, serta dari pihak Aliansi Mahasiswa Papua, Demianus Wanimbo, akhirnya kedua sandera warga Belgia dibebaskan. Dengan menggunakan dua pesawat Pilatus Porter milik AMA, dua sandera dan para mediator serta wakil-wakil media masa diterbangkan dari Ilaga dan tiba di bandara Sentani pada pukul 17.30 WIT. Upacara penyambutan dihadiri oleh Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Luk Darras, dan Kapolda Papua Irjen Pol. Made Mangku Pastika serta pewakilan dari Kodam XVII/Trikora. Kedua sandera diserahkan oleh mediator Br. Drs. Theo van den Broek ofm kepada Wagub Papua. Dari Wagub sandera diserahkan kepada Duta Besar Belgia, Luk Darras.

❖ Dalam pidato kenegaraan resminya yang pertama, Presiden Megawati meminta maaf atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan Aceh yang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya.

20 Agustus

❖ Rencana Pemda Propinsi Papua untuk mengadakan perjanjian dengan pemerintah PNG guna memulangkan tokoh TPN/OPM 'Jendral' Matias Wenda yang ditahan di PNG, batal dilaksanakan. Polisi PNG telah melepaskan Matias Wenda sebelum perjanjian

dibuat dan disepakati.

❖ Bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI ke-56, 77 narapidana di Lapas Merauke menerima remisi sesuai keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. W.19 – PS.01.04-92 tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001. Dari jumlah narapidana yang dibebaskan itu, tujuh orang di antaranya menerima remisi umum II atau bebas murni.

21 Agustus

❖ Kasus Abepura berdarah pada 7 Desember 2000 dan sejumlah kasus penembakan yang terjadi di beberapa tempat di Papua mendapat perhatian serius dari Kontras dan ELSAM Jakarta. Perhatian itu terungkap dalam acara pendidikan praktis HAM anggota DPRD se-Papua yang berlangsung di hotel Relat Indah, Jayapura. Koordinator Kontras Jakarta, Munarman, S.H., dan staf ELSAM Jakarta, Amiruddin, mengatakan bahwa kasus-kasus penembakan dan kekerasan yang terjadi di Papua tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Aceh dan di Timor-Timur pasca jajak pendapat. Yang berbeda hanyalah pelaku dari kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut.

23 Agustus

❖ Di hadapan para peserta pendidikan HAM untuk anggota DPR se-Papua di hotel Relat Indah, Direktur Elsham Papua, Yohanes G. Bonay, mengatakan bahwa pemahaman tentang makna dan wujud HAM sering bias apabila dikaitkan dengan kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Kecenderungan ini justru memudahkan terjadinya pelanggaran HAM. Oleh karena itu, ia meminta perhatian dari pemerintah yang merupakan representasi negara hendaknya memahami bahwa HAM bukan hak yang ada karena adanya negara, melainkan hak yang ada dan melekat karena manusia itu sendiri.

26 Agustus

❖ Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Drs. Manuel Kaisepo, berkunjung ke Merauke. Kunjungan itu berhubungan dengan program pemberian makanan tambahan kepada anak sekolah. Bantuan yang diberikan menteri berupa

susu yang dibagikan kepada murid-murid Sekolah Dasar.

27 Agustus

- Terjadi tembak-menembak antara kelompok bersenjata tidak dikenal dengan aparat keamanan Polsek Sarmi, di Desa Sarabera, Jayapura. Menurut Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing, S.H., tiga orang dari kelompok bersenjata luka-luka dan dirawat di rumah sakit Sarmi. Sementara tiga orang dari masyarakat sipil juga terluka karena dianiaya kelompok bersenjata tidak dikenal.
- *Draft* Otonomi Khusus diterima oleh DPR RI untuk dibicarakan. Kepada masyarakat Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si., mengatakan, "Masyarakat tak perlu ragu-ragu. Dalam rangka Otonomi Khusus, pemerintah akan memperhatikan rakyat Papua."

28 Agustus

- Terjadi tembak-menembak antara anggota TNI Kostrad Yonif 611 dengan anggota Brimob di Serui akibat perselisihan, Dua anggota TNI meninggal dunia dalam peristiwa ini.
- Perwakilan Uni Eropa dari Kedutaan Belgia, Peter Claes, mengatakan bahwa Uni Eropa mendukung persatuan dan integrasi Indonesia atas semua wilayahnya, karena keutuhan wilayah Indonesia sangat penting bagi stabilitas kawasan, bahkan stabilitas di tingkat dunia.
- Dua warga Kecamatan Bintuni, Kabupaten Manokwari, Yulianus Nauw dan Ruben Iba, mengalami luka tembak serius akibat ulah aparat Brimob di kecamatan itu. Belum jelas, apa alasan penembakan tersebut.
- Dalam sidang kasus gugatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jakarta kepada PT Freeport Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan dan menyatakan PT Freeport Indonesia bersalah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan dalam kasus longsor bantuan limbah (*overburden*) yang ditampung di Danau Wanagon. Terhadap keputusan itu, kuasa hukum PT Freeport Indonesia, Minang Warman, menyatakan banding.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam persidangannya juga

menyatakan PT Freeport terbukti bersalah karena memberikan informasi yang tidak benar kepada Komisi VIII DPR RI yang menangani pertambangan dan energi. Terutama berkaitan dengan masalah fungsi dari 'sistem peringatan dini di areal' tersebut.

30 Agustus

- Jenderal Edoardo Ermita, penasihat keamanan Presiden Filipina, menuding kelompok Abu Sayyaf punya hubungan langsung dalam pemasokan senjata secara ilegal kepada Organisasi Papua Merdeka dan Gerakan Aceh Merdeka.
- Terhentinya penyaluran beras Opsus (Operasi Pasar Khusus) dipertanyakan warga RW VIII Kampung Pipa, Kelurahan Argapura, Kotamadya Jayapura. Menurut warga, mereka sudah pernah membeli beras Opsus sebanyak tiga kali. Namun saat ini terhenti tanpa penjelasan dari pihak yang berwewenang.
- Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Drs. Manuel Kaisepo, mengatakan bahwa salah satu kesepakatan dari pertemuan tingkat tinggi ke-32 negara-negara Pasifik (Pasific Islands Forum) adalah mengakui kedaulatan Pemerintahan Indonesia terhadap wilayah Papua. Forum juga menghargai niat baik Pemerintah Indonesia untuk memberikan status Otonomi Khusus kepada Irian Jaya.

31 Agustus

- Asia Development Bank (ADB) memberikan bantuan dana survei di bidang pertanian yang dilakukan sejak tahun 1997 hingga 2004. Bantuan dana untuk seluruh Indonesia nilainya mencapai USD 100 juta, khusus bagi Papua sebesar USD 10 Juta. Pihak ADB telah melakukan evaluasi untuk melihat kembali riset (penelitian) yang masih kurang dalam beberapa tahun yang lalu.
- Pendaftaran bakal calon Walikota Sorong ditutup dan berhasil menjaring delapan kandidat, masing-masing Simon Tenau, S.Sos., Drs. Hans Wim Kambu, Drs. Nomensen Mambraku, Drs. John Fahmi, Drs. Izaak Karubaba, Drs. J.A. Jumame, Drs. Philipus Kambu, dan Mathias Mambraku.

SEPTEMBER 2001

3 September

❖ Sebanyak 14 nama calon anggota Komnas HAM yang dinyatakan lolos oleh tim seleksi, digugat oleh Koalisi Anti Korupsi dan Anti Kejahatan HAM. Ke-14 calon anggota tersebut dinilai terlalu homogen karena berasal dari kalangan LSM.

4 September

❖ John Yikwa (30 tahun), salah satu terdakwa kasus Abepura pada 7 Desember 2000, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum di PN Jayapura. Keputusan itu didasarkan pada keterangan para saksi, antara lain H. Darwis. Saksi mengatakan kalau John Yikwa tidak terlihat pada saat terjadi penyerangan kantor Mapolsek Abepura.

❖ LBH Jayapura mendapat rekomendasi dari Tim Advokasi HAM dan Keadilan untuk Rakyat Papua agar menghadirkan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai saksi dalam kasus dugaan makar petinggi PDP. Ada dua alasan kenapa Gus Dur harus dihadirkan. *Pertama*, Gus Dur adalah orang yang tahu persis dan pernah terlibat dalam proses politik aspirasi rakyat Papua yang berbuntut pada proses hukum. *Kedua,* Gus Dur telah memberikan dana satu miliar rupiah dan memberi kesempatan serta ruang kepada rakyat Papua melalui PDP untuk mendialogkan perjuangan rakyat Papua.

9 September

❖ Suku Besar Arfak Manokwari menggelar pertemuan selama dua hari (8 dan 9 September 2001) di GOR Sanggeng, Manokwari. Pertemuan itu diberi nama Forum Rekonsiliasi Menuju Arfak Baru dan mengusung tema "Dari Mana dan Hendak ke Manakah Masyarakat Suku Besar Arfak?". Pertemuan itu dimaksudkan sebagai sarana untuk menghimpun pikiran, pendapat, dan gagasan dalam rangka pembinaan masyarakat Arfak di Manokwari. Bupati Manokwari, Drs. Dominggus Mandacan, yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, "Jangan tutup diri, tetapi buka diri. Terima masukan dan kritikan untuk menatap masa depan yang lebih baik dan menuju Arfak baru yang didambakan bersama".

10 September

- Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (UE) menyatakan niatnya untuk membantu pembangunan di Propinsi Papua dan Aceh. Uni Eropa juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah RI dalam mengatasi masalah di Papua dan Aceh dan mempertahankan integritasnya. Lembaga itu juga berniat memberikan bantuan berupa misi kemanusiaan ke Aceh.
- Para petugas kesehatan di Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari, menyatakan segera meninggalkan kecamatan tersebut karena merasa tidak aman dalam melaksanakan tugasnya.
- Tersiar kabar terjadinya pembunuhan terhadap Willem Onde dan John Tumin Kandam di Asiki, Kabupaten Merauke.
- Tubuh petugas kesehatan (warga Papua) yang hilang di Wasior, ditemukan dalam keadaan kaki sudah terputus.

11 September

- Bupati Merauke, Drs. Yohanes Gluba Gebze, tetap memperjuangkan Kabupaten Merauke untuk menjadi propinsi tersendiri, dengan memaparkan sejumlah latar belakang. Menurutnya, Birokrasi propinsi tidak menunjukkan semangat Papua, namun masih diwarnai semangat primordial yang sempit sehingga berpengaruh pada pembagian porsi-porsi.
- Pemerintah Kota Sorong menepati janjinya membayar rapel gaji guru SD se-Kota Sorong lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Semula gaji itu akan dibayarkan pada 20 September 2001.
- Para pendeta terdiri dari Martin Wanma, Obed Maori, dan Yan Pit Rawar, atas nama Badan Kerjasama Gereja-Gereja se-Kabupaten dan Kota Sorong, Papua, mendatangi Mabes Polri. Maksud kedatangan mereka adalah untuk menjelaskan situasi masyarakat Wasior yang sebenarnya.
- Sebanyak 23 anggota Kongres Amerika mengirim surat terbuka kepada Presiden Megawati Soekarno Putri yang berisi tanggapan atas pertisiwa-peristiwa pembunuhan yang terjadi di Papua, Timor-Timur, dan Aceh.

13 September

- Bupati Merauke, Drs. Yohanes Gebze, menegaskan bahwa konsep Otonomi Khusus bagi Papua masih kabur. Sebab, di dalam *draft*

Otsus hanya dijelaskan kewenangan propinsi dan tidak menjelaskan apa saja yang menjadi kewenangan kabupaten dan kota. Menurutnya, kenyataan ini menandakan adanya kelemahan dalam konsep Otsus bagi Papua.

- Yohanes Tumin, 'Asisten Komandan' TPN/OPM Willem Onde, ditemukan tewas di sekitar Sungai Marro, Merauke. Korban tewas setelah mengunjungi PT Korindo di Asiki bersama Willem Onde pada 10 September 2001.

15 September

- Para guru SD, SMP, dan SMU se-Sentani, Jayapura, mengadakan aksi unjukrasa dengan cara mogok mengajar. Aksi para guru yang ditunjukkan kepada pemerintah Kabupaten Jayapura itu dimaksudkan untuk menanyakan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah dan meminta pemerintah menjelaskannya secara terbuka.
- Ditemukan satu mayat lagi di dekat Sungai Marro, Kelurahan Kelapa lima, Kabupaten Merauke. Korban yang mengalami luka tembak di bagian dada dan tangannya itu diidentifikasi sebagai 'Panglima' TPN/OPM wilayah Merauke, Willem Onde.

16 September

- Ratusan guru yang bertugas di wilayah Kota Jayapura menuntut pembayaran rapel bulan Januari-Juli 2001 dan menghendaki diadakannya dialog dengan Bupati dan DPRD Kabupaten Jayapura.
- Isi bendera, lagu, dan nama Papua seperti tercantum dalam draft RUU Otsus Papua diterima oleh DPR RI melalui suatu perdebatan, seperti disampaikan anggota Pansus RUU Otsus Papua, Lukas Degey. Namun soal perimbangan keuangan antara pusat dan Papua masih menjadi perdebatan.
- Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Hari Sabarno, dalam acara pembukaan Rakorda Propinsi Papua di kantor Gubernur Papua, mengatakan bahwa titik berat otonomi daerah berada di kabupaten. Sedangkan peran propinsi adalah sebagai supervisi, pengawas, pengendali, dan sebagai koordinator. Hubungan antara pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat dalam kerangka Otda didasarkan pada asas-asas

pemerintahan, yakni desentralisasi atau penyebaran. Namun kewenangan yang dianggap penting seperti masalah luar negeri, keuangan, moneter, peradilan, agama, dan masalah-masalah lainnya tidak dapat diatur sendiri oleh daerah.

17 September

- Pada kesempatan uji publik terhadap Bupati Jayapura terpilih, pengunjukrasa yang mengatasnamakan masyarakat Sentani mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jayapura. Dalam pernyataannya yang dibacakan Baharudin Bauw, mereka menuding anggota dewan telah memanfaatkan proses penjaringan calon bupati untuk menguras kantong-kantong para calon hingga nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Hal itu dinilai menggambarkan prilaku DPRD yang kurang aspiratif dalam menampung aspirasi rakyat.
- Kapendam XVII/Trikora, Letkol Inf. R. Siregar, menanggapi penemuan mayat pada 15 September 2001 di Kali Marro yang diidentifikasi masyarakat sebagai 'Panglima' TPN/OPM Willem Onde. Kapendam mengatakan, "Kami masih menelusuri berita ini, karena untuk membenarkan hal tersebut dibutuhkan bukti yang otentik".
- Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Mimika berhasil menetapkan Klemen Tinal sebagai Bupati Mimika dan Methodius Mamapuku sebagai wakilnya. Lukas Degey, anggota DPR RI yang mengikuti pemilihan itu, mengatakan bahwa pelaksanaan pemilihan tersebut berlangsung sangat demokratis.
- Sekelompok orang melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap karyawan PT Salaki di Kampung Biri Dua, Desa Ansumbi, Kecamatan Pantai Timur, Kabupaten Jayapura. Penyerangan itu menyebabkan empat orang mengalami luka-luka.

18 September

- Polda Papua belum dapat mengindentifikasikan korban penganiayaan yang diduga oleh masyarakat sebagai mayat Pimpinan TPN/OPM Willem Onde. Kadispen Polda Irja, Kompol Drs. Zulkifli, A.R., mengatakan, "Kita belum tahu pasti. Namun yang jelas pihak polisi akan terus menelusuri identitas korban

ini dengan jelas."

19 September

- Masyarakat Yahim-Yobeh dan Ifar Besar memalang bandara Sentani dan menuntut agar pemerintah membayar ganti rugi tanah yang digunakan untuk pembangunan bandara. Mereka memberi batas waktu kepada pemerintah sampai 2 Oktober 2001. Akibat pemalangan tersebut bandara Sentani lumpuh total.
- Aparat menduga aksi penyerangan dan penganiayaan terhadap karyawan PT Salaki di Kampung Biri Dua, Kecamatan Pantai Timur, Kabupaten Jayapura, pada 17 September 2001 dilakukan oleh kelompok TPN/OPM pimpinan Kol. Jhon Kepas.
- Presiden Megawati melakukan pertemuan dengan Faleomavaega, anggota Kongres Amerika Serikat di Washington D.C., untuk mendiskusikan masalah kemanusiaan dan Otonomi Khusus bagi Papua Barat.

20 September

- Dalam seminar, Strategi Pembangunan Nasional, di hotel Sentani Indah, Jayapura, Rektor Uncen, Ir. Frans A. Wospakrik, M.Sc., mengatakan bahwa desentralisasi dalam otonomi yang diterapkan di Indonesia merupakan salah satu bentuk kesadaran baru yang tumbuh dalam penyelenggaraan negara. Walaupun demikian, untuk konteks Papua format politik Otsus tidak menjamin dapat menjawab seluruh tuntutan keadilan dari masyarakat.
- Terjadi unjukrasa menolak pasangan Klemen Timal dan Methodius sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Mimika periode 2001-2006. Pengunjukrasa diketahui bukan dari warga Amungme dan Kamoro, melainkan ratusan pendukung mantan Bupati Drs. T.O. Potereyauw.

21 September

- Pimpinan TNI menerangkan bahwa telah terjadi penyerangan yang dilakukan anggota TPN/OPM terhadap anggota TNI yang sedang melakukan patroli di sekitar Kali Kopi, Mimika. Dua orang menjadi korban dalam peristiwa kontak senjata itu, masing-masing Sersan Kepala Sumardi dari pihak TNI dan satu lagi dari

pihak TPN/OPM yang belum diketahui namanya.

23 September

- Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia (PTFI), McMoRan Jim-Bob Moffett, meminta jaminan keamanan bagi kegiatan pertambangan PTFI di Papua. Permintaan itu disampaikannya kepada Presiden Megawati yang sedang berkunjung ke Houston, Texas.

25 September

- PT Freeport Indonesia mengumumkan sejumlah dana kompensasi untuk Suku Amugme dan Kamoro. Dana itu merupakan dasar dan tanda dari hasil perjanjian yang dibuat di New Orleans, Amerika Serikat, pada 3 September 2001 antara pimpinan Lembaga Adat Amungme dan Kamoro dengan pelaksana dari PT Freeport.

26 September

- RUU Otsus Papua akhirnya ditetapkan menjadi produk DPR RI dan kemudian diserahkan kepada pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri. RUU Otsus Papua itu secara resmi diserahkan oleh Ketua Pansus, Sabam Sirait, kepada Menteri Hari Sabarno.
- Sebanyak 200 warga masyarakat Jayawijaya yang terdiri dari LSM, Pemuda, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, mengikuti Pendidikan Bela Negara yang diberikan oleh Kodim 1702 dan Pemda Jayawijaya. Pendidikan itu bertujuan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus menyamakan persepsi dalam membela bangsa.
- Solidaritas Perempuan Papua mendatangi kantor DPRD Biak-Numfor. Mereka menuntut agar pemerintah memperhatikan masalah perjudian dan minuman keras. Dalam aksinya mereka membawa spanduk dan poster yang di antaranya bertuliskan: "Judi bukanlah budaya masyarakat Papua", "Membangun Biak bukan dengan judi dan miras", "Pemda Biak kurangi jam terbang, urus rakyatmu dulu, jangan hambur uang rakyat karena rakyat masih miskin".
- Kasus penyerangan dan pembunuhan terhadap karyawan PT

Dharma Mukti Persada mulai disidangkan di PN Manokwari.

27 September

- Masyarakat Fruata di Kecamatan Babo, Kabupaten Manokwari, melakukan protes terhadap PT Agoda Rimba Irian, cabang dari perusahaan HPH Djajanti Group, yang beroperasi mengolah kayu secara ilegal di wilayah itu.

28 September

- Sebanyak 125 pemilik tanah kapling di lokasi Pasar Baru, Kotaraja-Jayapura, mengeluhkan terkatung-katungnya proses pemberian status bagi tanah-tanah mereka. Apalagi setelah Pemda Kota Jayapura mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Pemda.
- Setelah Melkias Habel Suwae terpilih menjadi Bupati Kabupaten Jayapura dan TH Simbolon, M.A. menjadi wakilnya, muncul berbagai kelompok demonstran yang pro dan kontra.
- Terjadi perampasan senjata milik TNI oleh TPN/OPM di Ilaga, Puncak Jaya. Perampasan itu mengakibatkan Kopda Harun, anggota Koramil Ilaga, mengalami luka-luka. Sementara Inikiapit Murib, anggota TPN/OPM, meninggal setelah ditembak aparat.
- PT Freeport menolak untuk memberi bantuan helikopter kepada TNI untuk mengangkut pasukan tambahan ke Ilaga.
- Pemda Merauke mengatakan bahwa kota Merauke mengalami kekurangan air bersih.

29 September

- Kelompok TPN/OPM mengepung kota Kecamatan Ilaga dan membakar Polsek Ilaga, mesjid, pasar (kios-kios), kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta kantor Pos dan Giro. Serangan itu mengakibatkan semua penduduk yang tinggal di pusat kecamatan mengungsi ke rumah camat. Sebagian lagi mengungsi ke desa-desa lain yang dirasa aman atau masuk hutan.

30 September

- TNI belum dapat mengirim pasukan tambahan untuk membantu mengatasi serangan-serangan yang dilancarkan oleh OPM/TPN di Kecamatan Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya. Cuaca yang buruk

menjadi alasan TNI, karena untuk menuju Ilaga hanya dapat dilakukan melalui jalur udara. Namun Pangdam XVII/Trikora mengatakan bahwa pasukannya masih dapat mengatasi serangan-serangan OPM/TPN di daerah tersebut. Bahkan menurutnya kelompok penyerang sudah mundur hingga ke Desa Gome. "Dugaan kami mereka masih menguasai di sekitar lapangan terbang AMA di Desa Gome. Saat ini masyarakat setempat sedang berlindung di Koramil Ilaga," katanya.

- Pendeta Kaleb Murip menghadap Camat Ilaga dengan membawa surat dari pimpinan TPN/OPM wilayah Ilaga. Surat itu berisi tuntutan: [1] agar pos pasukan Tribuana di Desa Amenggaru dipindahkan ke pusat Kecamatan Kago, [2] agar tindakan pengejaran terhadap masyarakat dihentikan, dan [3] bahwa masyarakat termasuk OPM/TPN tidak menghendaki peperangan.
- Para pemimpin Gereja Katolik, GKI, dan denominasi Gereja lain di Kabupaten Mimika menghimbau masyarakat agar tenang dan tertib dalam menghadapi keputusan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan pemilihan Bupati Mimika periode 2001-2006. Menurut mereka, proses pemilihan Bupati Kabupaten Mimika dan Wakilnya masih belum final, terbukti dari masih adanya sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat.
- Sultan Tidore menawarkan diri untuk menjadi penengah dalam masalah-masalah yang marak dan banyak diprotes oleh masyarakat Papua.

OKTOBER 2001

1 Oktober

- Pangdam XVII/Trikora, Mayjen Mahidin Simbolon, menyatakan bahwa pihaknya telah memberangkatkan pasukan tambahan sebanyak satu peleton ke Ilaga, Puncak Jaya, untuk membantu pengamanan. Menurut laporan, situasi di Ilaga mulai kondusif.
- Kapendam XVII/Trikora, Letkol Inf. Siregar, mengatakan bahwa meskipun pihak Kodam menolak dengan tegas dan tidak mengakui keberadaan TPN/OPM, namun pihaknya tidak bisa gegabah dalam melakukan pengejaran. Soalnya, TPN/OPM hidup bersama-sama masyarakat sehingga jika tidak hati-hati dalam

menanganinya dikhawatirkan masyarakat yang tidak berdosa akan menjadi korban. Pihaknya juga meminta restu dari Pemda atau DPRD untuk melakukan penumpasan. Namun restu itu belum juga diperoleh.

- Menanggapi situasi keamanan di Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari, Pangdam XVII/ Trikora, Mayjen Mahidin Simbolon, menjelaskan bahwa walaupun sudah aman tetapi keadaan perlu diwaspadai. Pihaknya membantah kabar bahwa situasi di Wasior masih mencekam. Menurutnya, masyarakat di Wasior dan sekitarnya sudah kembali ke kampung halamannya masing-masing setelah sempat bersembunyi di hutan belantara.

2 Oktober

- Sekda Propinsi Papua Drs. Decky Asmuruf mengatakan, sesuai dengan kebijakan gubernur sebanyak 177 dari 405 buah mobil bekas Jepang yang berada di Kapal *Golden Coast* diijinkan untuk diturunkan di Sorong. Sisanya akan dikembalikan ke Jepang. Gubernur juga menyampaikan surat kepada Kapolda Irja agar penyidikan terhadap kasus mobil impor Jepang ini tidak perlu dilanjutkan.
- Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Drs. Moersoetidarno Moerhadi, menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) di Ilaga termasuk aksi teroris. Sebab, selain melakukan penyerangan dan tindak kekerasan, KSB juga melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap tempat ibadah dan sarana umum lainnya. Pihaknya juga menjelaskan bahwa untuk memulihkan situasi keamanan di Ilaga, telah disiapkan satu peleton Brimob di Mimika.

4 Oktober

- Hamish Daniel, Sekretaris Pertama Kedubes Inggris, mengatakan bahwa terhitung sejak 1999 lalu Skotlandia telah mendapatkan otonomi dari Pemerintah Inggris. Sementara untuk Papua, otonomi khusus yang akan diberikan masih dibahas oleh pemerintah pusat. Berkaitan dengan kesamaan situasi itulah Skotlandia ingin membagi pengalamannya dengan Papua, bahkan pihaknya sempat mengundang pimpinan daerah Papua ke Skotlandia. Kesamaan tersebut misalnya ditunjukkan dengan

adanya kelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri.

- ❖ Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, menyatakan bahwa bandara perintis di Ilaga telah dikuasai kembali oleh pasukan TNI dan Polri setelah sempat dikuasai oleh kelompok separatis. Selanjutnya akan dilakukan pengiriman pasukan, bahan makanan, serta kebutuhan lainnya.
- ❖ Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Papua, Yusuf Wally, S.E., menyatakan turut prihatin atas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Papua. Pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina dan pihak terkait lainnya. Menurutnya, penyediaan BBM di Papua sepenuhnya menjadi kewenangan Pertamina, karena Pertamina yang menangani tata niaga dan memonopoli penjualan BBM selama ini.
- ❖ Pangdam Trikora, Mayjen Mahidin Simbolon, memberhentikan delapan pejabat senior di lingkungan Kodam Trikora karena dinilai lemah dalam melakukan kegiatan intelijen dan operasi. Di antara mereka yang diberhentikan adalah Kolonel Tonny Armien (Asisten Intelijen Kodam), Kolonel H. Simanjuntak (Asisten Urusan Teritorial Kodam), Kolonel Endang Sutrisno (Kepala Zeni Kodam), dan Inspektur Militer Kodam, Kolonel Nur Suradji.

5 Oktober

- ❖ Para pemimpin agama di Papua mengeluarkan seruan untuk menghentikan kekerasan yang ditujukan kepada segenap pihak di Papua: pemerintah, militer, Polri, dan TPN/OPM. Seruan itu disampaikan oleh Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Uskup Jayapura, Ketua MUI Papua, Sekum PGBI, Ketua Sinode GKII, dan Ketua Sinode GIDI.
- ❖ Pangdam XVII/Trikora, Mayjen Mahidin Simbolon, menyatakan akan membubarkan markas kelompok separatis jika pihaknya menemukannya di Ilaga. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak mengakui adanya TPN sehubungan dengan insiden Ilaga. Tetapi penyerangan di Ilaga menurutnya dilakukan oleh Kelompok Separatis Bersenjata (KSB).
- ❖ Mahkamah Militer Jayapura yang dipimpin Kolonel CHK Somba Sinaga, menjatuhkan hukuman kepada enam anggota Yonif 752 Sorong yang didakwa melakukan tindakan insubordinasi.

Pengadilan tersebut merupakan bagian dari penanganan perkara terhadap 39 anggota TNI di lingkungan Korem 171/PVT Sorong.

❖ Camat Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Herry, menyatakan bahwa kerusuhan di Ilaga sudah berangsur reda. Bandara di Ilaga juga sudah bisa didarati pesawat reguler.

7 Oktober

❖ Kadispen Polda Irja, Kompol Drs. Zulkifli, menyatakan bahwa kendati bendera daerah disebut-sebut telah disetujui oleh Pansus Otsus Papua sebagai lambang daerah dan lambang budaya, termasuk juga lagu 'Hai, Tanahku Papua', namun bendera Bintang Kejora masih dilarang untuk dikibarkan, karena belum ada pengesahan dari pemerintah pusat yang dituangkan dalam undang-undang yang resmi.

8 Oktober

❖ Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, mengemukakan bahwa Komandan Satuan Brimob Daerah Papua dan Kapolres Manokwari telah melakukan evaluasi terhadap tindakan kepolisian dalam menangani perampasan lima pucuk senjata dan sebuah bren di Wasior, Kabupaten Manokwari. Ia menegaskan tidak mau di antara anggotanya ada yang melakukan pelanggaran HAM, karena tindakan itu akan dibenci rakyat. Menanggapi adanya anggota kepolisian yang melanggar prosedur sehingga menimbulkan korban dari rakyat, Kapolda juga menegaskan bahwa setiap anggota polisi yang terbukti bersalah akan diadili.

9 Oktober

❖ Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si., meresmikan dermaga CPO *(Crude Palm Oil)* milik PT Sinar Mas di Demta, Jayapura. Pelabuhan itu merupakan hasil investasi senilai Rp 50 miliar, setelah PT Sinar Mas beroperasi selama 10 tahun di Papua.

❖ Menurut Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si., pembangunan di Propinsi Papua memang harus dilihat secara keseluruhan. Tetapi perimbangan keuangannya harus memperhatikan kondisi masing-masing daerah yang berbeda-beda, sesuai dengan kekayaan sumber daya alamnya.

❖ Sekda Propinsi Papua, Drs. Decky Asmuruf, menegaskan bahwa

roda pemerintahan sudah berjalan seperti biasa pasca kerusuhan di Ilaga. Menurutnya, penyerangan itu merupakan ungkapan ketidakpuasan kelompok TPN/OPM terhadap situasi yang berkembang saat ini.

- Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi, Kabupaten Sorong, Efraim Yadanfle, mengancam akan menurunkan walikota definitif secara paksa apabila calon walikota dari Suku Moi, yakni Drs. John Fahmi, tidak memperoleh jabatan nomor satu di Kota Sorong. Menurutnya penurunan paksa itu akan dilakukan dengan cara mengerahkan massa secara besar-besaran untuk menduduki gedung DPRD Kota.
- Solidaritas Perempuan Papua (SPP) Biak kembali melakukan aksi unjukrasa di Biak dengan melakukan *long march* ke kantor Bupati dan menempelkan sejumlah pamflet serta poster di dinding kantor tersebut. Setelah bupati tiba dari Padaido, Ibu Alama Mampioper dan Marike Rumbiak yang menjadi pimpinan pengunjukrasa, menyampaikan tuntutan mereka kepada Bupati. Di antara tuntutannya adalah: [1] agar penjualan miras golongan B dan C yang berkadar alkohol tinggi dicabut ijinnya, [2] penghentian judi dalam segala bentuk, [3] agar DPRD menolak laporan pertanggungjawaban Bupati Biak tahun 2000 menyangkut dana *crash program* senilai Rp 28 miliar, [4] agar dana sebesar Rp 1,6 miliar yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dikembalikan kepada kelompok masyarakat ekonomi lemah. Dana sebesar itu ternyata Rp 1 miliar di antaranya telah dibagi-bagikan kepada 47 orang Forum Komunikasi Pengusaha Putera Daerah (FKPPD), [5] menuntut pertanggungjawaban bupati atas dugaan *mark-up* dalam proyek pengadaan barang Pemda sebesar Rp 13.484.179.225 yang menurut pengunjuk rasa memiliki selisih Rp 7.868.132.525.
- Bupati Biak menanggapi beberapa tuntutan dari Solidaritas Perempuan Biak. Ia mengatakan, miras memang hanya diijinkan dijual di restoran, diskotik, dan hotel. Namun pihaknya berjanji akan membicarakannya kembali dengan penjual miras. Sementara mengenai penggunaan dana *crash program*, sudah sesuai dengan petunjuknya yakni untuk pembangunan fisik, bukan untuk dibagi-bagikan. Mengenai dana Rp 1 miliar dari DAU memang dibagikan kepada pengusaha yang tidak mampu. Tetapi

jika hal tidak benar akan dibicarakan kembali dengan Ketua FKPPD. Menyangkut dugaan *mark-up* dalam proyek pengadaan barang Pemda, menurutnya jika benar terbukti maka pihak kejaksaan perlu memeriksanya. Sedangkan menyangkut perjudian kupon putih/togel, memang tidak ada ijin apapun dan memang dilarang oleh undang-undang.

10 Oktober

- Pimpinan PT Freeport di Jayapura, Brigjen TNI (purn.) Karel Ralahalu, membantah jika aksi demonstrasi anti Amerika di Jakarta berpengaruh terhadap warga Amerika Serikat yang bekerja di PT Freeport. Dikatakannya, telah ada jaminan keamanan dan dukungan dari pemerintah, Kapolda, dan Pangdam XVII/Trikora terhadap seluruh warga negara asing, khususnya bagi warga negara Amerika, yang berada di Tembagapura dan Timika.
- Boni Muenda, perwakilan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kecamatan Waris, Kabupaten Jayapura, mengatakan bahwa masyarakat adat Kerom, khususnya Senggi dan Waris, tidak ingin mengalami lagi masa-masa pahit seperti di masa lalu. Seperti halnya berbagai bentuk tindak kekerasan yang diterima mereka karena alasan politik dan perampasan hak ulayat milik masyarakat di kedua kecamatan. Oleh karena itu, masyarakat adat di kedua kecamatan tersebut ingin menata kembali hak ulayat mereka yang sudah diberikan oleh nenek moyang dalam suatu sidang adat, demi masa depan generasi muda Waris dan Senggi. Menanggapi aspirasi "M", dikatakannya bahwa berpisah ataupun tetap bersatu dengan NKRI, wilayah Kerom, khususnya Senggi dan Waris, tetap menjadi wilayah netral.
- Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si., mengatakan bahwa rencana pemekaran Propinsi Papua yang pernah dicetuskan oleh pemerintah pusat masih memerlukan peninjauan, sebab untuk melakukan pemekaran tidak semudah membalik tangan. Perlu ada persiapan-persiapan yang matang. Pemekaran propinsi dapat saja dilakukan di kemudian hari, namun saat ini yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah pemekaran wilayah-wilayah kabupaten.
- Pasukan TNI menguasai markas OPM di Desa Meruai, Kecamatan Bonggo, Kabupaten Jayapura.

11 Oktober

- Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si., menerangkan bahwa perimbangan keuangan sebanyak 80% untuk daerah dan 20% untuk pusat seperti termuat dalam RUU Otsus Papua sudah mendapat persetujuan. Perimbangan itu berlaku selama 25 tahun. Dalam pembahasan RUU Otsus itu juga telah disetujui adanya Dana Alokasi Umum (DAU) yang tetap akan diberikan kepada daerah. Untuk memenuhi program pemerintahan, Propinsi Papua membutuhkan dana minimal Rp 7 triliun per tahun.
- Kapendam XVII/Trikora, Letkol Inf. R. Siregar, mengungkapkan bahwa di balik penyerangan pos-pos keamanan oleh kelompok yang menamakan diri TPN/OPM belakangan ini, terdapat otak penggeraknya. Karena, tidak semua anggota kelompok separatis tahu persis apa sebenarnya tujuan dari aksi penyerangan yang dilakukan itu.
- Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Papua, Drs. John Ibo, mengatakan bahwa DPRD Papua selama ini tidak banyak menangani masalah pelanggaran HAM sampai pada tingkat penyelesaian. Menurutnya, DPRD yang *notabene* adalah kumpulan partai politik, lebih cenderung mengurusi masalah politik daripada masalah hukum. Namun ia juga mengatakan bahwa persoalan hukum memang bukan urusan dewan atau partai politik, tetapi dewan berperan sebagai lembaga yang hanya bisa mengaturnya secara prosedural.

12 Oktober

- Gubernur Papua melantik Habel Melkias Suwae sebagai Bupati Jayapura masa bakti 2001-2006, dan Ir. Tunggul Simbolon sebagai wakilnya. Gubernur juga meresmikan kantor Bupati Jayapura dan kantor DPRD yang baru di Tanah Merah, Sentani. Polres Jayapura yang didukung TNI menyatakan siap mengamankan pelantikan tersebut.
- Bupati Mimika, T.O. Potereyauw, menegaskan jika pihaknya akan mencopot dan menon-aktifkan jabatan beberapa kepala wilayah kecamatan di Kabupaten Mimika yang sering meninggalkan tempat tugas dan lebih banyak berkeliaran di Kota Timika.

13 Oktober

❖ Drs. J.A. Jumame terpilih sebagai Walikota Sorong periode 2001-2006, dan Hengky Rumbiak sebagai wakilnya, dalam Rapat Paripurna khusus DPRD Kota Sorong. Pasangan tersebut mengungguli tiga pasangan lain, yakni Simon Tenau dan Husain Fadirubun, Nomensen Mambraku dan Ambrosius Tanto, serta John Fami dan Sudirman Laring.

❖ Rapat Paripurna khusus DPRD Kota Sorong untuk memilih walikota dan wakil walikota periode 2001-2006 diwarnai aksi unjukrasa masyarakat adat Moi Sorong. Dalam aksinya mereka memasang spanduk dan pamflet di sepanjang pagar dan halaman kantor DPRD. Mereka menuntut agar pasangan calon John Fahmi dan Sudirman Laring dipilih sebagai walikota dan wakil walikota untuk periode 2001-2006.

14 Oktober

❖ Wakil Sekjen PDP, Drs. Agus A. Alua, menanggapi pernyataan pimpinan TPN/OPM Titus Murib di Ilaga, Puncak Jaya, yang menyerahkan mandat kepada Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) untuk melaksanakan amanat Kongres II Papua sebagai akibat munculnya krisis kepercayaan terhadap PDP. Menurut Agus, PDP juga menerima dokumen dari berbagai kelompok yang isinya senada dengan pernyataan Titus Murib. Di antaranya dari kelompok Matheys Meyer di Australia, kelompok "Bintang 14" di Sorong, dan dokumen hasil rapat di markas Bewani pada 6 April 2001. Namun menurutnya PDP memutuskan untuk tidak menanggapinya. Agus Alua dan sejumlah saksi peristiwa Ilaga menduga pembacaan surat yang dilakukan Titus Murib di Ilaga itu direkayasa pihak AMP.

15 Oktober

❖ Di Jayapura, Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Maybrat-Sorong (HPPMMS) mengeluarkan pernyataan sikap yang isinya mendukung terpilihnya Drs. J.A. Jumame sebagai Walikota Sorong dan Hengky Rumbiak sebagai wakilnya. Menurut HPPMMS, terpilihnya figur-figur tersebut merupakan keputusan demokratis dan harap diterima semua pihak. Selain itu. Kedua figur itu juga dinilai mampu bekerja.

- Kepala Suku Amungme, Viktor Beanal, menyampaikan dukungan masyarakat Suku Amungme dan Kamoro (Amor) terhadap fatwa Mahkamah Agung (MA) mengenai pembatalan pemilihan bupati Mimika. Dalam fatwanya MA meminta DPRD Kabupaten Mimika agar membatalkan hasil Sidang Paripurna Khusus DPRD yang telah memilih Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2001-2006.
- Menurut staf Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Agats-Asmat, Edoardus Kaize, aksi kekerasan yang muncul di Papua belakangan ini merupakan akibat dari kurang percayanya masyarakat Papua terhadap arti pembebasan yang sesungguhnya. Di satu sisi, harapan dan keinginan masyarakat belum terpenuhi, sementara di sisi lain ada harapan dari masyarakat agar seseorang bisa memperhatikan dan menyelesaikan aspirasi mereka. Namun harapan tersebut ternyata tidak dapat tercapai karena orang yang dipercaya ternyata tidak mampu memenuhinya.

16 Oktober

- Kadispen Kodam XVII/Trikora, Letkol Inf. R Siregar, dalam pernyataannya di Jayapura menjelaskan bahwa delapan pos Organisasi Papua Merdeka (OPM) di daerah Timika dapat dikuasai pasukan TNI. Tokoh OPM Kelly Kwalik lolos dari penyergapan, namun tujuh anggotanya ditangkap dalam serangan tanpa kontak senjata tersebut.
- Wagub Papua, drh. Constan Karma, mengemukakan bahwa sekitar seribu orang utusan dari Papua akan mendatangi Balai Sidang Senayan Jakarta untuk menyaksikan penetapan RUU Otsus Papua menjadi UU Otsus Papua pada 22 Oktober 2001.
- Kapolres Sorong, AKBP Drs. Faisal A.N., menyatakan bahwa pihaknya telah menangkap dua warga negara asing, yakni Peter H. Ingo Mau (warga negara Jerman) dan Sebastien Bole Besancon (warga negara Perancis) karena melakukan orasi politik yang menghujat pejabat Walikota Sorong. Mereka juga mengajak masyarakat untuk bertindak anarkis yang bertentangan dengan pasal 50 UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.
- Ketua Tim Pengkajian Pembangunan Daerah Sorong, Drs. Achmad Hatari, M.Si., menilai pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Sorong periode 2001-2006 cukup demokratis dan secara *de jure* sudah sah. Menurutnya, unjuk rasa anarkis yang menolak pemilihan hanya akan memperburuk citra, etika politik, dan sosio kultural yang sedang dibangun di tengah-tengah masyarakat Sorong.

17 Oktober

- Wakil Gubernur Papua, drh. Constan Karma, mengemukakan bahwa Pemda Propinsi Papua akan mendahulukan menyusun 30 Perda yang dianggap mendesak sesuai dengan tuntutan UU Otonomi Khusus. Pemda telah mempersiapkan tim khusus yang anggotanya terdiri dari Tim Asistensi RUU Otsus Papua, biro hukum dan Organisasi dan Tata Laksana (Ortal), para kepala dinas, serta instansi terkait lainnya.
- Sekretaris Umum Persekutuan Gereja Baptis Irja, Pdt. S. Sofyan Yoman, tidak membenarkan stigmatisasi TPN/OPM di Betaf, Wasior, Timika, Bonggo, Ilaga, dan Kali Kopi, yang dilakukan TNI dan Polri dengan tanpa menghargai martabat dan hak asasi orang-orang Papua. Menurutnya jika hal itu terus dilakukan maka TNI dan Polri semakin memperburuk citranya di mata masyarakat Papua. Di sisi lain tindakan stigmatisasi hanya akan semakin menjauhkan orang Papua untuk mencintai TNI dan Polri sebagai pelindung dan pengayom rakyat.
- Ratusan massa yang menolak terpilihnya Drs. J. Jumame sebagai Walikota Sorong kembali berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Sorong. Mereka menggelar aksinya di jalan tepat di depan kantor DPRD karena pintu gerbang gedung wakil rakyat itu diblokir aparat kepolisian. Aksi itu memacetkan arus lalu lintas. Kelompok pengunjuk rasa tersebut terdiri dari para pendukung Simon Tenau dan Husain, John Fahmi dan Sudirman Laring, dan pendukung Nomensen Mambraku dan Ambrosius Tanto. Mereka dikoordinir oleh Pdt. M.L. Wanma dan Ketua LMA Moi, Semuel Mainolo. Pengunjuk rasa menuntut agar hasil pemilihan Walikota Sorong dibatalkan karena diduga mengandung unsur *money politics*. Pdt. M.L. Wanma juga meminta massa untuk terus berunjuk rasa sampai ada jawaban yang pasti dari pimpinan dewan.
- Pimpinan Asrama Putri Santa Monica Sorong, Yos Yumte, sangat menyayangkan tindakan sepuluh anggota pasukan Brimob Polres

Sorong yang secara membabi buta menerobos masuk ke asrama dengan merusak pagar dalam pencarian dua orang yang terlibat demonstrasi menentang Walikota Sorong. Pasukan Brimob itu kemudian menggeledah kamar dan menendang pintu-pintu yang mengakibatkan penghuni asrama ketakutan. Menanggapi kejadian tersebut, Kapolres Sorong, AKBP Faisal A.N., menyampaikan permohonan maafnya dan berjanji akan menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota Brimob itu.

❖ Perwakilan UNHCR *(United Nations High Commissioner for Refugees)* Canberra dan Pejabat Pemerintah PNG Bidang Perbatasan mengatakan bahwa UNHCR akan menghentikan bantuan kepada 319 pelintas batas asal Papua yang berada di *transmiter* area Vanimo, Propinsi Sandaun, PNG. Alasannya, lembaga itu memiliki keterbatasan dana untuk pengungsi. Selama ini UNHCR menangani penyediaan pangan dan air. Sementara Keuskupan Vanimo menyediakan segala kebutuhan pengungsi lainnya. Pejabat Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Vanimo, Michael Kalele, mengaku merasa berat atas keputusan UNHCR itu karena Keuskupan pun telah berhutang sebesar K 100.000 untuk menanggung kebutuhan pengungsi. Akan tetapi, bagi Keuskupan nyawa pengungsi jauh lebih penting daripada masalah keuangan. Oleh karena itu bantuan akan tetap diprioritaskan.

18 Oktober

❖ Usulan rencana pemekaran Kecamatan Sarmi menjadi kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Jayapura telah sampai di DPR RI, tetapi pembahasannya mengalami penundaan hingga 2003 mendatang. Tokoh masyarakat Sarmi, Decky Sawem Sanadi, menyatakan bahwa masyarakat Sarmi kecewa dengan berita itu. Ia mengharapkan pemerintah dapat memberikan penjelasan yang transparan tentang tertundanya pemekaran daerah tersebut.

❖ Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Jayapura, Ignatius Hasim, S.Ag., menanggapi permintaan pengunjukrasa di kantor DPC PDIP Kota Jayapura yang menuntut dilakukannya *audit* terhadap kekayaan anggota DPRD Fraksi PDIP karena disinyalir telah melakukan KKN. Ia meminta pengunjukrasa agar membuktikan tudingannya. "Kalau tidak ada

bukti akurat, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Jayapura akan menuntut balik yang memimpin demonstrasi tersebut," ujarnya. Memang peristiwa ini dilatarbelakangi oleh dugaan korupsi/KKN.

- Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, Munir, S.H., mengatakan bahwa sikap aparat keamanan yang menggeneralisir gereja, adat, dan suku sebagai bagian dari perjuangan separatis, hanya menciptakan model permusuhan baru. Menurutnya generalisasi itu hanya menjadi alat untuk membenarkan tindakan sendiri semata-mata. Sikap demikian tidak bisa dibenarkan karena tiga bagian itu tidak lepas dari komunitas hidup manusia, juga sebuah perjuangan untuk mencapai pengakuan hak hidup dan menjadi manusia yang sederajat dengan manusia lainnya.
- Kapolres Mimika, AKBP Drs. Sumarjiyo, menjelaskan bahwa lima dari tujuh anggota TPN/ OPM yang ditangkap pasukan TNI/ Polri di Kali Kopi, Kecamatan Mimika Baru, oleh tim Penyidik Polres Mimika dijerat dengan pasal makar. Mereka dinilai mengancam kedaulatan negara sesuai pasal 106 sampai 110 KUHP dan melanggar UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata.
- Komandan Kapal Perang KRI Tongkol-813, Mayor Pelaut Bambang Pramushinto, mengatakan bahwa dalam operasi Kapal Perang KRI Tongkol-813 yang dilakukan di perbatasan ZEE *(Zona Economy Exclusif)* antara negara tetangga PNG dan Australia, tidak terdeteksi adanya imigran gelap. Namun daerah itu cukup rawan karena banyak melintas kapal kayu log ilegal dan kapal penangkap ikan yang tidak memiliki surat ijin dan dokumen lengkap.

19 Oktober

- Direktur YLBHI Jakarta, Munir SH, mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat militer Papua, kepolisian, dan kalangan LSM di Jayapura. Dalam pertemuannya dengan Kapolda Papua, Munir mengajak Kapolda membentuk tim gabungan untuk mengklarifikasi kasus Wasior yang dinilai telah mendatangkan trauma mendalam bagi masyarakat. Pembentukan tim tersebut dimaksudkan untuk melakukan investigasi kasus Wasior secara bersama-sama sehingga tidak ada pihak yang menyatakan dirinya

paling benar. Kapolda pada prinsipnya menyetujui pembentukan tim tersebut.

❖ Sulaiman L. Hamzah, salah seorang anggota MPR RI, mengemukakan bahwa kasus-kasus kontak senjata yang terjadi akhir-akhir ini sudah mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Ia berharap penertiban yang dilakukan aparat keamanan diwujudkan dalam kerangka hukum dan tidak terkesan nyawa dibalas nyawa. Ia kurang sependapat jika persoalan kontak senjata yang terjadi di Papua diselesaikan di pusat, walaupun secara struktural TNI dan Polri tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Sebaliknya, ia menolak apabila persoalan tersebut hanya dibebankan kepada DPR RI. Semestinya semua komponen yang ada di daerah dan pusat menyikapinya bersama-sama.

❖ Tim Gabungan Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) Kota Jayapura mulai melakukan penertiban terhadap ratusan rumah yang berada di areal Pasar Entrop, Jayapura, yang diduga didirikan secara ilegal.

20 Oktober

❖ PDP dengan tegas menolak diberlakukannya Otonomi Khusus dan secara konsisten akan terus melancarkan perjuangan damai dan demokratis untuk mengembalikan hak dan kedaulatan bangsa Papua. Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah PDP melakukan rapat kerja di Hotel Mahkota, Kotaraja. Hasil rapat akan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada pemerintah pusat sebelum UU Otsus Papua ditetapkan. Butir-butir lain dari pernyataan tersebut di antaranya:

- Rakyat Papua menyatakan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pemimpin dan seluruh rakyat di negara-negara Forum Kepulauan Pasifik yang telah memberikan dukungan dan solidaritasnya bagi pengembalian hak dan kedaulatan politik bangsa Papua melalui dialog damai
- (TPN/OPM) adalah kekuatan pertahanan yang selama 35 tahun telah bergerilya di hutan-hutan dengan hati nurani yang tulus untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua bagi rakyat di seluruh tanah Papua.
- PDP menyerukan dihentikannya operasi militer yang represif

oleh TNI dan Polri, juga menyerukan agar konfrontasi bersenjata dihentikan dan secara bersama-sama mendorong upaya-upaya damai melalui dialog politik.

- Papua menilai bahwa penahanan dan proses persidangan terhadap anggota PDP maupun Panel yang didakwa telah melakukan perbuatan makar pada hakekatnya telah mengadili seluruh rakyat Papua
- Diserukan kepada rakyat Papua untuk berjuang melawan berbagai bentuk provokasi serta usaha pembusukan internal dan *divide et impera*, serta terus berusaha memperkuat persatuan rakyat dalam semangat nasionalisme bangsa Papua

❖ Ketua PDP, Theys H. Eluay, menyatakan bahwa sampai saat ini pemerintah pusat cenderung belum membuka diri untuk menerima dialog rakyat Papua dalam rangka pelurusan sejarah. Menurutnya, rakyat Papua tidak pernah memimpikan Otsus dan tidak pernah membicarakannya, karena membicarakan Otsus sama saja dengan membicarakan kepentingan pemerintah, bukan kepentingan rakyat.

❖ Ketua DPRD Kota Sorong, Amos Watory, kontroversi terpilihnya Drs. J.A. Jumame sebagai Walikota Sorong dan Hengky Rumbiak sebagai wakilnya untuk periode 2001-2006 akan dikonsultasikan kepada Gubernur Papua. Terhadap tuntutan pengunjuk rasa yang mempersoalkan adanya dugaan *money politics* dalam pemilihan itu, DPRD akan menyampaikannya kepada pihak kepolisian sebagai penyidik untuk membuktikan kebenaran tuduhan tersebut.

21 Oktober

❖ Pangdam XVII/Trikora, Mayjen Mahidin Simbolon, mengatakan bahwa di Republik Indonesia hanya ada satu organisasi bersenjata yang resmi, yaitu TNI. Sementara organisasi bersenjata seperti TPN-OPM, dinilainya sebegai organisasi bersenjata yang tidak memiliki pemimpin dan asal-usul yang jelas. "Bila TPN-OPM diakui, maka ia harus mempunyai struktur organisasi, anggaran dasar dan rumah tangga, ada pemimpinnya, serta mempunyai visi dan misi khusus di Republik ini. Oleh karena itu TNI, khususnya Kodam XVII/Trikora, tidak mengakui nama dan penggerak TPN-OPM. Bagi kami nama yang tepat buat mereka adalah

kelompok separatis bersenjata karena tindakan mereka dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu aktivitas pembangunan di Bumi Cenderawasih ini," ujarnya.

- Kapolres Manokwari, AKBP Drs. Bambang Budi Santoso, menjelaskan bahwa meskipun situasi kamtibmas di Kecamatan Wasior semakin kondusif, tetapi operasi pengejaran terhadap Kelompok Separatis Bersenjata (KBS) masih terus dilakukan tanpa ada batas waktu. Pengejaran dilakukan karena KSB dinilai mengganggu ketertiban dan kehidupan masyarakat.

22 Oktober

- Puluhan pemuda Papua yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa dan Masyarakat Papua mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sorong. Mereka ingin membangun dialog mengenai RUU Otsus dan deklarasi Presidium Dewan Papua yang dikeluarkan pada 22 Oktober 2001. Komandan Satgas Papua Sorong, Andy Way, yang juga Ketua Forum itu mengatakan, "Kami bukan tidak setuju dengan materi RUU Otsus Papua, tetapi memang dari awal kami sudah menolaknya karena Otsus bukan jawaban dari apa yang diperjuangkan masyarakat Papua selama ini. Penerapan Otsus di Tanah Papua adalah tindakan pemerintah yang salah dalam memahami perjuangan masyarakat Papua, yakni menuntut dikembalikannya kedaulatan atau kemerdekaan rakyat Papua dari Pemerintah Indonesia," ujarnya.
- Absah tidaknya pemilihan Bupati Mimika yang dilaksanakan pada 17 September 2001 tergantung pada keputusan Departemen Dalam Negeri, walaupun Mahkamah Agung dalam fatwanya menyatakan bahwa pemilihan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan PP menyangkut tata cara pemilihan kepala daerah pasal 151 tahun 1999.
- Yulius Kowi, salah seorang tokoh masyarakat Mamberamo, Jayapura, menegaskan kembali tuntutan masyarakat Sarmi yang ingin memekarkan wilayahnya. Tuntutan tersebut telah disampaikan secara langsung kepada Mendagri oleh perwakilan masyarakat Sarmi pada 26 Juli 2001. "Kami minta kepada Pemda Propinsi dan DPRD Kabupaten Jayapura untuk segera merealisasikan pemekaran tersebut. Pemekaran itu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kami dari masyarakat Mambramo dan Tor Atas akan tetap

menuntut dan kami tidak akan bosan," ujarnya.

- Pangdam XVII/Trikora, Mayjen Mahidin Simbolon, menjelaskan bahwa pihaknya belum menghapus nama Willem Onde dari Susunan Bertempur Musuh (SBM), walaupun beberapa waktu lalu yang bersangkutan diduga sudah tewas akibat penganiayaan. Kabar itu juga diperkuat oleh surat dari keluarga Willem Onde yang menerangkan bahwa jenazah tersebut memang benar jenazah Willem. "Namun sulit untuk membuktikan bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Willem Onde karena pada saat ditemukan sudah dalam keadaan rusak," ujar Pangdam.

23 Oktober

- Wakil Sekjen PDP, Drs. Agus A. Alua, menegaskan kembali bahwa PDP menolak Otonomi Khusus. Menurutnya tugas PDP bukan untuk mengurusi Otsus, tetapi mengurusi aspirasi merdeka. Namun dirinya menolak anggapan bahwa dengan menolak otonomi khusus berarti juga menolak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
- RUU Otonomi Khusus Papua akhirnya disetujui oleh semua fraksi di DPR untuk disahkan menjadi Undang-undang. Selanjutnya UU tersebut akan dibawa kepada presiden untuk ditandatangani. Dalam UU Otsus Papua tersebut terdapat sejumlah perubahan, di antaranya nama Propinsi Irian Jaya diganti dengan Papua, bendera Bintang Kejora diperbolehkan berkibar sebagai simbol kebudayaan dan bukan simbol kedaulatan politik, Papua diperbolehkan memiliki badan legislatif khusus berupa Majelis Rakyat Papua (MRP) yang akan melindungi hak-hak orang asli Papua, serta propinsi diberi kewenangan seluas-luasnya kecuali dalam hal hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, fiskal, dan moneter.
- Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si., mengatakan bahwa disahkannya UU Otsus Papua bukanlah "rejeki nomplok", melainkan hasil perjuangan masyarakat Papua. Oleh karena itu, dia berharap masyarakat mempersiapkan diri menuju Papua baru dengan titik tolak keberangkatan dari pengembalian hak dasar orang Papua agar menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Ia berjanji akan segera mensosialisasikan UU tersebut kepada rakyat Papua.

24 Oktober

❖ Sekitar 400 orang penduduk Maluku Utara yang mengungsi selama beberapa bulan ke Pulau Kapat Lap, Sorong, dipulangkan ke tempat asalnya di Bacan, Halmahera, Gane Timur dan Barat. Mereka dipulangkan dengan menggunakan KM Pradawana milik Distrik Navigasi Sorong, atas permintaan Pemda Maluku Utara.

25 Oktober

❖ Mendagri Hari Sabarno meminta PDP agar tidak menggalang gerakan politik yang mengarah pada anarki dan kekerasan berkaitan dengan penolakannya terhadap keputusan pemeritah dan DPR yang mensahkan UU Otsus Papua. Menurutnya perbedaan pendapat dalam alam demokrasi merupakan hal yang wajar. Termasuk penolakan terhadap sebuah keputusan yang sudah dibuat. Namun alam demokrasi juga memberikan jalur bagi penyaluran pendapat.

❖ Anggota Komisi A DPRD Propinsi Papua, Drs. John Manurung, menegaskan bahwa penerapan Otsus harus tepat sasaran supaya masyarakat tidak dikecewakan lagi. Mengenai kesiapan dan kualitas DPRD, ia menilai hal tersebut tidak dapat diukur. Sebab, penilaian itu menyangkut kelembagaan yang *nota bene* meliputi kualitas 45 orang anggotanya, dan sangat tergantung pada kepekaan atau daya serap masing-masing anggota dewan. Fraksinya sendiri sebagai perpanjangan tangan masyarakat menurutnya belum mempunyai visi dan misi yang baik untuk mengakomodasikan dan membangun lembaga dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Untuk itu egoisme fraksi tidak perlu dikedepankan agar kinerja legislatif bisa lebih baik.

❖ Komunitas Pemuda dan Pelajar Puncak Jaya menemui Pangdam XVII/Trikora di Jayapura. Pertemuan itu dimaksudkan untuk mengklarifikasi dan *sharing* pendapat mengenai sejumlah perkara yang akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, seperti peristiwa kekerasan di Ilaga yang dilakukan oleh pasukan tempur TNI dan menimbulkan pengungsian penduduk. Komunitas pemuda tersebut minta agar pasukan TNI ditarik dari Puncak Jaya. Namun Pangdam mengatakan bahwa tidak ada pasukan tempur di Ilaga, melainkan hanya anggota Koramil dan Polsek

setempat.

- Di Sorong, Polisi menangkap seorang anggota Laskar Jihad yang datang dari Ambon karena membawa bom rakitan.

26 Oktober

- Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Herman Saud, M.Th., mengatakan bahwa disahkannya *draft* RUU Otsus Papua menjadi UU merupakan karunia Tuhan sebab dari *draft* yang disusun di Papua itu 90%-nya dapat diterima sebagai undang-undang.
- Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi Papua, Drs. Dorteus Asmuruf, menjelaskan bahwa UU Otsus Papua akan diserahkan langsung oleh Presiden Megawati kepada masyarakat Papua pada 22 Desember 2001. Penyerahan itu bertepatan dengan perayakan Natal yang akan dihadiri Presiden Megawati bersama masyarakat Papua di Jayapura.
- Ketua DPRD Manokwari, Daud Mandowen, minta agar masalah yang muncul di Kecamatan Wasior dan Windesi ditangani aparat keamanan dengan cara khusus untuk menghindari trauma masyarakat. Ia mengharapkan masalah yang telah memakan korban jiwa itu dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Menurutnya, jika kondisi traumatik terus dibiarkan akan berdampak pada lancarnya roda pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di dua kecamatan itu. Sementara itu Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Chris Warinussy, S.H., mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan tentang dugaan hilangnya John Calvin Werianggi, Kepala Desa Werianggi, Kecamatan Windesi. Pihaknya telah meminta Komnas HAM untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan korban sebagaimana diatur dalam pasal 34 dan 35 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Pemda Kabupaten Merauke melakukan berbagai program penanggulangan HIV/AIDS melalui Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), rumah sakit, dan LSM yang ada di daerah tersebut. Direktur Rumah Sakit Umum Merauke, dr. Stev Osok, dan ahli penyakit dalam RSU Merauke, dr. Jacobus Albert, menjelaskan bahwa selama Januari hingga September 2001 pihaknya menangani 43 kasus baru HIV/AIDS. Sampai Oktober 2001 di Merauke tercatat ada 330 orang penderita HIV dari semua

jenjang usia.

- Dalam pertemuan dengan Kapolri dan Kapolda dari seluruh Indonesia, Presiden Megawati menegaskan agar Polri tidak usah ragu-ragu dalam bertindak, asalkan sesuai dengan aturan dan berpegang pada hukum sebagai senjata utama. Presiden juga mengakui jika peralatan dan perlengkapan Polri masih belum mencukupi, bahkan sangat minim. Belum lagi dalam menjalankan tugasnya Polri selalu dibayang-bayangi oleh pelanggaran HAM.
- Sekretaris Foker LSM Papua, Budi Setyanto, S.H., menegaskan bahwa jika ingin Otsus Papua berhasil pihak legislatif dan eksekutif harus bekerja keras dalam mempersiapkan instrumennya dan pro-aktif melibatkan berbagai unsur masyarakat.

28 Oktober

- Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Drs. John Teman, mengatakan bahwa mungkin telah terjadi penumpukan kerja dalam penjabaran Perda karena lembaga legislatif tidak memiliki jadwal kerja yang jelas akhir-akhir ini. Ia mengatakan, birokrasi kita berpola pada sistem lama, sementara anggota legislatif di dalam fraksi belum punya rumusan yang jelas tentang apa yang akan dilakukan. Akibatnya visi dan misi pembangunan di Papua masih terpola pada kepentingan yang terpisah, dan unsur yang sangat menonjol adalah egoisme fraksi yang terjadi di DPRD. "Akibatnya seluruh kinerja di lembaga ini tidak jelas hendak kemana," ujarnya.
- Panglima Kostrad, Letjen Ryamizard Ryacudu, menjelaskan bahwa situasi kamtibmas di Papua pasca disahkannya UU Otonomi Khusus Papua relatif aman dan terkendali. Tidak ada kejadian-kejadian menonjol, tetapi ada sebagian masyarakat yang masih menghembuskan aspirasi merdeka, bahkan ada yang "mengompori" masyarakat. "Sekarang *sih* tergantung orang yang mengipas-ngipasi. Orang Irian sendiri, sebetulnya lugu-lugu saja, yang penting bagaimana dia hidup layak. Tetapi orang-orang tertentu mengiming-imingkan dan menghembus-hembuskan aspirasi merdeka dan menjadikannya angan-angan," ujarnya.
- Pieter Ell, S.H., salah seorang praktisi hukum di Papua, mengatakan bahwa apabila dalam penerapan UU Otsus Papua semua

pejabat masih memakai mental hanya ingin kaya, maka yang akan terjadi di Papua adalah munculnya kembali raja-raja kecil dan para penjajah tanah sendiri.

- Komandan Kopassus Tribuana X, Letkol Inf. Hartomo, mengatakan bahwa Kopassus yang bertugas di Papua bukan pasukan yang harus ditakuti, sebab kehadirannya di Papua adalah untuk menjaga keamanan masyarakat bersama dengan kesatuan-kesatuan lainnya. Kopassus adalah milik seluruh masyarakat karena kesatuan ini lahir dan berada di tengah masyarakat.

29 Oktober

- Dalam sambutannya di hadapan bupati dan gubernur seIndonesia, Presiden Megawati mengungkapkan keprihatinan berkaitan dengan munculnya gejalah baru berupa tampilnya semangat kedaerahan yang sempit dan berlebihan. Menurut Presiden, gejala itu akan membahayakan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. "Sadar atau tidak, kita sering bermain dengan simbol-simbol primordialisme yang sesungguhnya tidak proporsional lagi. Bila kita tidak bersikap hati-hati, kita akhirnya akan berada di tengah-tengah kondisi yang justru bertolak belakang dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

30 Oktober

- Ketua Umum DPD Kadin Papua, Tony Uloly, mengatakan bahwa banyak pengusaha Papua yang khawatir akan kehilangan jatah proyek akibat kehadiran pengusaha luar yang akan datang ke Papua setelah Otsus diberlakukan pada Januari 2002. Untuk mengatasi kekhawatiran itu, pihaknya telah membentuk tim yang saat ini lagi menggodok usulan kepada DPRD Papua yang nantinya akan digunakan sebagai masukan dalam menerbitkan Perda perekonomian.
- Direktur Yayasan Wilayah Adat Perbatasan RI-PNG, Jibu Ak Franz, mengatakan bahwa wilayah perbatasan hendaknya dijadikan zona damai dan wilayah netral bagi seluruh masyarakat Papua maupun non-Papua.
- Koordinator Elsham Papua Pos Kontak Sorong, Paskalis Baru, mengatakan bahwa tiga suku besar Masyarakat Sorong, yakni

Malamoi, Raja Ampat dan Alfat, akan mengajukan gugatan kepada DPRD Kota c.q. Panitia Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong periode 2001-2006 melalui kuasa hukum mereka, Elsham Papua.

NOVEMBER 2001

1 November

- Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si., mengatakan bahwa nama Papua sudah resmi digunakan terhitung sejak 22 Oktober 2001, bersamaan dengan disetujuinya UU Otsus Papua oleh DPR.
- Di Biak, Pangdam XVII/Trikora, Mayjen TNI Mahidin Simbolon, mengatakan bahwa tidak ada penambahan pasukan TNI ke Propinsi Papua berkaitan dengan diberlakukannya Otsus di Papua terhitung sejak November 2001.
- Kelompok "Bintang 14" di bawah pimpinan Drs. S.M. Paiki, menggelar jumpa pers di Gereja Kristus Bangkit Hamadi Rawa, Jayapura, untuk menjelaskan bahwa pihaknya telah merebut kembali kemerdekaan bangsa Melanesia Barat sebagaimana telah diumumkan pada 14 Desember 1988. Namun aparat Polres Jayapura menggagalkan jumpa pers tersebut. Selain membubarkan massa pro kemerdekaan Bangsa Melanesia Barat, aparat juga menangkap tiga orang pelaksana jumpa pers, masing-masing berinisial SM, MW, HS, dan menyita sebuah bendera Melanesia Barat, lima lembar materi jumpa pers, satu lembar daftar hadir, serta 17 lembar surat undangan.
- Sekitar 50 orang warga masyarakat Suku Moni berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Mimika. Mereka menyampaikan protesnya berkaitan dengan penggunaan hak ulayat tanah adat mereka yang dijadikan area penambangan oleh PT Freeport Indonesia tanpa melibatkan warga Suku Moni sebagai salah satu pemilik hak ulayat tersebut.
- Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si., mengumumkan bahwa Presiden Megawati akan berkunjung ke Jayapura pada 22 Desember 2001 untuk menyerahkan secara langsung UU Otsus Papua yang baru disahkan di Jakarta. Gubernur juga menjelaskan, di bawah undang-undang yang baru tersebut pendidikan

dijadikan fokus utama pemerintah dalam penyusunan anggaran.

2 November

❖ Gubernur Papua, Drs. Jaap Salossa, M.Si., mengatakan bahwa disahkannya UU Otsus Papua merupakan hasil perjuangan seluruh masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa Otsus itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Disebutkan pula beberapa langkah konkrit yang harus dilakukan berkaitan dengan disahkannya Otsus, yakni sosialisasi UU Otsus, membuat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Propinsi (Perdasi), mempersiapkan perangkat-perangkat pendukung seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Komite HAM Khusus Propinsi Papua, membentuk Komite Pelurusan Sejarah Papua, serta mempersiapkan rencana program untuk APBD dan APBN tahun anggaran 2002. Menurut Gubernur, tahap yang paling berat adalah sosialisasi UU Otsus kepada masyarakat.

3 November

❖ Dalam sambutannya pada upacara dies natalis dan wisuda pertama UNIPA (Universitas Negeri Papua) di Manokwari, Gubernur Papua Drs. J.P. Solossa, M.Si., menegaskan bahwa Otsus Papua adalah peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Papua. Dengan Otsus, faktor pendidikan akan lebih mendapat prioritas dalam pembangunan.

❖ Menurut Wakil Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe, aksi penyerangan kelompok seperatis TPN/OPM di Kecamatan Ilaga, Puncak Jaya, pada 28 Oktober 2001, telah merugikan pemerintah Kabupaten Puncak Jaya senilai Rp 10 Miliar. Dijelaskannya bahwa TPN/OPM telah merusak fasilitas umum milik pemerintah seperti Puskesmas, gedung SD, kantor Polsek, kantor Koramil, serta rumah-rumah penduduk di Kecamatan Ilaga. Ia membantah jika telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan yang bertugas di Ilaga, terutama pasca peristiwa penyerangan TPN/OPM. Bahkan berdasarkan hasil pantauannya ke Ilaga, aparat yang justru berperan aktif menolong masyarakat.[1] Menanggapi tudingan adanya kasus pemerkosaan yang dilakukan aparat keamanan pasca peristiwa Ilaga, Enembe juga memban-

tahnya. "Aparat tidak melakukan pemerkosaan. Yang melakukan pemerkosaan justru anggota TPN/OPM sendiri," ujarnya. Pihaknya menghimbau agar masyarakat yang ketakutan dan lari berlindung di hutan segera kembali ke rumahnya masing-masing untuk membantu pemerintah menata kembali kondisi fisik Kecamatan Ilaga, sebab situasi sudah normal kembali.

4 November

❖ Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay, yang juga terdakwa kasus dugaan makar, mengatakan bahwa pihaknya meragukan mantan Presiden Abdurrahman Wahid bisa datang untuk dihadirkan sebagai saksi. Juga dengan mantan Wagub Papua, Drs. J.G.R. Djopari, M.A., yang dimintai kesediannya oleh penasehat hukum Theys dkk. untuk menjadi saksi yang meringankan pada persidangan yang akan digelar pada 5 November 2001 di PN Jayapura. Sementara dua saksi yang meringankan lainnya, yakni Wakil Ketua I DPRD Papua, Drs. John Ibo, dan Staf Ahli Antropologi LIPI Jakarta, Drs. Muridan Widjoyo, menurut Theys dipastikan akan hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan.

5 November

❖ Theys H. Eluay mengatakan bahwa pihaknya akan tetap menggelar peringatan hari kemerdekaan bangsa Papua Barat di Pendopo Sentani pada 1 Desember 2001, meskipun acaranya akan berbeda dengan yang pernah dibuat pada 1 Desember 1999. Acara tersebut akan diisi dengan kegiatan ibadah syukur bersama para tamu dari luar negeri. Menurut Theys masyarakat Papua dan juga masyarakat di dunia internasional sangat mengharapkan perayaan peringatan ini. Oleh karena itu, Theys menghimbau baik kepada masyarakat Papua maupun masyarakat non-Papua supaya bersama-sama menjaga keamanan di Papua.

❖ Sekitar 300 orang perawat RSUD Dok II Jayapura melakukan unjukrasa di DPRD Propinsi Papua. Mereka menuntut kesejahteraan bagi para perawat dan menuntut perbaikan manajemen

---

1) Penilaian yang berbeda dapat dibaca dalam hasil investigasi yang dilakukan oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian, Keuskupan Jayapura. Laporan itu berjudul Peristiwa Kekerasan 28 September 2001 di Kecamatan Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya , Jayapura, April 2002.

RSUD.

- Di ruang kerja Wakil Bupati, Pemkab Jayawijaya dan UNICEF *(United Nations International Children's Fund)* melakukan rapat koordinasi untuk membangun kerja sama di bidang pendidikan dan kesehatan bagi kaum perempuan dan anak di Papua. Kegiatan dalam bentuk konferensi yang bertema "Menggagas Masa Depan Perempuan dan Anak" itu dilaksanakan selama tiga hari. Wakil UNICEF untuk Papua, dr. Budi Subianto, mengatakan bahwa kerja sama itu dilakukan karena pihaknya melihat angka kematian ibu dan anak di Papua, khususnya di Jayawijaya, setiap tahunnya sangat tinggi.
- Wakil Bupati Merauke, dr. Benyamin Simatupang, menegaskan kembali aspirasi masyarakat Merauke yang menuntut agar wilayah tersebut dimekarkan jadi Propinsi. Menurutnya tuntutan tersebut aspirasi murni masyarakat sehubungan dengan diberlakukannya Otsus di Papua. Pihaknya telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat, tetapi belum dijawab hingga saat ini.

6 November

- Jajaran Polres Merauke, di bawah pimpinan Ipda Pol Imar Soeleman, menangkap 18 orang warga sipil yang dugaan pelaku pengrusakan dan pembakaran serta pembantaian yang menewaskan seluruh anak buah kapal ikan KM Jala Perkasa di perairan Kali Kontuar, Kecamatan Kimaam. Selain dituduh sebagai pelaku pengrusakan, mereka juga dituduh sebagai anggota TPN/OPM pimpinan Jacobus Mawen yang diduga tewas dalam peristiwa penyerangan yang dilakukan aparat saat menangkap kelompok tersebut.
- Ketua Majelis Hakim PN Jayapura yang menangani persidangan kasus dugaan makar Theys H. Eluay dkk., E.H. Sinaga, S.H., menanggapi pernyataan Theys H. Eluay yang meminta agar dibebaskan dari proses hukum. Sinaga menegaskan bahwa proses hukum terhadap para terdakwa tetap akan dilakukan sesuai aturan yang ada. Menyinggung alasan yang dikemukakan oleh Theys bahwa Otsus merupakan realisasi dari perjuangan PDP, menurut Sinaga hal tersebut tidak ada kaitannya dengan dakwaan terhadap mereka.

- Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika, menyatakan keberatannya terhadap rencana peringatan 1 Desember sebagai HUT Kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Menurut Kapolda, Papua bukan negara, tetapi propinsi dan bagian dari NKRI yang setiap tahun merayakan HUT kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus. Oleh karena itu ia meminta Ketua PDP Theys Hiyo Eluay bersama massa pendukungnya agar memikirkan kembali niatnya untuk menggelar peringatan 1 Desember tahun ini. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum di NKRI akan tetap berpatokan pada hukum.
- Menanggapi unjukrasa para perawat di kantor DPRD yang menuntut kesejahteraan, Direktur RSUD Dok II Jayapura, dr. Clemens Manyakori, D.S.P., menerangkan bahwa para dokter pun mengalami nasib yang sama dalam hal kesejahteraan. Ia melihat para dokter sering mementingkan bisnis pribadinya di luar, ketimbang bertugas sesuai profesinya di RSUD. Hal itu disebabkan oleh honorarium yang diperoleh para dokter di RSUD tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.
- Anggota Tim Asistensi RUU Otsus Papua, Dr. Agus Sumule, mengharapkan agar dalam menyusun produk-produk peraturan daerah, DPRD propinsi dan kabupaten/kotamadya sebaiknya melibatkan pihak luar atau komponen masyarakat. Sebab, jika hanya bupati/walikota dan legislatif yang menyusunnya, sudah tentu akan ada masalah yang muncul di kemudian hari.
- Bupati Manokwari, Drs. Dominggus Mandacan, menerangkan bahwa berdasarkan hasil temuan Itwilkab Manokwari, penyimpangan dana proyek yang terjadi di daerahnya mencapai Rp 5,187 miliar, ditambah denda keterlambatan penyelesaian proyek sebesar Rp 627 juta. Penyelewengan dan denda keterlambatan penyelesaian proyek terjadi di lima instansi, yakni Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perumahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Tata Pemerintahan, serta Dinas Kesehatan. Untuk menindaklanjuti masalah tersebut, pihaknya telah mengeluarkan teguran melalui Surat Bupati tertanggal 31 Juli 2001 kepada semua instansi yang terlibat di dalamnya.

7 November

- Masyarakat di Jayapura Raya (Jayapura, Abepura, Sentani) mencemaskan isu adanya 'drakula' yang muncul dalam rupa manusia dan telah menelan korban manusia. Isu yang berkembang dari mulut ke mulut itu mengatakan bahwa drakula tersebut dapat muncul di tempat-tempat gelap, terang, sepi atau sunyi, di atas taksi atau bus, bahkan di tempat ramai seperti pertokoan dan warung makan. Akibatnya banyak masyarakat baik pejalan kaki maupun pengguna jasa angkutan umum atau mobil pribadi, setelah pukul 19.00 WIT tidak berani mondar-mandir seperti biasanya.
- Kapolres Manokwari, AKBP Drs. Bambang Budi Santoso, mengatakan bahwa pihaknya telah merubah sistem operasi di Wasior. Sebelumnya, operasi yang digelar adalah operasi pengejaran untuk menemukan kembali senjata (SS-1 dan Brench Ceko) milik anggota Brimob yang dirampas oleh TPN/OPM. Namun operasi tersebut ternyata telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak Kepolisian. Oleh karena itu Polres Manokwari merubah sistem operasi pengejaran dengan operasi rehabilitasi. Operasi rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat sehingga mereka tidak meragukan lagi aparat kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Mengenai senjata yang hingga saat ini belum ditemukan, Kapolres mengaku bahwa pihaknya masih akan terus berupaya untuk menemukannya. Tetapi operasi pengejaran sudah dihentikan karena tidak efektif.
- Sekitar 600 orang buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Jayapura berunjukrasa di DPRD Papua. Mereka menuntut Departemen Perhubungan (Dephub) agar memperhatikan kesejahteraan mereka dan kinerja di pelabuhan, khususnya kinerja koperasi milik karyawan.
- Asisten I Setda Pemerintah Propinsi Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng, menilai keinginan Pemkab Merauke untuk membentuk Propinsi sendiri sebagai hal yang wajar. Namun untuk menjadi sebuah propinsi menurutnya ada banyak kriteria yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah kesiapan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), serta kesiapan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, Pemkab Merauke perlu berkoordinasi

dengan Gubernur Papua sebelum mengajukan aspirasinya ke pemerintah pusat.

- Menejer British Petrolioum (BP) Indonesia Pusat, Amir Hamzah, menerangkan bahwa Pertamina dan BP yang mengoperasikan proyek LNG Tangguh di Bintuni, Manokwari, telah menandatangani *Letter of Intent* (LoI) untuk mensuplai LNG sebanyak 1,3 juta ton per tahun ke GNPower di Philipina. GNPower merupakan perusahaan swasta yang berbasis di Manila.
- Komite Bersama Perbatasan antara RI-PNG yang sudah berusia 20 tahun, memulai pertemuan dua hari di Alotau, PNG. Delegasi Indonesia diwakili oleh Mendagri Hari Sabarno, Kapolda Papua Irjen Pol. Made Mangku Pastika, dan Gubernur Papua Drs. J. P. Solossa, M.Si. Pertemuan itu membahas pemulangan pengungsi asal Papua yang saat ini bermukim di Vanimo.
- DPRD Merauke mengusulkan agar Merauke dimekarkan menjadi sebuah propinsi tersendiri.

8 November

- Isu adanya 'drakula' di Jayapura Raya meluas dan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat.
- Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing, S.H., dengan tegas menyatakan akan membubarkan kegiatan peringatan 1 Desember jika Theys bersama pendukungnya ternyata nekat melakukannya, meskipun peringatan itu dilaksanakan di rumah kediaman ketua PDP itu.
- Ketua Pansus HAM DPRD Propinsi Papua, Ny. Pdt. A.W. Iwanggin, mengakui tim yang dipimpinnya belum dapat berbuat sesuatu karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
- Majelis Hakim Mahkamah Militer (Mahmil) III-9 Jayapura yang diketuai Kolonel CHK Somba Sinaga, S.H., menjatuhkan vonis terhadap empat anggota Polri yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan Danramil Jayapura Utara (Japut), almarhum Lettu Inf. Nur Hidayat. Selain dipecat dari anggota Polri, para terdakwa dijatuhi hukuman penjara, yakni 8 tahun penjara untuk Bripda Pol. Laode Esrudin, dan masing-masing 6 tahun penjara untuk Bripda Pol. Samuel Depondoi, Bripda Pol. Ruslan Fakaubun, dan Bripda Pol. Nukrah.
- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Fakfak, Syarif Tjora, S.H.,

mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk tim gabungan dengan melibatkan Polres Fakfak untuk mengusut masalah HPH (Hak Pengusahaan Hutan).

9 November

- Ny. Hasniah Pakdaruddin (43 tahun) dan Salma (24 tahun), pengusaha warung makan di Jl. Baru, Kotaraja, dikabarkan nyaris menjadi korban gigitan "drakula" di Abepura.
- Menyikapi isu 'drakula' yang telah meresahkan dan menimbulkan korban di lingkungan masyarakat Abepura, Camat Abepura, Benhur Tommy Mano, mengatakan akan segera mengambil langkah untuk menyelidiki kebenaran isu tersebut. Ia akan berkoordinasi dengan Koramil, Polsek Abepura, dan juga melibatkan warga masyarakat untuk melakukan ronda malam guna menciptakan keamanan di wilayah Abepura, serta untuk memastikan ada tidaknya 'drakula'.
- Sebanyak satu peleton anggota Brimobda Papua dari Kotaraja tiba di Manokwari untuk melaksanakan program rehabilitasi di Kecamatan Wasior. Pasukan Brimob itu ditampung di gedung Sasana Karya Kabupaten Manokwari untuk menerima arahan dari Bupati dan Kapolres setempat sebelum menjalankan tugasnya di lapangan.

10 November

- Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay, dikabarkan hilang (diculik) di Skyline dalam perjalanan pulang dari Hamadi menuju Sentani seusai mengikuti upacara Hari Pahlawan Nasional atas undangan Komandan Kopassus Satgas Tribuana yang bermarkas di PT Hanurata, Hamadi, Jayapura. Kabar hilangnya Theys disampaikan Aristoteles Masoka (sopir mobil kijang Theys) kepada Ny. Yaneke Ohee Eluay (Istri Theys) sesaat setelah ia meloloskan diri dari penghadangan sekelompok orang tak dikenal di Skyline, sekitar pukul 22.00 WIT.

11 November

- Theys Hiyo Eluay ditemukan di Koya Tengah, Kecamatan Muara Tami, Kabupaten Jayapura, sekitar 50 km dari Jayapura pada pukul 08.00 WIT dalam keadaan tidak bernyawa di dalam mobil

bernomor polisi B-8029-TO yang merupakan mobil milik Theys sendiri. Saat ditemukan, kondisi tubuhnya telah kaku, wajahnya membiru kehitam-hitaman, lidahnya menjulur keluar, serta pada mulut dan hidungnya terdapat darah yang sudah agak mengering. Sedangkan posisi mobilnya hampir masuk ke dalam jurang dengan bagian depannya telah terperosok. Di samping itu kaca di bagian tengah dan pintu depan mobil sudah pecah. Jenazah almarhum kemudian dievakuasi ke RSUD Dok II Jayapura untuk keperluan otopsi.

- Tim dokter yang menangani otopsi almarhum Theys H. Eluay berjumlah enam orang, terdiri dari dokter ahli paru-paru, ahli bedah, ahli kandungan, ahli penyakit dalam, dan ahli forensik. Tim tersebut dipimpin Direktur RSUD Dok II Jayapura, dr. Clemens Manyakori, D.S.P. Proses otopsi berlangsung mulai pukul 16.30 WIT hingga pukul 21.30 WIT. Proses otopsi disaksikan pula oleh Sekjen PDP Thaha Alhamid, Drs. Don AL Flassy, Kapolres Jayapura AKBP Drs. Daud Sihombing, S.H., serta beberapa anggota keluarga almarhum serta anggota PDP dan Panel. Meskipun pada pukul 21.30 WIT kegiatan otopsi sudah selesai, namun tim dokter tidak menjelaskan hasilnya karena harus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing, S.H., mengatakan bahwa kematian Theys Hiyo Eluay diduga akibat dicekik karena saat dikeluarkan dari mobil pribadinya nampak almarhum sedang menggigit lidahnya. Namun, pihak kepolisian masih menunggu kepastian hasil otopsi dari tim dokter RSUD Dok II Jayapura. Untuk mengusut kasus tersebut, kepolisian akan menanganinya secara profesional, yakni melakukan penyelidikan yang intensif, termasuk berusaha menemukan sopir pribadi Theys, Aristoteles Masoka, yang bisa dijadikan saksi kunci kasus tersebut.
- Kematian Theys Hiyo Eluay mengundang emosi dan amarah massa (diperkirakan mencapai 500 orang) pendukungnya di Sentani. Mereka melakukan pengrusakan dan pembakaran beberapa ruko di sekitar pendopo kediaman Theys.
- Sehubungan dengan kematian Theys Hiyo Eluay, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Majelis Ulama Indonesia

(MUI) Propinsi Papua mengeluarkan seruan yang meminta seluruh masyarakat di Tanah Papua agar tidak terprovokasi. Pihak Gereja dan MUI Papua menilai penculikan dan pembunuhan terhadap Ketua PDP dan Ketua LMA itu merupakan tindakan provokasi dari pihak tertentu untuk menciptakan konflik di Tanah Papua.

- Wakapolda Papua, Brigjen Pol. H. Raziman Tarigan, menyatakan bahwa pihaknya telah memberlakukan siaga satu dengan membentuk pasukan gabungan TNI/Polri yang melibatkan TNI Batalyon 751, Zipur Korem 172, Marinir, Kodam XVII/Trikora, anggota Polda Papua, anggota Polres Jayapura, dan anggota Brimobda Papua. Dikatakannya, pasukan yang disiagakan sebanyak tujuh kompi yang disebar untuk mengamankan jalan poros Koya Barat-Skow, perbatasan RI-PNG, Sentani, Abepura, dan Jayapura.

12 November

- Pukul 11.45 WIT, massa mengantar jenasah Theys Hiyo Eluay untuk disemayamkan di kantor DPRD Papua dengan perarakan. Sementara itu sekitar 2000 massa tanpa batas usia yang dipimpin Boy Eluay melakukan *longmarch* menuju Jayapura untuk bergabung dengan 5000-an massa yang sudah ada di gedung DPRD Papua. Mereka melakukan *longmarch* untuk menjaga jenazah almarhum Theys.
- Menyikapi aksi *longmarch* massa pendukung Theys, Wakapolda Papua, Brigjen Pol. H. Raziman Tarigan, mengeluarkan perintah tembak di tempat jika ada pendukung Theys yang bertindak anarkis.
- Komandan Satgas Tribuana, Letkol Inf. Hartomo, bersama Kapendam XVII/Trikora, Letkol Inf. R. Siregar, menggelar jumpa pers di Markas Kopassus Hanurata, Hamadi, Jayapura, untuk menyikapi tudingan massa yang menuding Kopassus sebagai pelaku pembunuhan Theys Hiyo Eluay. Dalam jumpa pers tersebut, keduanya menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya salah satu tokoh pejuang Pepera, Theys Hiyo Eluay, yang selama ini ikut menjaga keutuhan Irian Jaya dalam NKRI. Sementara menanggapi tudingan keterlibatan TNI/Kopassus dalam pembunuhan Theys, Kapendam mengatakan bahwa pembu-

nuhan tersebut mungkin dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengadu domba TNI dengan masyarakat, atau dilakukan kelompok yang merasa tidak senang terhadap Theys dengan tujuan ingin menciptakan kekacauan di Papua.

- Dalam jumpa pers tersebut, Komandan Kopassus, juga membantah pihaknya terlibat dalam pembunuhan Theys Hiyo Eluay. "Sangat bodoh kalau anggota Kopassus dari Satgas Tribuana yang melakukannya. Kami Satgas Tribuana justru sangat mengutuk pembunuh Bapak Theys, karena kami tidak pernah bermusuhan dengan Bapak Theys. Bahkan kami seluruh anggota Kopassus sudah menganggap Theys sebagai bapak kami sendiri di Tanah Papua. Bagaimana mungkin seorang anak membunuh bapaknya sendiri," ujarnya. Namun Hartomo mengakui jika sebelumnya Theys menghadiri syukuran Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2001, di Markas Satgas Tribuana atas undangannya. Hartomo juga menyatakan bahwa pihaknya siap membantu aparat kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut, meski sebatas memberikan informasi. Ia menegaskan bahwa perbuatan membunuh Theys tidak dapat ditolerir dan jika tertangkap pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
- Presiden Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajaran kepolisian di Papua agar melakukan investigasi menyeluruh atas terbunuhnya Ketua PDP Theys Hiyo Eluay.
- Menko Sospolkam Susilo Bambang Yudhoyono, menilai pembunuhan terhadap Theys Hiyo Eluay sebagai upaya mengganggu proses sosialisasi pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua. Pihaknya meminta pemerintah Propinsi Papua agar tidak terganggu dengan peristiwa terbunuhnya Theys. Menurutnya, sosialisasi UU Otsus Papua harus tetap dijalankan untuk membangun kembali Papua di bidang ekonomi, politik, sosial dan keamanan. Sedangkan mengenai pengusutan kasus terbunuhnya Theys, Menko menyarankan agar masyarakat hendaknya menyerahkan proses investigasi kepada pihak kepolisian yang dibantu tim dokter, sehingga tidak menghalangi proses hukum yang ada.
- Tim dokter yang dipimpin dr. Clemens Manyakori menerangkan bahwa dari hasil otopsi pihaknya tidak menemukan tanda-tanda

terjadinya penganiayaan berat pada tubuh Theys Hiyo Eluay. Namun secara medis ditemukan terjadinya penyumbatan saluran pernapasan *(hypoxia)* sebagai penyebab kematian. Menanggapi dugaan adanya cekikan, menurut Clemens tim medis tidak menemukan bekas cekikan dengan tali atau sejenisnya. Sementara jantung Theys, telah dikirim ke laboratorium forensik Universitas Hasanudin Makassar untuk diperiksa.

- Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Drs. Raziman Tarigan, S.H., menyatakan bahwa hingga saat ini pembunuh terhadap Theys Hiyo Eluay masih misterius. Bahkan Aristoteles Masoka (sopir pribadi Theys yang menjadi saksi kunci) juga belum diketahui keberadaannya, meskipun dikabarkan selamat. Namun pihaknya menegaskan bahwa Polri tidak akan menutup-nutupi kasus tersebut, meskipun nanti melibatkan institusinya sendiri. Tarigan juga mengaku jika pihaknya sudah mengumpulkan sejumlah bukti seperti sidik jari yang ada di mobil, yakni pada dashboard dan kunci kontak.
- Sekitar pukul 11.00 WIT, massa melakukan pembakaran untuk yang kedua kalinya di Sentani akibat luapan emosi, amarah, dan kekecewaan mereka terhadap terbunuhnya Theys. Namun pelaku pembakaran itu tidak diketahui, meskipun saat itu aparat kepolisian (Dalmas dan Brimob) sedang berjaga-jaga di Sentani.

13 November

- Komandan Satgas Tribuana X, Letkol Inf. Hartomo, menyatakansiap bila dipanggil oleh yang berwenang untuk diperiksa sehubungan dengan kasus kematian Theys Hiyo Eluay.
- Menko Sospolkam Susilo Bambang Yudhoyono, menyesalkan adanya tuduhan terhadap TNI dan Polri yang dituding berada di balik pembunuhan Theys Hiyo Eluay. Menurutnya pembunuhan Theys bisa saja disebabkan oleh berbagai hal, seperti kriminal murni. Kalaupun pembunuhan itu bermotif politik, latar belakangnya pun bisa saja bermacam-macam.
- Kepala Deputi Operasional Mabes Polri, Komjen Pol. Syachruddin Pagar Alam, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes TNI Cilangkap untuk menyikapi kondisi keamanan di Papua yang dikabarkan memburuk. Mabes Polri sendiri sudah mempersiapkan satu batalyon pasukan Brimob untuk membantu

aparat keamanan di Papua. Rencana penambahan pasukan itu berkaitan dengan status siaga satu di Papua yang belum dicabut. Syachruddin menilai, kematian Theys yang juga tokoh kontroversial itu, telah menimbulkan amarah masyarakat yang bisa berakibat buruk.

- Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, mengatakan bahwa dalam menghadapi kondisi di Papua akhir-akhir ini pihaknya berpedoman pada dua hal. *Pertama,* bagaimana mengusut tuntas kasus pembunuhan Theys sehingga masyarakat mendapat kejelasan mengenai kejadian yang sebenarnya. *Kedua,* bagaimana keamanan masyarakat dapat dijamin sehingga situasi keamanan di Propinsi Papua dapat kondusif seperti keadaan sebelumya. Dalam kasus Theys, motif politik adalah motif pembunuhan yang lebih berat daripada motif pencurian dan perampokan. Oleh karena itu pihaknya akan bekerja secara profesional, independen, transparan dan sangat membutuhkan informasi dari masyarakat. Namun ia mengatakan bahwa penyelidikan yang diterapkan oleh polisi dalam menyelidiki kasus Theys H. Eluay seharusnya menggunakan sistem jemput bola: bergerak keluar mencari saksi, jangan menunggu informasi.
- Selain menyatakan rasa dukacita yang mendalam, Gubernur Papua, Drs. J. P. Solossa, M.Si., menegaskan bahwa pembunuhan terhadap Theys Hiyo Eluay adalah perbuatan yang tidak manusiawi dan biadab dan pihaknya mengutuk dengan keras tindakan tersebut. Ia menilai kematian Theys tidak hanya menimbulkan kepedihan yang dalam bagi keluarganya, tetapi juga bagi berbagai kalangan baik di Papua maupun di tingkat nasional. Terlepas dari statusnya sebagai Ketua PDP, menurutnya Theys adalah tokoh masyarakat dan Ondoafi yang terpandang di hadapan rakyatnya. Oleh karena itu ia memahami jika kematian Theys menimbulkan reaksi di kalangan rakyat.
- Setelah disemayamkan selama sehari di kantor DPRD Papua, jenazah Theys Hiyo Eluay diarak massa dengan *longmarch* dari Jayapura menuju Sentani sejauh 45 km. Sebelumnya dilakukan acara penyerahan kembali jenazah Theys dari pihak DPRD Papua yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Papua, Drs. John Ibo, kepada pihak keluarga dan PDP yang diwakili oleh Moderator PDP, Pdt. Herman Awom, S.Th. Arak-arakan dimulai pukul 09.30

WIT, diikuti sekitar 10.000 orang dari semua usia. Pada pukul 18.00 WIT, massa tiba di Pendopo Heleboy Obhe/Pendopo Ondofolo Obhe Sentani yang menjadi kediaman almarhum Theys sekeluarga. Di sana jenazah Theys Hiyo Eluay disemayamkan sambil untuk menunggu waktu dan tempat pemakaman.

- Pemakaman direncanakan pada 17 November 2001 di lapangan sepak bola Sentani sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak keluarga Theys, tokoh adat Sereh, PDP dengan pihak pemerintah dan DPRD Papua.
- Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pasca kematian Theys Hiyo Eluay, Bupati Manokwari, Drs. Dominggus Mandacan, menggelar pertemuan di Sasana Karya Kantor Bupati. Dalam pertemuan tersebut, Bupati meminta seluruh komponen masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Manokwari. Sebab situasi pasca kematian Theys menurutnya gampang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan provokasi agar timbul kekacauan. Pihaknya meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan menyerahkan sepenuhnya pengusutan kasus kematian Theys kepada pihak berwajib, yakni kepolisian.
- Di Merauke berkembang isu bahwa kematian Theys Hiyo Eluay berkaitan dengan kematian Komandan TPN/OPM Kodap V Merauke, 'Kolonel' Willem Onde.
- Beredar isu di masyarakat bahwa air minum yang berasal dari bak penampungan Waena beracun karena telah ditaburi racun oleh orang tidak dikenal.
- ebuah Pesawat milik AMA jatuh di dekat Nabire, menewaskan empat dari lima penumpangnya.

14 November

- Staf PT Merpati Nusantara di Wamena mengeluhkan banyaknya penumpang yang membatalkan perjalanannya akibat peristiwa pembunuhan terhadap Ketua PDP Theys Hiyo Eluay.
- Elesius Tabuni ditangkap dan ditembak oleh aparat ketika bersembunyi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Aparat menduga Elesius merupakan salah seorang anggota OPM yang terlibat dalam penyerangan di Ilaga. Awalnya Elesius akan dikirim untuk selanjutnya dirawat di rumah sakit militer Jayapura, namun ia

meninggal saat masih dalam perjalan.

15 November

- Uni Eropa mendesak pihak yang berwenang di Indonesia agar menjelaskan kematian Theys dan mengadili para pelaku pembunuhan secepatnya.
- Rakor Polkam membahas kematian Theys, di antaranya membahas dampak politis dan upaya meredam spekulasi kematian Theys Eluay yang beredar baik di dalam maupun di luar negeri.

16 November

- Pihak kepolisian telah meminta keterangan lebih dari 100 orang saksi berkaitan dengan kasus tewasnya Theys Eluay. Hasilnya, seperti dikatakan Kapolda Papua Irjen Pol Made Mangku Pastika dan Kapolres Jayapura AKBP Drs. Daud Sihombing, S.H., telah ditemukan titik-titik terang.
- Sekitar pukul 09.00 WIT, Mapolsek Waropen diserang oleh sekitar 100 orang gerombolan bersenjata yang diduga anggota TPN/OPM. Para penyerang menggunakan lima pucuk senjata api, yakni tiga pucuk jenis SS1, satu pucuk jenis mouser, dan satu pucuk jenis SP. Setelah terjadi kontak senjata dengan polisi, diketahui satu orang anggota TPN/OPM tewas tertembak dan seorang warga sipil menderita luka-luka.

17 November

- Jenasah Theys dimakamkan di lapangan sepak bola Kota Sentani, dihadiri ribuan massa dari berbagai usia dan berasal dari berbagai daerah. Di hadapan massa yang menghadiri acara pemakaman, pihak PDP menyatakan siap melanjutkan perjuangan sesuai mandat dari masyarakat Papua untuk mencapai tujuan perjuangan, yakni mewujudkan aspirasi Papua Merdeka.
- Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika, bertemu dengan pihak PDP di Hotel Sentani Indah. Pertemuan itu melibatkan anggota panel PDP dari 14 Kabupaten/Kota. Kapolda diterima Wakil Ketua PDP, Tom Beanal, yang didampingi Yoris Raweyai, Willy Mandowen, Herman Awom, dan Don AL Fassy. Dalam pertemuan tersebut Kapolda meminta agar PDP membantu kepolisian dengan memberikan informasi-informasi

yang diperlukan agar kasus Theys cepat terungkap. Menurut Kapolda, pembunuhan terhadap Theys telah direncanakan cukup lama dan terorganisir dengan baik dan rapi. Oleh karena itu guna mengungkap kasus tersebut saksi kunci seperti Aristoteles Masoka (sopir Theys) sangat dibutuhkan keterangannya.

- Presiden mengutus Menteri Percepatan Pembangunan, Manuel Kaisepo, untuk mengumpulkan informasi secara lengkap berkaitan dengan tewasnya Theys Eluay. Informasi itu nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam upaya mencari penyelesaian bersama.

18 November

- Kapolri Bimantoro berjanji akan mengerahkan semua kemampuan Polri untuk mengusut secara tuntas kasus meninggalnya ketua PDP, Theys Hiyo Eluay. Menurutnya penyelidik Polri telah menemukan fokus penyelidikan dan mulai menggambarkan ciri-ciri para pelaku. Ia meminta masyarakat agar dapat mempercayai kinerja kepolisian.

19 November

- Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, menerangkan bahwa penyelidikan terhadap kematian Theys Eluay hampir selesai. "Tinggal mengarahkan siapa saja pelaku pembunuhannya," ujarnya.
- Dakwaan JPU terhadap Theys Hiyo Eluay berkaitan dengan kasus dugaan Makar, dinyatakan "gugur demi hukum" oleh majelis hakim PN Jayapura yang diketuai E.H. Sinaga, S.H.
- Komandan Kopassus, Mayjen Amirul Isnaeni, menegaskan bahwa tidak ada anggota Kopassus yang terlibat dalam pembunuhan Theys Eluay. Pihaknya mengancam akan menuntut siapa saja yang menuduh Kopassus.

20 November

- Tim penyelidik Polri kesulitan memperoleh jantung almarhum Theys Eluay karena tidak diizinkan keluarganya untuk dibawa dan diperiksa di Mabes Polri.
- Kapolri menanggapi desakan berbagai pihak yang menginginkan dilibatkannya tim independen internasional untuk mempercepat

proses penyelidikan kasus kematian Theys. Menurut Kapolri, tim tersebut itu diperlukan karena Polri memiliki kemampuan untuk mengungkap kasus itu.

- Menurut Menko Sospolkam, Susilo Bambang Yodoyono,pemerintah pusat telah melibatkan BIN (Badan Intelijen Nasional) untuk menganalisa kemungkinan adanya motif politik dalam kasus kematian Theys Hiyo Eluy.
- Sebanyak 650 pasukan Linud Kostrad diangkut dan mendarat di Merauke untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan pada 1 Desember 2001.

21 November

- Para pemimpin Gereja-gereja se-Papua yang berada di Jayapura berdialog dengan Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika. Mereka juga mengirim surat kepada Kapolri Bimantoro yang isinya mendesak agar dibentuk tim independen yang memiliki kredibilitas tinggi dengan melibatkan Komnas HAM serta ahli-ahli HAM internasional yang tidak memihak dan transparan, demi rasa keadilan masyarakat Papua yang terus-menerus dilukai. Para pimpinan gereja juga meminta secara resmi kepada Polda Papua agar melindungi para saksi yang sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan kasus kematian Theys.
- Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika, menerangkan bahwa pihak kepolisian telah berhasil memeriksa 13 saksi berkaitan dengan upaya pengungkapan kasus kematian Theys. Namun pihaknya masih harus bekerja ekstra dan lebih gigih untuk mendapatkan informasi-informasi baru yang sangat dibutuhkan. Pihaknya juga akan terus mencari Aristoteles yang menjadi saksi kunci.

22 November

- Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, mendukung dibentuknya tim independen internasional karena akan membantu penyelidikan kasus kematian Theys Eluay. Tetapi menurut UU, tim internasional tidak dapat melakukan penyelidikan. Tim tersebut hanya bisa membantu sebatas memberikan informasi atau pengawasan terhadap pekerjaan

penyelidikan yang dilakukan oleh tim nasional. Sebab secara teknis, Polri masih mempunyai kemampuan untuk mengusut kasus kematian Theys.

- Uskup Jayapura, Mgr. Dr. Leo Laba Ladjar, ofm, menyatakan bahwa pihak Gereja-Gereja di Papua siap membantu Polda Papua dalam mengusut kasus kematian Theys Hiyo Eluay hingga tuntas. Namun Uskup Leo meminta keseriusan pihak kepolisian untuk segera mencari dan menemukan saksi kunci, Aristoteles Masoka.
- Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua di Jayapura diserang oleh orang tak kenal.

23 November

- Komnas HAM membentuk tim pencari fakta untuk menanggapi permintaan berbagai pihak guna mengungkap kematian Theys Eluay.
- Di Sasana Krida kantor Gubernur Papua Dok II Jayapura, Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika, mengatakan bahwa pihaknya siap menjamin keselamatan saksi kunci Aristoteles Masoka untuk mengungkap kasus kematian Theys. Ia menegaskan, jika ada yang mengetahui Aristoteles masih hidup agar menghubunginya langsung tanpa perantara. Pihaknya sebagai Kapolda Papua siap menjamin keselamatannya.
- Kontras Jakarta mengungkap adanya dokumen rahasia Rapat Koordinasi Khusus (Rakorkus) yang dilangsungkan pada 8 Juni 2000. Rapat itu dihadiri Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Departemen Pertahanan (Dephan), Mabes Polri, Mabes TNI-AD, Badan Intelijen Strategis (Bais), Bakin (Badan Koordinsi Intelijen Nasional), Staf Teritorial TNI dan Muspida Irian Jaya. Dalam Rakorkus tersebut, nama Theys Hiyo Eluay disebut-sebut sebagai tokoh yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, Rakorkus memutuskan membentuk satu tim yang menjalankan kombinasi operasi terbuka dan tertutup *(clandestine operation)*. Kontras menilai modus pembunuhan Theys persis dengan model pembunuhan Ketua International Forum for Aceh (IFA), Jafar Sidiq. Kontras memperkuat dugaannnya itu dengan dokumen rahasia tersebut yang berisi rencana operasi pengkondisian dan pengembangan jaringan komunikasi. Operasi ini menyikapi arah politik Irian Jaya pasca Kongres Rakyat Papua II yang meng-

inginkan untuk merdeka.

- Mabes Polri membantah dan tidak mempercayai dokumen yang diungkapkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jakarta, yang menduga kematian Theys Hiyo Eluay disebabkan oleh adanya operasi *clandestine* rahasia.

24 November

- Anggota Komnas HAM Indonesia, Dr. Albert Hasibuan, S.H., menilai ada banyak indikasi yang mengarah pada keterlibatan pasukan elite Kopassus Satgas Tribuana dalam kasus kematian Theys. Kecurigaannya itu didasarkan pada hasil penyelidikan unit intelijen kepolisian yang mengungkap adanya keterlibatan Kopassus dalam kasus tersebut. Bahkan menurut Hasibuan, laporan hasil temuan intelijen kepolisian itu sudah disampaikan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri. Tetapi, Presiden sendiri belum memberikan pernyataan menyangkut kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay. Hasibuan juga mengatakan Komnas HAM akan segera melakukan investigasi untuk mengusut kasus tersebut.
- Menanggapi pernyataan Kontras mengenai dugaan adanya operasi *clandestine* dalam pembunuhan Theys Hiyo Eluay, Menko Sospolkam Susilo Bambang Yudoyono meminta Kontras supaya memberikan barang bukti agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Yudhoyono juga meminta TNI/Polri supaya tidak menyembunyikan hasil-hasil temuan yang diperolehnya dalam proses penyelidikan.
- Komandan Kopassus Satgas Tribuana, Kolonel Inf. Hartomo, dan Kapendam XVII/Trikora, Letkol Inf. R. Siregar, sekali lagi membantah jika Kopassus terlibat dalam pembunuhan Theys. Menanggapi dugaan adanya operasi *clandestine* yang diungkap Kontras Jakarta, menurut kedua tokoh TNI tersebut tidak perlu ditanggapi.

25 November

- Menko Sospolkam Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan menempatkan 32.500 anggota TNI dan Polri, atau 51 batalion, di Aceh dan Papua. Penempatan itu semata-mata untuk mempercepat proses penyelesaian damai atas berbagai konflik yang terjadi.

26 November

- Setelah mengirim tim ahli beberapa waktu lalu, Polri mendatangkan kembali tim kedua untuk mempercepat pengusutan kasus kematian Theys Eluay. Dalam penyelidikan yang dilakukan tim kedua ini, Polri melibatkan POM TNI untuk melihat kemungkinan adanya keterlibatan anggota keamanan negara.
- Gubernur Lemhanas, Prof. Dr. Ermaya Suradinata (Mantan Dirjen Kesbang Linmas Depdagri), membenarkan jika pada 8 Juni 2000 ada pertemuan yang melibatkan sejumlah pejabat di Jakarta. Ermaya mengaku, dialah yang saat itu memimpin rapat tersebut. Tetapi ia membantah jika rapat tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan pembunuhan Theys Hiyo Eluay. Ermaya menegaskan bahwa rapat itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan pembunuhan Theys, karena sifatnya hanya rapat koordinasi biasa.
- Wakil Ketua PDP, Tom Beanal, menyatakan bahwa PDP menyambut baik rencana Komnas HAM untuk melakukan investigasi. Tetapi pihaknya pesimis tim itu akan bekerja dengan baik jika tidak melibatkan tim independen internasional dalam proses pengungkapan kasus kematian Theys Hiyo Eluay.
- Pemimpin agama-agama di Papua, baik Kristen maupun Islam, meminta dibentuknya suatu tim pencari fakta yang independen sehubungan dengan kasus pembunuhan terhadap Theys H. Eluay.
- Sebanyak 400 anggota marinir (TNI-AL) ditempatkan di Sorong untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan pada 1 Desember 2001.

27 November

- Berbagai pihak berupaya mengungkap kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay. Kontras Jakarta dengan caranya sendiri memeriksa dokumen "operasi *clandestine*" dari pemerintah pusat dan menuntut pemerintah pusat bertanggung jawab atas kasus Theys H. Eluay. Ketua Dewan penasihat Kontras Jakarta, Munir, S.H., siap berdebat dengan Mendagri tentang operasi *clandestine* kalau dibuka ruang untuk itu. Munir menegaskan, "Penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay terencana dan bermotif politik."
- Mendagri Harry Sabarno membantah tudingan Kontras Jakarta tentang adanya rapat persiapan pembunuhan Theys Hiyo Eluay.

Ia mengatakan bahwa rapat pada 8 Juni 2000 itu hanya menghasilkan sebuah kebijakan pembangunan untuk masyarakat Papua agar tidak terlepas dari NKRI sebagai respons pemerintah atas Kongres Rakyat Papua. Intinya adalah bagaimana agar Irian Jaya tetap dalam paham NKRI. Rapat tersebut juga menghasilkan nota dinas yang kemudian diserahkan kepada Mendagri. Isinya, *pertama,* bagaimana membentuk kesamaan sikap dan bahasa yang diwujudkan dalam *statement* para pejabat pusat maupun daerah dalam menyikapi kondisi Irian Jaya. *Kedua,* perlunya payung hukum untuk menindak pelanggar hukum, termasuk aparat. Namun Mendagri mengatakan bahwa nota dinas tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ada dana operasionalnya.

- Menteri Perekonomian, Syamsul Muarif, menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan rapat kabinet untuk menyikapi kasus kematian Theys Hiyo Eluay. Salah satu keputusannya adalah harus ada kerja sama antara Kapolri dan Panglima TNI untuk mengungkap kasus tersebut secara tuntas.
- PDP menggelar pertemuan di kantor Keuskupan Jayapura untuk mendesak pengusutan kasus kematian Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay. Hasil pertemuan tersebut dirumuskan dalam bentuk tujuh point pernyataan resmi sikap PDP yang akan diumumkan kepada masyarakat luas melalui media cetak dan elektronik, baik lokal maupun nasional. Pernyataan sikap itu ditandatangani oleh Moderator PDP Pdt. Herman Awom. S.Th. dan Sekjen PDP Thaha Moh. Alhamid.[2] Salah satu tuntutannya adalah menentukan *dead line* bagi Polri untuk mengungkap kasus kematian Theys, yakni pada 10 Desember 2001.
- CINCPAC, Laksamana Dennis Blair, menolak keras solusi militer dalam menyelesaikan konflik di Papua dan Aceh. Namun ia menyatakan bahwa dirinya yakin atas ketulusan militer didalam proses reformasi.
- Mendagri Hari Sabarno menegaskan bahwa rencana Operasi Matoa untuk melawan gerakan separatis di Irian Jaya tidak pernah diwujudkan akibat minimnya dana.

---

[2] Lihat lampiran dalam buku ini.

28 November

- Rapat Paripurna Khusus DPRD Papua mengeluarkan enam butir pernyataan sikap. Salah satunya adalah mendesak pemerintah untuk membentuk tim independen guna mengungkap kasus tewasnya Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay.
- Menanggapi tuntutan *dead line* dari PDP, Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika menyatakan mendukung tuntutan tersebut. Ia menerima dan akan menjadikan *dead line* tersebut sebagai pendorong untuk bekerja keras dan cepat dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan pada pihak kepolisian.
- Sekjen PDP Thaha Alhamid, menerima pesan ancaman bahwa dirinya akan mengalami nasib yang sama seperti Theys.

29 November

- Mapolsek Kimaam, Kabupaten Merauke, diserang oleh sekitar 100 orang bersenjata tradisional yang diduga anggota TPN/OPM yang beroperasi di wilayah tersebut. Dua orang penyerang ditembak aparat kepolisian dalam peristiwa itu.
- Sebanyak 50 warga Papua melakukan aksi protes di luar gedung PBB di Jakarta. Mereka menuduh ada konspirasi antara pemerintah dan militer dalam kasus pembunuhan Theys.

30 November

- Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika, mengatakan bahwa pihaknya akan terus memperbanyak saksi yang akan diperiksa sehubungan dengan kasus kematian Theys Hiyo Eluay. Ia juga menerangkan bahwa Komandan Satgas Tribuana Kolonel Inf. Hartomo dan anggotanya sudah dimintai keterangan sebagai saksi.
- Kapolres Merauke, AKBP Drs. Yohanes Agus Mulyono, membenarkan adanya peristiwa penyerangan terhadap Mapolsek Kimaam. Ia mengatakan, TPN/OPM yang melakukan penyerangan itu menamakan dirinya 'Pasukan Tiga Buta'. Kelompok yang dipimpin Lazarus Kiwa tersebut merencanakan untuk membakar Mapolsek dan merampas senjata milik aparat kepolisian. Dalam aksi tersebut dua orang dari Pasukan Tiga Buta tewas tertembak dan dua orang lagi, yakni Trenius Parawa dan Samuel Yawahingga, mengalami luka tembak sehingga harus

menjalani perawatan intensif di RSUD Merauke. Kapolres mengatakan, Pasukan Tiga Buta yang beranggotakan sekitar 100 orang itu adalah kelompok yang selalu mengacau keamanan di wilayah Kecamatan Kimaam, Kabupaten Merauke.

- Transmigran eksodus Bonggo VIII Armopa, Kabupaten Jayapura, kembali ke daerah asalnya masing-masing (NTT dan Jawa) dengan menumpangi KM Dobonsolo atas (biaya tiket) tanggungan pemerintah. Mereka telah berjuang selama hampir dua tahun menuntut keadilan untuk merperbaiki nasibnya sebagai korban program transmigrasi, yakni sejak Februari 2000 hingga 30 November 2001.

DESEMBER 2001

1 Desember

- Pasukan TNI dan Polri menggerebek markas TPN/OPM pimpinan Leo Wansman di Desa Anusuar, Kecamatan Pantai Barat, Kabupaten Jayapura. Dalam penggerebekan itu disita sejumlah barang bukti, antara lain senjata api jenis mouser, lima bilah parang, lima bilah pisau dapur, 20 buah busur dan anak panah, satu kantung plastik belerang, serta sehelai bendara Bintang Kejora. Sempat terjadi kontak senjata sebelum kelompok TPN/OPM itu lari ke hutan.
- Pratu MS, salah seorang anggota Kostrad Linud 501 Madiun, ditangkap polisi karena memiliki senjata api rakitan dan melakukan penganiayaan terhadap seorang guru bernama Toni Gedoan. Polisi kemudian menyerahkannya ke Denpom Sorong.
- Perayaan 1 Desember berlangsung tenang dan penuh damai di seluruh Papua. Sekitar 2000 orang di Sentani menghadiri ibadah dan perayaan bersama, dipimpin oleh Tom Beanal.

3 Desember

- Kapendam Trikora, Letkol Inf. R. Siregar, memberikan tanggapan atas tuduhan yang diarahkan pada Kopassus yang diduga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kematian Theys H. Eluay. Kapendam mengatakan, "Setiap tuduhan hendaknya disertai bukti-bukti yang menguatkan. Semua tuduhan terhadap TNI dan

Kopassus itu sama sekali tidak beralasan dan sangat mengada-ada karena tuduhan itu semuanya hanya didasarkan pada dugaan saja, tanpa disertai oleh bukti yang kuat".

4 Desember

- Di hadapan Komisi II DPR RI, Kapolda Irja Irjen Pol. Made Mangku Pastika, menjelaskan bahwa pihaknya sudah memeriksa 47 saksi sipil, 15 saksi dari TNI AD, dan 2 saksi dari Polri berkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap ketua PDP, Theys Hiyo Eluay. Pihaknya meyakini bahwa penculikan dan pembunuhan terhadap Theys dilakukan oleh "kelompok tertentu".
- Ketua Tim Pencari Fakta Komnas HAM, Bambang W. Soeharto, mengatakan bahwa tim yang dipimpinnya tengah berupaya mencari informasi dari berbagai pihak mengenai kematian Theys, karena masalah tersebut sudah menjadi sorotan dunia internasional. Misteri kematian tokoh PDP itu harus terungkap dan negara jangan sampai dikorbankan hanya untuk menutupi oknum yang tidak bertanggung jawab.
- Para pemimpin agama yang diwakili oleh GKI di Tanah Papua, Keuskupan Jayapura, MUI Papua, dan Sinode GKII, mengirim surat kepada Komnas HAM yang isinya menolak pengiriman tim pencari fakta dan meminta tim penyelidik independen.
- Saat bertemu Ketua DPR Akbar Tandjung, Wakil Ketua PDP, Tom Beanal, mendesak DPR membentuk Pansus untuk menyelidiki kematian misterius Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay. "Kami sudah tidak percaya lagi dengan kinerja polisi dan Komnas HAM. Oleh karena itu kami menginginkan DPR membentuk Pansus," ujarnya.
- Berkaitan dengan insiden berdarah di Kimaam, Forum Merauke untuk Demokrasi (Formed) mengeluarkan pernyataan yang intinya mengutuk keras aksi penembakan yang dilakukan aparat karena pada akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. Formed juga meminta Bupati Merauke, John Gluba Gebze, dan Ketua DPRD Merauke, Pieter Tiniyap, agar menangani kasus tersebut secara serius dengan membentuk tim independen.
- Tiga orang staf ICRC (Palang Merah Internasional), yakni Godefridus Dijkman, Jean Nordman, dan Robert Irary, gagal bertemu dengan para tahanan kasus Wąsior di Polres Manokwari

karena tahanan tersebut sudah dipindahkan ke LP Manokwari.

5 Desember

- Komandan Kopassus Satgas Tribuana, Letkol Inf. Hartomo, membantah tuduhan Elsham Papua Barat yang menyatakan bahwa Aristoteles Masoka (sopir Theys yang juga saksi kunci pembunuhan terhadap Ketua PDP itu) berada di tangan Satgas Tribuana. Ia menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan fitnah. Ia menambahkan, selama ini Kopassus sama sekali tidak pernah mengusik keberadaan PDP, bahkan belum pernah mempunyai masalah dengan PDP. Kopassus hanya menangani masalah TPN saja, sedangkan masalah OPM, termasuk PDP, lebih banyak ditangani oleh polisi.
- Kasat Serse Polres Jayapura, AKP Helmi Kwarta, yang terlibat dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Theys, menyatakan bahwa dia dan keluarganya diteror melalui telpon selama dua hari berturut-turut. Namun ia mengaku tidak takut menghadapi teror itu.
- Hingga 30 November 2001, seperti yang dicatat oleh Subdin BP-P dan PL Dinas Kesehatan Propinsi Papua, penderita HIV/AIDS di Papua terus berkembang. Pengidap HIV/AIDS tercatat sudah mencapai 646 orang, masing-masing 384 orang pasien penderita HIV, dan 263 orang pasien penderita AIDS, dan jumlah yang meninggal mencapai 131 orang pasien.
- Jean Nordman, salah seorang delegasi ICRC di Jayapura, mengatakan bahwa hak-hak tahanan politik harus diperhatikan sesuai dengan konvensi Genewa. Bila terjadi sesuatu pada tahanan atau tahanan meninggal dunia, atasan lembaga yang menangani tahanan dapat dibawa ke Mahkamah Internasional di Belanda. Berkaitan dengan hal itu pihaknya akan mengadakan kunjungan ke setiap Polres di Papua untuk melihat dari dekat kondisi para tahanan di sana.
- Bupati Merauke, John Gluba Gebze, menyetujui usulan pembentukan tim independen untuk mengusut kasus Kimaam. Pihaknya bahkan siap datang ke Kimaam untuk bertemu dan berdialog dengan semua komponen masyarakat di daerah tersebut, sekaligus mendengarkan aspirasi mereka.

6 Desember

- Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika, menyatakan bahwa isu yang mengabarkan bahwa Aristoteles Masoka sedang berada di PNG adalah tidak benar. Pernyataannya itu dikeluarkan setelah dua perwira Polda Irja, yakni Kapuskodalops Kombes Pol. Drs. Bekto Suprapto, M.Si. dan Kapolres Jayapura AKBP Drs. Daud Sihombing, memeriksa kebenaran informasi tersebut ke PNG. Semetara itu Wakapolda Irja, Brigjen. Pol. Drs. Raziman Tarigan, S.H., menegaskan bahwa pengusutan kasus terbunuhnya Ketua PDP terus berlanjut dan pelakunya akan terus dikejar. Selain itu ia menyatakan, kemungkinan 99% sopir Theys, yakni Aristoteles Masoka, sudah tidak hidup lagi.
- Ketua DPRD Merauke, Drs. Pieter M. Tiniyap, menyatakan bahwa DPRD juga mendukung dibentuknya tim independen untuk mengusut kasus Kimaam. Bahkan menurutnya DPRD sendiri dalam waktu dekat akan menurunkan tim ke Kimaam karena menilai kasus Kimaam merupakan masalah kausal yang patut mendapatkan perhatian serius dari semua pihak agar kejadian serupa tidak meluas.
- Dandim 1710/Mimika, Letkol (Kav.) Jamaluddin, mengatakan bahwa pasukan yang dikirim untuk mengamankan Kecamatan Ilaga, Puncak Jaya, telah ditarik dan diganti dengan pasukan yang baru. Ia mengatakan, keadaan di Kecamatan Ilaga makin kondusif dan warga masyarakat maupun aparat pemerintah telah menjalankan aktivitasnya secara normal.
- Lima warga Papua yang ditangkap karena terlibat dalam aksi pengibaran Bendera Bintang Kejora pada Desember 2000 di Desa Brongkendik, Fakfak, akhirnya dibebaskan oleh Polres Fakfak.

7 Desember

- Gubernur Papua, Drs. J. P. Solossa, M.Si., mengatakan bahwa UU Otonomi Khusus Papua akan diserahkan oleh Presiden Megawati pada 22 Desember 2001 di Jayapura sebagai hadiah Natal kepada masyarakat Papua. Presiden juga akan menghadiri perayaan Natal Gabungan di GOR Jayapura.
- Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Drs. Pieter Matemko Tiniyap, membenarkan jika pihak eksekutif dan legislatif Merauke telah sepakat untuk mengusulkan empat nama kabupaten dan satu kota

yang akan dimekarkan. Masing-masing Kabupaten Boven Digul dengan ibukota Tanah Merah, Kabupaten Mappi dengan ibukota Kepi, Kabupaten Asmat dengan ibukota Agats, Kabupaten Merauke dengan ibukota Kurik, dan Kotamadya Merauke dengan ibukota Merauke. Usulan tersebut akan dibawa ke Jakarta sebelum 10 Desember 2001.

- ❖ Puluhan ibu-ibu, pemuda, dan anggota Panel PDP Nabire yang dipimpin oleh Pieter Edoway, Ketua Panel Nabire, menemui DPRD Kabupaten Nabire untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menyampaikan lima butir tuntutan: [1] Dilaksanakannya dialog nasional untuk pelurusan sejarah Papua dan menuntut solusi damai atas sengketa politik Papua Barat; [2] Segera dibentuk komisi investigasi yang benar-benar independen untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran HAM, teror, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua; [3] Menolak tanpa syarat pengerahan pasukan non-organik, termasuk 50 batalyon gabungan yang akan dikirim oleh Menko Sospolkam; [4] Jadikan Tanah Papua sebagai zona damai yang bebas dari penindasan, kesewenang-wenangan dan kekerasan; [5] Menuntut DPRD kabupaten Nabire agar segera mengadakan sidang paripurna untuk menetapkan suatu peraturan daerah tentang perlindungan penduduk pribumi.
- ❖ Bupati Manokwari, Drs. Dominggus Mandacan, meninjau sejumlah proyek dengan membawa martil seberat 5 kg dan 3 kg. Bupati kemudian melakukan tes terhadap proyek parit, talud, dan MCK. Setelah dites, terbukti bahwa kualitas proyek-proyek itu rendah sehingga Bupati memerintahkan agar kontraktor memperbaikinya. Jika tidak, kontraktor-kontraktor itu tidak akan mendapatkan proyek di masa mendatang.

9 Desember

- ❖ Sekda Kabupaten Puncak Jaya, Drs. Henock Ibo, menyatakan bahwa masyarakat Puncak Jaya belum pernah merasakan adanya subsidi karena masyarakat harus membeli barang dengan harga yang ditetapkan pengusaha. "Subsidi apa yang masuk ke Puncak Jaya dan untuk jenis barang apa? Selama ini masyarakat sama sekali tidak pernah merasakan adanya barang yang disubsidi, padahal kami tahu kalau pemerintah telah menganggarkan subsidi sebanyak Rp 3 miliar, termasuk untuk Puncak Jaya.

Namun kenyataannya masyarakat daerah itu sama sekali tidak pernah merasakan subsidi," ujarnya.

10 Desember

- Kaum Perempuan Papua di Jayapura yang dipelopori Solidaritas Perempuan Papua, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Wanita Katolik, Wanita Islam, dan komponen perempuan lainnya memperingati hari HAM sedunia dengan membagikan bunga di sejumlah lokasi strategis di Sentani, Waena, Abepura, Kotaraja, hingga Jayapura.
- Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, mengungkapkan bahwa penyelidikan yang dilakukan Polda terhadap kasus kematian Theys hampir selesai. Namun diakuinya hasil penyelidikan itu belum bisa dibeberkan kepada publik untuk kepentingan penyelidikan itu sendiri, karena polisi dalam hal ini sebatas memeriksa tersangka. Di samping itu, jika terjadi kesalahan dalam pengungkapan bisa-bisa berbalik menjadi tuntutan kepada polisi, juga dapat mempengaruhi penyelidikan. Menurutnya, semua itu dapat dibuka dan dibuktikan hanya di tingkat pengadilan.
- Dubes New Zealand untuk Indonesia, Chris Elder, melakukan kunjungan kerja ke Jayapura dan bertemu dengan Muspida Propinsi Papua. Dalam sebuah pembicaraan tertutup dibahas mengenai kerja sama di bidang ekonomi kerakyatan dan masalah pendidikan. Juga disinggung-singgung masalah pembunuhan terhadap Ketua PDP, tetapi pembicaraan masalah tersebut oleh Muspida diarahkan kepada Kapolda Irja. Dubes juga melakukan pertemuan dengan DPRD Propinsi Papua untuk membahas Otonomi Khusus di Papua.
- Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Sorong terpilih, Drs. J.A. Jumame dan Hengki Rumbiak, berlangsung lancar di aula Oksigen Pertamina, Sorong. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Irja, Drs. J. P. Salossa, M.Si.
- Wagub Papua, drh. Constan Karma, mengakui bahwa tidak hanya Kabupaten Puncak Jaya yang belum menerima subsidi, melainkan juga dua kabupaten lain di Papua, yakni Kabupaten Jayawijaya dan Mimika. Pembagian dana subsidi yang bersumber dari royalti PT Freeport Indonesia telah dibahas secara bersama-

sama, dengan melibatkan Pemda Propinsi Papua, pemerintah tiga kabupaten, serta instansi terkait. Pemberian subsidi itu didasarkan pada SK Gubernur No. 5 tahun 2001. Sementara itu Kepala Irian Bhakti (anak perusahaan dari Dolog, yang ditugaskan untuk menyalurkan sembilan bahan pokok ke seluruh Papua), Drs. Laurentius, menilai pernyataan Sekda Kabupaten Puncak Jaya keliru dalam hal pemberian subsidi. Menurutnya, selama ini pihaknya selalu mengirimkan barang-barang bersubsidi secara rutin ke Puncak Jaya melalui KUD Norewa dan KUD Sehat milik Pemda Kabupaten Puncak Jaya.

❖ Pasukan Kopassus tambahan tiba di Timika. Sebanyak 300 orang berdemonstrasi di depan kantor DPRD Timika untuk memprotes penambahan pasukan tersebut.

11 Desember

❖ Delegasi Dubes Selandia Baru untuk RI ditolak bertemu dengan Pangdam XVII/Trikora, Mayjen TNI Mahidin Simbolon, dengan alasan tidak ada ijin dari Panglima TNI. Pertemuan dilanjutkan dengan Kapolda Papua. Dalam pertemuan itu dibicarakan soal keamanan di Papua, termasuk kasus pembunuhan Theys.

❖ Ribuan massa yang dikoordinasikan oleh Sonamapa (Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua) melakukan unjukrasa di kantor Gubernur Papua. Mereka menyampaikan empat tuntutan: [1] Menuntut Pemda Papua agar segera menjawab misteri kematian Theys H. Eluay secara arif dan bijaksana, dan segera mendatangkan tim investigasi internasional untuk mengungkap kasus tersebut; [2] Pemda Papua diminta untuk memfasilitasi dibukanya dialog nasional maupun internasional mengenai status politik Papua Barat; [3] Menolak secara tegas Otonomi Khusus Papua karena bukan kehendak rakyat; [4] Menolak kehadiran pasukan militer atau batalyon tambahan di Papua dan segera menarik seluruh pasukan non-organik dari Papua.

❖ Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing, menegaskan bahwa pada prinsipnya hasil penyelidikan kasus tewasnya Ketua PDP, Theys H. Eluay, terus mengalami kemajuan. Ia menggambarkan bahwa pelaku pembunuhan Theys adalah 'musang berbulu ayam, di kandang ayam'. Kapolres juga memperkirakan kalau Aristoteles sudah tewas karena belum juga ditemukan

dalam tenggang waktu yang cukup lama.

- Kakanwil Kehakiman Propinsi Papua, M.B. Aronggear, menjelaskan sebab-sebab seringnya narapidana kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura. Menurutnya ada beberapa kemungkinan, seperti adanya pemberian cuti kepada narapidana menjelang masa bebas tahanan, pemberian ijin untuk menjenguk keluarga, dan pemberian asimilasi yang semuanya diatur berdasarkan ketetapan yang ada. Tapi masalah kaburnya narapidana bisa juga disebabkan oleh kurangnya petugas jaga di LP Abepura. Idealnya minimal ada tujuh orang petugas jaga, tetapi selama ini hanya ada tiga orang saja.
- Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing, S.H., menjelaskan bahwa 80% kasus-kasus kriminal seperti perkosaan, perkelahian, dan kecelakaan lalu lintas dipicu oleh pelaku yang mengonsumsi minuman keras (miras). Pernyataan itu dikeluarkan Kapolres saat melakukan pemusnahan 2.000 liter miras 'cap tikus' di Entrop, Jayapura.
- Sekitar 1.300 orang mahasiswa dan pemuda melakukan unjukrasa dengan berjalan kaki dari Abepura menuju Kantor Gubernur Papua di Jayapura. Mereka memprotes proses penyelesaikan kasus pembunuhan Theys yang dinilai tidak mengalami perkembangan. Mereka juga menolak rencana kunjungan Presiden Megawati ke Papua pada 22 Desember 2001.

12 Desember

- Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, mengumumkan sayembara: bagi siapa saja yang dapat memberi informasi mengenai keberadaan Aristoteles Masoka, akan diberi hadiah berupa mobil eks-Jepang. Sayembara itu dikeluarkan karena Polda belum mendapatkan informasi akurat mengenai keberadaan sopir Theys tersebut.
- Tiga pimpinan LSM di Jayapura, yakni Pieter Ell, S.H. (Kontras Papua), John Rumbiak (Supervisor Elsham), dan Demianus Wakman (Direktur LBH Jayapura) menemui Kapolda Papua untuk bertukar pikiran serta informasi mengenai situasi yang berkembang di Papua dan pengusutan kasus Theys.
- Bupati Jayapura, Habel Suwae, menjelaskan bahwa sejumlah oknum camat yang tidak melaksanakan tugas di lingkungan

kerjanya telah ditangani oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). "Badan itulah yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sanksi kepada oknum bersangkutan," ujarnya.

❖ Empat orang warga PNG ditangkap oleh Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Papua di sekitar perairan Holtekamp, Jayapura. Keempat orang itu diduga kuat hendak menyelundupkan BBM ke Vanimo. Mereka ditangkap karena tidak membawa *border pass* (kartu pelintas batas). Sementara BBM yang mereka bawa terdiri dari 240 liter bensin dan 120 liter minyak tanah.

13 Desember

❖ Unjukrasa di kantor Gubernur Papua dibubarkan oleh pasukan Dalmas Polres Jayapura sekitar pukul 00.30 WIT. Dalam peristiwa pembubaran itu sejumlah orang mengalami luka-luka serta sejumlah lainnya ditangkap dan dibawa ke Polres Jayapura. Siang harinya, para pengunjukrasa datang kembali ke kantor gubernur dan menuntut bertemu dengan Gubernur Papua. Muspida Papua, yang terdiri dari Gubernur, Pangdam, dan Kapolda akhirnya bersedia menemui massa di halaman kantor gubernur setelah mengadakan rapat dengan 15 orang wakil pengunjukrasa di Gedung Negara. Pada kesempatan itu Pangdam menjelaskan soal batalyon gabungan dan pasukan non-organik yang ditempatkan di Papua, yang menurutnya dimaksudkan untuk menjaga perbatasan. Sementara Kapolda menjelaskan soal kasus terbunuhnya Theys, dan Gubernur menjelaskan soal Otsus untuk Papua.

❖ Sekjen Komnas HAM, Asmara Nababan, menyatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk tim independen guna mengusut kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay. Anggota Tim Independen Nasional tersebut terdiri dari unsur Pemda Irja, LSM, pemerintah, polisi, militer, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Papua.

14 Desember

❖ Ny. Dorsila Ayomi/Kapouw, ibu dari Aristoteles Masoka, menyatakan kesedihannya karena anaknya yang menjadi sopir Theys

itu belum juga ditemukan. Pihaknya meminta agar Pemda Papua segera bertindak dan tidak terkesan membisu. Pihaknya juga mengaku lelah dalam menanggapi isu-isu yang menginformasikan keberadaan Aristoteles, karena setiap kali dicek ternyata bohong. Isu-isu itu dinilainya sebagai upaya untuk mengadu domba antara keluarganya dengan pihak penyidik. "Sebagai ibu, saya sangat sedih. Apalagi jika memang benar Ari (panggilan Aristoteles – *pen.*) sudah dibunuh. Biar mayatnya ataupun tulangnya tolong dikembalikan saja. Kami tak akan bisa melupakan dia sebab Ari tergolong anak yang ramah dan sopan serta mempunyai banyak kreasi," ujarnya. Aristoteles Masoka yang lahir di Jayapura, 31 Januari 1980, adalah anak dari Yonas Masoka dan Ny. Dorsila Ayomi/Kapouw. Ia adalah mahasiswa ISTP (Institut Sains dan Teknologi Papua) Jayapura, jurusan Arsitektur.

- Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, menegaskan bahwa orang yang menyembunyikan Aristoteles adalah orang yang melakukan pembunuhan terhadap Ketua PDP, Theys H. Eluay.
- Menanggapi usulan Mensesneg Bambang Kesowo agar PDP minta abolisi untuk Theys H. Eluay, sekjen PDP Thaha Alhamid, mengatakan, "Abolisi bukan suatu prioritas bagi kami, dan kami tidak pernah memikirkannya. Prioritas kami adalah menjamin hak hidup rakyat dan dialog bersama untuk menegakkan keadilan di Tanah ini. Prioritas ini bukan hanya untuk PDP, namun demi seluruh rakyat Papua".
- Langkah Bupati Jayapura yang menyerahkan penanganan oknum camat yang lalai dalam bertugas kepada Baperjakat, oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura, Nahor Sibiar, dinilai tidak tepat. Menurutnya kasus tersebut tidak perlu diserahkan kepada Baperjakat, melainkan harus ditindak tegas dan diberi sanksi yang keras oleh bupati sendiri.
- Ketua DPP Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), M.C. Da Lopez, mengemukakan bahwa untuk 4-5 tahun ke depan Papua idealnya dimekarkan menjadi enam propinsi. Menurutnya untuk membentuk propinsi atau kabupaten baru, esensi utamanya adalah potensi daerah, bukan dari kuantitas atau jumlah penduduk. Walaupun jumlah penduduknya sedikit, tetapi jika

potensi daerahnya memenuhi kebutuhan, maka daerah itu telah memenuhi syarat untuk dijadikan propinsi.

15 Desember

- Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Drs. Pieter Matemko Tiniyap, menegaskan bahwa masalah pemekaran wilayah Merauke menjadi propinsi tersendiri merupakan aspirasi dari rakyat. Pihaknya bahkan telah menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah pusat melalui Pansus Otsus Papua. Hal senada dikemukakan Bupati Merauke, Drs. John Gluba Gebze. Ia menegaskan bahwa komitmen masyarakat sudah bulat mengingat persyaratan untuk pembentukan Propinsi Merauke sudah layak ditindaklanjuti, misalnya luas wilayah, potensi daerah, komitmen masyarakat, aspek pemerintahan, dan norma-norma masyarakat adat. Sebagai langkah awal, telah dimulai upaya pemekaran kabupaten dan kota.
- Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Jayawijaya, Drs. Viktor Kudiay, merasa kecewa dengan pimpinan proyek permodalan untuk pengusaha golongan ekonomi lemah tahun 2001, karena tidak memiliki laporan tertulis mengenai penyaluran dana sebesar Rp 2 miliar.
- Bupati Puncak Jaya, Eliezer Renmaur, mengadakan program berbusana dengan memberikan pakaian dan sabun kepada penduduk yang belum menggunakan busana/pakaian modern. Program tersebut dimulai dari SD, SLTP, SMU, serta sekolah-sekolah Alkitab, dengan alasan agar kegagalan "operasi pemberangusan koteka" pada 1970-an oleh Pemda Kabupaten Jayawijaya tidak terulang.

17 Desember

- Ketua HPI (Himpunan Pengusaha Indonesia) Wilayah Papua, Bosco Fernandez, menyambut baik kebijakan Pemprop dan DPRD Propinsi Papua agar sejumlah perusahaan yang beroperasi di Papua harus mendirikan kantornya di Papua.
- Persoalan pembayaran kompensasi kayu antara PT Sumalindo dengan masyarakat Tor Atas sebagai pemilik hak ulayat, dibahas oleh Komisi B DPRD Jayapura, Dinas Kehutanan, PT Sumalindo, dan tokoh-tokoh masyarakat dari Tor Atas Kabupaten Jayapura.

Masalah tersebut sudah berlangsung sejak 1993-1997 dan 1997-2000, serta belum terselesaikan hingga sekarang. Dalam pembahasan itu, perwakilan masyarakat menuntut agar pembayaran ganti rugi dibayarkan saat itu juga. Sayangnya, pihak perusahaan hanya diwakili oleh wakil pimpinan yang tidak berwenang. Di samping itu perusahaan menganggap wakil tokoh masyarakat Tor Atas yang hadir tidak representatif karena para wakil itu tinggal di Jayapura. Menurut perusahaan, pihaknya telah membayar ganti rugi tersebut, namun setiap kali muncul kembali pihak yang mengaku merasa berhak atas pembayaran hak ulayat itu. Untuk menanggulangi masalah ini, Dinas Kehutanan akan memberi data-data kepada PT Sumalindo sebagai pegangan pembayaran ganti rugi.

18 Desember

- Sonamopa kembali melakukan unjukrasa di kantor DPRD Papua dengan mengajukan beberapa tuntutan: [1] Meminta DPRD Papua untuk memanggil gubernur dan rektor Uncen sebagai penggagas UU Otsus Papua, untuk menjawab secara arif, bijaksana, dan benar atas kewenangan siapa Otsus dipaksakan di Papua Barat. Soalnya, pada 13 Maret 2001 perwakilan rakyat Papua telah menolaknya; [2] Menuntut pemerintah Indonesia melalui DPRD Papua agar segera menyampaikan kepada rakyat apa yang menjadi keinginan rakyat melalui mekanisme demokrasi yang adil, [3] Meminta negara menjawab seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sejak 1962-2000; dan [4] Meminta DPRD membuat suatu mekanisme untuk menyusun *draft* referendum.
- Wagub Papua, drh. Constan Karma, memastikan bahwa dalam kunjungan Presiden Megawati pada 22-23 Desember 2001 nanti tidak ada dialog dalam bentuk apapun. Sesuai jadwal, Presiden hanya akan menghadiri perayaan Natal sekaligus menyerahkan UU Otonomi Khusus Papua.
- Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, membenarkan adanya rekomendasi Komnas HAM kepada Presiden untuk membentuk tim independen guna mengusut kasus kematian Theys H. Eluay. Kapolda mendukung pembentukan tim tersebut dengan maksud agar pengungkapan kasus menjadi lebih efektif.

❖ Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya, Pdt. Timotius Wakur, menjelaskan bahwa DPRD akan memanggil pimpro penyaluran dana bantuan bagi pengusaha golongan ekonomi lemah. Pihaknya menduga adanya ketidakberesan dalam penyaluran dana sebesar Rp 2 miliar dalam proyek tersebut.

19 Desember

❖ Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Endriartono Sutarto, menyatakan dukungannya terhadap pihak manapun yang menjalankan tugas mengusut kematian Theys H. Eluay. Ia bahkan berjanji tidak akan menutup-nutupi jika ada oknum TNI yang terlibat dalam kasus pembunuhan Ketua PDP itu. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kebijakan apapun dari TNI dan pemerintah berkaitan dengan terbunuhnya Theys. "Kalaupun ada oknum atau siapapun dan dari pihak manapun yang terlibat, itu merupakan tindakan tanpa perintah," ujarnya.

❖ Gubernur Papua, Drs. J. P. Solossa, M.Si., mengadakan pertemuan dengan para pemimpin agama yang jumlahnya mencapai puluhan orang. Gubernur mengharapkan perayaan Natal dan penyerahan UU Otsus Papua oleh Presiden Megawati pada 22 Desember 2001 dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu ia minta dukungan dan keterlibatan tokoh agama dan masyarakat untuk menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah pusat akan membentuk tim independen untuk mengusut kematian Ketua PDP, Theys H. Eluay.

❖ Ratusan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Jayawijaya mendatangi kantor Bupati Jayawijaya. Mereka mempertanyakan penyaluran beras JPS/OPK yang sejak November – pertengahan Desember 2001 tidak dibagikan lagi. Sekda Kabupaten Jayawijaya, Drs. Jason Muabay, menjelaskan kepada masyarakat bahwa masalah tersebut bukan disebabkan oleh kesengajaan Dolog tetapi memang karena stok beras di gudang Dolog maupun di gudang Kota Wamena sudah tidak ada lagi. Penjelasan itu kemudian dibuktikan sendiri oleh masyarakat dan Sekda yang langsung memeriksa gudang Dolog yang sudah tidak memiliki lagi stok beras JPS/OPK.

20 Desember

- Wakil Sekjen PDP, Drs. Agus A. Alua, mendesak pemerintah agar segera mengungkap pelaku pembunuhan Ketua PDP, Tehys H. Eluay, sebelum Presiden Megawati datang ke Jayapura. Dikatakannya, PDP juga telah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri mengenai hal tersebut. Ia menegaskan bahwa PDP menolak upaya pembelokan kasus Theys yang diarahkan pada perkara kriminal yang nantinya hanya berujung ke pengadilan biasa atau pengadilan militer. Upaya serupa juga dilakukan dengan meniupkan isu bahwa Theys dibunuh oleh kelompok TPN/OPM di perbatasan, yang tujuannya hendak mengadu domba antara PDP dengan TPN/OPM.
- Sekretaris Umum PGBI, Pdt. S. Sofyan Yoman, mengatakan bahwa pelaku pembunuhan terhadap Ketua PDP tidak bisa dikatakan dilakukan oleh oknum, karena pembunuhan itu dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan negara, bukan kejahatan oknum. Kalau dari hasil investigasi membuktikan adanya keterlibatan anggota TNI, maka pernyataan KSAD yang mengatakan bahwa itu tindakan oknum TNI terlalu pagi. Sebab, tidak mungkin anggota TNI melakukan tindakan tersebut tanpa adanya perintah atasan. "KSAD tidak boleh bilang itu tindakan oknum sebab bagaimana mungkin seorang anak buah bertindak tanpa perintah atasan. Apalagi yang dibunuh bukan sembarang orang," ujarnya.
- Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, mengatakan bahwa pihak kepolisian tidak mungkin mengumumkan hasil penyelidikan terhadap kasus kematian Ketua PDP, Tehys H. Eluay, karena sesuai KUHAP tindakan tersebut melanggar hukum. Namun ia setuju jika kasus tersebut perlu segera dituntaskan. Ia juga menyatakan bahwa saat ini penyelidikan terhadap kasus tersebut sudah hampir selesai dan tinggal menunggu hasil penyelidikan dari tim independen yang dibentuk Presiden.
- Menko Sospolkam, Susilo Bambang Yudhoyono, menegaskan bahwa pihaknya belum bisa memastikan kapan Presiden Megawati bisa berkunjung ke Papua. Dalam sebuah rapat konsultasi, Presiden Megawati memutuskan bahwa yang terpenting buat Papua bukan soal kunjungannya ke daerah itu, tetapi bagaimana melaksanakan komitmen untuk menyelesaikan

masalah Papua secara menyeluruh. Menurut Menko, kondisi keamanan di Papua dalam keadaan baik. Sementara kondisi politik mengalami sedikit eskalasi karena sebagian orang masih menolak Otsus Papua dan meminta pengungkapan kasus Theys.

- Elsham, LBH Jayapura, dan Kontras Papua menolak dengan tegas keberadaan Tim Independen Nasional usulan Komnas HAM yang diajukan kepada Presiden, untuk menangani kasus pembunuhan Theys H. Eluay. Menurut ketiga LSM itu, kasus tersebut merupakan suatu kejahatan negara terhadap kemanusiaan dan bermotif politik sangat tinggi. Mereka juga berpendapat bahwa kasus Theys sangat tepat jika ditangani oleh tim independen yang melibatkan orang-orang terpercaya, seperti dari Komnas HAM, NGO nasional dan Papua, ahli-ahli hak asasi manusia tingkat internasional semisal *UN Special Rapporteur on Summary Execution* dan *UN Working Group on Torture,* serta ahli forensik independen. Ditegaskan bahwa usulan Komnas HAM kepada pemerintah untuk membentuk Tim Independen Nasional justru merupakan upaya untuk menggiring kasus Theys H. Eluay ke arah tindak kriminal biasa dan dipetieskan, apalagi di dalamnya terlibat unsur TNI.
- Walikota Jayapura, M.R. Kambu, menegaskan bahwa himbauan Pemerintah Kota kepada pedagang kaki lima agar tidak berjualan di tempat-tempat yang tidak diperuntukkan untuk berjualan, tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi atau semata-mata berkaitan dengan kunjungan Presiden Megawati. Menurutnya himbauan itu dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban kota secara menyeluruh.
- Sunarto, salah seorang veteran pejuang Trikora, mempertanyakan adanya selisih dalam dana bantuan untuk perbaikan dan renovasi rumah bagi para pejuang Trikora. Ia menjelaskan, dalam surat Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. PR. 02.03.DM/332 tanggal 8 September 2001, disebutkan bahwa untuk perbaikan 1.300 unit rumah dan sarana lainnya dananya mencapai Rp 13,3 miliar yang dialokasikan melalui APBN. Tetapi Wakil Kepala Dinas PU Propinsi Papua mengatakan bahwa dana yang tersedia hanya sebesar Rp 8 miliar saja. Maka ada selisih sebesar Rp 5,3 miliar. Selisih itulah yang dipertanyakan Sunarto.
- Terjadi penembakan di sekitar wilayah pertambangan

Tembagapura. Penembakan itu melukai dua orang karyawan PT Freeport Indonesia. Salah seorang korban, yakni Lucia, mengalami luka yang serius. Sementara Identitas para pelaku belum diketahui.

21 Desember

- Berdasarkan masukan dari Menko Sospolkam, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk meminta Presiden Megawati menunda kunjungannya ke Papua. Alasannya, kondisi kesehatan Presiden sedang tidak bagus akibat terserang flu berat. Selain itu karena sosialisasi UU Otsus di Papua belum optimal. Sementara itu Mendagri Hari Sabarno menjelaskan bahwa batalnya kunjungan Presiden Megawati ke Papua tidak akan mempengaruhi proses pelaksanaan Otsus Papua. UU Otusus Papua tetap akan diberlakukan mulai 1 Januari 2002.
- Gubernur Papua, Drs. . P. Solossa, M.Si., mengatakan bahwa meski kecewa dengan pembatalan kunjungan Presiden ke Papua secara tiba-tiba, namun pihaknya tetap memaklumi keputusan tersebut atas dasar pertimbangan kenegaraan.
- Kapolres Jayapura, AKBP Totok Kasmiarto, menyambut baik keinginan Pemerintah Kota Jayapura untuk meninjau kembali Perda tentang Miras. Ia menilai sanksi dalam Perda tentang Miras sangat ringan, sehingga tidak membuat jera pelanggarnya. Kapolres juga menjelaskan, karena pengaruh penyalahgunaan miras, tingkat kriminalitas dan kecelakaan di Jayapura, bahkan di Papua, saat ini cukup tinggi. Dari 130 lebih kasus yang muncul dalam tiga bulan terakhir, umumnya dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan miras.

22 Desember

- Aksi unjukrasa bersama yang melibatkan sekitar 700 mahasiswa di Jayapura dibubarkan secara paksa oleh polisi anti huru-hara. Dalam peristiwa itu 42 mahasiswa ditangkap aparat keamanan.

26 Desember

- Menkeh dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mengemukakan bahwa pemerintah pusat dalam rapat Polkam memutuskan akan

membentuk tim independen. Tugas tim tersebut adalah untuk mencari data mengenai sebab-sebab tewasnya Ketua PDP, Theys H. Eluay. "Komposisinya belum final. Kita masih menunggu masukan dari Pemda Papua, DPRD, dan tokoh Gereja. Nanti diumumkan di Polkam," ujarnya. Sementara itu KSAD Jenderal Endriartono Sutarto, juga akan mengirim tim khusus yang dipimpin Komandan Pusat Intel TNI dan dibantu oleh Pusat Polisi Militer. Tim tersebut bertujuan untuk mencari fakta hukum mengenai anggota TNI yang dikabarkan terlibat dalam pembunuhan itu.

27 Desember

- Tim khusus TNI AD yang dipimpin oleh Brigjen TNI Marbun tiba di Jayapura untuk menyelidiki dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus penculikan dan pembunuhan Ketua PDP, Tehys H. Eluay, Kedatangan tim itu dibenarkan Pjs. Kapendam XVII/ Trikora, Mayor CAJ G.T. Situmorang.
- Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, menyambut baik pembentukan tim independen dan tim khusus TNI AD yang akan menyelidiki kasus Theys. Mengenai perkembangan penyelidikan, ia mengatakan bahwa polisi masih terus memperbanyak saksi-saksi dan bukti-bukti tambahan. Keberadaan Aristoteles juga masih terus dicari.
- Beberpa warga di Sorong mengungkapkan bahwa VCD yang menayangkan konflik di Maluku diedarkan secara bebas di Sorong oleh kelompok yang belum teridentifikasi. VCD itu antara lain diedarkan di Pasar Sentral Remu dengan harga Rp 15.000/ keping. Rekaman peristiwa kekerasan dalam VCD tersebut bisa dengan mudah menyulut emosi orang yang menontonnya.

28 Desember

- Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar memaparkan perkembangan penyelidikan kasus penculikan dan pembunuhan Theys H. Eluay, di antaranya mengungkapkan dugaan adanya keterlibatan anggota Kopassus dari Markas Tribuana. Namun diakuinya jika pihaknya mendapat kesulitan untuk mengusut dugaan tersebut karena tidak ada kewenangan polisi untuk menyidik anggota TNI. Pihaknya mengharapkan agar POM TNI segera mengambil alih

dan menindaklanjuti hasil temuan polisi tersebut.

- Sebanyak 25 orang perwira tinggi TNI AD menerima penghargaan Bintang Kartika Eka Paksi Pratama dari Presiden, yang diserahkan oleh KSAD Jenderal Endriartono Sutarto. Para perwira itu dinyatakan telah menunjukkan prestasi dan memberi sumbangan tenaga dan pikiran melampaui panggilan tugasnya. Di antara penerima penghargaan tersebut adalah Mayjen TNI Mahidin Simbolon, Pangdam XVII/Trikora.
- Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, menjelaskan bahwa tim khusus TNI AD telah berkoordinasi dan melakukan pertemuan dengan Polda. Dalam pertemuan tersebut Polda memberikan bahan-bahan berupa hasil penyelidikan kepolisian. Tim khusus itu juga telah bertemu dengan para saksi. Karena tim khusus TNI AD tersebut terpisah dari tim kepolisian, maka tidak ada pelimpahan berkas perkara.
- Tiga LSM dari Jayapura, yakni Elsham, Kontras Papua, dan LBH Jayapura, menolak dengan tegas keberadaan Tim Independen Nasional dan tim militer karena dinilai sebagai upaya 'cuci tangan' dan melokalisasi masalah karena bermaksud menggiring masalah Theys ke arah tindak kriminal biasa. Menurut ketiga LSM itu, perkara Theys seharusnya dilihat sebagai kejahatan HAM berat karena di dalamnya melibatkan institusi-institusi negara. Ketiga lembaga itu mendesak agar pembentukan tim independen melibatkan Komisi Tinggi HAM PBB, ahli forensik LSM HAM Internasional, Komnas HAM, LSM Nasional dan Papua, serta memiliki kewenangan untuk menyelidiki institusi negara seperti Presiden, MPR, DPR, DPA, dll.

29 Desember

- Pada parade Hari Juang Kartika TNI AD, Presiden Megawati menyampaikan pesannya kepada jajaran TNI AD, "Laksanakan tugas dan tanggung jawabmu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan bekal pegangan itu, kalian dapat bertugas tanpa harus selalu dilibat kekhawatiran mengenai pelanggaran hak asasi manusia". Hadir dalam parade tersebut satu unit besar pasukan non-Papua yang menggunakan 'busana' ala Papua. Hadir juga Pangdam XVII/Trikora, Mayjen TNI Mahidin Simbolon.

30 Desember

- Pangdam XVII/Trikora, Mayjen TNI Mahidin Simbolon, menyatakan bahwa jika benar personel di jajarannya terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan Theys, berarti mereka melakukan hal itu di luar jalur komando pimpinan Kodam XVII/Trikora. "Karena perintah itu tidak pernah dikeluarkan," ujarnya. Sementara itu Kasdam XVII/Trikora, Brigjen TNI Agustadi Sasongko, meminta semua pihak agar tidak lebih dulu menuduh TNI sebagai pelaku. Pihaknya menegaskan bahwa harus dilihat kemungkinan lain, misalnya perpecahan dalam tubuh PDP, yang juga bisa dijadikan titik awal penyelidikan.
- Komandan Jendral Kopassus, Mayjen TNI Amirul Isnaini, mengatakan bahwa demi kejelasan duduk soal yang sebenarnya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus pembunuhan Ketua PDP untuk diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sementara itu Komandan Puspom TNI, Djasri Marin, mengatakan bahwa pihaknya akan bergabung dan bekerja sama dengan Polri dalam Tim Independen Nasional.
- Perayaan Natal gabungan diselenggarakan di GOR Cenderawasih, Jayapura. Perayaan itu dihadiri oleh sekitar 500 umat Kristen, Muspida, dan sejumlah artis yang memeriahkan ibadat. Dalam acara tersebut Gubernur Papua membacakan permintaan maaf secara tertulis dari Presiden Megawati karena batal hadir dalam perayaan Natal itu. Presiden berjanji akan mencari waktu yang tepat untuk berkunjung.
- Kekosongan stok beras di Wamena ditanggapi Wagub Papua, drh. Constan Karma, dengan kemarahan. Ia mengemukakan akan memanggil Sekda, Dolog, dan Deperindag untuk menghadap dirinya di Kantor Gubernur Papua. Ia beralasan, subsidi beras dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, khususnya untuk daerah Jayawijaya, besarnya cukup lumayan.
- Bupati Merauke, Drs. John Gluba Gebze, menyatakan bahwa pihaknya siap menerima 600 orang pengungsi dari Bula, PNG, yang akan kembali ke Merauke pada Januari 2002. Para pengungsi itu sudah lima tahun hidup di PNG. Sebelum kembali ke tempat asalnya di Nasem, para pengungsi itu akan ditempatkan di penampungan sementara yang sudah disiapkan.

***

Bagian 2

GAMBARAN SOSIAL-POLITIK 2001

SAAT tahun 2000 berakhir dan masuk ke tahun 2001, masyarakat Papua diliputi rasa cemas. Banyak alasan untuk merasa seperti itu. Bulan-bulan terakhir tahun 2000 ditandai banyak peristiwa berdarah dan meninggalkan tanda tanya bagi masyarakat Papua, apa yang menanti di tahun 2001? Peristiwa kekerasan di Wamena (Oktober 2000), Merauke (November dan Desember 2000), dan Abepura (Desember 2000), yang ditindaklanjuti dengan operasi militer oleh aparat keamanan, telah menggoncangkan masyarakat. Peristiwa-peristiwa itu secara drastis mempersempit harapan masyarakat tentang masa depan yang lebih cerah. Masyarakat Papua semakin hari semakin merasa takut dan tak berdaya berhadapan dengan berbagai peristiwa kekerasan, berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang tidak jelas "wajahnya", juga dengan kebijakan pemerintah yang kabur arahnya, di samping dengan tindakan aparat keamanan yang tak terkendali. Perjuangan dengan cara damai juga dijawab dengan kekerasan oleh pihak yang berkuasa. Kenyataan itu, telah memusingkan masyarakat Papua.

KEMARAHAN AWAL TAHUN

Memasuki tahun 2001, masyarakat Papua masih menyimpan kemarahan menyangkut peristiwa Abepura. Tindakan kriminal pada 7 Desember 2000 yang menewaskan dua orang itu sudah tentu tidak

dapat diterima pihak manapun. Namun kemarahan masyarakat itu, dijadikan dalih aparat keamanan untuk melakukan operasi penindasan yang melanggar segala rasa keadilan. Orang yang tidak terbukti terlibat dengan peristiwa itu ditangkap secara semena-mena dan diperlakukan secara tidak manusiawi hingga menimbulkan dua orang korban tambahan. Pelaku tindak kriminal dalam peristiwa Abepura jelas harus ditindak, namun reaksi dari pihak keamanan jelas tidak bisa diterima. Rangkaian peristiwa Abepura dan kelanjutannya itu, menjadi sorotan banyak orang.

Investigasi untuk menemukan pelaku peristiwa 7 Desember 2000 yang sebenarnya, tidak dijalankan secara wajar dan profesional. Malahan, sebuah kelompok masyarakat yang berasal dari pegunungan, *distigma* dan dijadikan 'kambing hitam', serta ditindak begitu saja tanpa didahului investigasi yang mendalam. Dalam suasana demikian, tidak mengherankan jika banyak pihak mendesak Komnas HAM membentuk tim investigasi yang obyektif untuk menghentikan tindakan yang sewenang-wenang[1].

Munculnya berbagai peristiwa di Jayapura – yang menjadi jantung Papua – di awal tahun 2001, menyebabkan peristiwa-peristiwa lain yang terjadi pada tahun 2000 mulai dilupakan orang, atau sekurang-kurangnya tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Padahal peristiwa-peristiwa itu masih perlu ditindaklanjuti. Misalnya saja peristiwa Wamena (Oktober 2000), dan Peristiwa Merauke (November 2000 dan Desember 2000).

Untung saja laporan peristiwa di Wamena masih diterbitkan pada Januari 2001 oleh kalangan LSM. Perhatian masyarakat terhadap peristiwa itupun beralih pada proses pengadilan yang akhirnya menjatuhkan hukuman kepada lima tokoh Satgas Papua yang dianggap bersalah. Walaupun proses peradilannya dinilai kurang memuaskan menurut standar hukum yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional.

UNSUR-UNSUR DOMINAN SELAMA TAHUN 2001

Jika mencermati berbagai peristiwa selama tahun 2001, sebagaimana terungkap dalam bagian kronologi buku ini, ada dua

---

[1] Perkembangan dari masalah ini dapat dibaca pada Bagian 3.

hal yang patut dicatat sebagai kejadian yang sangat dominan dan mempengaruhi suasana tahun tersebut. Dua hal itu adalah: *pertama,* persiapan sampai pengesahan RUU Otonomi Khusus Papua; dan *kedua,* meningkatnya kekerasan, khususnya seperti terungkap dalam pembunuhan terhadap Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay. Dua hal ini akan menjadi fokus utama dalam uraian suasana sosio-politik selama tahun 2001. Berkaitan dengan Otsus bagi Papua, akan diberi sedikit tambahan perhatian pada dua unsur "pewarna" yang akan ikut menentukan keberhasilan program tersebut di kemudian hari, yakni [a] unsur "budaya korupsi" dan [b] unsur "permasalahan yang muncul di sekitar pemilihan pejabat tinggi".

Di samping unsur-unsur pokok itu, perlu juga dicatat munculnya unsur-unsur lain. Di antaranya: [1] maju-mundurnya upaya penegakan hukum di Papua khususnya, di Indonesia pada umumnya, [2] meningkatnya kritik terhadap pelanggar HAM yang kebal hukum, [3] kasus pengadilan anggota PDP yang berkepanjangan, [4] kasus penyanderaan di Asiki dan Ilaga, [5] lumpuhnya lembaga-lembaga negara, khususnya DPRD, [6] meluasnya kebingungan masyarakat karena kurangnya arahan dari pemimpin sehingga masyarakat gampang diperalat oleh siapa saja, [7] pemekaran wilayah propinsi, kabupaten dan kecamatan, serta [8] pengaruh perkembangan pentas politik nasional, seperti jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid dan naiknya Presiden Megawati Sukarnoputri.

Walaupun unsur-unsur tambahan ini sangat penting dan turut menentukan suasana sosio-politik tahun 2001, namun tulisan ini akan difokuskan pada empat unsur kunci. Yakni persiapan RUU Otonomi Khusus, budaya korupsi, pemilihan pejabat tinggi, dan pembunuhan terhadap Theys Hiyo Eluay. Walaupun demikian, dalam pembahasan keempat unsur kunci ini tentu saja akan berkaitan juga dengan unsur-unsur lainnya.

Seluk-Beluk Persiapan RUU Otonomi Khusus

Gagasan dasar

Sekedar mengingatkan, Otonomi Khusus (Otsus) ditawarkan pemerintah Indonesia sebagai tanggapan terhadap munculnya berbagai unjukrasa masyarakat di Papua, yang juga ditandai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora di kota-kota kabupaten pada

tahun 1998. Tawaran itu dimaksudkan untuk meredam tuntutan masyarakat yang menginginkan kebebasan dan kemerdekaan. Tawaran serupa juga diberikan kepada masyarakat Aceh, propinsi paling barat yang dinilai sebagai wilayah bermasalah.

Tawaran Otsus pada intinya tercipta dari pandangan yang secara resmi berkembang dan disosialisasikan di kalangan pejabat pemerintah, bahwa masalah di Papua berakar dari gagalnya kebijakan pembangunan di wilayah tersebut. Tawaran ini juga didasarkan pada pandangan pemerintah yang tak boleh diganggu gugat, bahwa Papua merupakan bagian integral dari NKRI sebagaimana terungkap dalam suatu keputusan hukum internasional (Resolusi PBB tahun 1969). Selain itu, juga didasarkan pada kesadaran bahwa terdapat indikasi kuat adanya penyelewengan yang signifikan dalam pelaksanaan isi dan jiwa New York Agreement (1963-1969) menuju Pepera (1969). Tawaran Otsus juga terinspirasi oleh kenyataan bahwa otonomi sesungguhnya akan diberlakukan sebagai kebijakan nasional dan berlaku di seluruh Indonesia dalam bentuk pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah.

Penilaian pemerintah terhadap masalah di Papua pada umumnya hanya berkaitan dengan masalah pembangunan semata-mata. Tak heran jika penilaian tersebut tidak disetujui oleh tokoh-tokoh Gerakan Aspirasi Merdeka (Gerasem) dan sebagian besar masyarakat Papua.[2] Oleh sebab itu, tawaran Otsus yang dimaksudkan pemerintah sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat Papua, tidak diterima dan hanya dianggap sebagai sebuah kiat untuk menyangkal masalah-masalah yang sesungguhnya. Apalagi pemerintah dengan jelas menunjukkan sikap untuk tidak memberi tempat sedikitpun bagi terbukanya diskusi dan dialog mengenai masalah politik Papua. Mustahil bagi pemerintah untuk mendiskusikan status politik Papua yang telah menjadi bagian integral NKRI. Kenyataan ini kemudian dengan mudah dijadikan dasar untuk menyamakan konsep atau kata 'otonomi' dengan 'sikap atau orang yang menentang aspirasi murni masyarakat Papua'. Pada akhirnya, pelan tetapi pasti, masyarakat terbelah menjadi dua kubu,

---

[2] Bandingkan dengan Permasalahan di Papua , Juni 2000, bahan presentasi Pemimpin Gereja Katolik di hadapan Presiden Abdurrahman Wahid. Teks tersebut juga disimpan di Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura.

yakni yang pro kemerdekaan (pro-M) melawan yang pro otonomi (pro-O).

Selama tahun 1999-2000, pemerintah betul-betul menutup telinga terhadap aksi-aksi yang menentang konsep otonomi. Sikap itu akhirnya diterima dengan sangat memalukan oleh DPRD Propinsi Papua pada Desember 2000, saat menerima tawaran *draft* RUU Otonomi khusus hasil rumusan pemerintah pusat. Walaupun secara formal DPRD telah meminta masukan dari berbagai kalangan sebelum menerima konsep yang ditawarkan pemerintah, namun para wakil rakyat Papua itu tidak pernah menanggapi dengan serius dan tidak membuat perubahan mendasar pada rumusan yang dikirim dari Jakarta.

Dari 'Otonomi' ke 'Otonomi Khusus'

Tekanan dan aksi masyarakat yang menentang otonomi datang bertubi-tubi. Sementara pemerintah daerah sadar betul bahwa bagaimanapun konsep otonomi akan diberlakukan. Maka Gubernur Irja, Drs. Jaap Solossa, M.Si., berikhtiar merumuskan suatu konsep yang lebih baik dan lebih mencerminkan aspirasi masyarakat Papua. Sudah setahun sebelumnya ia meminta kepada pemerintah pusat supaya Papua tidak hanya diberi 'otonomi' – yang berlaku sama untuk semua provinsi di Indonesia dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2001 – tetapi diberi 'otonomi khusus' agar mampu menjawab secara menyeluruh persoalan khas Papua. Pemerintah pusat menyetujui permintaan tersebut dengan memberi ruang gerak yang lebih lebar. Namun, ruang gerak itu gagal dimanfaatkan oleh DPRD Propinsi Papua.

Setelah terjadi perdebatan antara sejumlah tokoh politik dan cendikiawan pada akhir Januari 2001, secara resmi Gubernur Papua meminta Universitas Cendrawasih untuk menyusun sebuah konsep "otonomi khusus" yang lebih pantas. Uncen harus bergerak cepat karena konsep tersebut harus sudah masuk ke meja DPR RI sebelum 1 Mei 2001, sesuai ketetapan MPR No. 4 tahun 2000 (~~Ketetapan mengenai apa?~~). Secara kasar, Uncen hanya memiliki waktu tiga bulan saja untuk mengerjakan konsep tersebut.

Mengisi konsep Otonomi Khusus: kinerja sebuah komisi

Untuk menopang Uncen sebagai kelompok kerja (pokja) yang

diberi tugas menyusun konsep Otsus, Gubernur Irja membentuk sebuah komisi. Wakil dari berbagai organisasi, termasuk LSM dan lembaga-lembaga agama, ditempatkan dalam komisi tersebut. Tugas utama komisi adalah memberikan sumbang saran kepada pokja Otsus Papua.

Salah satu langkah penting pokja bersama komisi dalam proses tersebut adalah melakukan kunjungan ke berbagai kabupaten selama Februari 2001. Kunjungan itu dimaksudkan untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai tujuan pekerjaan mereka, selain memberikan pemahaman bahwa masukan dari masyarakat sangat menentukan mati hidupnya pekerjaan tersebut. Walaupun niat untuk berdialog tidak selalu disambut dengan baik oleh masyarakat – bahkan seringkali ditanggapi dengan reaksi yang keras dari Satgas Papua dan simpatisannya, seperti terjadi di Manokwari dan Timika. Namun kunjungan itu telah membuka mata pokja dan komisi tentang berbagai hal. Di satu sisi, mereka bersentuhan langsung dengan kenyataan bahwa arus yang menentang segala hal yang berbau 'otonomi' semakin deras. Namun di sisi lain mereka memperoleh peluang yang sangat besar untuk merasakan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat Papua.

Juga harus dicatat bahwa di sejumlah kabupaten pokja dan komisi nyaris tidak memperoleh kesempatan berdialog dengan rakyat karena pertemuan hanya dihadiri kalangan pegawai saja. Namun demikian, walaupun tidak seratus persen memenuhi harapan pokja dan komisi, kunjungan lapangan itu telah memberi dasar pijakan untuk memahami masalah utama yang sedang dihadapi konsep Otsus.

Pokja dan komisi juga mencoba mendapatkan masukan dari Presidium Dewan Papua (PDP). Tetapi PDP selalu menjauhkan diri dari segala diskusi menyangkut Otsus. Mereka berargumentasi bahwa PDP akan tetap berpegang teguh pada mandat yang diberikan rakyat Papua, yakni mengupayakan kemerdekaan, bukan Otonomi Khusus.

Kondisi sosio-politis

Dari pembahasan awal hasil pokja bersama komisi, jelas terlihat bahwa bobot tawaran Otsus sangat tergantung pada perubahan kondisi sosio-politis di Papua. Perhatikan misalnya kenyataan bahwa

pada saat diskusi sekitar rumusan Otsus dijalankan, pemimpin inti PDP masih berada dalam tahanan kejaksaan, insiden-insiden berdarah belum juga diselidiki secara hukum, penambahan pasukan keamanan dan dampaknya yang semakin tidak mendukung 'niat baik pemerintah', dan sebagainya. Walaupun pada masa-masa ini muncul juga beberapa tanda yang mengarah pada perubahan. Misalnya dibentuknya KPP HAM untuk mengusut kasus Abepura, aparat keamanan tampak dapat menahan diri dalam tindakannya, serta anggota PDP dikeluarkan dari tahanan kejaksaan dan hanya dikenai status tahanan luar.

Jawaban terhadap aspirasi dasariah

Setiap pihak yang terlibat dalam proses penyusunan konsep Otsus menjadi sadar bahwa aspirasi rakyat yang sudah disuarakan bertahun-tahun harus dijawab jika konsep itu ingin mendapat tempat di hati rakyat Papua. Pokja dan komisi bekerja dari satu *draft* ke *draft* berikutnya dan berakhir pada draft berupa RUU Otsus Papua yang menghembuskan harapan dan cakrawala baru. Sejumlah segi, khususnya yang berkaitan dengan perjuangan rakyat Papua selama dua tahun terakhir, dibeberkan dalam sejumlah alinea substansial. Misalnya:

- Penghargaan terhadap ungkapan sosio-kultural khas Papua, termasuk jaminan kebebasan mengibarkan bendera Papua dan lagu 'kebangsaan' rakyat Papua (Bab II dan XI);[3]
- Kewenangan mengatur keputusan politik, yakni yang berkaitan dengan migrasi penduduk dan penempatan pasukan keamanan (Bab IV);
- Adanya perwakilan pemimpin adat dalam penyelenggaraan negara (Bab V);
- Perolehan keuntungan terbesar dari pembagian pendapatan hasil eksploitasi sumber daya alam (Bab X);
- Permulaan bagi dialog politik tentang masa lalu ('pelurusan sejarah') (Bab XII pasal 43);
- Perhatian bagi penegakan keadilan dan penghentian pelanggaran HAM (Bab XII);

[3] Sumber rujukan adalah draft akhir resmi yang diserahkan kepada DPR-RI. Draft tersebut berjudul Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua dalam Bentuk Wilayah Berpemerintahan Sendiri

- Tuntutan referendum akan dilaksanakan jika otonomi khusus tidak diterapkan dengan semestinya (Bab XXIII pasal 75).

Forum terbuka bagi diskusi-diskusi akhir

Sebelum menyelesaikan pekerjaannya, pokja bersama komisi memutuskan untuk menampung masukan akhir melalui suatu lokakarya yang melibatkan wakil-wakil dari seluruh Papua. Lokakarya itu diwujudkan dalam "Forum Kajian RUU Otonomi Khusus Menuju Papua Baru", yang diselenggarakan pada 28-29 Maret 2001. Mengingat forum tersebut merupakan kejadian penting dalam tahun 2001, karena dapat dilihat sebagai "barometer" suhu politik di Papua pada masa itu, maka sejumlah catatan observasi selama forum tersebut berjalan perlu dipaparkan di sini.

Rumusan RUU Otsus yang diserahkan kepada para peserta forum untuk didiskusikan merupakan *draft* yang kesebelas. Naskah yang dirumuskan kiranya cukup seimbang dan mencerminkan usaha tim Uncen dalam menjembatani gerakan aspirasi "M" (merdeka) yang disuarakan selama dua tahun terakhir, dengan kemungkinan politis yang dapat diraih dalam jangka pendek.

Bagi mereka yang mempelajari atau terlibat dalam perumusannya, naskah tersebut menunjukkan suatu langkah maju, kendati belum merupakan hasil akhir. Terutama jika dilihat dari strategi jangka panjang dalam menangani "masalah Papua", termasuk dalam membuka jalan untuk dilakukannya dialog politik, yang dijamin dalam bab yang mengatur adanya komisi khusus untuk pelurusan sejarah. Pengaturan serupa juga berlaku untuk pelanggaran HAM di masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. Peran pemimpin adat Papua juga diperhatikan secara khusus dengan adanya usulan untuk mendudukkan mereka dalam badan legislatif dan pemerintahan. Dengan demikian nampak bahwa naskah yang diserahkan mencerminkan usaha serius untuk menampung aspirasi masyarakat Papua. Namun tak pelak muncul kekurangan yang sebenarnya sudah disadari oleh tim perumus sewaktu menyerahkan naskah ini. Yakni, naskah tersebut kurang disosialisasikan sebelum forum kajian dilangsungkan. Kekurangan itu akhirnya harus dibayar mahal.

Rabu, 28 Maret 2001, forum dibuka dan dihadiri oleh 28 orang perwakilan dari setiap kabupaten, sehingga total yang hadir

mencapai ± 400 orang. Namun di depan GOR Cendrawasih, berlangsung unjukrasa yang dilakukan sekitar 150 orang dengan membawa spanduk dan meneriakkan kalimat bernada protes. Tetapi unjukrasa itu tidak menghalangi siapapun yang mengambil bagian dalam pertemuan. Bahkan para pengunjukrasa sempat memberi salam dengan ramah kepada peserta forum. Bisa disebutkan bahwa suasana tidaklah panas dan aksi unjukrasa masih dianggap wajar-wajar saja. Upacara pembukaan pun berjalan dengan lancar. Dua buah sambutan yang masing-masing disampaikan rektor Uncen dan Gubernur Papua juga dinilai menggambarkan harapan yang realistis, tanpa janji-janji muluk.

Namun seusai upacara pembukaan, suasana menjadi tak terkendali. Serombongan massa, kebanyakan mahasiswa dan anggota panel yang jumlahnya mencapai ± 500 orang, memaksa masuk ke dalam GOR dan menyatakan menolak diskusi mengenai otonomi. Akibatnya situasi jadi memanas. Polisi yang mengawal rapat di sekeliling GOR, mulai melancarkan tembakan peringatan dan terlibat bentrokan fisik dengan sejumlah orang. Polisi akhirnya bisa mengendalikan situasi. Tinggallah saksi bisu: tenda-tenda yang rusak dan kursi yang hancur berantakan. Keesokan harinya dikabarkan satu orang meninggal di RSUD Dok II Jayapura akibat bentrokan itu.

Sebenarnya, ketika memasuki GOR pengunjukrasa diberi waktu untuk bicara. Setelah bicara, mereka diajak panitia untuk duduk dan mendengarkan penjelasan yang disampaikan tim Uncen yang membahas muatan Otsus dan jadwal pembahasannya. Namun para pengunjukrasa menolak tawaran tersebut dan mengajak peserta forum yang sependapat dengan mereka untuk meninggalkan ruangan. Sepertiga utusan perwakilan kabupaten mengikuti ajakan mereka dan melakukan aksi *walk-out*.

Keesokan harinya, setiap delegasi kabupaten melaporkan hasil diskusinya masing-masing. Kebanyakan laporan delegasi bersesuaian dengan dasar-dasar pikiran yang terkandung dalam konsep buatan tim Uncen. Tetapi pada saat itupun sepertiga delegasi tidak muncul lagi. Boleh jadi mereka masih bergabung dengan mahasiswa yang berunjukrasa di kampus Uncen, Abepura. Sore harinya, forum ditutup tanpa ada kekacauan.

Setelah menerima masukan dari semua delegasi, tim Uncen bertekad merevisi kembali *draft* RUU Otsus Papua, agar menghasilkan

draft akhir yang lebih akomodatif, yang harus diserahkan kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya akhir Mei 2001.

Diperoleh kesan bahwa, penolakan terhadap Otsus, sebagaimana terungkap dalam forum kajian, sebagian besar muncul karena kekurangpahaman banyak orang mengenai apa yang hendak dicapai. Mereka umumnya hanya mempertentangkan "otonomi khusus" dengan "kemerdekaan", yang sudah lazim terjadi selama dua tahun terakhir. Reaksi negatif yang "semata-mata menolak atau mengabaikan" Otsus, mungkin merupakan dampak sampingan dari Kongres Rakyat Papua II, yang dilangsungkan pada Mei - Juni 2000. Saat itu, kongres hanya memberikan tekanan pada strategi "penyelesaian persoalan Papua secara internasional" atau diperolehnya perhatian dan dukungan dunia internasional. Penekanan ini akhirnya membentuk sikap masyarakat Papua yang terlalu mudah menggantungkan nasibnya pada "kekuatan luar" dalam menyelamatkan dirinya sendiri, serta mencap "perjuangan dalam negeri" samasekali tidak laku.

Polarisasi seperti ini mungkin dapat dicegah seandainya kelompok kerja dan komisi menyediakan banyak waktu untuk menyosialisasikan *draft*, dan turun ke lapangan untuk mendengarkan suara rakyat. Polarisasi seperti itu cenderung lebih dominan, walaupun berulangkali diungkapkan – seperti terungkap pula dalam sambutan rektor Uncen dan Gubernur Papua dalam acara pembukaan forum kajian – bahwa tahapan pembahasan itu bukan tahapan final, tetapi hanya satu tahapan saja dari seluruh proses yang membicarakan aspirasi rakyat Papua.

Proses di Jakarta

Ketika RUU diserahkan kepada pemerintah pusat dan DPR RI pada 16 April 2001, lobi yang sangat berat dirintis di Jakarta. Yang jadi masalah utama adalah: apakah konsep baru itu bisa didiskusikan di DPR RI atau diabaikan ketika dipertentangkan dengan konsep serupa versi pemerintah pusat yang disetujui oleh DPRD Propinsi Papua[4] dan sudah diserahkan kembali pada Desember 2000. Jika kemungkinan kedua yang terjadi, maka hal itu dianggap sangat

[4] Pada 22 April 2002, DPRD Papua juga secara resmi menyetujui dan mendukung RUU Otonomi Khusus yang dirancang Tim Uncen untuk mengganti RUU yang pernah disetujui dan diteruskan ke pemerintah pusat pada Desember 2000.

berbahaya, dan dikhawatirkan *draft* baru hanya menjadi semacam pelengkap keterangan. Oleh sebab itu Gubernur Irja bersama tim Uncen memutuskan untuk membentuk tim lobi yang permanen di Jakarta untuk memastikan bahwa hanya *draft* baru yang akan menjadi satu-satunya bahan pembahasan. Akhirnya mereka berhasil meloloskan *draft* baru, dan keberhasilan itu boleh dinilai sebagai suatu hasil perjuangan yang luar biasa.

Perlu juga disinggung adanya sejumlah komentar di media massa, khususnya yang dikeluarkan oleh Gubernur Irja. Misalnya saja dikatakan bahwa inti dari *draft* baru itu adalah tuntutan yang lebih besar terhadap pembagian pendapatan ekonomi untuk daerah, yakni sekitar 70% atau 80% dari hasil eksploitasi sumber daya alam. Tekanan perhatian itu sekali lagi memperkuat pandangan bahwa bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, persoalan Papua semata-mata hanya dipusatkan pada aspek 'pembangunan'. Dengan memberi tekanan pada dimensi ekonomi sebagai bagian paling penting dari *draft* RUU, maka sensor semakin diperbesar untuk dimensi-dimensi lain. Sementara, dimensi ekonomi terus diperjuangkan.

Penekanan ini seolah-olah tidak menghargai kerja keras pokja dan komisi yang berupaya mencakup luasnya aspirasi rakyat dalam *draft* RUU, dan mengolahnya menjadi naskah yang utuh. Mereduksi masalah Papua menjadi semata-mata masalah kebijakan pembangunan merupakan kesalahan besar dan sekaligus meneguhkan pandangan 'Jakarta'. Dengan demikian, peluang yang sudah ada di depan mata untuk membuka mata pemerintah pusat agar lebih mengenal masalah Papua yang sesungguhnya sekali lagi diabaikan.

Suasana seperti itulah yang menyertai pembahasan RUU di DPR RI yang dimulai pada September 2001 dan rampung dibahas pada 20 Oktober 2001. Pada 21 November 2001, RUU itu disahkan oleh Presiden menjadi UU No. 21 tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Papua.

Perubahan yang dibuat dan penilaian hasil akhir

Sebelum disetujui oleh DPR dan pemerintah, naskah RUU Otonomi Khusus Papua mengalami cukup banyak perubahan.[5] Jika dilihat secara keseluruhan, perubahan-perubahan itu dapat

[5] Rangkuman perubahan draft RUU Otsus Papua kami lampirkan pada bagian terakhir buku ini.

disimpulkan dalam paparan di bawah ini:

Pertama, nampak jelas bahwa yang digunakan adalah pra anggapan bahwa Papua tetap dan akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI.

Kedua, berdasarkan pra anggapan tersebut, tuntutan untuk diadakannya penelitian mengenai sejarah Papua pada dasarnya mustahil dilakukan, sementara pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh 'Jakarta' tidak memadai untuk menjawab kebutuhan dialog secara terbuka mengenai status politik Papua. Bahkan pembentukan komisi tersebut cenderung dipandang pemerintah bukan sebagai alat untuk mengungkapkan kebenaran, tetapi terutama untuk memperkokoh kesatuan negara. Oleh sebab itu, Komisi Keberanan dan Rekonsiliasi kehilangan bobot dan tujuannya yang hakiki.

Ketiga, catatan serupa berlaku juga untuk masalah penting lainnya, yakni Komisi Hak Asasi Manusia (HAM). Lagi-lagi komisi ini berada di bawah kendali pemerintah pusat.

Keempat, kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) masih tetap kabur dan cenderung hanya menjadi perangkat hiasan daripada sebagai lembaga pengambil keputusan.

Kelima, penggunaan simbol-simbol lokal terbatas hanya pada pengungkapan jati diri kultural. Hal ini menjadi pemicu diskusi yang ramai di kemudian hari dan memberikan ruang bagi TNI / Polri untuk bertindak ketika mereka menilai simbol-simbol kultural itu telah disalahgunakan. Adanya pembatasan untuk mengungkapkan jatidiri kultural dengan sendirinya membahayakan pemakaian simbol-simbol lokal yang biasa digunakan secara spontan oleh masyarakat Papua.

Keenam, peran pengawasan oleh pemerintah pusat diartikan secara ganda karena penggunaan represi dalam konteks tersebut dibenarkan.

Ketujuh, pekerjaan raksasa sudah menunggu dalam penerapan UU Otsus Papua, yakni menerjemahkan 'prinsip-prinsip' Otsus ke dalam peraturan daerah yang konkret. Dalam proses tersebut berbagai kemungkinan penyelewengan dalam menafsirkan UU Otsus tetap terbuka. Di sinilah pentingya kontrol sosial yang seluas mungkin untuk mencegah penyalahgunaan wewenang demi kepentingan kelompok tertentu.

Meski sejumlah perubahan penting telah dilakukan, UU Otsus tetap memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk mengambil keputusan politik yang baru di masa mendatang, jika saja undang-undang tersebut diterapkan dengan benar.

Otsus bagi Papua tentu sangat bermanfaat untuk memperbaiki berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Otsus juga sangat berguna untuk menghargai dan mengangkat tradisi rakyat Papua, selain dapat membantu untuk menyelesaikan pelanggaran HAM dan menyeret pelaku-pelakunya ke pengadilan. Hanya saja perlu dicatat bahwa upaya penegakan keadilan oleh lembaga yudikatif seperti dipaparkan dalam UU Otsus masih diragukan efektivitasnya.

Jika UU Otsus tersebut diterapkan secara benar, sekurang-kurangnya akan menciptakan perubahan dalam hal kesejahteraan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat setempat lainnya) serta dalam hal HAM (partisipasi politik, penghargaan terhadap jatidiri rakyat Papua, hak-hak ulayat, serta berbagai aspirasi masyarakat). Selebihnya, UU Otsus diragukan bisa memberi ruang yang lebih luas bagi dialog politik terbuka, karena tidak mampu menjawab tuntutan kebebasan politik.

Tuntutan kebebasan/kemerdekaan : pola "three in one"

Kemungkinan-kemungkinan yang bisa timbul dari penerapan Otsus seperti digambarkan di atas, akan sangat berkaitan dengan cara tafsir dan cara pandang kita terhadap tuntutan kebebasan dan kemerdekaan Papua. Untuk memahami bobot tuntutan tersebut, dapat dibedakan (bukan dipisahkan!) tiga unsur yang terkandung di dalamnya: [1] unsur politis, [2] unsur sosio-kultural, dan [3] unsur pembangunan. Ketiga unsur tersebut berkaitan erat satu sama lain, sehingga bisa disebut *three in one* (tiga dalam satu). Di bawah ini akan dicoba digali pengertian ketiganya.

Jika kita perhatikan, dalam tuntutan rakyat Papua yang menghendaki 'kemerdekaan' di dalamnya terdapat tiga lingkup kepentingan:

- Kesadaran pada kenyataan bahwa rakyat Papua belum pernah mengenyam kesempatan yang bebas dan adil untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam konteks ini, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 dipandang sebagai kejadian yang memalukan dan

cacat hukum, serta melanggar hukum internasional. Semakin hari semakin jelas bahwa rakyat Papua tidak sendirian dalam garis pandangannya ini[6]. Kesadaran inilah yang memunculkan tuntutan adanya 'pelurusan sejarah', bahkan sebagian rakyat Papua menggunakan istilah yang lebih tajam: menuntut 'negara merdeka'. Inilah unsur politis dari tuntutan masyarakat Papua.

- Adanya pengalaman kolektif yang dirasakan rakyat Papua. Misalnya pengalaman dilecehkan dan tidak dihargai sebagaimana layaknya manusia, dijadikan obyek untuk menggali keuntungan oleh pemegang proyek; dipandang sebagai musuh negara; hidup dalam ketakutan karena tindakan represif aparat keamanan, diintimidasi, tidak memililiki kebebasan bersuara dan berkumpul, atau martabatnya disangkal. Oleh sebab tuntutan kebebasan dan kemerdekaan dari rakyat Papua mencakup juga tuntutan penghentian segala bentuk penindasan dan pelanggaran HAM, serta tuntutan penegakan keadilan. Inilah yang menjadi unsur sosio-politik-kultural.
- Tidak mampunya kebijakan pembangunan menyejahterakan rakyat Papua. Penerapan kebijakan yang sentralistik tidak menjawab kebutuhan lokal dan umumnya hanya menguntungkan pihak-pihak luar. Penilaian ini diterima secara luas sebagai sumber utama permasalahan di Papua, bahkan diakui oleh pemerintah sendiri. Inilah yang dimaksud dengan unsur *pembangunan,* yang merupakan unsur ketiga dalam *three in one.*

Berdasarkan analisis di atas, Otonomi Khusus sekurang-kurangnya membuka peluang untuk memperbaiki dua dari tiga unsur utama, yakni unsur sosio-politik-kultural dan unsur

---

[6] Bandingkan misalnya dengan komentar yang baru-baru ini dinyatakan oleh orang-orang yang dulu terlibat dalam peristiwa tersebut. Pepera semacam pemutihan belaka. Anggapan umum di PBB waktu itu adalah bagaimana secepat mungkin membuang masalah (Papua), kata Chakravarthy Narasimhan, mantan asisten Sekretaris Jendral PBB yang menangani masalah Papua waktu itu. Ia menyatakan hal itu di kediamannya di Madras, India. Tak seorangpun peduli dengan kenyataan bahwa satu juta orang hak asasinya yang paling fundamental dilanggar. Bagaimana orang bisa sungguh percaya bahwa semua pemilih secara mufakat memutuskan untuk bergabung dengan rezim Soeharto? Mufakat semacam itu tidak dikenal dalam demokrasi manapun juga, tambahnya. Brian Urquant, yang juga mantan asisten Sekjen PBB, sependapat dengan Narasimhan. Ia mengatakan, (Pepera)Telah dirancang sedemikian rupa sehingga PBB tinggal mensahkan saja dengan cara yang paling mudah, bukan dengan cara yang paling demokratis untuk menyelesaikan masalah.

pembangunan. Sementara unsur politik, mungkin tidak bisa dijawab secara maksimal atau bahkan tidak sama sekali. Oleh sebab itu, UU Otsus tetap perlu dilengkapi.

Mengatasi keterpecahan yang melumpuhkan

Walaupun harus diakui bahwa UU Otsus hanya mampu menjawab sebagian saja dari tiga pola tuntutan rakyat Papua, kiranya tetap berguna untuk mengambil keuntungan dari undang-undang tersebut dan Otsus hendaknya tidak dilihat sebagai 'menentang aspirasi M'.

Ruang dialog untuk menangani permasalahan politik di Papua, kiranya masih perlu diperjuangkan untuk melengkapi UU Otsus. Maka, aspirasi menuntut dialog masih harus tetap disuarakan, dan tuntutan terhadap terwujudnya penegakan keadilan harus digemakan secara lebih intensif. Diberlakukannya Otsus seharusnya tidak dapat menghalangi upaya untuk membuka dialog politik dan kepastian hukum, karena Otsus itu tidak menyediakan cukup ruang untuk itu. Karena, tidak akan ada penyelesaian akhir yang menyeluruh tanpa membuka ruang dialog politik dan kepastian hukum. Kenyataan ini perlu dipahami oleh siapa saja yang berniat menyelami secara jujur permasalahan sesungguhnya di Tanah Papua.

Sikap PDP menimbulkan pertanyaan

Dengan menerima Otsus kiranya dapat membantu semua pihak untuk *mengatasi keterpecahan yang melumpuhkan*, yakni keterpecahan yang ditandai dengan adanya kubu "O" (otonomi) dan kubu "M" (merdeka). Ostus kiranya juga akan membantu dalam memahami aspirasi "M" secara tepat, serta memahami tuntutan keadilan dan dialog politik yang disuarakan secara damai oleh rakyat Papua. Dalam upaya mengatasi keterpecahan di antara warga masyarakat Papua itu, peran yang lebih aktif dari PDP sebenarnya sangat diharapkan. Secara formal, PDP memang sudah ditempatkan sebagai lembaga yang diberi mandat untuk memperjuangkan kemerdekaan, untuk memperjuangkan otonomi khusus.[7] Tak

Tidak

[7] lihat pernyataan PDP pada tanggal 20 Oktober 2001; teks lengkap dicantumkan sebagai lampiran pada buku ini.

mengherankan jika PDP kemudian selalu menolak untuk mendiskusikan RUU Otsus. Sikap demikian dapat dimaklumi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan.

Boleh dikatakan bahwa persetujuan DPR RI terhadap RUU Otsus Papua sebenarnya merupakan hasil perjuangan masyarakat Papua yang selama tiga tahun gencar menyuarakan aspirasinya. Otonomi yang lumayan luas dan disetujui pemerintah pusat itu sudah tentu tidak akan pernah diperoleh jika protes rakyat Papua tidak digemakan terus-menerus, hingga kalangan pengambil keputusan di pemerintahan "gelisah" dibuatnya. Maka PDP yang menjadi salah satu motor perjuangan rakyat Papua selayaknya merasa bangga atas keberhasilan ini dan dapat mengklaim dirinya sebagai pejuang yang efektif, sambil tetap menjelaskan bahwa Otsus tidak menjawab seluruh aspirasi bangsa Papua secara menyeluruh dan perlu dilengkapi melalui dialog politik. Sikap demikian akan mampu menyampaikan dua pesan penting kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Di satu sisi, jelas bahwa Otsus tidak mampu menjawab keseluruhan masalah bangsa Papua secara memuaskan. Tetapi di sisi lain, Otsus menyediakan peluang-peluang penting untuk dimanfaatkan jika bangsa Papua ingin mengembangkan dirinya menjadi tuan di tanahnya sendiri.

Jika PDP bersikap demikian, maka lembaga itu dapat membantu masyarakat kebanyakan keluar dari kelumpuhan, yang sebagian besar diakibatkan oleh harapan yang terlalu tinggi dan tidak mempertimbangkan kenyataan politik yang sebenarnya. Sayangnya, sejauh menyangkut Otsus, PDP memilih untuk menjadi 'penonton' saja. PDP tidak aktif memberikan pengarahan dan menjawab kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat, terutama kepada mereka yang tinggal jauh dari pusat keramaian Papua, yang semakin hari semakin kurang memahami apa sebenarnya yang sedang diharapkan.

Kondisi yang Memprihatinkan

Kegagalan mengatasi budaya korupsi

Selama tahun 2001, lagi-lagi muncul banyak berita mengenai kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan dana pembangunan atau program bantuan masyarakat (seperti Jaring Pengaman Sosial dan Operasi Pasar Khusus). Sejumlah kasus akhirnya dikirim ke meja

hijau, seperti penyelewangan keuangan di lingkungan Dinas Kesehatan. Namun sejumlah kasus lainnya oleh pemerintah daerah hanya disoroti dengan nada ancaman, seperti yang berkaitan dengan kelalaian para pemegang ijin HPH dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Sejauh pengetahuan masyarakat, kasus-kasus tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang nyata.

Ada pula kasus-kasus yang berkaitan dengan proyek-proyek serba mahal dan sering kali berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pelayanan umum kepada masyarakat. Kasus-kasus tersebut menjadi sorotan karena kualitas hasilnya jauh dari yang diharapkan.

Kasus penyelewengan program-program bantuan untuk masyarakat, ternyata melibatkan banyak petugas di berbagai tingkat. Kategori kasus ini mendapat sorotan yang luas dari masyarakat karena langsung menyangkut kehidupan mereka. Program bantuan itu sering kali mengalami kemacetan, yang pada akhirnya dananya habis begitu saja. Wajar kalau kemudian muncul pertanyaan, dihabiskan oleh dan untuk siapa?

Kenyataan tersebut memang bukan hal baru. Bedanya, sekarang masyarakat bisa lebih mudah dan terbuka dalam memrotes "budaya korupsi". Masyarakat tampaknya tambah sadar akan hak-haknya dan lebih banyak menerima informasi mengenai program-program dari pemerintah. Pemerintah sendiri, mungkin dengan secara tidak sadar, juga turut membantu meningkatkan frekuensi protes karena sering kali mengajak masyarakat untuk menjadi lebih kritis dan partisipatif. Hanya yang perlu dipertanyakan, sejauh mana ajakan pemerintah itu didukung suatu *political will* (kemauan politik) guna memperbaiki keadaan yang buruk itu. Kalau kemauan politik itu diukur dengan banyaknya berita mengenai penyelesaian kasus penyelewengan secara hukum, atau dengan adanya perubahan sikap dari aparat pemerintah, para pengamat atau pembaca kronik tahun 2001, tentu akan kecewa. Karena sepanjang tahun 2001, hanya satu dua kasus penyelewengan saja yang diangkat ke permukaan dan diadili. Bahkan terkadang hasil pengadilan pun dinilai kurang memadai. Kebanyakan kasus umumnya dibiarkan dalam keadaan kabur, dan tidak diketahui apakah sudah atau belum diproses.

Dengan adanya Papuanisasi di tingkat dministrasi pemerintahan, juga tampak bahwa makin banyak warga asli Papua mulai me-

nikmati "hasil permainan". Kenyataan ini justru membuat sakit banyak warga Papua yang mengharapkan peran bersih dari "kami punya orang", yang nyata-nyata bekerja dan mengabdi untuk kepentingan masyarakatnya. Ungkapan yang sering terdengar dari warga masyarakat adalah, "kami diajak untuk pilih orang sendiri sebagai wakil rakyat dan sebagainya. Namun sesaat sesudah duduk di kursi, ternyata dia lupa adat." Pengalaman-pengalaman seperti itu, membuat banyak warga pesimis dan kecewa. Kenyataan itu juga menimbulkan kekhawatiran akan munculnya unsur-unsur pemerintahan yang semakin kehilangan nilai-nilai moral, bahkan tidak tahu malu, baik di tingkat atas maupun di tingkat bawah.

Budaya korupsi di Papua tidak terlepas dari fenomena munculnya "mental proyek". Kedua penyakit itu saling memperkuat. Sudah bukan rahasia jika di kalangan birokrat dikenal adanya musim kerja aktif dan masa menganggur. Pekerjaan dianggap ada, jika APBD sudah dicairkan. Rumusannya adalah: dana ada, proyek dilaksanakan, dan tentu ada komisi bagi yang menjalankannya. Jika dana yang dianggarkan berlebihan, karena pemerintah sendiri terkadang tidak memiliki program yang benar-benar realistik dan menyentuh kebutuhan masyarakat, maka diupayakan berbagai program dadakan dan asal-asalan untuk menghabiskan kelebihan dana tersebut. Fenomena terakhir ini sangat menjamur dan kasat mata dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, bersamaan dengan membanjirnya berbagai dana program tambahan yang diberikan pemerintah pusat untuk masyarakat Papua. Di antaranya dana bantuan IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan JPS (Jaring Pengaman Sosial), dengan berbagai jenis paket program di dalamnya seperti bantuan beras Opsus (Operasi Pasar Khusus), *crash program*, dan sebagainya.[8]

"Mental proyek" – yang sebenarnya sudah menjadi penyakit menular secara nasional – terlihat di segala tingkatan masyarakat, dan tidak terbatas terjadi di kalangan birokrat. Bahkan kalangan LSM dan masyarakat biasa tidak luput dari sentuhan penyakit tersebut. Kenyataan ini dengan sendirinya mendorong munculnya pemahaman di kalangan masyarakat bahwa di kantor-kantor

[8] Uraian rinci mengenai sejumlah program bantuan dapat dibaca dalam Bagian 3 buku ini.

pemerintah terdapat banyak uang yang bisa diakses melalui proposal. Begitu satu proposal diterima, maka akan datang proposal-proposal berikutnya, sehingga lama-kelamaan berubah menjadi kebiasaan yang hanya akan semakin melumpuhkan daya juang dan kreatifitas masyarakat untuk mempertahankan hidupnya secara sehat dan manusiawi. Situasi ini pelahan-lahan melahirkan "budaya kemiskinan" (*culture of poverty*), dan menghasilkan suatu masyarakat yang mengakui dirinya miskin, tidak berdaya, maka berhak mengemis dan berhak untuk dibantu. Dengan sendirinya, masyarakat demikian pada akhirnya akan kehilangan rasa percaya diri dan harga diri. Kenyataan seperti inilah yang kini nampak jelas di Papua, antara lain ditunjukkan dengan banyaknya pengajuan proposal kepada pemerintah atau instansi donor lainnya, sehingga meniadakan segala daya kreativitas yang sebenarnya ada dan dapat dikembangkan.

Perkembangan tersebut memang sangat memprihatinkan, apalagi mengingat Papua segera akan memasuki era otonomi khusus, yang tentu akan ditandai dengan penyediaan anggaran yang berlipat ganda. Dalam berbagai kesempatan sosialisasi, gubernur Papua seringkali menekankan bahwa adanya Otsus Papua akan membuka berbagai peluang yang luar biasa. Benar, jika yang dimaksud adalah tersedianya jumlah uang yang berlimpah. Namun kiranya kurang disosialisasikan oleh beliau bahwa melimpahnya uang akan membawa bahaya besar karena bisa membawa banyak orang terjerat dalam kebiasaan korupsi dan mental proyek, alias terjerat dalam upaya-upaya menguntungkan diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat. Sayangnya, instansi yang diharapkan dapat berperan membatasi bahaya tersebut, atau mengubah prilaku dan suasana seperti di atas – dan inilah yang terpenting – ternyata tidak berfungsi dan mengalami kelumpuhan yang parah. Kenyataan demikian tentu tidak dapat membantu masyarakat untuk bersikap lebih positif terhadap segala upaya otonomisasi di Papua. Mereka yang masih bersikap kritis mungkin akan bertanya, untuk siapa sebenarnya otonomi khusus itu? Akibat sampingan lain yang juga perlu dikhawatirkan adalah mudahnya masyarakat digiring menuju konflik horisontal, yakni antara kelompok masyarakat Papua yang tergolong 'kaya' dengan masyarakat Papua yang miskin.

Kekacauan sekitar pemilihan bupati/walikota

Jika mencermati kronik tahun 2001, akan muncul kesan bahwa hampir setiap pemilihan pejabat tinggi seperti bupati, walikota serta wakilnya disertai juga dengan keributan. Misalnya seperti yang terjadi di Sorong, Puncak Jaya, Paniai, Timika, dan Jayapura. Pemilihan bupati, walikota serta wakilnya di daerah-daerah tersebut selalu dipersoalkan. Pada dasarnya terdapat dua alasan pokok mengapa hasil pemilihan itu ditolak. *Pertama*, karena calon yang akhirnya terpilih bukan calon yang diinginan sekelompok etnis tertentu, dan *kedua,* karena calon yang terpilih dituduh telah terlibat permainan politik uang *(money politics)*, atau terpilih dengan cara membeli suara pemilihannya.

Sejak masa kampanye, proses pemilihan seorang kepala daerah sering kali diwarnai kekisruhan, misalnya adanya perebutan pada tahap pendafataran. Selain itu bobot seorang calon, sering kali dikait-kaitkan dengan "asal-usulnya". Tuntutannya sederhana saja: Walikota Jayapura misalnya, harus orang asli Jayapura! Atau, harus dari *fam* atau marga tertentu. Walaupun DPRD kabupaten atau kota telah melakukan seleksi berdasarkan visi dan misi yang dikemukakan para calon, dan lazimnya setiap pasangan calon diundang untuk menjelaskan visi dan misinya itu, namun penilaian yang obyektif akan sulit dilakukan. Penilaian *de facto* dikaburkan karena kepentingan primordial suku atau marga, atau bahkan dipengaruhi keuntungan materiil akibat *money politics.*

Pandangan etnis yang sempit itu memang sangat mengganggu. Namun sikap itu dapat dipahami, jika lahir dari reaksi spontan orang Papua sebagai warga asli yang martabat dan suaranya tidak diakui dan dihargai selama puluhan tahun. Masyarakat Papua merasa terlalu lama diatur dan dipimpin oleh "orang luar". Maka, ketika ada keterbukaan dan peluang, pengejewantahan harga diri suku dan *fam* mengambil peranan yang sangat penting, bahkan terkadang ditunjukkan secara berlebihan. Reaksi demikian juga dapat dilihat sebagai "promosi Papuanisasi", yakni aspirasi yang menekankan agar pejabat yang berkuasa di Papua dipilih dari putra putri daerah sendiri. Aspirasi ini mendapat tempat yang baik dalam kerangka 'perjuangan pembebasan' yang selama bertahun-tahun disuarakan masyarakat Papua.[9]

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika muncul juga kekacauan

akibat adanya prakter *money politic* yang dilakukan calon pejabat. Dalam satu dua kasus terdapat indikasi yang sangat jelas, bahwa permainan itu memang ada. Persoalan ini diperburuk oleh anggapan, bahwa politik kotor itu memang dapat dipercaya bisa membuahkan hasil yang diharapkan.

Namun dua persoalan tadi tampaknya tidak banyak berpengaruh terhadap kelangsungan pemilihan kepala daerah, karena *toh* pada akhirnya mereka tetap dilantik sebagai bupati atau walikota dan wakilnya. Inilah yang selama tahun 2001 membuat para pengamat politik terheran-heran. Soalnya, protes masyarakat terhadap kasus pasangan terpilih yang dipermasalahkan, tidak ditanggapi dengan penyelesaian yang transparan. Jika protes itu akarnya berasal dari pandangan etnis (primordial) yang sempit, bolehlah dimaklumi. Namun, jika akarnya berasal dari dugaan adanya politik uang, yang dapat digolongkan sebagai tindakan kriminal, maka sulit diterima jika kemudian kasus tersebut tidak diusut secara transparan sesuai prosedur.

Warga masyarakat juga patut merasa heran dengan penyelesaian kasus-kasus demikian tanpa dicari akar masalahnya. Mereka dibiarkan bingung, karena tidak ada instansi yang bisa meluruskan proses demokrasi yang tidak jujur itu. Yang mereka tahu adalah uang ternyata tetap berkuasa. Memang akan sangat berbahaya jika mereka yang bermain kotor dengan uang itu kurang menunjukkan itikadnya untuk melayani masyarakat sesuai dengan jabatannya. Namun begitulah kenyataannya, protes masyarakat tidak dapat mempengaruhi lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Suara mereka digeser ke pinggir, dan masyarakat disuruh puas dengan apa yang sudah terjadi.

Ironisnya, dalam situasi semacam ini, masih banyak pejabat yang menyanjung *good governance* (pemerintahan yang bersih), dan menjadikannya omongan yang murah. Mereka juga mengajak

---

[9] Kecenderungan untuk membangkitkan kembali keterikatan pada adat dan penghargaan atas eksistensi masyarakat asli , juga dapat dinilai sebagai langkah maju dan positif. Terutama jika dilihat dari wacana kemajemukan serta keanekaragaman nilai masyarakat, yang kemudian dijadikan pegangan untuk mengatur dan menata kembali hidupnya. Bagi masyarakat Papua, pegangan itu bisa ditemukan pada sejumlah nilai dasariah dalam adat-istiadat mereka, yang sampai saat ini kurang diberi tempat dalam perkembangan dunia modern. Hanya saja perlu dijaga secara bersama-sama, agar pergumulan ini tidak mengarah pada resistensi yang tertutup, tetapi justru harus membantu mereka untuk lebih percaya diri dan lebih berharga diri menghadapi tantangan-tantangan dunia yang terus berkembang.

masyarakat untuk mengambil peran sebagai 'instansi kritis'. Tetapi karena kenyataan di lapangan justru sebaliknya, banyak warga akhirnya mengambil sikap masa bodoh. Mereka tidak mau pusing lagi mengeluarkan pendapat, karena *toh* pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Kata "mafia" mulai terdengar, merujuk pada jaringan kekuasaan yang sulit ditembus melalui proses demokrasi yang sehat. Penilaian demikian – yang bukan tanpa alasan – pada akhirnya tidak membantu untuk memulihkan kembali kepercayaan rakyat pada pemerintah serta untuk mengajak rakyat berperan dan berpartisipasi kembali dalam pembangunan di Papua.

Justru dalam situasi seperti inilah pemerintah mengajak dan memberi peluang kepada masyarakat untuk berperan menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri melalui UU Otonomi Khusus.

Meningkatnya Kekerasan

Berbagai insiden kekerasan

Meningkatnya kekerasan yang sudah tampak sejak akhir tahun 2000, semakin menjadi-jadi selama tahun 2001. Daftar di bawah ini memperkuat kesimpulan di atas.

Tabel. 1. Daftar insiden kekerasan tahun 2001[10]

TANGGAL	TEMPAT KEJADIAN	PERISTIWA	PIHAK YANG TERLIBAT
16-01-01	Asiki —Merauke	Penyanderaan 18 karyawan PT Korindo	Willem Onde (Faksi TPN/OPM)
16-01-01	Sarmi	Bentrokan Polisi dengan TPN/OPM: satu anggota TPN luka tembakan	Polisi & TPN/OPM
03-02-01	Lokasi PT Somalindo Timber Kuefa — Betaf	4 agt Kopassus & 1 agt OPM tewas	TPN/OPM & Kopassus

[10] Boleh jadi daftar di bawah ini datanya tidak lengkap karena tidak mencantumkan korban kekerasan akibat operasi aparat keamanan. Daftar ini juga tidak mencantumkan korban tindak kriminal murni karena berada di luar cakupan buku ini.

TANGGAL	TEMPAT KEJADIAN	PERISTIWA	PIHAK YANG TERLIBAT
05-02-01	Nabire	1 agt. Brimob tewas	Kurang jelas
16-02-01	Wamena	Bentrokan antara TNI dan Polisi	TNI & Polisi
28-02-01	Jayapura	Robert Onggo tewas dalam kasus pemerasan	Polisi
29-03-01	Jayapura – GOR Forum Kajian Otsus	Philipus Murib tewas setelah terluka dalam aksi unjuk rasa	Polisi & Masyarakat
31-03-01	Wonggema – Wasior PT Dharma Mukti Persada (timber)	3 karyawan PT Dharma diculik dan dibunuh	TPN/OPM (?)
04-04-01	Kali Kopi – Timika	3 pencari kayu gaharu tewas	Kurang jelas
19-04-01	Asiki – Merauke	Dani Pamungkas (agt Brimob) tewas	Kurang jelas
03-05-02	Kecamatan Wasior	Brimob menyerang 22 agt Satgas Papua: 6 orang tewas; 16 orang ditahan	Polisi
07-05-01	Ilaga	Penyanderaan 2 warga asing (Belgia)	TPN/OPM
13-05-01	Nabire	Bentrokan antara TNI dan Polisi	TNI & Polisi
13-06-01	Wondiboi – Wasior	5 agt Brimob tewas	TPN/OPM
25-06-01	Betaf	Hubertus Wresman diculik dan dibunuh	Kurang jelas
09-07-01	Sorong	Bentrokan antar TNI-Polisi: 1 agt TNI luka	TNI & Polisi
10-07-01	Wasior	Musa F.(agt Brimob) tewas	Kurang jelas
17-07-01	Jayapura	Bentrokan Polisi & masyarakat: Yusuf Runggaimusi tewas	Polisi & Masyarakat

TANGGAL	TEMPAT KEJADIAN	PERISTIWA	PIHAK YANG TERLIBAT
20-07-01	Manokwari	Daan Yarius Ramar (51 th) tewas sewaktu dalam tahanan	Polisi
27-08-01	Sarabera - Sarmi	Serangan pada pos Polisi: 6 org luka-luka	TPN/OPM
28-08-01	Serui	Bentrokan antara TNI dan Polisi: 2 org tewas, 4 luka-luka	TNI & Polisi
28-08-01	Bintuni	Serangan pada pos Polisi: 2 org Luka	TPN/OPM
10-09-01	Asiki - Merauke	Willem Onde & John Tumin tewas terbunuh	Dugaan kuat: TNI
17-09-01	Betaf	Serangan pada PT Salaki: 1 org tewas	Kurang jelas
21-09-01	Kali Kopi - Timika	Bentrokan TPN/OPM dgn TNI: 2 org tewas	TPN/OPM & TNI
23-09-01	Bonggo	Serangan pada pos TNI: 2 org tewas	TPN/OPM
28-09-01	Ilaga	Bentrokan TPN/OPM dengan TNI/Polisi: 1 org tewas tereksekusi	TPN/OPM & TNI/ Polisi
04-10-01	Windesi - Wasior	John Calvin Werianggi dibunuh	TNI
15-10-01	Biak	Seorang agt Brimob ditikam mati di pasar	Kurang jelas
10-11-01	Jayapura	Theys Eluay diculik dan dibunuh	TNI
14-11-01	Mulia	Elesius Tabuni ditembak mati	TNI & Polisi
16-11-01	Parapasi - Waropen	Serangan pada pos Polisi: 1 org tewas	TPN/OPM

TANGGAL	TEMPAT KEJADIAN	PERISTIWA	PIHAK YANG TERLIBAT
25-11-01	Jayapura	Kantor Independent Journalist Alliance (AJI) diserang	Kurang jelas
28-11-01	Kimaam	Aksi unjuk rasa masyarakat: 2 org tewas	TNI/Polisi
20-12-01	Tembagapura	Serangan terhadap dua org karyawan	Kurang jelas

Daftar di atas cukup mengejutkan dan membuat kita sadar bahwa "zona damai" di Papua masih jauh dari harapan. Kekerasan di segala lapisan masyarakat terus meningkat. Peningkatan itu sebagian terkait dengan upaya pihak keamanan untuk melenyapkan segala bentuk gerakan "kemerdekaan", yang dinilai sebagai gerakan separatis. Sebagian lagi terkait dengan munculnya faksi-faksi gerakan pembebasan yang sudah tidak sabar dan memilih jalan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua tindakan kekerasan bersangkut paut langsung dengan gerakan politik. Kekerasan berantai di wilayah Wasior Manokwari misalnya, lebih terkait dengan persoalan ekonomi, yakni soal pertanahan. Awal kekerasan di Pulau Kimaam, Merauke, juga berkaitan dengan alasan ekonomi, yakni perampasan peluang ekonomis masyarakat lokal oleh pengusaha bermodal yang didukung kebijaksanaan pemerintah, dengan cara menguasai tempat perikanan tanpa memperdulikan nasib masyarakat.

Dari rangkaian kekerasan itu, ada dua peristiwa besar selama tahun 2001. Yakni rangkaian insiden kekerasan di wilayah Wasior dan pembunuhan terhadap Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluai.

Kekerasan di wilayah Wasior

a. Peristiwa awal: 31 Maret 2001

Peristiwa ini berawal dari unjukrasa masyarakat yang menuntut kompensasi tanah dan hasil hutan yang diambil PT Darma Mukti Persada. Di Kecamatan Wasior terdapat tiga perusahaan HPH, yakni PT Darma Mukti Persada (DMP), PT Wapoga Mutiara Timber (WMT), dan [illegible] (VPP). Ketiga perusahaan

ini sudah bertahun-tahun merambah kayu bulat dari hutan untuk diekspor ke luar Papua.

Sudah lazim kalau perusahaan-perusahaan HPH itu mengurus dan mendapat izin dari pusat dan tidak peduli dengan hak masyarakat setempat. Kompensasi atas tanah dan hutan yang menjadi hak masyarakat adat tidak diberikan atau pemberiannya dipermainkan. Upaya masyarakat dalam menuntut haknya sering tidak dihiraukan dan diremehkan. Sementara perusahaan-perusahaan itu merasa dirinya 'kuat' karena telah menjalin hubungan erat dengan pihak keamanan.

Sejak pertengahan Maret 2001, dewan adat yang mewakili penduduk asli Wombu berupaya melakukan negosiasi dengan PT Darma Mukti Persada. Dewan adat menuntut uang ganti-rugi yang harus dibayarkan sebelum 30 Maret 2001. Ternyata uang ganti-rugi itu tidak juga dibayarkan hingga batas waktu yang ditetapkan. Lalu, penduduk asli Wombu mulai memalang jalan masuk ke perusahaan HPH itu. Namun aksi pemalangan hanya berjalan sehari saja karena pada 31 Maret 2001 muncul kelompok tak dikenal dengan bersenjata api canggih. Kelompok itu menyerang, menculik, dan membunuh tiga orang karyawan PT Darma Mukti Persada.

Peristiwa 31 Maret ini dijawab pihak keamanan dengan suatu operasi pengejaran dan penyisiran. Masyarakat dijadikan target operasi. Sementara usaha investigasi untuk menemukan pelaku penyerangan yang sebenarnya tidak dijalankan. Akibatnya banyak warga biasa menjadi ketakutan dan melarikan diri ke tempat-tempat yang dianggap aman.

b. Peristiwa lanjutan 13 Juni 2001

Pada 3 Mei 2001, di tempat yang sama kembali terjadi peristiwa berdarah yang kurang jelas hubungannya dengan peristiwa sebelumnya. Pada hari itu sekelompok utusan dari Satgas Papua yang berjumlah 22 orang, kebanyakan berasal dari Kabupaten Puncak Jaya, baru pulang dari suatu pertemuan di wilayah Kecamatan Wasior. Jenis pertemuannya kurang jelas. Utusan Satgas Papua hanya mengaku bahwa mereka baru menghadiri suatu pertemuan adat. Namun pihak keamanan menuding mereka terlibat suatu latihan Tentara Pembebasan Nasional (TPN). Dalam perjalanan pulang, kelompok ini ditangkap pasukan Brimob. Dalam

peristiwa ini, enam orang utusan ditembak mati dan 16 lainnya dibawa dan ditahan di Manokwari.

c. Penyerangan terhadap pihak keamanan

Ternyata kekerasan di Kecamatan Wasior tidak berakhir sampai di situ. Pada 13 Juni 2001, lagi-lagi terjadi peristiwa berdarah. Pagi hari itu, sekelompok bersenjata tak dikenal menyergap dan menewaskan lima anggota Brimob. Kelompok penyerang itu jumlahnya ditaksir mencapai 30 orang. Mereka bersenjata tombak, parang, panah, dan senjata api. Sementara anggota Brimob yang menjadi korban adalah petugas penjaga keamanan di perusahaan kayu gelondongan CV Vatika Papuana Perkasa (VPP) yang berbasis di Desa Wondiboi. Seusai penyerangan kelompok ini juga membawa lari lima pucuk senjata rampasan dari Brimob.

d. Operasi balasan pihak keamanan

Setelah peristiwa 13 Juni 2001 itu, operasi pihak keamanan yang sudah dimulai sejak awal April (setelah terjadi peristiwa 31 Maret 2001) menjadi lebih hebat lagi. Operasi yang represif itu diwarnai kemarahan pasukan Brimob yang kehilangan lima orang personilnya. Pihak keamanan melakukan penyisiran besar-besaran. Orang kampung yang tidak tahu apa-apa ikut ditangkap, dianiaya, dan ditahan. Sejumlah rumah penduduk di sekitar tempat kejadian dihanguskan. Hasil kebun atau hewan piliharaan juga dimusnahkan.

Operasi pihak keamanan tersebut menjadi sorotan banyak pengamat. Protes yang keras disuarakan berbagai pihak, termasuk oleh pimpinan Gereja GKI. Sejumlah usaha dijalankan oleh pihak Gereja bersama beberapa LSM untuk meredakan situasi serta mengarahkannya pada penanganan yang lebih manusiawi dan sesuai hukum. Namun usaha-usaha ini kurang berhasil. Bahkan tim kemanusiaan yang dibentuk Gereja, bersama sejumlah LSM yang bertujuan menangani persoalan ini, ditolak keberadaannya oleh Pangdam XVII/Trikora, Mayjen Mahidin Simbolon, dengan alasan terdapat sejumlah anggota tim yang tidak disukainya.

Setelah menyadari bahwa operasi yang dilakukan pihak keamanan tidak tepat sasaran, maka pada 29 Juli 2001 Kapolda Papua bersama Muspida melakukan kunjungan ke lapangan dan mengupayakan jalan keluar yang lebih persuasif. Kunjungan ini

berhasil memulihkan kembali suasana menjadi lebih normal. Dengan cara yang persuasif, pihak keamanan juga menyerukan agar pelaku penyerangan mengembalikan lima pucak senjata yang mereka rampas dari Brimob. Namun seruan tersebut sampai akhir tahun 2001 tidak membuahkan hasil.

e. Dampak peristiwa pada masyarakat biasa

Operasi pihak keamanan yang awalnya dimaksudkan untuk mengejar pelaku penyerangan, dengan mudah dialihkan pada penduduk yang tidak berdaya untuk melawan. Menurut laporan Tim Kemanusiaan Kasus Wasior, ada 94 orang penduduk sipil yang tidak berdosa ikut ditangkap, diperlakukan tidak manusiawi, dan mengalami penyiksaan ringan sampai berat. Bahkan ada di antara korban yang menderita cacat seumur hidup. Operasi itu telah berhasil membuat masyarakat takut, sehingga terjadi pengungsian masal guna mencari tempat yang lebih tenang dan aman, walaupun harus meninggalkan mata pencahariannya sehari-hari. Bencana itu terjadi hanya karena para penduduk tersebut kebetulan tinggal di kampung-kampung yang berdekatan dengan lokasi kejadian.

Pengungsian besar-besaran itu juga berdampak buruk bagi penduduk. Kondisi dan keberadaan mereka jauh dari sumber makanan, dari perumahan yang layak, dan dari segala bentuk pelayanan seperti pendidikan dan kesehatan. Tidak sulit untuk meramalkan bahwa rangkaian peristiwa di Wasior selama tahun 2001 itu akan meninggalkan bekas-bekas yang sangat traumatis bagi penduduk di wilayah ini.

f. Pola pengamanan yang patut dipertanyakan

Peristiwa di Wasior menunjukkan pola operasi keamanan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Papua, yakni reaksi keras tanpa membedakan mana yang salah dan mana yang tidak. Dengan dalih mencari pelaku yang seharusnya dilakukan melalui investigasi yang sistematis dan obyektif, pihak keamanan masuk pada suatu operasi yang intimidatif dan melakukan penyiksaan yang membabi buta. Seakan-akan siapa saja yang kebetulan tinggal berdekatan dengan lokasi kejadian sudah terbukti terlibat dan dicap bersalah, serta harus diperlakukan sebagai musuh. Pola yang sama juga ditunjukkan saat dilakukan operasi keamanan seusai peristiwa

penyerangan Polsek di Abepura. Lalu muncul kesan bahwa operasi keamanan dengan segala tindakannya itu sepertinya dinyatakan sah oleh pihak yang berwajib.

Yang lebih mengherankan, investigasi yang sistematis dan obyektif untuk mengusut berbagai kasus, atau usaha menangani kasus sesuai prosedur hukum yang berlaku, tidak penah dijalankan. Ini bukanlah hal baru, tetapi sudah berlangsung sejak tahun 2000 dalam kasus Wamena dan Merauke,[11] hingga kasus-kasus yang muncul tahun 2001 seperti kasus Merauke, Kimaam, dan Betaf. Ketika sudah ada orang yang ditahan pun, proses hukum terhadap mereka selalu ditunda-tunda. Dakwaan terhadap beberapa orang yang ditahan sejak peristiwa 3 Mei 2001 misalnya, baru ditangani oleh Ajun jaksa pada 26 Oktober 2001.[12]

g. Akar permasalahan ditelantarkan

Perlu juga dicatat bahwa masalah-masalah yang melatarbelakangi munculnya rangkaian peristiwa kekerasan itu ternyata kurang mendapat perhatian secara terbuka dan obyektif. Akibatnya akar permasalahan tidak tersentuh dan tidak ditangani secara serius sehingga tetap akan menjadi pemicu konflik di masa mendatang. Contoh yang bagus untuk menggambarkan kenyataan ini adalah kasus ditemukannya mayat seorang petugas kesehatan di wilayah Wasior dalam keadaan terpotong-potong pada 10 September 2002. Berita penemuan mayat ini hanya menjadi catatan kecil saja di koran, lalu segera hilang dari perhatian siapa saja. Kejadian ini sebenarnya merupakan konsekwensi dari penolakan pemerintah (termasuk aparat keamanan) atas hak-hak asasi manusia yang sangat tragis, termasuk penolakan terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat adat.

Pembunuhan terhadap petugas kesehatan itu, adalah sebagian saja dari serangkaian tindakan kekerasan di wilayah Wasior. Di daerah ini, perusahaan-perusahaan kayu bergabung dengan pasukan keamanan dalam menjalankan operasinya, tanpa peduli dengan banyaknya ganti-rugi yang harus dibayarkan kepada masyarakat

---

[11] SKP Keuskupan Jayapura, *Memoria Passionis: Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia di Papua tahun 2000*, Jakarta: LSPP, 2000.

[12] Surat dakwaan terhadap empat anggota utusan Satgas Papua yang ditangkap pada 3 Mei 2001, bernomor Reg. Perkara: PDM46/MANOK/Ep.2/0801.

setempat. Tidak sedikit korban jatuh dari ketegangan ini. Faktanya, eksploitasi komersial sumber daya alam di Papua sering kali diiringi dengan pembunuhan-pembunuhan yang sadis.

Di balik kedok untuk mematahkan kekuatan separatisme Papua, pemerintah Indonesia, termasuk di dalamnya aparat keamanan, telah membangun sejarah panjang pelanggaran HAM demi menyelamatkan kepentingan ekonomis/bisnis kelompok-kelompok tertentu. Maka, selama akar masalah semacam ini tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan tangani secara serius, maka tidak akan ada penyelesaian masalah di Papua.

Namun, sulit dibuktikan juga bahwa masyarakat Papua tidak terlibat secara aktif dalam berbagai peristiwa kekerasan di atas. Karenanya sangat memprihatinkan ketika masyarakat Papua berusaha membangun suasana damai dan membuka dialog sebagai sarana utama untuk mewujudkan aspirasinya, kelompok lainnya justru dengan intensif menggunakan cara-cara kekerasan. Kenyataan itu tentu saja sangat mengganggu dan bertolak belakang dengan upaya menempuh jalan damai seperti yang ditunjukkan oleh Presidium Dewan Papua.

Munculnya sikap kurang sabar masyarakat juga patut direnungkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ketika terjadi kekerasan di Wasior misalnya, tercatat masih ada usaha masyarakat untuk berdialog dengan perusahaan, agar hak-hak mereka diindahkan. Masyarakat masih mau menempuh jalan damai. Namun rupanya mereka bosan terus-menerus berhadapan dengan kekuatan yang tidak mau tahu dengan hak-hak dasar masyarakat. Apalagi lawan yang dihadapi menunjukkan arogansi kekuasaan. Wajar jika pada titik tertentu masyarakat merasa lelah dan lari pada cara lain untuk meneriakan suaranya. Ya, siapa saja yang menggunakan cara kekerasan memang salah. Namun perlu dipertanyakan, kenapa orang sampai menggunakan cara seperti itu?

Pembunuhan Theys Hiyo Eluay

Peristiwa yang paling menggoncangkan masyarakat Papua selama tahun 2001 adalah penculikan dan pembunuhan terhadap Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay. Peristiwa pada malam 10 November itu akan terus dikenang orang Papua. Apalagi kejadian sebenarnya dari pembunuhan itu belum juga terungkap secara jelas. Oleh sebab itu,

sekali lagi masyarakat Papua merasa, bahwa keadilan bukan main susahnya untuk diperoleh di negera hukum ini.

Hasil investigasi awal yang dilakukan polisi telah membenarkan dugaan masyarakat luas, bahwa pembunuhan itu dilakukan secara terencana, teliti, dan bermuatan politik. Seorang pemimpin bangsa Papua telah hilang, dan duka masyarakat sangat dalam karena harus kehilangan orang yang menjadi lambang perjuangan rakyat.

a. Seorang pemimpin politik "yang berwarna-warni" dihilangkan

Siapakah Theys Hiyo Eluay? Tokoh ini adalah pribadi yang kontroversial dan sering menimbulkan penilaian yang beragam. Ia merupakan tokoh yang mengambil bagian dalam Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969, dan secara formal menyetujui pengintegrasian Papua kedalam Republik Indonesia. Ia juga kader Golkar yang selama 12 tahun duduk di kursi DPRD. Selain itu, Theys adalah tokoh adat di kawasan Sentani yang akhirnya memproklamasikan diri sebagai pemimpin Adat Bangsa Papua (November 1999), setelah ia tidak lagi duduk di DPRD. Pamornya mulai naik ketika pada 1998 menyatakan bertanggungjawab atas kelakuan dua tokoh Papua lainnya, Don Flassy dan Sem Yaru, yang sedang ditahan polisi. Bahkan saat itu Theys juga mempersilahkan pihak berwajib untuk menangkap dan memenjarakan dirinya. Tapi akhirnya melalui persidangan di pengadilan pada 5 September 2000, ia dinyatakan bebas dan tidak terlibat dalam kegiatan subversi. Dalam Mubes Papua yang berlangsung pada Februari 2000, Theys diangkat sebagai ketua Presidium bersama Tom Beanal yang diangkat sebagai rekan-ketua. Jabatan itu diperkuat dalam Kongres Papua II pada Mei - Juni 2000. Pasca kongres, Theys mengambil bagian dalam berbagai lobi, baik di dalam maupun di luar negeri, hingga namanya dikenal di tingkat nasional maupun internasional.

b. Gaya kepemimpinan Theys

Gaya kepemimpinan Theys bersifat tradisional dan dilandaskan pada karisma pribadi. Ia bukanlah seorang pemimpin politik modern yang mengetahui seluk-beluk negosiasi dan diplomasi politik. Bahkan ia menghindari cara berpolitik seperti itu. Ia merasa lebih betah berada di tengah-tengah masyarakat biasa dengan menggunakan bahasa yang menyentuh hati para pendengarnya.

Theys merupakan pemimpin yang dapat mengungkapkan suara hati orang Papua dengan segala emosi dan hiasannya, serta memiliki kepekaan terhadap momen-momen tertentu untuk tampil secara tepat.

Di bawah ini adalah beberapa sikap dan tindakan Theys Hiyo Eluay yang menunjukkan karakter-karakter khasnya itu.

1. Selama menghadiri persidangan di pengadilan ia menarik perhatian dan menunjukkan kedudukan serta pengaruhnya dengan berpakaian adat seraya diiringi ratusan pengikutnya.
2. Ketika Kapolda memberi ultimatum agar Posko-Posko (yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat Papua yang ingin bergabung dengan perjuangan) dibubarkan, Theys balik mengeluarkan ultimatum kepada Kapolda agar segera mencabut instruksinya (April 1999).
3. Ketika sejumlah tokoh perjuangan Papua mulai diintimidasi dan diteror pihak yang tidak diketahui identitasnya, Theys mulai membentuk Satgas Papua yang bertugas menjaga keamanan para pejuang. Pembentukan Satgas akhirnya meluas di seluruh wilayah Papua, hingga di pelosok-pelosok.
4. Ketika "Tim Seratus"[13] menunjukkan sikap lesu dan tidak terlalu aktif lagi – terutama setelah menyampaikan pernyataan di depan Presiden Habibie pada Februari 1999 – dan mengakibatkan gerakan massal cenderung kehilangan momen, Theys justru secara tiba-tiba mengejutkan semua pihak dengan merencanakan pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 1999 di seluruh wilayah Papua. Kejadian ini membangkitkan kembali gerakan dan semangat bangsa Papua untuk memperjuangkan aspirasinya. Pada saat yang sama Theys mengangkat dirinya sebagai Pemimpin Besar Bangsa Papua, dan mengangkat Yorris Raweyai, Ketua Pemuda Pancasila, sebagai pemimpin masyarakat Papua yang tinggal di luar Papua. Kedudukannya itu semakin diakui setelah rencana pengibaran bendera benar-benar dilaksanakan dalam suasana damai dan penuh hikmat. Untuk pertama kalinya sejak 1 Desember 1961, bendera Bintang Kejora

[13] Nama julukan bagi delegasi masyarakat Papua yang menghadap Presiden Habibie pada 26 Februari 1999. Tim ini menyatakan bahwa, Sudah cukup penderitaan bangsa Papua, maka saatnya sudah tiba untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia.

berkibar dengan bebas. Banyaknya orang Papua yang menitikkan air mata saat itu, mencerminkan betapa besarnya dampak emosional kejadian tersebut.

5. Didampingi oleh "saudaranya", Tom Beanal, Theys turut menyemangati Kongres Papua, sekaligus mencegah terjadinya bentrokan antara kubu-kubu yang pro otonomi dengan yang pro kemerdekaan.
6. Akhir tahun 2000, sekali lagi Theys masuk penjara bersama empat tokoh pejuang Papua lainnya, hingga menjadi "pejuang yang siap menderita". Ketika Theys akhirnya dibunuh, ia masih berstatus sebagai tahanan polisi.

Memang, kepemimpinannya kurang menonjol dalam ketrampilan merumuskan visi dan strategi yang rasional dan operasional. Namun tugas itu dibiarkannya untuk dijalankan oleh rekan-rekannya yang lebih berpendidikan dan lebih mengetahui tuntutan dan cara berpolitik mutakhir. Kepemimpinannya hanya dipusatkan pada ungkapan suara hati dan nurani, serta ajakan agar segala perjuangan dijalankan secara damai.

Walaupun terkadang ungkapan dan sikap Theys menimbulkan kontroversi, ada yang mau mendukung, tetapi ada juga yang melawannya, tetapi setelah dibunuh Theys justru menjadi pemersatu seluruh bangsa Papua. Ia menjadi martir untuk perjuangan bangsa Papua yang ingin hidup dalam damai dan bebas dari segala bentuk penindasan.

c. *Dampak pembunuhan Theys terhadap masyarakat*

Pembunuhan terhadap Theys ditanggapi masyarakat Papua dengan sikap yang mengagumkan. Reaksi pertama masyarakat adalah bungkam seribu bahasa karena tidak mempercayai kejadian seperti itu terjadi. Kemarahan massa sempat muncul dan mengakibatkan sejumlah toko di Sentani rusak. Ketika jenazah Theys diarak ke Sentani, rumah-rumah di sepanjang jalan juga dilempari batu oleh massa. Namun pelampiasan kemarahan yang destruktif itu dengan cepat dapat dikendalikan oleh PDP, yang kemudian mengarahkannya pada rasa berkabung yang mendalam. Berhari-hari masyarakat Papua menenggelamkan dirinya dalam doa, lagu-lagu, tangisan, kata-kata, perarakan, serta keheningan.

Suasana seperti itu juga mewarnai seluruh acara penguburan yang dihadiri sekitar 10 sampai 15 ribu orang. Suasana yang mengagumkan dan mengungkapkan kekhasan martabat orang Papua. Sangat tepat jika aparat keamanan tidak menunjukkan kekuatannya di lokasi penguburan, karena memang tidak dibutuhkan. Selama upacara pemakaman berlangsung, bangsa Papua menunjukkan sisi kepribadiannya yang terbaik dan sejati. Pada dasarnya mereka mau hidup dalam damai, dan tidak mengerti bagaimana pembunuhan atas pribadi Theys bisa terjadi.

Sementara wakil-wakil Muspida, termasuk dari pihak keamanan, selama acara penguburan berjalan mengambil tempat sebagai undangan. Tidak hadirnya Gubernur Papua dalam acara penguburan, justru sangat mengherankan. Begitu juga dengan tidak hadirnya Menteri Negara Kawasan Indonesia Timur, Manuel Kaiseipo, yang justru datang ke Papua untuk menghadiri acara penguburan itu.

Bagi banyak pengamat sangat mengherankan bahwa pembunuhan terhadap Theys tidak memicu pemberontakan masal yang penuh kekerasan. Bahkan beberapa kalangan masyarakat ada yang menduga, kemungkinan besar ada pihak yang justru kecewa bahwa pembunuhan tehadap Theys tidak memicu perlawanan yang keras. Perlawanan demikian akan mudah dapat digunakan sebagai legitimasi untuk melakukan operasi keamanan secara besar-besaran dengan menyapu bersih gerakan pembebasan bangsa Papua sampai tidak ada lagi jejak-jejaknya. Ada tidaknya kelompok demikian itu hanya dapat dibuktikan jika kebenaran, termasuk di dalamnya muatan politik pembunuhan ini, dapat terbongkar.

Yang jelas, tidak adanya sebuah pemberontakan masal bukan karena disebabkan Papua tidak merasa marah. Kenyataannya, mereka memang betul-betul marah, karena sekali lagi diperlakukan sebagai "obyek saja", sebagai orang yang tidak berarti, yang dapat dihabisi dengan sewenang-wenang. Memang, ada alasan untuk marah dan untuk merasa tidak berdaya berhadapan dengan unsur kejahatan sebagaimana terbukti dalam penculikan serta pembunuhan terhadap Theys. Namun, ternyata masyarakat Papua cukup sabar dan menyalurkan kemarahannya secara sangat manusiawi, yakni melalui acara-acara duka, tenggang rasa, dan melalui ajakan untuk tetap menjaga suasana damai.

Di samping itu, ada harapan besar dalam masyarakat Papua, agar pihak berwajib kali ini berusaha sungguh-sungguh untuk membongkar dan mencari kebenaran dalam kasus Theys, dan membawa para pelakunya ke pengadilan. Mereka berharap besar bahwa akhirnya hukum bisa ditegakkan. Harapan besar ini memberi dasar untuk tetap bersabar sehingga membantu meredakan emosi masyarakat Papua. Maka, kunci untuk mengatasi pengalaman pahit ini akhirnya terletak pada investigasi yang dilakukan secara serius untuk mengungkap kasus tersebut.

Ini pula yang diwanti-wanti oleh banyak komponen masyarakat. Tidak mengherankan jika selama bulan-bulan terakhir tahun 2001 berbagai pihak, seperti pemimpin agama, LSM, tokoh-tokoh masyarakat, PDP, Kapolda, Gubernur, dan DPRD, sangat vokal menuntut adanya investigasi yang sungguh-sungguh obyektif. Namun, sampai akhir tahun 2001 ternyata tak ada satupun tim investigasi yang terbentuk, yang bisa dipercayai oleh berbagai pihak. Sehingga, rasa frustrasi dan tidak berdaya terhadap pihak-pihak yang berkuasa makin hari makin terasa.[14]

d. Apakah pembunuhan Theys kejadian yang terisoliasi?

Pembunuhan terhadap Theys menimbulkan kemarahan sekaligus rasa takut. Orang banyak bertanya, "Kenapa bisa terjadi demikian? Apakah kejadian serupa akan terjadi lagi? Siapa korban berikutnya?" Ada semacam perasaan bahwa masyarakat sedang berhadapan dengan musuh yang sangat kuat, namun tidak kelihatan, tersembunyi. Muncul juga perasaan bahwa musuh itu "kebal hukum", sehingga tidak mungkin dapat diadili. Juga ada dugaan, bahwa kejadian pembunuhan itu adalah bagian dari suatu recana skenario yang lebih besar.

Perhatian masyarakat lalu terpusat pada sebuah dokumen yang dibocorkan Kontras Jakarta. Dokumen itu melaporkan suatu pertemuan berbagai instansi keamanan nasional di Jakarta pada 8 Juni 2000.[15] Dalam pertemuan itu digambarkan sebuah rencana untuk menghilangkan, meniadakan gerakan "M" (merdeka) di Papua. Adanya "program kerja Juni 2000" itu membuat masyarakat

---

[14] Baca lebih lanjut uraian mengenai kondisi HAM 2001, Bagian 3 dalam buku ini.
[15] Nota Dinas dengan nomor: 578/ND/KESBANG/VI/2000, tertanggal 8 Juni 2000.

Papua benar-benar takut dan waspada, termasuk para pembela hak-hak dasar masyarakat Papua. Tiba-tiba pembunuhan terhadap Willem Onde, seorang tokoh pejuang lainnya, yang dihabisi bersama ajudannya, yang terjadi dua bulan sebelum Theys tewas, mendapat relevansi baru. Pembunuhan terhadap Willem Onde pun tidak pernah diinvestigasi.[16]

Willem Onde dikenal sebagai salah satu komandan OPM sejak pertengahan 1998. Ia menjadi 'anak binaan' Kopassus di Bagian Selatan Propinsi Papua (Merauke). Pada awal tahun 2001 Willem Onde berhasil menarik perhatian besar masyarakat karena menyandera 18 karyawan perusahaan kayu PT Korindo di Kabupaten Merauke. Penyanderaan ini akhirnya dapat diselesaikan dengan cara damai dan Willem Onde diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya kepada pejabat tinggi negara (termasuk kepada Presiden Abdurrahman Wahid) di Jakarta. Pada Juli 2001, hubungannya dengan Kopassus mulai renggang, sampai akhirnya putus sama sekali, karena ternyata pimpinan Kopassus tidak berhasil mengandalkan Willem Onde menurut kehendak mereka. Dua bulan kemudian, tepatnya 10 September 2001, Willem Onde bersama ajudannya, John Tumin Kandam, dibunuh dalam perjalanannya dari Asiki ke Muting. Karena tidak pernah diinvestigasi, para pelaku pembunuhan terhadap Willem Onde dan John Tumin tidak pernah diketahui. Akhirnya masyarakat hanya bisa menduga-duga. Dan Theys Hiyo Eluay kemudian terbunuh juga. Kejadian ini menyegarkan kembali ingatan masyarakat, terutama masyarakat di bagian selatan Papua, yang kemudian berniat menuntut untuk diadakan investigasi yang serius.

Pembunuhan terhadap Theys dan Willem Onde juga membuat kalangan pembela HAM di Papua resah. Keresahan itu semakin menjadi-jadi karena munculnya ancaman terhadap beberapa tokoh, baik di kalangan pembela HAM maupun di kalangan pejuang-pejuang aspirasi masyarakat Papua. Tampaknya, selama di Papua masih ada "kekuatan-kekuatan yang tersembunyi", rasa kurang aman di kalangan-kalangan masyarakat akan terus muncul dan

---

[16] Lihat laporan SKP Merauke: "*Laporan dan Analisi: Mengapa pembunuhan terhadap Willem Onde dan John Tumin Kandam belum diinvestigasi?*", Merauke, Juni 2002.

melumpuhkan kebebasan yang sah dalam menyampaikan aspirasi

e. Dampak pembunuhan Theys terhadap PDP

Pembunuhan terhadap Theys juga meninggalkan kelumpuhan di PDP. Kedudukannya sebagai Ketua secara formal tidak diisi kembali karena hanya dapat diganti melalui Kongres Papua yang memberikan mandat kepada Presidium. Kongreslah yang dinilai berwenang untuk mengangkat seorang ketua baru. Untuk kepentingan praktis, kedudukan ketua diisi oleh Wakil Ketua Tom Beanal. Sedangkan di forum-forum, tanggapan dan sikap PDP lazimnya disuarakan melalui Sekjen Thaha Mohammad Alhamid.

Setelah emosi akibat terbunuhnya Theys mereda, ada upaya PDP yang menonjol. Yakni, menuntut adanya investigasi yang mampu mengungkapkan kebenaran di belakang pembunuhan terhadap ketua mereka, untuk mengantar para pendukungnya ke arah sikap yang tenang, melalui upaya-upaya di bawah ini:

Upaya pertama, mendorong adanya suatu investigasi yang obyektif, yang dijalankan dalam hubungan kerjasama antara pihak investigator awal, yakni aparat polisi di Papua, dengan berbagai pihak, baik tokoh masyarakat umum, LSM, maupun tokoh-tokoh Agama, untuk turut memperjuangkan investigasi yang benar.

Upaya kedua, PDP akan berunding dengan wakil-wakilnya di daerah (para anggota Panel) untuk menentukan strategi ke depan sambil menghindari terjadinya insiden-insiden baru. Dalam kerangka inilah, PDP kemudian berhasil menghindari tanggal 1 Desember 2001 menjadi *moment* munculnya pemberontakan masyarakat secara luas. Berbagai tindakan seperti pengibaran bendera yang rencananya akan dilakukan anggota-anggota Panel pada tanggal itu, dilarang oleh PDP. Semua pihak dianjurkan untuk memperingati 1 Desember dengan menyelenggarakan pertemuan ibadat syukur dan sejenisnya. Ternyata, PDP sangat berhasil dalam menenangkan masyarakat dan mampu menghindari jatuhnya lebih banyak korban dalam perjuangannya.

PDP juga menyuarakan dengan lantang bahwa program perjuangan tidak mengalami perubahan hanya karena ketuanya terbunuh. Mandat yang diberikan kongres untuk memperjuangkan pembebasan Papua, tetap dipegang teguh, walaupun kurang dijabarkan dalam sebuah program yang transparan dan nyata.

Kepercayaan masyarakat terhadap PDP ternyata tetap ada dan bahkan semakin kuat setelah adanya peristiwa berdarah itu.

Namun perlu jadi catatan bahwa PDP semakin kurang jelas dalam menggambarkan strategi yang mau disajikan kepada pengikut, yang sebagian besar tinggal jauh dari sumber informasi dan kegiatan politik. Padahal sudah bertahun-tahun masyarakat berharap PDP dapat memperjuangkan pembebasan dalam waktu tidak terlalu lama. Harapan yang tinggi itu terus berkembang dan tidak didasarkan pada sebuah pegangan yang realistis. Kelemahan PDP dalam menjabarkan programnya, bukan tidak mungkin akan membuat masyarakat semakin kehilangan pegangan yang lebih jelas. Bahkan, dalam bulan-bulan terakhir tahun 2001, PDP menjadi kurang vokal dan arahannya kurang terasa. Akibatnya, masyarakat yang sebenarnya berharap mendapat petunjuk dari PDP, bagaikan "kawanan domba tanpa gembala". Keadaan yang cukup memprihatinkan.

KEMARAHAN AKHIR TAHUN

Sekali lagi, pada peralihan tahun 2001, masyarakat Papua tidak punya pilihan lain selain merasa marah. Padahal tahun sebelumnya pun mereka harus kecewa, karena kemajuan yang diharapkan, ketenangan, kedamaian dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, juga tak kunjung datang. Berbagai peristiwa selama tahun 2001 semkain menggarisbawahi, betapa sulit untuk mewujudkan dan menikmati keadilan di Papua. Beberapa peristiwa kekerasan sekali lagi menunjukkan betapa masyarakat sangat mudah menjadi korban perebutan kekuasaan dan perebutan keuntungan ekonomis yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Upaya Papuanisasi ternyata tidak menjamin keadaan menjadi lebih baik, dan bisa meningkatkan penghargaan terhadap jati diri masyarakat Papua. Otsus kemudian juga ditawarkan sebagai salah satu sarana untuk menjawab sejumlah kebutuhan, tetapi menelantarkan sebagian luka besar masa lampau Bangsa Papua yang semakin tidak terawat.

Penegakan hukum yang diharapkan menjadi unsur kunci, perwujudannya justru semakin kabur, bukan saja di Papua melainkan di seluruh Indonesia. Setelah menyaksikan pembunuhan tragis terhadap seorang tokoh pejuang yang memilih jalan damai, siapa dari masyarakat Papua yang masih punya optimisme di

kemudian hari? Banyak pertanyaan lain yang kemudian muncul. Ke mana pihak yang berkuasa di Indonesia mau mengantarkan masyarakatnya? Apa sebenarnya peran TNI? Siapa yang bisa mengendalikan penggunaan kekerasan dan arogansi militer?

Kebijakan yang diperlihatkan pemimpin negara juga tidak turut meningkatkan rasa tenang bangsa Papua. Presiden Megawati Sukarnoputri dalam sambutannya pada sebuah paradę militer pada 29 Desember 2001 mengatakan, "Kami tiba-tiba sadar ... perlunya suatu kekuatan untuk mencegah dan melindungi bangsa dan negara dari perpecahan atau dari kepunahan. Dengan diarahkan oleh undang-undang di Indonesia, anda (TNI) dapat menunaikan tugas anda tanpa perlu khawatir bahwa akan terlibat dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia. Buatlah segala sesuatunya tanpa ragu-ragu." Isi dan nada pernyataan Presiden itu, tidak mampu membantu masyarakat Papua untuk lebih tenang hatinya dalam memasuki tahun 2002!

***

Bagian 3

KONDISI HAK ASASI MANUSIA 2001

URAIAN di bagian ini hendak secara utuh melihat persoalan hak asasi manusia baik hak sosial, ekonomi, budaya maupun dari hak sipil dan politik. Sebagai tolok ukur akan dipakai perangkat hukum HAM nasional dan internasional. Perangkat nasional yang dipakai adalah Amandemen kedua UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Perangkat HAM internasional yang dipakai terutama adalah dua kovenan internasional yang amat penting, masing-masing Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional 1998. Kedua kovenan tersebut telah diratifikasi oleh 95% anggota PBB, tidak termasuk Indonesia, dimasukkan dalam perangkat hukum HAM Internasional (*International Bills on Human Rights*), sehingga memiliki tingkat universalitas tinggi.

Pemahaman yang utuh terhadap perangkat hukum HAM nasional dan internasional menjadi makin penting mengingat wacana nasional tidak terkecuali di Papua masih didominasi oleh pandangan bahwa hak asasi manusia hanya berkaitan dengan hak sipil dan politik atau lebih sempit lagi dengan kekerasan negara. KKN yang makin mewabah, pelayanan kesehatan yang tidak memadai, konflik sumber daya alam yang makin tajam, pendidikan yang buruk, hak masyarakat adat (*indigeneous people's rights*) yang terabaikan, kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tak tertangani – semuanya cenderung dianggap 'masalah pembangunan' dan bukan masalah hak asasi manusia.

Pandangan yang cenderung berat sebelah tersebut merupakan dampak global dari kinerja Amnesty International dan Human Rights Watch yang berkonsentrasi pada hak-hak sipil dan politik. Dua LSM internasional tersebut telah memberikan tekanan yang amat besar terhadap persoalan-persoalan yang berada dalam cakupan hak sipil dan politik selama tidak kurang 4 dasawarsa[1]. Selain itu terdapat juga kesalahpahaman umum dalam pembedaan dua kelompok besar hak-hak asasi manusia itu seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini: [2]

Tabel 2
Kesalahpahaman dalam
pembedaan hak ekososbud dengan hak sipil dan politik

Hak-hak ekonomi, sosial, budaya	Hak-hak sipil dan politik
Dicapai secara bertahap	Dicapai dengan segera
Negara bersifat aktif	Negara bersifat pasif
Pelanggaran takdapat diajukan ke pengadilan	Pelanggaran dapat diajukan ke pengadilan
Bergantung pada sumber daya	Tidak bergantung pada sumber daya
Ideologis	Non ideologis

Cara berpikir sedemikian amat menguasai wacana kemasyarakatan di semua kawasan termasuk di Papua. Bahkan bila ada pihak yang bicara mengenai tuntutan kesejahteraan, mereka begitu saja disamakan dengan "pro pembangunan", "pro-otonomi", "pro-pemerintah". Pemahaman sesederhana itu dapat dimengerti mengingat hak ekososbud amat dikaitkan dengan negara sebagai penyedia segala sumber daya bagi pemenuhan hak-hak tersebut.

---

[1] Ifdhal Kasim, Kata Pengantar hlm. lx dalam: *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya: Esai-esai pilihan*, Jakarta: ELSAM, 2001.
[2] *Ibid.*, hlm. xv.

Sementara itu hak sipil dan politik cenderung disamakan dengan "perjuangan politik", "isu sentral", "masalah Papua". Namun dampak yang ditimbulkan tidaklah sederhana karena mempersempit pemahaman masyarakat terhadap hak asasi manusia sebagai kesatuan berbagai macam unsur. Marilah kita kaji secara singkat kedua daftar tersebut dari sudut pandang yang utuh.

UUD 1945 pasal 28 I ayat 4 menyatakan pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*), menegakkan, dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak asasi manusia. Hal yang sama sudah digariskan dalam pasal 71 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bahkan menambahkan dengan perkataan *"... dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia"*. Prinsip itu sebenarnya telah menjadi pegangan masyarakat Internasional seperti dinyatakan dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik maupun dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya.[3]

Dengan demikian sebenarnya kewajiban pemerintah terdiri atas tiga lapis jangkauan baik mengenai hak ekososbud maupun hak sipil dan politik[4]. *Lapis pertama*, negara tidak mencampuri urusan yang dapat ditangani sendiri oleh masyarakat dan pasif. Negara perlu memberikan ruang kebebasan seluas-luasnya bagi masyarakat yang mampu memenuhi hak-hak asasinya. Hal ini dapat diwujudkan misalnya dengan memberi ruang kebebasan yang wajar bagi masyarakat adat Papua untuk mengelola sumber daya alamnya secara tradisional, untuk menyatakan jatidirinya sebagai 'orang Papua', untuk meneruskan sistem pertanian adaptif yang telah berlangsung turun-temurun di berbagai wilayah Papua, untuk memberlakukan tata sosial adat yang tetap relevan dalam perubahan jaman.

Lapis kedua negara melindungi individu atau kelompok tertentu dari pihak yang hendak menggunakan kebebasannya secara agresif hingga merampas kebebasan orang atau kelompok lain. Perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam sistem perundang-

---

[3] Indonesia tetap belum meratifikasi kedua kovenan terpenting itu. Salah satu konsekuensi peratifikasian kovenan adalah terbukanya jalan bagi rakyat dan komunitas Internasional untuk menguji dan mengadukan pelaksanaan kovenan tersebut dalam sistem peradilan HAM internasional karena dalam kedua kovenan terdapat mekanisme pengawasan dan pengaduan.

[4] Pendekatan ini mengikuti uraian salah seorang pakar hukum HAM Internasional, Prof. Asborjn Eide, Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai Hak Asasi Manusia , *op.cit.*, hlm. 34-44

undangan yang ada dan dijalankan secara efektif.[5] Lapis kedua ini amat menonjol dalam hak sipil dan politik . Negara tidak dibenarkan mengulur-ulur waktu dalam memenuhi kewajibannya dengan alasan keterbatasan sumber daya. Negara pada prinsipnya bahkan dapat dituntut ke muka pengadilan baik karena dengan sengaja melanggar HAM atau dengan membiarkan pelanggaran hak asasi manusia terjadi terus-menerus dengan pola yang sama. Negara, contohnya, harus mengambil tindakan bila sebuah perusahaan HPH di Papua melampaui batas-batas penebangan kayu dan tidak melakukan peremajaan hutan. Negara juga wajib bertindak bila aparat keamanan atau penegak hukum melakukan penyerangan, penyiksaan hingga pembunuhan terhadap masyarakat Papua. Negara wajib pula bertindak bila perusahaan tambang meracuni alam tempat masyarakat adat hidup.

Lapis ketiga adalah negara secara proaktif memenuhi hak ekonomi, sosial, budaya dan sipil politik setiap warga negara. Negara tidak cukup hanya bertindak sebagai 'penjaga malam' melainkan wajib menyediakan sistem yang mampu menjamin pemenuhan hak-hak asasi warga negaranya. Negara wajib menjamin ketersediaan pangan, mengambil segala langkah yang efektif guna menghentikan penyebaran penyakit mematikan, menyusun sistem pendidikan di berbagai tingkat yang menyerap warisan budaya sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, memberdayakan masyarakat adat Papua agar tangguh dalam menghadapi perubahan zaman, mengadili pelaku pelanggaran berat HAM, mendidik militer dan polisi agar memiliki wawasan luas dalam menangani gejolak sosial politik di Papua.

Dengan pemahaman HAM yang ringkas ini, kiranya kesalahpahaman umum yang dipaparkan di atas dapat dijernihkan.

FAKTA DAN ANALISIS[6]

Hak Ekonomi, Sosial, Budaya

Untuk menilai kondisi HAM di bidang hak-hak ekososbud perlu

---

[5] Ketegasan ini juga tertera dalam Amandemen II UUD 1945 pasal 28 I ayat 5.

[6] Pembagian uraian kami dalam dua bagian besar mengikuti uraian dan penggolongan dalam Kovenan Hak Ekososbud dan Sipol. Angka dalam kurung merujuk pada tanggal dan bulan seperti dicatat dalam Bagian 1 Kronik 2001.

digunakan tolok ukur yang memadai dan berlaku universal, dalam hal ini Prinsip-prinsip Limburg (1986) dan Pedoman Maastricht (1997). Keduanya merupakan perangkat hukum internasional untuk mengukur pelaksanaan kewajiban negara dalam hal memenuhi hak-hak ekososbud. Meski Indonesia belum meratifikasi Kovenan Hak Ekososbud, tolok ukur tersebut tetap dipakai mengingat kovenan tersebut memiliki jangkauan universal.

Fakta-fakta masalah

Dalam analisis berikut ini pemenuhan hak ekonomi akan dilihat dari bagaimana negara menyediakan lapangan kerja yang amat terkait dengan pengembangan pendidikan di Papua. Hak sosial akan dilihat dari bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan pangan, perumahan, sarana kesehatan, air bersih, pendidikan, juga hak-hak kaum perempuan. Secara khusus akan dilihat problem 'otonomi khusus' yang amat terkait dengan hak sosial. Hak budaya akan diperhatikan dari cara pemerintah menangani konflik sumber daya alam antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pemilik modal di berbagai wilayah di Papua.

1. Penyediaan lapangan kerja

Jenis Hak	Peristiwa
Lapangan pekerjaan	➢ Penerimaan CPNS formasi 3000 diduga berlatar belakang KKN sehingga mendorong demo di sejumlah kota (16/3, 19/3), ➢ Pembentukan Pansus DPRD untuk tangani CPNS (21/3), ➢ Pemalangan terhadap kantor bupati Jayawijaya dalam kaitan penerimaan CPNS (27/3), ➢ Lapangan kerja di Papua terbatas dan diharapkan BP bisa menyerap 5000 pencari kerja (30/3), ➢ Ketua Ikatan Intelektual Jayawijaya Barat menyesalkan penerimaan CPNS 2000 untuk Jayawijaya (11/5).

Jenis Hak	Peristiwa
Hak buruh:	➢ Karyawan PT TDC di Biak mempertanyakan realisasi PHK (29/3, 5/6), ➢ Koordinator eks-karyawan PT Henrison Iriana, Arar, Sorong kecewa terhadap Komisi E DPRD Sorong yang berpihak pada perusahaan (14/5), ➢ Pemecatan 11 karyawan PT You Liem Sari dinilai sepihak (7/6), ➢ Karyawan PT Bina Balantak, Sarmi, mogok kerja sehubungan dengan UMR (10/6), PTFI membahas tuntutan buruh PTFI bersama dengan DPRD Irja (3/7), ➢ Ratusan karyawan PT Usaha Mina Sorong berdemo untuk mempertanyakan nasib nasib karyawan (14/8)

Penyediaan lapangan kerja merupakan masalah pelik yang dihadapi Pemda Papua dan kabupaten-kabupaten. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemda hanya mampu melaksanaan penerimaan PNS. Setiap tahun terjadi unjukrasa sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap hasil tes CPNS. Unjukrasa ini terjadi di sejumlah pusat kabupaten seperti Manokwari, Wamena dan Jayapura. Demo di Wamena pada 27 Maret 2001, misalnya, menjadi begitu tajam hingga DPRD Kabupaten Jayawijaya merasa perlu membentuk pansus untuk menangani skandal CPNS. Kita dapat melihat bagaimana menjadi PNS dianggap penting dan terhormat oleh masyarakat Papua. Budaya ini didorong oleh kebijakan yang cenderung memberi posisi tinggi pada pekerjaan kepemerintahan dibandingkan pekerjaan lain yang lebih sesuai dengan identitas orang Papua. Akibatnya, pengembangan sektor swasta seperti pertanian, perdagangan dan perikanan kurang diminati. Tak heran bila sektor swasta dikuasai masyarakat non-Papua. Ini amat disayangkan sebab masyarakat Papua asli telah memiliki teknik dan modal yang hanya perlu diperkuat.

Sekarang kiranya belum terjadi pemisahan bidang pekerjaan berdasarkan kesukuan. Langkah-langkah ke arah tersebut perlu diwaspadai karena dapat memecah masyarakat Papua dalam

dualisme yang tajam, yakni Papua yang menguasai sektor negara dengan non-Papua yang menguasai sektor ekonomi. Pemisahan ini akan membawa dampak destruktif yang permanen. Kita perlu belajar dari sistem politik diskriminatif Orde Baru yang membuat etnis Cina terkurung di dunia bisnis. Setiap kali mereka menjadi kambing hitam bila pecah konflik negara dengan masyarakat. Mereka juga terus dipaksa bergantung pada militer demi menjaga kelanggengan bisnisnya. Pola yang sama sudah mulai terlihat dalam kerusuhan seperti di Sentani pasca pembunuhan Ketua PDP. Dalam kerusuhan itu masyarakat non-Papua menjadi kambing hitam Pintu masuk kekerasan seperti itu hendaknya disadari oleh masyarakat Papua dan Pemda Papua dalam segala tingkatan jika tidak ingin mengulang sejarah.

Pengembangan lapangan kerja sebenarnya amat berkaitan dengan kemajuan dunia akademis dan pemanfaatan sumber daya alam.[7] Dicatat dalam bagian kronik bahwa sistem pendidikan Papua belum mengalami kemajuan baik di tingkat sarana, jenis, dan mutunya. Tak heran bahwa tenaga kerja yang tersedia cenderung mengarah ke sektor pemerintahan dan kurang berminat bersaing di sektor swasta yang menekankan mutu, keahlian dan kerja keras.

Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, tampak nyata dalam penggolongan di atas bagaimana sumber daya alam hanya diperas dan tetap sebagai bahan mentah. Pemerintah Daerah belum mampu melihat dengan jernih bahwa penghisapan Sumber Daya Alam (SDA) tidak hanya merusak alam tetapi juga merusak mata pencarian masyarakat adat. Hal ini telah terjadi di wilayah pesisir utara Jayapura (Kecamatan Pantai Timur, Tor Atas, Sarmi). Masyarakat adat menjadi lebih miskin oleh penghisapan kekayaan hutan, hambatan transportasi darat dan air, hambatan telekomunikasi dan pertikaian dengan para pemegang ijin HPH. Tanah sebagai modal dasar masyarakat adat tidak dapat lagi diandalkan padahal tidak tersedia pilihan baru yang sepadan.

Dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak ekonomi masyarakat Papua selama 2001 belum mencapai taraf yang memadai. Masyarakat belum ikut menentukan pengelolaan aset-aset produksi sementara tanah sebagai modal dasar telah makin sempit. Akibatnya tingkat kemakmuran masyarakat Papua justru semakin rendah.

---

[7] Bdk., Asborjn Eide, Hak Atas Standar Hidup yang Layak termasuk Hak Pangan , dalam: Ifdal Kasim dan Johanes da Masenus Arus (eds.), *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Jakarta: ELSAM, 2001, hlm.120-128.

2. Taraf hidup yang tertinggi

Jenis Hak	Peristiwa
Standar hidup yang layak: kesehatan, perumahan, pangan,	➢ Terjadi perjudian di Biak (11/2), ➢ Masyarakat Bonggo mengeluhkan pembangunan jalan yang belum terealisasi (8/2), ➢ Transportasi ke Bonggo rusak berat (21/ 3), ➢ Razia miras di Desa Samber, Biak (4/4), ➢ Penderita HIV/ AIDS di Papua terus meningkat dan sulit ditanggulangi (18/4, 8/5, 26/10, 5/12), ➢ Rencana pemekaran wilayah Kerom (2/4), tuntutan pemekaran wilayah Sarmi dipertanyakan (18/10, 22/10), ➢ Dana APBD Irja 2001 diarahkan untuk restrukturisasi Pemda, pembinaan politik, dan program strategis (20/4), ➢ Gubernur Irja berusaha menarik investor dari Taiwan dan Cina (27/4), ➢ Nasib transmigran Bonggo yang tidak selesai dan terus memperjuangkan nasibnya (1/6), ➢ Menteri negara lingkungan hidup meminta agar PTFI serius menangani *tailing* (10/5), ➢ LSM diminta oleh DPRD Irja agar membantu menangani masalah HAM dan lingkungan (11/5), ➢ Masyarakat PIR III Timika akan menggugat PTFI soal lahan garapan (15/5), ➢ Rencana pemekaran 16 kabupaten baru (25/5), ➢ Tiga puskesmas pembantu di Biak Utara sejak Januari 2001 tidak berfungsi (10/6), ➢ Penggunaan APBD secara ilegal oleh oknum Pemda Paniai (1/8), ➢ Warga Polimak II keluhkan soal air PDAM (3/8), ➢ Kesulitan sarana transportasi di wilayah pedalaman Kabupaten Jayapura (14/8),

Jenis Hak	Peristiwa
	➢ Masalah beras Opsus di Kampung Pipa, Argapura (30/8), ➢ ADB memberikan bantuan US$ 10 juta untuk survey pertanian (31/8), ➢ Petugas kesehatan Wasior meninggalkan tempat karena tidak aman (10/9), ➢ Uni Eropa bersedia bantu Aceh dan Papua (10/9), ➢ Bupati Merauke mengkritik birokrasi propinsi (11/9), pengumuman PTFI tentang dana untuk suku Amungme dan Kamoro (25/9), ➢ 125 pemilik kapling tanah di Kotaraja mengeluh (28/9), ➢ Pasokan BBM di Papua berkurang (4/10), ➢ Penertiban ratusan rumah liar di Entrop (19/10), ➢ Pemekaran Kabupaten Merauke (15/12), ➢ Subsidi untuk Kabupaten Puncak Jaya (9/12, 10/12), ➢ Program berbusana di kabupaten Puncak Jaya (15/12), ➢ Pemekaran Propinsi Papua (14/12)
Perjuangan perempuan	➢ Komnas Perempuan menilai tindak kekerasan terhadap perempuan di Papua tinggi (23/3), ➢ Pra Konferensi Perempuan Papua dihambat pihak kepolisian dan menimbulkan polemik (10/5, 11/5), ➢ Perdebatan masalah Pekerja Seks Komersial di Wamena (1/6, 10/6), ➢ Perkosaan terhadap siswi SMPN Arso oleh anggota TNI dan tanggapannya (13/6, 15/6), ➢ Semiloka soal kekerasan terhadap perempuan (8/7), ➢ Konferensi perempuan Papua I (27/7), ➢ Janda-duda melakukan demo di DPRD Sorong soal tunjangan perbaikan penghasilan (9/8), ➢ SSP Biak demo soal miras dan judi (26/9), ➢ Kaum perempuan Papua di Jayapura memperingati hari HAM sedunia (10/12),

Persoalan terbesar di bidang hak ekososbud di Papua berada dalam lingkup pencapaian taraf hidup tertinggi di bidang pangan, kesehatan, perumahan, budaya dan transportasi. Dari paparan fakta 2001 di atas, kita melihat masalah-masalah struktural mendasar. Contohnya, dalam kasus RSUD Sorong, tiga puskemas pembantu di Biak Utara, dan RSUD Jayapura belum memenuhi standar kesehatan baik menurut masyarakat maupun tenaga medis. Problem yang dihadapi bukan lagi menyangkut keterbatasan dana, tenaga medis atau pelayanan, tetapi struktur kebijakan pemerintah yang tidak mampu menciptakan kondisi layanan kesehatan yang memadai.

Kasus menonjol dalam bidang kesehatan lainnya adalah peningkatan drastis jumlah penderita dan korban penyakit HIV/ AIDS di seluruh Papua. Penyakit ini amat berkaitan dengan perilaku seksual masyarakat. Pemerintah telah mengadakan kampanye dan penyuluhan mengenai penyakit HIV/ AIDS. Namun sampai saat ini belum terdapat suatu kebijaksanaan terpadu pemerintahan daerah untuk memeranginya. Sebuah tim khusus telah didirikan bekerja sama dengan kelompok agama dalam menyosialisasikan bahaya serius penyakit tersebut. Namun demikian, tampaknya tim kesehatan kewalahan menghambat penyebaran penyakit HIV/ AIDS baik karena pelayanan kesehatan yang tidak mampu menjangkau seluruh sudut Papua maupun karena unsur pendukung perkembangan perilaku seksual bebas seperti perdagangan pekerja seksual[8], perdagangan miras, narkoba, industri hiburan malam, dan industri perjudian, tak terkontrol. Perang terhadap HIV/ AIDS dipersulit oleh kepentingan ekonomi seperti yang disebutkan di atas.

Menjadi jelas bahwa penyakit ini tidak bisa ditanggulangi dari segi medis belaka. Penanggulangan dan pencegahannya juga bergantung pada kebijakan pemerintah menangani perdagangan Pekerja Seks Komersial (PSK), minuman keras, narkotika dan perjudian. Selama perangkat hukum dan tindakan hukum tidak tegas, kiranya penyakit HIV/ AIDS akan meningkat makin tajam.

---

[8] Perdagangan PSK di Papua merupakan bagian perdagangan perempuan di bawah umur 18 tahun di Indonesia, bahkan berkaitan juga dengan perdagangan perempuan internasional. Tahun 1999 diperkirakan 75.106 perempuan terlibat perdagangan seks. Padahal tahun 1995 baru berjumlah 72.000 orang. *Lihat* Country Report on Human Rights Practices in Indonesia 2001 yang dikeluarkan oleh Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Department of State, United States of Amerika, bagian 6f. trafficking in persons, Maret 2002.

Tabel 3
Angka kumulatif penderita HIV dan AIDS per tahun 1992 – 2001[9]

TAHUN	HIV	Kumulatif	AIDS	Kumulatif	JUMLAH
1992	6	6	-	-	6
1993	48	54	-	-	54
1994	10	64	5	5	69
1995	24	88	5	10	98
1996	10	98	16	26	124
1997	21	119	27	53	172
1998	17	136	62	115	251
1999	94	230	39	154	384
2000	108	338	96	250	588
2001	206	544	154	404	948
Jumlah		**544**		**404**	**948**

Sarana transportasi masih menjadi barang mahal bagi masyarakat Papua. Daerah-daerah pedalaman Jayapura misalnya tidak dihubungkan oleh sarana transportasi darat (ke arah perbatasan dengan PNG) dan laut (wilayah kecamatan-kecamatan sepanjang pantai utara Jayapura-Sarmi) yang memadai ke kota Jayapura. Berbagai urusan jadi makan waktu berhari-hari . Jika daerah tetap bergantung pada transportasi udara, maka ekonomi daerah tidak akan berkembang ke arah yang diinginkan. Masyarakat desa pada umumnya tidak mampu menjangkau jalur perdagangan melalui transportasi udara, sehingga seyogyanya pemerintah menyediakan transportasi darat yang memadai.

Gambaran ini menunjukkan sejauh mana keseriusan pemerintah dalam memenuhi taraf hidup masyarakat Papua. Pemerintah tidak cukup hanya menjadi Sinterklas. Bantuan cuma-cuma hanya bakal menajamkan mentalitas proyek dan taraf ketergantungan. Jauh lebih baik bila pemerintah menjadi pencipta struktur-struktur ekonomis yang mampu menghantar masyarakat Papua pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Pendidikan yang menjadi tulang punggung kelangsungan generasi depan Papua tetap memprihatinkan. Selama 2001 beberapa sekolah macet total menyelenggarakan pendidikan seperti terjadi di Bonggo, Kabupaten Jayapura. Kesejahteraan guru tidak kalah

[9] Data dari Dr. Gunawan Ingkokusomo, Pemimpin Kampanye ASA (Aksi Stop AIDS) di Jayapura.

3. Problem bidang pendidikan

Problem di bidang pendidikan	➢ Pembebasan biaya Ebtanas diragukan karena sekolah-sekolah mulai menagih biaya tersebut (25/4), ➢ 113 SD di Merauke tidak bisa mengikuti Ebtanas (31/5), ratusan guru SD se-kota Sorong demo soal pembayaran gaji (30/7), ➢ Semiloka hak anak di Jayapura (6-7/8), ➢ Pemerintah Kota Sorong menepati janji pembayaran rapel gaji guru SD (11/9), ➢ Guru SD, SMP, SMU Sentani mendemo Pemda Kabupaten Jayapura soal DAU (15/9), ➢ Ratusan guru di Kota Jayapura menuntut pembayaran rapel (16/9).

memprihatinkan. Pemotongan gaji guru tanpa alasan tidak bisa dicegah oleh demo. Fakta-fakta ini tentu memprihatinkan karena saat ini pemerintah mempropagandakan pembebasan biaya Ebtanas.

Semua hal itu berdampak pada melemahnya profesionalisme guru. Ketimpangan jumlah pendidik di daerah pedalaman dan di perkotaan juga memprihatinkan. Masyarakat pedalaman justru harus menanggung dampak yang lebih

Hingga tahun 2001 ini belum dihasilkan satu kebijakan pendidikan yang mampu mempersiapkan masyarakat Papua menghadapi masa depan yang penuh persaingan. Seperti telah disinggung dalam uraian tentang lapangan kerja, pendidikan amat menentukan maju-tidaknya angkatan kerja. Dengan kuatnya konsentrasi ke sektor negara (birokrasi) melalui PNS, maka dapat dipertanyakan mutu pendidikan di Papua harus dipertanyakan. Mutu pendidikan tidak dapat begitu saja diperbaiki begitu saja dengan pembebasan uang sekolah, uang Ebtanas, atau uang pendaftaran sekolah melainkan harus ditelaah lebih jauh lagi karena berkaitan dengan pengembangan kurikulum yang relevan dengan situasi Papua dewasa ini dan di masa depan. Selama bidang pekerjaan begitu terbatas dan kurikulum pendidikan begitu umum, selama itu pula mutu tenaga kerja Papua mengecewakan.

4. Kebijakan Otonomi khusus[10]

Kebijakan Otonomi khusus	➢ Pemaparan Otsus di rumah Theysdan tanggapannya (20/2, 22/2), ➢ Rencana seminar Otsus (28/2) dicanangkan, ➢ Sosialisasi Otsus di Wamena (3/3), ➢ Ketua Forum Kajian RUU Otsus menyatakan akan menggelar seminar Otsus selama dua hari (27/3), ➢ Gubernur meminta agar masyarakat menciptakan keamanan selama seminar (27/3), ➢ Theys menganggap pembahasan RUU Otsus adalah permainan kotor Jakarta (27/3, 8/4), ➢ Mahasiswa Uncen menggelar orasi bebas untuk menentang Otsus (27/3), ➢ Pelaksanaan Forum Kajian Otsus (28/3), ➢ Penolakan delegasi sejumlah kabupaten terhadap RUU Otsus (28/3), ➢ Demo dan bentrokan saat pembahasan RUU Otsus (28/3), ➢ RUU Otsus diajukan oleh pemerintah ke rapat paripurna DPR RI dan digugat keabsahannya (1/4), ➢ Perdebatan dan lobi RUU Otsus yang dibahas di DPR RI (2/4, 23/4, 30/4, 1/5, 28/5, 28/6, 19/7, 16/9, 26/9, 16/10, 17/10, 22/10, 23/10, 25/10, 26/10), ➢ Lemhanas berpendapat Otsus tidak perlu untuk Aceh dan pendapat lain tentang Papua (15/5), ➢ Otsus menjawab semua keinginan masyarakat (26/6, 27/6), ➢ Pansus DPR-RI hanya mengunjungi Biak, Jayawijaya, Timika, dan reaksi penolakan (6/8, 8/8, 10/8), ➢ Bupati Merauke menganggap Otsus kabur (13/9), ➢ Pembagian wewenang dalam Otsus dan pemekaran provinsi diperdebatkan oleh Merauke (8/10, 9/10, 10/10), ➢ Perdebatan pemberlakuan Otsus (22/10, 23/10, 26/10)

[10] Uraian selengkapnya tentang pokok ini dapat dibaca dalam bagian kedua buku ini.

Seperti telah diuraikan secara terperinci dalam Bagian 2, **Kebijakan Otonomi** khusus merupakan masalah sentral yang menyerap perhatian luar biasa besar selama 2001 sebanding dengan arus GERASEM di Papua. UU Otsus no. 21/2001 merupakan peluang untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia bidang ekososbud meski merupakan kompromi politis terpenting tahun 2001 bagi Papua. Sebagai kompromi politis, UU tersebut menjadi jalan tengah bagi berbagai kelompok untuk sejenak meredakan konflik demi kepentingan yang lebih luas. Sejak 1998, masyarakat terseret dalam gelombang konflik politik yang menguras seluruh energi bahkan tak jarang menelan korban jiwa. Kompromi politik merupakan jalan antara yang perlu dilalui jika proses politik hendak diselesaikan melalui mekanisme hukum dan demokrasi. Pertanyaan kritis yang kemudian muncul adalah apakah aktor-aktor politik di Papua bersedia menempuh jalur tersebut? Di pihak lain, UU Otsus merupakan peluang untuk memperbaiki bahkan merombak struktur kebijakan negara. Dengan UU tersebut pemerintah makin diwajibkan untuk memprogramkan peningkatan taraf hidup yang dapat dicapai oleh masyarakat Papua berdasarkan segala sumber daya yang dimilikinya. Apakah peluang ini hendak dibiarkan lewat begitu saja demi propaganda politis?

5. Konflik Sumber Daya Alam

Konflik sumber daya alam:	➢ Masalah pemalangan sawah di Nimboran (12/2), ➢ Pemalangan jalan di Kecamatan Waris dibuka (16/2), ➢ Suku Patipeme dan masyarakat adat Skow menuntut kompensasi tanah adat PT Hanurata (22/2), ➢ Pemalangan jalan PT Freeport di Mile 27 (27/2), ➢ Ancaman Bupati Manokwari terhadap 17 HPH yang belum membayar pajak PBB (8/3),desakan gubernur terhadap perusahaan HPH yang belum bayar pajak (20/3), ➢ Bupati Jayapura menekankan agar hak-hak masyarakat adat dilindungi (20/3), ➢ Polda Irja mengadakan operasi Wanalaga untuk memberantas pencurian kayu ilegal (18/4), ➢ Ka Dinas Kehutanan Sorong terlibat dalam penyelundupan kayu dan tanggapan berbagai pihak (11/5, 18/5, 24/5),

	➢ Walhi mengajukan PTFI ke pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam kasus Danau Wanagong (11/5) dan dinyatakan bersalah (28/8), ➢ Bantahan bahwa kopermas merusak hutan (14/5), ➢ Bupati Merauke akan menggugat 8 perusahaan HPH yang menunggak pajak (15/5), ➢ Sengketa PT Sumalindo Lestari Jaya dengan masyarakat soal pembayaran hak ulayat (18/5, 8/6, 12/6, 5/7, 17/12), ➢ Tuntutan hak ulayat di Gunung Meja Manokwari (6/6), ➢ Gubernur Irja menegur para pemegang HPH yang menunggak pajak (11/6, 12/6), ➢ Kasus Henock Ohee dinyatakan menang terhadap pemerintah (3/7), ➢ Oknum polisi di Sorong tertangkap mencuri kayu (15/7), ➢ Suku Kuri di Babo, Manokwari, menerima kompensasi pembayaran hutan (2/8), ➢ Penandatanganan MOU PTFI, Lemasa, dan Lemasko (1/8), ➢ Pemalangan Bandara Sentani oleh masyarakat Yahim-Yobeh dan Ifar Besar (19/9), ➢ Masyarakat Fruata mendemo PT Agoda Rimba Irian yang melakukan operasi kayu ilegal (27/9).
Warisan budaya	➢ Masyarakat Kurulu merasa terganggu dengan proyek air minum yang berada di gunung Supula yang dianggap keramat (9/4), ➢ Sejumlah desa di PNG dan Waris mengadakan pesta adat untuk mengusir roh jahat (24/7), ➢ Suku Besar Arfak (manokwari) mengadakan musyawarah adat dalam perspektif rekonsiliasi (9/9),

Akar konflik sumber daya alam di Papua berakar dalam perbedaan kepentingan antara penduduk asli (*indigeneous people*), bisnis dan hukum. Selama pemerintahan Orde Baru, sumber daya alam di Papua menjadi tumbal kebijakan pembangunan yang sentralistik. Proses penghisapan sumber daya alam selama lebih dari tiga dasawarsa dan masih terus berjalan di tahun 2001 telah membentuk rasa antipati dan luka di hati masyarakat Papua kepada pemerintahan pusat di Jakarta. Perasaan tersebut diperdalam lagi saat masyarakat Papua menghadapi para pemegang HPH atau

konsesi tambang yang mendapat dukungan oknum birokrat yang korup, aparat keamanan, dan legislatif[11].

Sepanjang tahun 2001, konflik sumber daya alam dapat ditemui di berbagai lokasi HPH, perikanan atau mineral, mulai Pesisir Utara Jayapura, Manokwari, Teluk Bintuni-Sorong, perairan Pulau Kimaam-Merauke sampai konsesi PTFI - Mimika. Tidak jarang konflik kemudian memicu kekerasan massa. Jika sudah terjadi kekerasan fisik, persoalan dengan amat mudah bergeser ke masalah politik.

Selain berkonflik dengan masyarakat, Gubernur dan Bupati Manokwari dan Merauke sibuk menghitung kerugian negara akibat pelalaian pembayaran pajak. Bupati Merauke dan Manokwari beberapa kali mengeluarkan daftar perusahaan HPH yang lalai membayar pajak dan mengancam akan memperkarakannya ke pengadilan. Akan tetapi tidak terjadi tindakan hukum terhadap perusahaan HPH penunggak pajak.

Seluruh konflik ini bukanlah hal baru dan kiranya tidak akan reda tanpa solusi menyeluruh melalui satu sistem hukum baru yang mengadopsi kepentingan penduduk asli, negara dan kepentingan bisnis.

Di era otonomi khusus, peluang untuk mengatur kembali perangkat hukum lebih terbuka tetapi sekaligus berbahaya sebab dapat lebih memeras sumber daya alam demi mencapai target "Pendapatan Asli Daerah".

Menjadi batu ujian serius bagi pemerintah daerah apakah dalam konflik sumber daya alam mereka mampu dan mau memberikan ruang kebebasan pada masyarakat adat untuk memenuhi sendiri hak-hak asasinya. Apakah DPRD dan MRP mampu menembus kebuntuan hukum dengan mengadopsi hak ulayat?

Pemain-pemain kunci

Dalam menyusun peta masalah ekososbud terdapat pihak-pihak yang ambil peran penting. Peran-peran tersebut hendak dianalisis guna mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan hak ekososbud.

---

[11] ICG Asia Report No. 29, *Indonesia: Sumber Daya Alam dan Penegakan Hukum*, Jakarta/Brussels, 20 Desember 2001. (www.crisisweb.org)

1. pemerintah pusat dan daerah

Dalam memajukan hak ekososbud, pemda kabupaten dan kota masih bergerak dengan pola lama, yakni menjadi penyedia segala kebutuhan materi. Sayangnya, masyarakat pun masih memakai pola yang lama. Pola lama ini dapat dilihat misalnya dalam *crash program* yang banyak dipertanyakan itu. Fokus perhatian masih pada prosentase keuangan saat membahas RUU Otonomi Khusus, penyediaan lapangan kerja lebih pada PNS, berbagai kemerosotan fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, penanganan perdagangan miras, PSK, dan narkoba. Padahal dalam hak-hak ekososbud, tugas pemerintah adalah bergerak secepat mungkin dengan sumber daya maksimum untuk mencapai pemenuhan hak ekososbud dan tidak boleh mengulur-ulur waktu[12].

➢ Memperlemah keberdayaan masyarakat

Dari penanganan masalah ekososbud, terlihat bahwa pemerintah tidak mengembangkan keberdayaan masyarakat Papua yang mayoritas menduduki taraf hidup paling bawah. Segi ini sebenarnya merupakan segi 'menghormati hak asasi warganegara' yang menjadi kewajiban negara saat masyarakat sendiri merasa mampu untuk mengorganisir dan menyelenggarakan diri. Akibat yang makin dapat dirasakan adalah makin muncul sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah dalam semua bidang kehidupan termasuk di bidang kehidupan yang sebenarnya dapat ditangani sendiri.

➢ Melanggar prinsip perlindungan

Dari paparan fakta mengenai persoalan konflik sumber daya alam, masyarakat adat Papua mendapat tantangan berat dalam menjaga hak milik kolektif masyarakat adat. Fakta-fakta ini terjadi misalnya di perairan Kimaam, Teluk Bintuni, atau pesisir utara Jayapura. Masyarakat adat merasa bahwa hak milik mereka yang berupa tanah, hutan, ikan, dirampas oleh pengusaha HPH atau perusahaan penangkapan ikan tetapi pemerintah tidak melindungi

---

[12] Pemahaman ini mengacu pada Prinsip-prinsip Limburg no. 12 yang mengatakan *Kewajiban untuk secara bertahap mencapai realisasi sepenuhnya hak-hak mengharuskan negara pihak untuk bergerak secepat mungkin ke arah terwujudnya hak-hak tersebut. Dalam keadaan apapun hal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai mengandung arti bahwa negara berhak untuk mengulur usaha secara tidak terbatas untuk memastikan realisasi sepenuhnya .*

mereka. Tidak ada langkah dari pihak pemerintah untuk mengembangkan sistem hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat dari intervensi semena-mena pihak ketiga; bahkan Kepala Dinas Kehutanan Sorong ditangkap Polda Metro Jaya karena tuduhan terlibat dalam penyelundupan kayu. Peristiwa ini tentu makin menguatkan dugaan bahwa dalam perkara konflik sumber daya alam, pemerintah dan pengusaha justru bergandengan tangan dalam melakukan tindak pelanggaran hak ekososbud. Perampasan hak-hak masyarakat adat tidak hanya merusak alam tetapi juga memiskinkan masyarakat secara sistematik karena lahan pekerjaan dan sumber makanan dirusak.

Hal sedemikian tentu amat menyedihkan karena lembaga yang seharusnya memberikan perlindungan justru melakukan pelanggaran bersama dengan pihak ketiga. Kewajiban 'melindungi' makin mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengingat di dalam sistem otonomi daerah dimana setiap daerah mencari Pendapatan Asli Daerah masing-masing masyarakat adat adalah pihak yang paling rentan akan perampasan hak ekososbudnya yang berakibat pada pemiskinan masyarakat.

➢ Fungsi menegakkan hak ekososbud lemah

Dari tahun ke tahun masyarakat Papua terutama yang tinggal di wilayah pedalaman terus bergelut dengan masalahyang itu-itu saja. Padahal pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan warganya di bidang-bidang yang disebutkan di atas tidak hanya dalam kasus-kasus bencana tetapi justru dalam suatu kebijakan yang mampu mengembangkan keberdayaan masyarakat.

Di bidang pangan, pemerintah tidak cukup hanya sebagai penyalur beras pegawai dan pasar tetapi harus mengembangkan sistem yang memungkinkan beras dapat diproduksi di Papua sendiri dan terdapat sistem cadangan yang mencukupi. Pemerintah perlu mengembangkan sistem produksi pangan asli Papua yang jauh lebih adaptif daripada tanaman padi. Di bidang kesehatan, pemerintah perlu mengambil langkah nyata dan terpadu dalam menangani penyebaran penyakit HIV/ AIDS. Karena itu kebijakan politik perlu dengan tegas diambil dalam hal peredaran miras, perdagangan PSK, perdagangan narkoba, dan perjudian. Di bidang pendidikan,

pemerintah tidak cukup hanya membebaskan uang sekolah, uang EBTANAS, atau uang pendaftaran. Jauh lebih penting lagi untuk perlu menyusun satu kebijakan integral dalam hal pendidikan mulai dengan kurikulum, pendidikan guru, partisipasi orang tua, penguatan yayasan-yayasan pendidikan swasta, hingga penataan sistem perguruan tinggi. Boleh dikatakan bahwa pemerintah memiliki pekerjaan raksasa yang memang hanya bisa dibebankan kepada negara sebagai pemegang segala sumber daya dan fasilitas. Dalam hal pemenuhan hak ekososbud, pemerintah justru memiliki peluang untuk bekerja sama dengan negara lain atau badan-badan internasional agar taraf kesejahteraan masyarakat Papua meningkat. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah di segala tingkat mengambil langkah efektif guna memenuhi kebutuhan rakyat Papua ini?

2. DPRD

Berdasarkan perangkat HAM nasional dan internasional DPR atau lembaga perwakilan rakyat bukanlah pelaksana utama kewajiban HAM. Pelaksana utama adalah negara atau pemerintah. Namun demikian, DPR(D) memiliki fungsi pengawasan selain sebagai pembuat perangkat undang-undang. Mereka diharapkan lebih proaktif dalam memantau kinerja pemerintah daerah agar hak asasi warganegaranya terpenuhi.

- Pembuat hukum yang belum proaktif

Kewenangan DPRD menyusun peraturan daerah dapat dikaitkan dengan kewajiban pemerintah dalam melindungi hak-hak ekososbud. Namun hingga kini DPRD belum mampu menyusun perundangan yang berwawasan HAM. Komisi F yang membidangi masalah HAM dan Lingkungan belum menunjukkan kinerjanya yang nyata dengan menyusun dan menetapkan peraturan yang mampu memberikan jaminan kepada kelompok masyarakat yang rentan seperti masyarakat adat. Padahal jika pemerintah belum mampu bergerak ke arah sistem perlindungan hukum, DPRD seharusnya lebih dulu mengambil langkah pertama mengingat DPRD memiliki mandat dari rakyat untuk mewujudkan kepentingan rakyat dalam sistem hukum dan kebijakan politik di Tanah Papua.

- Fungsi pengawasan lemah

DPRD kurang menampakkan fungsinya dalam bidang pengawasan terhadap pemerintah. DPRD Jayawijaya misalnya tidak mampu mengakomodasi suara masyarakat yang menuntut agar PSK (Pekerja Seks Komersial) dikeluarkan dari Wamena karena banyak mendatangkan masalah sosial yang menurunkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Hal senada ditunjukkan oleh DPRD Sorong yang tidak berhasil menjembatani sengketa antara perusahaan dengan buruhnya. Pihak DPRD justru lebih memihak kepentingan pengusaha. Peran DPRD juga tidak muncul ketika masyarakat terlibat dalam pertikaian yang menyangkut sumber daya alam dengan pihak pemilik modal.

➢ Menghindari risiko politis

Dalam proses pembuatan rancangan UU Otonomi Khusus, Pemda dan bukan DPRD yang mengambil inisiatif, membentuk tim asistensi, membentuk tim lobi, hingga merumuskan UU Otonomi Khusus. Amat ironis bahwa pihak legislatif pasif dalam penyusunan perangkat undang-undang yang menyerap kepentingan rakyat luas. Padahal produk hukum yang diperkarakan adalah produk yang amat menentukan dinamika sosio-politik, ekonomi, budaya, masyarakat Papua. Apakah DPRD tidak memiliki kemampuan untuk merumuskan produk hukum yang penting dan berbobot seperti RUU Otsus? Atau apakah sebenarnya DPRD menghindari tekanan emosi massa sehingga membiarkan pemerintah mengambil peran utama dalam penyusunan, pembahasan, hingga peresmian RUU Otonomi Khusus dengan risiko berhadapan dengan massa?

3. Pelaku bisnis/ pemilik modal

Dalam konteks hak ekososbud, peran pelaku bisnis menduduki tempat penting sebagian pemenuhan hak ekososbud rakyat Papua dipengaruhi oleh kinerja kelompok ini. Pertanyaannya adalah apakah pelaku bisnis atau pemilik modal menjalankan usahanya secara wajar dan sehat atau mereka dibenarkan dengan mengorbankan kepentingan kelompok masyarakat yang lemah? Jika dilihat dalam berbagai kasus konflik sumber daya alam selama ini pengusaha menjadi sumber masalah baik bagi masyarakat adat dan bagi pemerintah. Banyak pemegang HPH di Merauke dan Manokwari yang menunggak pajak atau berkonflik dengan

masyarakat soal pembayaran "ganti rugi hak ulayat".

Di sisi lain, sektor bisnis berperan besar dalam mengembangkan dan menggerakkan ekonomi Papua. Hal ini dengan mudah dapat dilihat dari keberadaan perusahaan multi nasional seperti PTFI, Conoco, Korindo, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah sektor bisnis juga mengembangkan keberdayaan masyarakat Papua? Apakah pelaku bisnis tidak memperburuk kondisi hak ekososbud?

4. Masyarakat adat (indigeneous people)

Dalam konflik sumber daya alam, masyarakat adat merupakan pihak yang selalu dikorbankan. Masyarakat adat tersebar di seluruh Papua terutama di lingkungan pedesaan dan pedalaman yang memiliki sarana komunikasi, sarana transportasi, ketersediaan kebutuhan-kebutuhan pokok yang terbatas.

- Tak diakui secara hukum

Selama puluhan tahun, masyarakat adat di Papua ini tidak mendapat tempat baik secara politis maupun secara hukum. Hak-hak kolektif yang menjadi identitas masyarakat adat tidak diakui. Kenyataan ini betul-betul melukai hati masyarakat adat di Papua dan baru dapat diungkapkan secara jelas dan tegas dalam empat tahun terakhir ini. Namun demikian, tuntutan masyarakat adat untuk dapat diakui keberadaannya baru secara formal dirumuskan dalam Amandemen Kedua UUD 1945 pasal 28 I ayat 3. Perwujudannya dalam kehidupan sosial politik Papua kiranya masih dipertanyakan mengingat belum ada satu perangkat hukum pun yang bersifat operasional. Kenyataan ini menjadikan masyarakat adat tetap dalam posisi yang lemah saat berhadapan dengan kepentingan investor atau kepentingan negara. Dalam keadaan terdesak, masyarakat adat tak jarang mengambil jalan pintas demi menyuarakan harga diri dan jatidiri mereka.

- Tak terorganisir

Masyarakat adat umumnya tidak terorganisir dengan baik yang memungkinkan mereka menangani masalah bersama-sama. Masyarakat adat kerap masih bersandar pada gaya bertindak dalam tata sosial yang sudah tidak berlaku tanpa ada pihak yang mampu menjembatani tata sosial lama dengan yang sedang berlaku dewasa

ini. Akibatnya, tantangan-tantangan yang muncul dalam tata sosial dewasa ini seperti kekuatan modal, peran negara yang dominan, kekuatan militer yang berpihak pada kepentingan pengusaha, sulit ditangani oleh masyarakat adat. Di sejumlah tempat masyarakat adat mengorganisir diri dalam Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yang kerap kali tidak berakar dalam struktur adat yang asli sehingga terjadi dualisme dalam penghayatan masyarakat yang bersangkutan. Secara formal LMA diakui oleh pemerintah tetapi secara sosial kurang mendapatkan legitimasi dari masyarakat adat yang bersangkutan. Dualisme ini makin memperlemah keberdayaan masyarakat adat.

➢ Diperalat demi kepentingan pihak lain

Sejak jaman pemerintahan Orde Baru hingga kini, peran masyarakat adat yang diwadahi dalam Lembaga Masyarakat Adat diperalat oleh macam-macam kepentingan politis kelompok tertentu. LMA atau masyarakat adat tidak didudukkan sebagai mitra sejajar saat berhadapan dengan pemerintah atau pengusaha. Mereka kerap diperalat untuk memenuhi syarat hukum yang mewajibkan adanya konsultasi dengan masyarakat adat, misalnya dalam eksploitasi hasil hutan dan laut. Jarang sekali masyarakat adat sungguh-sunguh dimintai pendapat dan diajak berunding dengan jaminan kebebasan bicara. Kehadiran mereka tak lain sebuah formalitas belaka.

5. Kalangan LSM dan pemerhati HAM

Seperti telah diuraikan di atas, pengaruh wacana HAM dunia dan nasional menjadikan kalangan LSM Papua dan pemerhati masalah HAM memberi porsi yang kurang berimbang pada pemantauan hak ekososbud dibandingkan pada hak sipil dan politik. Kalangan pemerhati HAM belum memiliki akses yang luas kepada masalah KKN, tingkat kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung serta problem pendidikan yang makin pelik.

Hal-hal yang kiranya perlu dikembangkan oleh kalangan pekerja HAM adalah perluasan wawasan pemahaman hak asasi manusia yang juga meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, yang langsung mempengaruhi tingkat hidup masyarakat sehari-hari. Bidang-bidang seperti pengembangan pendidikan alternatif, persoalan *good*

Dari rentetan peristiwa kekerasan selama 2001, kita harus mempertanyakan sejauh mana kemauan dan kemampuan pemerintah dalam melindungi hak yang tak dapat dikurangi dalam keadaan manapun juga, yakni hak hidup. Keterlibatan aparat pertahanan negara dalam peristiwa kekerasan memperteguh asumsi bahwa negara dengan sengaja melakukan tindak kekerasan terhadap warga negaranya. Yang mengejutkan adalah bahwa setelah diundangkannya UU No. 39/1999, UU No. 26/ 2000, bahkan Amandemen Kedua UUD 1945, aparat negara yang mengklaim diri mengemban amanat konstitusi melanggar Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut dengan membiarkan pola kekerasan berlangsung terus menerus tanpa ada proses peradilan yang jujur, benarlah asumsi lain bahwa negara telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran HAM. Jika dalam hak yang tak dapat dikurangi dalam keadaan darurat manapun (*non-derogable rights*) pemerintah tidak mau dan tidak mampu memberikan jaminan hidup, masa depan masyarakat Papua dapat diramalkan masih semuram masa-masa yang telah lewat.

1. Konflik politik

Konflik kepentingan politik	➢ Rencana pembubaran pos-pos TPN oleh Kodam (23/2), ➢ Kemarahan Willem Onde terhadap rencana pembubaran pos TPN (25/2), ➢ Presiden Gus Dur meminta OPM membubarkan diri (21/3), ➢ Kapolda Irja berencana merazia atribut Bintang Kejora (30/3), ➢ Sekjen PDP minta rencana dikaji ulang (1/4), ➢ Satu anggota TPN/OPM ditangkap di Vanimo, PNG (2/4), ➢ Dropping pasukan Brimob ke Wasior (3/4), ➢ Theys meminta Satgas Papua dihidupkan kembali (8/4), ➢ Ketua PDP akan menuntut Polda karena mengusir Satgas ➢ Papua dari Gedung DKIJ dan dipersilakan oleh Kapolda (24/4), ➢ Penurunan bendera Bintang Kejora di Manokwari dan dampak ketegangan yang ditimbulkan (1/5, 4/5), ➢ Semua komponen Papua menyampaikan pernyataan keprihatinan kepada Presiden (29/5), ➢ Rencana pembentukan pemerintahan transisi oleh Theys mendatangkan polemik (31/5),

	➢ Perdebatan dropping pasukan TNI dan Polri di perbatasan (7/6), ➢ Ekstradisi Mathias Wenda sulit dilakukan (4/7, 20/8), ➢ Isu penyerangan terhadap PTFI oleh TPN/ OPM dan tanggapannya (11/7), ➢ Perselisihan kelompok TPN/OPM di Vanimo (18/7), ➢ Gus Dur mengatakan konflik politik di Aceh dan Papua adalah warisan masa lampau (22/7), ➢ Kodam mendukung kebijakan Zona Damai di Papua (22/7), ➢ Selandia Baru memprotes Nauru karena melarang OPM di wilayahnya (13/8), ➢ Dukungan Australia terhadap integrasi dan kedaulatan wilayah RI (13/8), juga Uni Eropa (28/8) dan negara-negara Pasifik (30/8), ➢ Filipina tuduh kelompok Abu Sayaf memasok senjata untuk OPM dan GAM (30/8), ➢ Kontak senjata antara TPN dengan TNI di Kali Kopi, Timika (21/9), ➢ Pos Satgas Yonif 511 Bonggo diserang oleh kelompok TPN (23/9), ➢ Perampasan senjata milik anggota Koramil di Ilaga yang memicu kekerasan dan berbagai tanggapan (28/9, 30/9, 1/10, 2/10, 4/10, 5/10, 9/10, 14/10, 6/12), ➢ Perdebatan pemakaian nama dan bendera papua (7/10), masyarakat adat Kerom tidak ingin pengalaman sejarah pahit terulang (10/10), ➢ Pasukan TNI menyergap kelompok TPN/ OPM Kelly Kwalik di Kali Kopi, Timika (16/10, 17/10, 18/10), ➢ Pernyataan politik PDP (20/10), ➢ TPN/OPM dinyatakan tidak ada oleh Kodam (21/10), ➢ Pangkostrad menilai tuntutan merdeka karena provokasi (28/10), penggerebekan markas TPN/OPM di Kec. Pantai Barat, Jayapura (1/12), ➢ Perkara pembunuhan Theys (3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 10/12, 11/12, 12/12, 13/12,14/12, 19/12, 20/12, 22/12, 26/12, 27/12, 28/12, 30/12), ➢ Presiden Megawati batal berkunjung ke Papua dan tanggapannya (21/12),
Hak menentukan nasib sendiri	➢ Harapan adanya pelurusan sejarah dari penelitian sejarah Papua di Belanda (4/5), ➢ Pihak yang terlibat dalam masalah Papua harus akui kebenaran sejarah (28/5), ➢ PDP menemui Presiden Gus Dur untuk meminta referendum dan tanggapan (22/6, 25/6),

	➢ Sem Yaru menyesalkan jika perjuangan M hanya untuk kepentingan sendiri (2/8), ➢ Visi Papua baru didiskusikan (12/8).

Debat mengenai kejelasan status politik Papua dan "hak menentukan nasib sendiri" merupakan sumber ketegangan di Papua yang baru akan reda hingga tercapai solusi politik yang menyeluruh.

Dalam pentas politik nasional, pertarungan kepentingan politik terjadi dengan tarik menarik kebijakan keamanan mengenai Papua. Di tingkat internasional konflik politik Papua telah menjadi bahan perdebatan dan diplomasi di forum internasional seperti Forum Negara Kepulauan Pasifik, Vanimo-PNG. Baik Indonesia maupun PDP mengerahkan energi besar dan serius guna memperjuangkan kepentingan masing-masing. Diplomasi Indonesia berhasil untuk menghalangi pembicaraan status politik Papua secara resmi dalam Forum tersebut. Di sisi lain, penting dicatat juga bahwa PDP berhasil meyakinkan negara Nauru dan Vanuatu untuk mengajukan pernyataan resmi dalam sidang tahunan majelis umum PBB 2001 mengenai status politik Papua. Dengan demikian kedua belah pihak mencapai targetnya masing-masing.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana konflik politik itu berkembang? Jika kedua belah pihak berkeras memperjuangkan posisi politis masing-masing, kemungkinan besar daftar peristiwa berdarah akan semakin panjang.

2. Penanganan konflik politik

Penanganan konflik	➢ Seruan para pemimpin gereja di Timika soal pemilihan bupati (30/9), ➢ Sultan Tidore menawarkan diri sebagai penengah konflik Papua (30/9), ➢ Para pemimpin agama Papua menyerukan penghentian kekerasan (5/10), ➢ Kritik YLBHI terhadap aparat keamanan karena menggeneralisir gereja, adat, dan suku sebagai sarung separatisme (18/10), ➢ Kesepakatan Polda dengan LSM soal pembentukan tim klarifikasi kasus Wasior (19/10), ➢ Pendapat anggota MPR soal masalah kekerasan di Papua (19/10),

	➢ Komunitas Pemuda dan Pelajara Puncak Jaya mengklarifikasi masalah Ilaga dengan Pangdam (25/10), ➢ Ketua DPRD Manokwari meminta agar masalah Wasior ditangani tanpa mendatangkan trauma (26/10), ➢ Wilayah zona damai di perbatasan RI-PNG (30/10), ➢ Para pemimpin agama meminta pembentukan tim penyelidik independen (4/12).

Sepanjang berlangsungnya kekerasan pada tahun 2001, pemimpin agama, kalangan LSM, PDP dan pemerintah berulang kali menyerukan Papua seagai zona damai. Seruan itu tidak diikuti pembentukan sebuah mekanisme yang dapat memetakan, menangani, hingga mencegah terulangnya konflik. Daftar panjang terulangnya peristiwa kekerasan dengan motif dan pola yang sama menggarisbawahi hal ini.

Sebagai perbandingan dapat dianalisis tiga kasus "perundingan" yang menonjol: kasus penyanderaan di Asiki, Merauke, kasus penyanderaan Ilaga, dan kasus Wasior. Jika dilihat secara teliti, dalam kasus Asiki dan Ilaga terdapat sejumlah unsur yang tidak terdapat dalam kasus Wasior seperti warga negara asing, kesediaan pemerintah dan kepolisian untuk berunding dalam tahapan panjang, pihak perantara perundingan yang dipercaya dan didukung berbagai pihak, perhatian luas dari media massa, *political will* untuk menyelesaikan masalah secara damai. Dalam kasus Wasior, unsur-unsur tersebut kurang ada atau malah tidak ada sehingga masalah menjadi tak tertangani.

Dapatlah disimpulkan bahwa penanganan konflik memerlukan keterlibatan aktif pelbagai pihak, baik yang memegang kendali pemerintahan, keamanan, maupun pengaruh massa. Senyatanya, penyelesaian kasus memerlukan otoritas hukum dan politik, keterampilan negosiasi, *political will* yang memadai, keterbukaan pihak-pihak yang terlibat dan pihak perantara yang terpercaya.

Pengalaman penyelesaian sejumlah perkara kiranya perlu dipelajari oleh pihak-pihak di Papua yang menginginkan Papua menjadi zona damai. Pengalaman itu tidak hanya dapat mencegah jatuhnya korban tetapi juga mampu menyelesaikan masalah secara baik.

3. Kesamaan di muka hukum

Kesamaan di muka hukum	➢ Sanksi bagi polisi yang indisipliner (1/2), ➢ Kesiapan Polda untuk diperiksa oleh KPP HAM Papua (25/2), ➢ Anggota Polda mengganggu proses pemeriksaan KPP HAM Papua (7/3), ➢ Pemeriksaan perwira Polda oleh KPP HAM di sekretariat KPP HAM (15/3), ➢ Kapolda tidak keberatan tentang pemeriksaan KPP HAM terhadap perwiranya (19/3), ➢ KPP HAM menemukan unsur pelanggaran berat HAM dalam kasus Abepura (20/3), ➢ Kapolda Irja menilai sikap KPP HAM tendensius dan provokatif (22/3), ➢ Mabes Polri memprotes hasil akhir investigasi KPP HAM Papua (17/4), ➢ Komnas HAM mengadopsi hasil akhir KPP HAM Papua (15/5), ➢ Pansus HAM DPRD Papua melakukan investigasi di Manokwari dan Wasior (7/8), ➢ Mahmil Jayapura menjatuhkan hukuman kepada 6 orang terdakwa (5/10), ➢ TPF Komnas HAM untuk kasus Theys (5/12)
Perlakuan manusiawi selama dalam tahanan	➢ Polemik biaya pengobatan Theys (29/3), ➢ Bantuan Gus Dur untuk pengobatan Theys (5/4), ➢ ELSHAM dan Amnesty International meminta 22 orang tahanan politik di Wamena dibebaskan (6/7), ➢ Kepala Suku Wondama meninggal di tahanan Polres Manokwari (20/7).
Pengadilan yang adil	➢ Kasus Wamena berdarah disidangkan (12/2, 19/6), ➢ Tuntutan agar kasus PDP segera disidangkan (14/2, 18/2), ➢ Pidana untuk pembawa anak panah dan busur di perbatasan (13/2), ➢ Persidangan tokoh Melanesia Barat dengan dakwaan pemerasan (18/2), ➢ Perpanjangan penahanan PDP (21/2, 22/2), ➢ Pidana makar untuk 1 orang PDP dan 4 orang Panel Jayawijaya (10/3), ➢ Empat tokoh Melanesia Barat dibebaskan (13/3), penangguhan penahanan untuk lima PDP (15/3), ➢ Komandan Satgas Papua bebas murni (22/3), Theys cs dikenai dakwaan makar (29/3),

	➢ Kasdam XVII/ Trikora menolak usulan DPRD Irja untuk mengadakan persidangan kasus Theys di Kodam atau Polda (26/4), ➢ Komandan Satgas Bonggo divonis bersalah karena membawa amunisi dan senjata tajam (27/4), ➢ Persidangan tokoh PDP di Jayapura, berbagai pendapat, dan langkah (13/5, 14/5, 15/5, 21/5, 30/5, 24/6, 25/6, 13/8, 4/9, 14/12), ➢ Perdebatan soal vonis bebas dr. Dimpudus (11/6), ➢ PDP minta agar kasus Abepura segera disidangkan (18/6), ➢ Berkas kasus Abepura dikembalikan oleh Kejakgung kepada Komnas HAM untuk dilengkapi (26/7, 2/8), ➢ John Yikwa dituntut bebas dalam kasus Abepura 7 Desember 2000 (4/9).

Dalam tahun 2001 terdapat tiga kasus besar yang dapat menjadi petunjuk sejauh mana hukum diberlakukan secara sama: kasus Abepura, kasus pengadilan PDP, kasus penculikan dan pembunuhan Theys H. Eluay. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Papua, perkara dugaan pelanggaran berat HAM diselidiki secara resmi oleh lembaga yang memiliki kewenangan penyelidikan *pro iustitia*. Jika diteliti lebih lanjut, KPP HAM Papua menghadapi banyak tantangan dari lembaga-lembaga yang seharusnya mendukung penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Polri, Kanwil Kehakiman dan HAM[14].

Saat proses penyelidikan berjalan, Polres Jayapura tiba-tiba mengeluarkan surat pemanggilan kepada para saksi korban yang sedang dimintai keterangannya oleh KPP HAM. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Papua malah mengeluarkan surat supaya perwira Polri tidak perlu memberikan keterangan terhadap KPP HAM karena perkara Abepura 7 Desember 2000 bukanlah pelanggaran berat HAM. Komnas HAM dalam rapat pleno mempertanyakan kesimpulan KPP HAM yang mengategorikan kasus Abepura 7 Desember 2000 sebagai pelanggaran berat HAM. Mabes Polri memprotes hasil kesimpulan penyelidikan KPP HAM Papua. Meski demikian, hasil penyelidikan KPP HAM Papua tetap dipertahankan

---

[14] *Lihat*, Laporan Akhir KPP HAM Papua/ Irian Jaya, Bagian Pendahuluan, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2001.

dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti dengan proses penyidikan. Dengan langkah ini sekurang-kurangnya ada tindakan hukum yang nyata dan upaya memutuskan lingkaran kebal salah dan kebal hukum (*impunity*) di Papua.

Proses peradilan yang penting dicatat adalah pengadilan politik bagi lima tokoh PDP yang dikenai tuduhan makar. Proses penangkapan dan penahanan sudah dilakukan November 2000 dan masa persidangan baru dimulai pada awal tahun 2001. Persidangan ini lebih bersifat politis karena fakta yang diperkarakan adalah peristiwa-peristiwa yang dihadiri dan disetujui oleh Pemerintah: perayaan ulang tahun Theys H. Eluay di Sentani 12 November 1999, Mubes Papua di Sentani 23-26 Februari 2000, Kongres Papua di Jayapura 29 Mei-4 Juni 2000. Pengadilan ini menunjukkan dengan jelas kebingungan pemerintah dalam menghadapi dinamika sosial politik di Papua karena secara hukum ketiga peristiwa tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mempersalahkan tokoh PDP tanpa sekaligus mengadili pemerintah yang telah membiarkan terjadinya ketiga peristiwa besar tersebut.

Kasus terakhir yang menyedot perhatian besar publik adalah proses pengusutan perkara pembunuhan Theys H. Eluay. Meski dibentuk beberapa tim untuk mengungkapkan kasus ini, tetap saja penyelesaiannya tak kunjung tercapai. Hingga akhir tahun pemerintah belum mampu menyingkapkan perkara yang amat melukai hati masyarakat Papua tersebut.

4. Pemerintahan yang bebas KKN

Pemerintahan yang bebas KKN	➢ Wakil Walikota Jayapura berjanji mengusut penyelewengan beras Opsus (29/4), ➢ Bupati Manokwari mengeluarkan ultimatum bagi Camat yang tidak bertugas (29/4), ➢ Penghentian kasus dugaan korupsi proyek Talud Bappedalda Irja (9/4), ➢ Penyelewengan beras Opsus di Desa Makbalim Kecamatan Salawati (8/5), ➢ Pemilihan Bupati Jayapura dinilai primordialistik (10/5), ➢ Masalah dugaan *money politics* dalam pemilihan Bupati Paniai (25/5),

	➢ Mantan dirut PDAM Sorong dinyatakan kabur (29/5), ➢ Mantan Kabag TU Dinkes Irja divonis 10 bulan penjara (31/5), ➢ Tindakan Bupati Mimika terhadap camat yang tidak bertugas (12/10), ➢ Dugaan *money politics* dalam pemilihan bupati Sorong (20/10, 30/10), ➢ Sejumlah camat di wilayah Kabupaten Jayapura akan ditindak (12/12, 14/12, 18/12), ➢ Penyelewengan dana veteran (20/12),
Ikut serta dalam pemerintahan	➢ Musda Golkar di Jayapura (10/2), ➢ Ketua DPRD Mimika meminta masyarakat tidak ikut campur urusan pemerintah (22/3), ➢ Pertentangan eksekutif dan legislatif Sorong (25/5), ➢ Bupati dan Wabup Puncak Jaya terpilih (17/7), ➢ Ramses Wali mundur dari bursa calon bupati Jayapura (20/7), ➢ Gubernur Irja mendukung pemilihan Megawati (22/7), ➢ 8 pasang calon Walikota Sorong dan wakilnya (31/8), ➢ Bupati Jayapura dan Wabup terpilih (17/9), ➢ Penetapan Bupati Timika dan wakilnya (17/9) ➢ Dan dinyatakan cacat hukum oleh MA (22/10), ➢ LMA Malamoi akan menurunkan paksa Bupati dan Wabup Sorong (9/10), ➢ Bupati Sorong dan wakilnya terpilih serta tanggapan masyarakat (13/10, 15/10, 17/10),

Pemerintah yang bebas KKN kiranya makin sebatas impian karena birokrasi di segala tingkat belum berhasil melepaskan diri dari budaya korupsi. Kemelut pemilihan sejumlah bupati dan walikota selama 2001, atau kericuhan saat penjaringan CPNS lebih mudah dilihat tetapi KKN di kampung-kampung yang jauh dari jangkauan media, jauh lebih sulit ditangani tetapi justru amat menyengsarakan masyarakat yang sudah memiliki keterbatasan akses kepada lalu lintas barang dan jasa, infrastruktur, fasilitas sosial, dan fasilitas umum. Sebagai contoh adalah berbagai penyelewengan beras opsus yang terjadi di Biak Timur, Jayapura, dan Sorong yang

melibatkan oknum Camat atau pejabat lain. Tindakan sedemikian amat menyengsarakan masyarakat karena langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Kericuhan pemilihan bupati/ walikota beserta wakilnya menjadi penanda bagi perubahan tata sosial masyarakat Papua yang dikondisikan oleh arus Papuanisasi. Budaya KKN, primordialisme sempit, kepentingan partai-partai politik, dan kepentingan pribadi, bercampur menjadi satu kekuatan yang sulit dikendalikan hukum. Sebagai contoh adalah hasil pemilihan Bupati Timika, yang ditolak oleh LEMASA dan bahkan kemudian dinyatakan cacat hukum oleh Mahkamah Agung tidak sanggup mengubah keputusan mereka.

Tekanan massa lain terjadi di Sorong saat berlangsung pemilihan Bupati Sorong. Pendukung masing-masing kandidat memperjuangkan kandidat mereka tanpa mempedulikan proses hukum dan politik di lembaga DPRD. Akibatnya terjadi bentrokan fisik antar para pendukung calon, pemalangan, perusakan, sehingga akhirnya polisi harus turun tangan. Situasi serupa terjadi di Jayapura saat DPRD Kabupaten Jayapura memilih pasangan Bupati dan Wakilnya.

Dari proses pemilihan itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa *impunitas* tidak hanya melindungi TNI dan Polri tetapi telah meluas ke tingkat Bupati/ Walikota. Hukum tidak mampu menjamah mereka sehingga masyarakat kembali menjadi korban.

5. kebebasan mengungkapkan pendapat, termasuk aspirasi M

Kebebasan berekspresi	➢ *Walk-out*, demo, dan bentrokan saat pembahasan RUU Otsus di GOR Jayapura (28/3), ➢ Philipus Murib meninggal saat terjadi bentrokan polisi dan pendemo menolak Otsus di GOR Cenderawasih, Jayapura (29/3), ➢ Ratusan mahasiswa Uncen dan rakyat Papua melakukan mimbar bebas untuk menolak Otsus (29/3), ➢ Anggota Tim *Steering Committee* Forum Kajian Otsus menyesalkan terjadinya bentrokan (29/3), ➢ John Ibo mengharapkan pemikiran tentang Otonomi dan Merdeka ditempatkan secara proporsional (30/3), ➢ Kelompok pemuda Oksibil menyandera tiga anggota DPRD Jayawijaya dengan tuntutan agar pemerintah memperhatikan wilayah tersebut (4/4),

	➢ Masalah perjuangan PDP dinilai masih dalam konteks wacana (15/5), ➢ Protes pihak PWI Reformasi dan AJI Papua terhadap tindakan Ditserse Polda (8/6), ➢ Demo masyarakat Puncak Jaya meminta pembatalan Bupati terpilih dengan alasan bukan putera daerah (11/6), ➢ Perdebatan calon bupati dan wakilnya untuk Kabupaten Mimika (5/7), ➢ Masyarakat Sentani menuduh anggota DPRD Kabupaten Jayapura memeras calon Bupati/ Wabup (17/9), ➢ Demo penolakan Bupati dan Wabup Timika terpilih (20/9), ➢ SSP Biak berdemo soal miras, judi, KKN di Biak (9/10), ➢ Kapolres Sorong menangkap dua WNA karena melakukan orasi politik (16/10), ➢ Demo ke kantor DPC PDIP Kota Jayapura dan perdebatannya (18/10), ➢ Sonamapa demo soal kematian Theys (11/12, 13/12, 18/12, 22/12)

Pengungkapan pendapat dalam wujud demo, unjukrasa, atau pemalangan menjadi hal yang makin biasa di berbagai wilayah di Papua, khususnya di perkotaan. Pelaku unjukrasa tidak terbatas mahasiswa atau pejuang politik tetapi juga guru, tenaga medis, kelompok perempuan, atau warga masyarakat biasa. Pemalangan biasanya dilakukan mahasiswa. Isu yang disuarakan juga makin beragam: pelanggaran HAM, maraknya penjualan miras, perjudian, upah yang tidak layak, pelayanan medis yang buruk,pelanggaran hak ulayat, pelurusan sejarah, aspirasi M, hingga hak menentukan nasib sendiri. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa menyuarakan ketidakadilan melalui tekanan massa bukanlah hal yang tabu. Dilihat dari reaksi aparat kepolisian, pada umumnya polisi mampu memberikan ruang sewajarnya bagi demo atau aksi massa sejauh masalah yang disuarakan tidak terlalu bersinggungan dengan wilayah politik kekuasaan dan tidak menggunakan kekerasan. Kebebasan pers untuk mengungkapkan ketidakadilan dalam masyarakat di berbagai bidang juga lebih terjamin meski masih dengan gampang ditemukan 'jual beli berita' di media massa oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal terakhir ini amat berkaitan dari suasana umum di Indonesia.

➢ Pemalangan

Cara pengungkapan pendapat dengan pemalangan bangunan atau area, perlu dinilai secara kritis. Pemalangan merupakan alat tawar menawar masyarakat Papua untuk mencapai tuntutannya. Dalam sejumlah kasus yang muncul selama 2001, pemalangan menjadi sarana terakhir yang ampuh untuk memaksa pihak penguasa atau pengusaha mau membicarakan tuntutan keadilan (hak ulayat, aspirasi politik, dsb). Tetapi dalam kasus-kasus lain, pemalangan menjadi semacam pemaksaan kehendak oleh massa kepada individu tanpa dasar hukum. Pemaksaan ini menjadi makin dianggap biasa dan seakan-akan harus diterima atau dianggap sah. Sebagai contoh dapat dilihat dalam proses penjaringan CPNS di Kabupaten Jayawijaya. Pihak yang tidak diterima sebagai pegawai melakukan pemalangan hingga akhirnya DPRD turun tangan. Contoh lain adalah pemalangan lahan transmigrasi oleh pemilik hak ulayat yang mengklaim pembayaran tanah yang belum beres.

Pemaksaan kehendak massa perlu ditangani serius jika masyarakat tidak hendak jatuh dalam demokrasi massa yang semata-mata bersandar pada jumlah tanpa memperhitungkan kebebasan individu dan perangkat hukum yang mengatur persengketaan. Pembiaran pemalangan secara berlarut-larut akan berdampak pada lunturnya kepastian hukum yang pada gilirannya menggerogoti tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Papua sendiri secara keseluruhan.

➢ Bicara politik

Ruang kebebasan berpendapat menjadi lebih sempit saat masyarakat bicara mengenai GERASEM, pengibaran bendera Papua, pelurusan sejarah Papua, atau tema 'hak menentukan nasib sendiri' (*rights of self-determination*) yang menyangkut status politik Papua yang amat sensitif. Dilihat dari tanggapan aparat negara, terdapat perbedaan mencolok antara suasana tahun 1998-2000 dengan tahun 2001. Keleluasaan untuk mengibarkan bendera Papua, membicarakan aspirasi M, pelurusan sejarah, secara hukum tidak ada lagi. Tanda yang paling jelas adalah proses persidangan PDP yang didakwa makar dengan fakta-fakta utamanya justru memperkarakan status politik Papua: 12 November 1999, 1 Desember 1999, 23-26 Februari 2000, 29 Mei-4 Juni 2000.

Kemudian terjadi pengerahan kekuatan represif untuk membungkam GERASEM, seperti penambahan pasukan militer di wilayah perbatasan dan yang dianggap rawan, pelarangan dan razia atribut Papua Merdeka dan pembunuhan tokoh politik Papua.

Ditinjau dari segi penyelesaian masalah Papua, pembungkaman aspirasi politis hanya bersifat menyimpan api dalam sekam. Energi perlawanan rakyat tidak akan padam justru makin bertambah kuat dan tersimpan di bawah permukaan. Seharusnya pemerintah mengupayakan tercapainya dialog politik demi menyelesaikan masalah status politik Papua. Tanpa pernah menghadapi inti masalah dalam kerangka hukum dan demokrasi, kebijakan pemerintah yang dihasilkan selalu bersifat kasuistik, parsial dan represif.

Pemain-pemain kunci

Seperti halnya hak-hak ekososbud, dalam hal hak sipil dan politik juga perlu dianalisis berbagai pemain kunci yang ambil peran menentukan dalam dinamika sosial politik Papua selama 2001.

1. Pemerintah pusat dan daerah

Ditinjau dari perangkat hukum yang disediakan bagi pemerintah, Indonesia memiliki perangkat hukum di bidang HAM yang memadai karena telah diadopsi dalam UUD 1945 khususnya Amandemen Kedua. Persoalannya sekarang adalah apakah perangkat hukum tersebut memiliki kewibawaan politis. Sejumlah unsur di bawah ini menunjukkan gambaran kinerja pemerintah di bidang hak sipil dan politik.

- Menempuh jalan kompromi

Selama 2001, pemerintah memiliki fokus perhatian yang berbeda dalam hal menangani dinamika sosio-politis di Papua. Kebijakan Pemerintah Pusat masih tidak memperlihatkan kemauan politis untuk mencapai satu penanganan masalah Papua yang menyeluruh hingga seluruh gejolak politis terjawab. Pemerintah Pusat belum menunjukkan tanda untuk berani mengadakan dialog politik guna membicarakan masalah status politik Papua atau sekurang-kurangnya menggali dan membicarakan secara obyektif akar konflik politik di Papua selama ini. Bahkan dalam perancangan RUU Otsus,

Jakarta tetap bersandar pada pola Orde Baru dengan secara cukup keras memperjuangkan RUU Otsus versi Departemen Dalam Negeri tanpa mau mengadopsi kepentingan propinsi.

Dalam hal itu, Pemerintah Propinsi terbukti lebih serius menangani persoalan politis Papua dengan mencari jalan tengah melalui perancangan, penggodokan, hingga lobi keras di DPR RI supaya *draft* RUU Otsus versi Papua diterima. Langkah yang ditempuh Pemda Papua adalah dengan menampung pendapat masyarakat dan membicarakannya meski pihaknya tahu bahwa langkah tersebut tidak populer. Jalan ini memang kompromis tetapi sekaligus realistis yang dapat mengurangi ketegangan politis, risiko korban, sekaligus membuka langkah baru. Pembahasan Otonomi Khusus tak pelak lagi menjadi fokus utama pemerintah daerah sehingga betul menyerap segala sumber daya manusia dan dana dalam memperjuangkannya. Karenanya tak heran kalau sejumlah persoalan lain terpinggirkan dan kurang ditanggapi.

➢ Kelemahan SDM di tingkat aparat pemerintah

Perjalanan tahun 2001 menunjukkan bahwa mutu SDM aparat pemerintah makin lemah seiring situasi umum di Indonesia. Tindakan-tindakan aparat pemerintah menunjukkan ketidak-cakapan manajerial dan sempitnya wawasan kenegaraan. Umumnya mereka didukung kekuatan politis yang semata-mata bersandar pada kekuatan massa dan primordialisme sempit. Bukan rahasia lagi - meski amat sulit dibuktikan di muka hukum— bahwa permainan uang telah menjadi bagian dari proses pemilihan aparat pemerintah sehingga mengalahkan pertimbangan profesionalisme seseorang. Pemilihan bupati/ walikota beserta wakilnya tak pernah luput dari segala macam kericuhan yang berbuntut pada bentrokan antar kelompok pendukung calon.

Lebih daripada itu, pemekaran kabupaten terkesan 'asal jadi' seperti terjadi Kabupaten Puncak Jaya atau Paniai. Di daerah-daerah tersebut pemekaran kabupaten diwujudkan dalam melengkapi kantor-kantor dinas, menambah jumlah pegawai negeri dan membangun kelengakapan sarana serta prasarana daripada pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. Relevansi pembangunan kantor dinas beberapa departemen patut dipertanyakan, terlebih karena dibangun di

tempat yang tidak terdapat industri apapun serta wilayah yang masih tertutup untuk wisatawan. Ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah, kedua kabupaten tersebut menjadi contoh buruk pemerintahan yang hanya mampu berdiri dengan biaya dari propinsi.

➢ Terjangkiti primordialisme sempit

Masyarakat menyaksikan bagaimana pemilihan pejabat mengikuti garis primordialisme sempit dengan dalih 'Papuanisasi' atau 'kepercayaan kepada putera daerah'. Di satu sisi semangat ini wajar mengingat selama tiga dasawarsa ciri 'lokal' dianggap berbahaya bagi persatuan dan kesatuan nasional. Akan tetapi, *euforia* itu ternyata mempersempit arti kedaerahan menjadi sesuku, se-keluarga besar, dan akhirnya 'pokoknya kami punya orang'. Apa saja yang bukan 'bagian dari kami' tidak dapat diterima meski secara obyektif memiliki keunggulan untuk memimpin wilayah kabupaten atau kota. Ironisnya, calon-calon pejabat Papua justru mengeksploitasi sentimen primordial demi jabatan. Pikiran sempit tersebut kiranya akan dibayar mahal oleh rakyat Papua. Mereka mulai kehilangan sosok pemimpin, terjerumus dalam tarik menarik jabatan, dan akhirnya makin dikecewakan justru oleh 'orang sendiri'.

2. DPRD

Yang tetap patut dicermati adalah kinerja DPRD yang diandaikan menjadi penopang tiang demokratisasi di Papua. Kelemahan DPRD yang mirip dengan kelemahan aparat pemerintah sebenarnya tidak terlalu mengherankan jika diletakkan dalam konteks Indonesia secara keseluruhan. Sejumlah kabupaten baru memiliki DPRD karena tuntutan Undang-undang bagi sebuah pemekaran daerah meski penduduk setempat belum mencapai taraf kemandirian.

➢ Kelompok penguasa baru

Hal yang mencolok dari demam demokrasi di Indonesia adalah kedudukan DPRD yang berubah drastis menjadi penguasa baru sebagai akibat dipilihnya wakil rakyat melalui pemilu. Suasana ini telah menular ke Papua hingga ke tingkat kabupaten/ kota. Sekarang yang menjadi tolok ukur utama adalah bagaimana DPRD bisa menghalangi pemerintah daripada bagaimana DPRD menjadi

lembaga yang mewujudkan kepentingan masyarakat dalam perangkat hukum yang memajukan tingkat kemakmuran daerah. Gaya ini tak terhindarkan karena DPRD berisikan partai-partai pemenang pemilu 1999 dan bagian terbesar adalah warisan sistem Orde Baru.

➢ Lebih berkiblat kepada partai

Sebagai pewaris sistem kepartaian di Indonesia yang lebih bersandar pada loyalitas daripada profesionalisme, DPRD masih berisikan muka-muka lama yang loyal para partainya. Mutu perorangan dan keahlian berpolitik mereka tidak memadai. Keadaan sedemikian tidak menguntungkan masyarakat karena fokus perhatian DPRD belum menjangkau keadaan konkret masyarakat dan kebijakan-kebijakannya tidak langsung berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. APBD belum berorientasi pada layanan umum dan sosial melainkan pada peningkatan fasilitas pegawai, penanganan gejolak aspirasi M di Jayawijaya, Puncak Jaya, Sorong, Timika.

➢ Terjangkiti primordialisme sempit

Seperti halnya pemerintah, DPRD juga terjangkit primordialisme dalam menentukan susunan keanggotaan DPRD. Keadaan di DPRD lebih buruk karena di satu sisi, harus mengakomodasi suara partai-partai pemenang pemilu 1999 dan di sisi lain, menampung ciri khas 'lokal' atau asli wilayah yang bersangkutan. Masyarakat lebih menjadi penonton dan tak jarang terbawa arus pertentangan partai-partai dalam DPRD saat berlangsungnya pemilihan bupati atau walikota, pemilihan ketua DPRD, atau isu 'jabatan' lainnya.

3. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Satu hal yang menandai perilaku militer di Papua selama 2001 adalah pertikaian antara polisi dengan TNI di sejumlah tempat di Papua yang bermula dari perang mulut atau masalah sepele. Pertikaian itu tidak hanya terbatas antar anggota kedua satuan tetapi juga menyangkut masalah penanganan TPN/ OPM seperti dalam kasus Max Rumbiak di awal tahun 2001. Kodam memiliki garis kebijakan yang berakibat pada kembali beraksinya kelompok Max Rumbiak dengan dalih 'dibina oleh Kodam'. Kenyataan ini amat mengejutkan karena secara prinsipil gerakan TPN/ OPM telah

melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah RI dan berusaha ditangani secara militer oleh TNI. Akan tetapi, setelah satu kelompok menyerah, justru dibiarkan kembali ke lapangan tanpa penanganan hukum sama sekali.

Secara nasional, militer menyatakan mundur dari politik tetapi campur tangan dalam politik tetap berjalan. Dalam konteks Papua, kehadiran militer masih identik dengan operasi militer yang mengorbankan rakyat sipil. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2 di atas yang menggambarkan pola kekerasan yang terjadi di Papua yang melibatkan militer. Kasus mencolok dan menggemparkan adalah pembunuhan tokoh politik Papua yang memicu kemarahan orang Papua, mempertajam ketegangan antar etnis di Papua dan menggoncangkan dinamika kehidupan bermasyarakat yang sebelumnya relatif tenang.

Di sisi lain, militer sebenarnya mengalami kesulitan dalam menghadapi gerakan-gerakan perlawanan bersenjata karena di sejumlah tempat terjadi pencurian atau penghadangan yang menelan korban jiwa entah di kalangan gerakan perlawanan bersenjata, kalangan militer atau keduanya. Hal ini terjadi antara lain di Betaf, Kabupaten Jayapura, Tiom, Kabupaten Jayawijaya, Kali Kopi, Kabupaten Mimika, dan Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, misalnya. Kesulitan lain adalah bahwa kelompok OPM yang diandaikan sudah dapat "dibina" ternyata lepas kendali sehingga terpaksa diambil keputusan untuk memutuskan ikatan dengan anak-anak binaan itu. Hal ini dinyatakan dengan jelas oleh Komandan Satgas Intelijen Kodam XVII Trikora, Kolonel Inf Armen Tony dalam suratnya kepada Willem Onde pada tanggal 15 Juni 2001.[15] Sesudah pernyataan itu, Willem Onde dan John Tumin Kandam ditemukan mati dibunuh sebagaimana halnya Theys H. Eluay. Di Pegunungan Bintang, Paulus Kaladana menjadi lebih aktif di bawah komando Komandan Satgas Tribuana X di Hamadi.[16]

Fakta-fakta itu mengindikasikan bahwa TNI sedang dalam kebingungan untuk menempatkan diri dalam tata kenegaraan yang

---

[15] Surat ini dikirim kepada Willem Onde melalui fax nomor 0971-322231 di Merauke; lihat laporan SKP Merauke: Laporan dan Analisis: Mengapa pembunuhan terhadap Willem Onde dan John Tumin Kandam belum diinvestigasi? , Merauke, Juni 2002, hlm. 8.

[16] Laporan SKP Jayapura dalam Seri MEMORIA PASSIONIS No. 11: Laporan suasana kemasyarakatan di Wilayah Pegunungan Bintang , Jayapura, Februari 2002.

telah diperbarui. Dalam kebingungan tersebut, jalan yang diambil tetap pola lama yang mengedepankan pendekatan keamanan daripada hukum.

4. Polri di Papua

Dalam tahun 2001, Polri berusaha tampil sebagai bagian dari masyarakat sipil yang mengurus keperluan masyarakat berdasarkan prosedur hukum. Pendekatan hukum ini cukup ditampilkan dalam sejumlah kasus yang menonjol seperti penanganan kasus penyanderaan, kasus pembunuhan Theys H. Eluay, kerja sama dalam pemeriksaan kasus Abepura, dan kiranya amat dipengaruhi oleh kepemimpinan Kapolda, Irjen Pol. Made Mangku Pastika.

- Mencoba patuh terhadap hukum

Polda Papua coba mengambil langkah berani dengan memilih jalan hukum saat diadakan penyelidikan dalam kasus Abepura. Jalan ini tidak semudah diucapkan atau banyak digembar-gemborkan oleh kalangan politisi yang terjerat berbagai kasus berat KKN. Kepatuhan hukum ini tidak terjadi dengan serta merta. Pergulatan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang tunduk terhadap hukum tersirat penolakan mereka untuk bekerja sama dengan KPP HAM.

- Terbuka dan terlibat dalam penyelesaian konflik secara damai

Polda juga bersedia berunding dalam menangani kasus sandera yang cukup melelahkan dan mempertaruhkan reputasi pemegang jabatan di jajaran kepolisian pada saat itu. Baik kasus Merauke maupun kasus Ilaga tidak mudah ditangani karena berbagai unsur antara lain sandera adalah warga negara asing, lokasi penyanderaan yang tidak mudah dijangkau, tuntutan sandera yang hampir mustahil dipenuhi, liputan media massa dalam dan luar negeri yang gencar, dan tarik menarik kekuatan politis. Di tengah segala macam kesulitan, kepolisian coba membuka ruang berunding dan secara serius menangani masalah setahap demi setahap bersama pihak mediator.

Dapat dikatakan bahwa polri mengalami kemajuan yang berarti dalam menangani kemelut massa karena sandera berhasil dibebaskan dengan selamat tanpa melalui kekerasan. Contoh lain

yang mencolok adalah pengendalian reaksi massa saat Ketua PDP dibunuh, diarak ke Sentani, dan akhirnya dikuburkan. Kembali pengendalian tanpa kekerasan. Langkah pengendalian konflik tanpa kekerasan kiranya perlu dipelajari dan dikembangkan secara terencana oleh Polda agar terus menjadi bagian profesionalisme polisi.

➢ Mandiri dalam bersikap

Kemandirian ditujukkan oleh Polda Papua dalam sejumlah peristiwa penting seperti penyanderaan di Merauke dan Ilaga, Puncak Jaya, atau kasus penculikan dan pembunuhan Theys H. Eluay. Dalam kasus penyanderaan, Polda dengan gigih memperjuangkan penyelesaian damai sedangkan dalam kasus terakhir, Polda menyelidiki kasus pembunuhan Theys hingga batas-batas kemampuan dan kekuasaan yang dimiliki sebagai aparat kepolisian. Kapolda Papua berulangkali menyatakan keterbatasan hukum dan politis dalam mengungkapkan seluruh hasil investigasi sehingga meminta lembaga yudikatif maupun pemerintah menindaklanjuti dengan langkah hukum dan politis yang lebih kuat. Pemerintah justru mengambil langkah ganjil dengan membentuk KPN yang tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penyelidikan Polda Papua yang cukup canggih akhirnya tenggelam dalam kekaburan isu lain di Papua.

Polda juga mencoba untuk mengambil jarak dari politik praktis dan berusaha tidak dipengaruhi kekuatan-kekuatan politis lainnya untuk mengedepankan kekerasan fisik. Sikap ini muncul tatkala sejumlah isu besar muncul dalam kaitan dengan proses merancang RUU Otonomi Khusus, masalah pengibaran bendera atau masalah keamanan masyarakat.

5. Presidium Dewan Papua (PDP)

PDP tampil dengan gaya yang sudah baku Mereka bersandar pada mandat kongres, memberikan arahan kepada masyarakat untuk menolak otonomi khusus serta melakukan perjuangan lobi di tingkat nasional dan internasional. Ketiga unsur ini menjadi ciri corak PDP selama 2001 di bidang politik[17].

Di bidang HAM sendiri, PDP kurang berperan dalam sejumlah

kasus yang menonjol selama 2001 baik di bidang hak ekonomi, sosial, budaya seperti pelbagai kasus KKN, pelayanan kesejahteraan masyarakat, maupun hak sipil-politik seperti penyanderaan di Merauke dan Ilaga, proses penyelidikan KPP HAM, peristiwa Wasior, ketegangan etnis dan agama di Wamena. Pelbagai hal yang telah diuraikan di atas kurang mendapat perhatian dari PDP. Boleh jadi karena PDP merupakan badan politis rakyat Papua, sehingga mereka lebih mementingkan wacana politis ketimbang wacana Hak Asasi Manusia.

6. TPN/ OPM

Selama 2001 kegiatan TPN/ OPM kembali hangat dibicarakan di berbagai lapisan kehidupan masyarakat karena tampil dengan berbagai aksi di berbagai tempat di Papua. Dalam laporan media massa, TPN/OPM terlibat dalam sejumlah penyerangan atau perampasan senjata di sejumlah tempat seperti Kali Kopi, Betaf, Sinak, Ilu, Ilaga, dan Merauke.

Jika ditempatkan dalam konteks sejarah perlawanan TPN/OPM, tindakan-tindakan TPN/OPM sebenarnya tidak jauh berbeda dari pola yang sudah terjadi dalam tahun-tahun sebelumnya: baik dari segi sasaran, target, dan tuntutan. Namun ada satu unsur yang patut dicermati, yakni bahwa kalangan TPN/OPM makin terbuka untuk penyelesaian masalah secara damai. Tanda-tanda ini cukup nyata terutama dalam peristiwa penyanderaan yang menempatkan TPN/ OPM dalam posisi amat kuat. Dalam kasus-kasus tersebut TPN/ OPM ternyata bersedia berunding tahap demi tahap hingga akhirnya dicapai kata akhir secara damai. Tanda-tanda ini cukup menjanjikan bagi penanganan konflik di Papua secara damai

Di sisi lain ternyata sejumlah faksi OPM tetap diperalat oleh TNI seperti terjadi dengan Paulus Kaladana yang diperalat TNI, Tadeus Yogi, Maks Rumbiak, atau Willem Onde. Kesaksian di sejumlah laporan menyebutkan bahwa TNI melegitimasi operasi militer di Papua. Memang belum ada bukti legal-formal tetapi kesaksian masyarakat dan kemiripan pola kerja TNI cenderung mengarah kepada kesimpulan tersebut. Kalangan gereja-gereja telah beberapa

---

[17] *lihat* bagian kedua buku ini mengenai peran politik PDP.

melaporkan keadaan di Paniai, Pegunungan Bintang, dan Merauke. Hingga kini belum pernah ada langkah hukum baik dari pihak pemerintah daerah maupun aparat keamanan dan militer.

7. Kalangan LSM dan pekerja HAM

Peran LSM dan pemerhati serta pekerja kemanusiaan di Papua selama 2001 makin menonjol terutama dalam melakukan advokasi hak-hak sipil dan politik. Kalangan LSM Papua seperti Elsham, LBH Papua, Kontras Papua, LP3BH dan SKP Jayapura (Lembaga di bawah Gereja Katolik Keuskupan Jayapura) giat melakukan investigasi terhadap berbagai kasus, melakukan pelatihan-pelatihan hukum dan HAM bagi masyarakat di tingkat akar rumput, dan melakukan kampanye kasus di tingkat nasional dan internasional. Hal terakhir ini mendapat perhatian penuh terutama dari Elsham yang coba menyuarakan masalah HAM di Papua ke dunia internasional. Jumlah LSM di bidang HAM sendiri mengalami peningkatan dan tidak hanya terpusat di Jayapura tetapi juga di kota-kota kabupaten lainnya. Di Jayapura sendiri berkembang ALDP, di Merauke PAHAM, di Nabire YABIMU, di Manokwari LP3BH dan di Timika YAHAMAK. Di kalangan gereja makin dikembangkan badan yang khusus menangani masalah keadilan sosial seperti SKP KAM, Biro Keadilan dan Perdamaian GKII, Biro HAM dan Hukum Sinode GKI di Tanah Papua.

Segi lain yang dikembangkan oleh kalangan LSM, khususnya Foker LSM Papua, adalah dialog interaktif di TV lokal dari radio mengenai sejumlah perkara penting yang muncul di sepanjang tahun 2001 seperti KKN, Otonomi Khusus, hubungan antar agama, masalah kamtibmas di Papua, pengadilan HAM, konsep komisi kebenaran dan rekonsiliasi, dan sebagainya. Kalangan LSM menerbitkan tabloid *JUBI* sebagai media untuk menyebarluaskan perkembangan masalah HAM di Tanah Papua secara lebih mendalam.

Pengaruh yang mulai ditanamkan oleh kalangan LSM bidang HAM adalah bahwa masyarakat Papua mulai fasih bicara mengenai "hak-hak dasar, HAM, pelanggaran HAM", bahkan, tak jarang dengan mudah memakai istilah-istilah berat seperti *"genosida,* pelanggaran berat HAM, kejahatan negara, kejahatan terhadap kemanusiaan" untuk menengarai sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua. Di satu sisi, pengaruh tersebut amat penting

dikembangkan supaya HAM tidak lagi dijadikan barang tabu yang tidak pantas dibicarakan terbuka atau disamakan begitu saja dengan "melawan pemerintah". Tetapi di sisi lain, masyarakat dan kalangan LSM perlu memperluas dan mendalami pengertian HAM dan segala seluk beluk prosedur hukum yang termasuk di dalamnya. Pendalaman ini amat penting tidak hanya supaya ketepatan dan mutu laporan terjaga tetapi juga agar istilah-istilah kunci di bidang hukum HAM tidak keropos dan menjadi slogan belaka.

Segi khusus dalam bidang HAM yang makin mendapat perhatian tersendiri adalah penanganan hak-hak perempuan. Kesadaran ini makin diutarakan dan diungkapkan secara lebih jelas oleh sejumlah LSM yang memfokuskan perhatian pada masalah perempuan seperti LP3A, JKPIT, KKW, Komnas Perempuan dan P3W. Perhatian yang cukup menonjol di bidang ini memberikan pengaruh positif dalam memperluas cakrawala pemahaman HAM dan tak jarang memberikan kritik dari segi yang jarang disinggung oleh publik, seperti kesetaraan gender, kekerasan domestik, partisipasi kaum perempuan dalam politik atau peran perempuan dalam adat.

Perkara yang mendapat perhatian khusus dari masyarakat, LSM, kalangan agamawan, pemerintah, polri dan TNI, adalah penyelidikan kasus Abepura 2000 yang dilakukan oleh Komnas HAM melalui KPP HAM. Untuk pertama kalinya, perkara dugaan pelanggaran HAM di Papua mendapat penanganan hukum yang semestinya. Langkah ini mungkin diambil berkat kerja keras dari kalangan LSM dan kalangan agamawan yang telah berjuang agar suara korban didengarkan dan ditindaklanjuti dengan penanganan hukum. Sayangnya, hingga akhir tahun 2001 tidak ada langkah lanjutan dari pihak Kejaksaan Agung terhadap perkara Abepura.

Pertanyaan kritis sekarang adalah sejauh mana telah terbangun kerja sama antar berbagai LSM demi pemberdayaan masyarakat yang lebih menyeluruh? Pertanyaan ini tidak baru sama sekali tetapi tetap menjadi pertanyaan kunci bagi kalangan LSM yang mengklaim 'bekerja bagi rakyat dan ada di pihak rakyat, bukan di pihak pemerintah'.

8. kalangan pemimpin agama

Sepanjang tahun 2001 para pemimpin makin proaktif menanggapi perkembangan masyarakat. Demikian pula para

agamawan yang melintasi batas-batas masing-masing dan berdialog secara konstruktif baik antar agama.

Peran yang cukup menonjol dimainkan oleh kalangan agamawan adalah yang berkaitan dengan mediasi konflik. Peran ini tampak amat nyata dalam kasus-kasus penting seperti penyanderaan Willem Onde (Merauke) dan Titus Murib (Ilaga), kasus Wasior. atau kasus Theys H. Eluay. Peran penengah itu makin perlu dikembangkan ketika konflik telah menghasilkan sekat-sekat pemisah antar kelompok masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan TNI dan Polri, antara pemerintah dengan TNI dan Polri, antara masyarakat dengan DPRD. Sejauh ini peran pemimpin agama, khususnya agama Kristen di Papua tetap diakui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Unsur-unsur yang dimainkan dalam mediasi pada umumnya tidak disiapkan sebagai program kerja melainkan muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat yang mendesak, seperti :

- Menjadi jembatan terpercaya. Unsur ini tampak dalam perundingan baik dengan kelompok Willem Onde atau Titus Murib. Wakil dari gereja-gereja sungguh berusaha agar di satu sisi tetap netral sekaligus mendorong agar masalah segera diselesaikan dengan membebaskan sandera dalam keadaan selamat. Saat berunding kredibilitas gereja-gereja sungguh dipertaruhkan di hadapan pemerintah, masyarakat, TNI, Polri, TPN/OPM dan dunia internasional.
- Menjernihkan situasi. Unsur ini menonjol dalam sejumlah seruan yang dikeluarkan bersama oleh kalangan pemimpin agama Kristen dan Islam dalam sejumlah insiden besar selama 2001. Peran ini dijalankan di saat masyarakat mengalami ketakutan atau ketegangan antar pihak-pihak yang berkepentingan seperti kalangan pejuang politik, pemerintah, TNI, Polri ataupun kalangan LSM.
- Mencari jalan keluar: Unsur ini coba terus dikembangkan saat situasi mengalami kebuntuan akibat insiden kekerasan yang terjadi selama tahun 2001. Unsur ini tidak mudah dijalankan mengingat jalan damai selalu berarti keterlibatan semua pihak untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan, kesediaan berunding, mencapai kata sepakat, dan melaksanakannya. Tidak jarang hukum formal terpaksa agak diparkir sejenak demi

kepentingan yang lebih besar, yakni menghindari jatuhnya korban.

Pertanyaannya adalah apakah peran mediasi kalangan agama hanya terbatas pada kalangan Kristen dan Islam atau dapat diperluas kepada kalangan agama-agama lain seperti Hindu, Budha, dan Konghucu? Lebih lanjut apakah peran mediasi kalangan agama memang seluruhnya berhasil? Jika ditilik lebih dekat, seperti saat melakukan perundingan di Wasior, kalangan agama mengalami kebuntuan karena tidak mempertahankan kenetralan dengan meminta pendapat dari Kodam XVII/ Trikora mengenai pembentukan Tim Investigasi untuk Kasus Wasior. Padahal mereka wajib berurusan dengan Polda karena kasus tersebut menyangkut gangguan ketentraman masyarakat. Kegagalan menjalankan misi mediasi itu lebih karena mereka terlalu mengedepankan kepentingan korban.

Kalangan agama sendiri kiranya perlu mengembangkan ketrampilan untuk mengembangkan metode penanganan konflik dengan cara menjadi mediator yang efektif. Pengalaman yang berharga tersebut perlu diolah dan direfleksikan. Mereka tidak bisa lagi bersandar semata-mata pada kharisma dan kebijakan spontan. Perlu dipikirkan kerangka penanganan masalah yang bersifat jangka panjang yang mampu mengantisipasi berkembangnya konflik di Papua. Pembentukan lembaga khusus di bawah gereja yang mengikuti perkembangan sosial-politik di Papua merupakan langkah awal konkret. Pertanyaan berikutnya adalah apakah sejumlah lembaga di bawah naungan gereja dapat diandalkan secara teknis-profesional dalam melayani perkembangan masyarakat? Apakah lembaga yang didirikan di bawah lembaga-lembaga agama untuk menangani masalah keadilan mampu bekerja maksimal dan memiliki identitas tersendiri ketika berhadapan dengan kalangan LSM dengan pekerjaan yang sama?

Satu hal lain yang makin menonjol dari peran agamawan, terutama gereja-gereja, adalah keterlibatan sejumlah tokoh agama dan penyerapan simbol-simbol kekristenan dalam gerakan aspirasi M. Hampir dalam setiap ungkapan aspirasi M, simbol-simbol kekristenan seperti ayat-ayat Alkitab, lagu-lagu, salib, menjadi bagian tak terpisahkan. Jika ditempatkan dalam konteks Indonesia

secara umum, kecenderungan ini kiranya mengikuti gaya yang sedang laku dalam pentas politik Indonesia yang menyerap simbol-simbol agama dalam pertarungan politis guna merebut basis massa. Dalam konteks Papua, kiranya gaya ini patut dicermati dan direfleksikan oleh kalangan gereja-gereja jika hendak mempertahankan fungsi mediasi yang netral. Selain itu, risiko lain yang sudah terjadi di bagian lain di Indonesia adalah sektarianisme. Jika kalangan gereja-gereja di Papua hendak membangun "Papua Tanah Damai" kiranya perpecahan melalui pintu sektarianisme perlu dijaga secara ketat.

9. Komunitas internasional

Selama tahun 2001, komunitas internasional mendapatkan banyak informasi mengenai keadaan hak asasi manusia di Papua berkat berbagai upaya lobi kalangan LSM maupun kalangan agama dan tentu saja PDP. Meski demikian, perhatian komunitas internasional umumnya bersifat kasuistik dan terbatas pada kasus-kasus hak-hak sipil-politik dan kurang memberikan perhatian pada kasus-kasus HAM seperti Abepura.

Perhatian dunia dapat dipilah-pilah dalam beberapa kelompok, yakni kelompok LSM atau Ornop (di dalamnya termasuk kelompok-kelompok gereja), kelompok negara, kelompok regio negara-negara, dan badan dunia di bawah PBB seperti Komisi HAM PBB. Kelompok LSM atau Ornop kiranya merupakan kelompok yang telah lama memberikan perhatian pada keadaan masyarakat di Papua entah melalui cabangnya atau melalui perhatian khusus lainnya. Pada tahun 2001, Human Rights Watch memberikan perhatian khusus terhadap kasus Abepura 2000 dengan kunjungan ke Papua. Dewan Gereja Sedunia juga memberikan perhatian terhadap masalah hak asasi manusia di Papua khususnya saat dilangsungkan sidang Komisi HAM PBB di Geneva. Sebenarnya kalangan LSM internasional juga memberikan pendampingan di bidang kesehatan dan pendidikan tetapi kurang diliput oleh media. Perhatian mereka amat berarti bagi masyarakat di pedalaman dan telah berlangsung lama seperti halnya WVI (*World Vision Indonesia*) dan MSF (*Medicine Sans Frontier*) yang memiliki cabang di Wamena. Di bidang lingkungan hidup keberadaan CI (*Conservation Internasional*) dan WWF (*World Wildlife Fund*) juga merupakan bentuk perhatian kalangan LSM

Internasional terhadap keadaan masyarakat di Papua.

Di tingkat forum kerjasama regional , tercatat bahwa Uni Eropa, Forum Pasifik, banyak memberikan taggapan terhadap keadaan di Papua seperti halnya kasus pembunuhan Theys H. Eluay. Forum Negara Pasifik cukup membuat pusing Indonesia karena memberikan simpati kepada perjuangan politik rakyat Papua yang menuntut pengembalian kedaulatan meski secara resmi mendukung kedaulatan Indonesia. Vanuatu dan Nauru bahkan mendukung usaha perjuangan tersebut dengan mengeluarkan pernyataan resmi kepada PBB yang meminta agar majelis umum PBB meninjau kembali pelaksanaan PEPERA 1969. Selain Vanuatu, negara yang sering memberikan sorotan terhadap keadaan hak asasi manusia di Papua adalah Amerika Serikat. Dalam laporan tahunan Amerika[18], Papua banyak mendapat sorotan khususnya dalam kerangka penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Badan PBB yang juga turut memberikan perhatian di Papua adalah UNICEF melalui kantor cabangnya di Jayapura, OCHA, dan UNHCR. Perhatian ketiga badan dunia itu berbeda baik dalam bobot maupun tingkat keterlibatannya. UNICEF banyak bergerak bersama sejumlah LSM untuk menangani pelaksanaan pendidikan yang tersendat-sendat akibat konflik seperti di Lembah Baliem. OCHA untuk sementara lebih banyak bergerak pada tingkat pemantauan. UNHCR terlibat dalam pemulangan pengungsi Papua dari PNG ke sejumlah lokasi asal mereka. Dalam hal itu mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah dan keuskupan-keuskupan di perbatasan kedua negara. Adapun peran Komisi HAM PBB terhadap masalah Papua sendiri amat terbatas. Badan tersebut tidak memiliki kantor di Indonesia sehingga lebih berperan sebagai semacam penampung berbagai macam usulan saat sidang tahunan dilangsungkan hal mana perkara Papua bersaing keras dengan seribu satu perkara hak asasi manusia di dunia ini.

Perhatian komunitas internasional ditanggapi beragam oleh khalayak ramai di Papua. Terhadap bantuan-bantuan kemanusiaan berupa sembako, umumnya masyarakat menghargai dan merasa tertolong. Terhadap tanggapan-tanggapan mengenai keadaan sosio-

---

[18] United States Departement of State, Country Report on Human Rights Practises in Indonesia-2001, March 4, 2002.

politis di Papua, tidak jarang masyarakat Papua berpikir bahwa dunia internasional betul-betul dapat diandalkan. Pemahaman ini tak jarang merupakan akibat informasi yang kabur. Sudah tersebar di kalangan rakyat bahwa 'masalah Papua sudah ada di PBB', 'masalah HAM sudah dilaporkan di Komisi HAM PBB', atau 'dunia internasional sudah mendukung masalah Papua', padahal kenyataannya tidaklah demikian. Tidak ada pihak yang secara jujur membuka tabir kenyataan bahwa dunia internasional bukanlah pihak pertama dan terutama yang mempertaruhkan segalanya guna memecahkan segala masalah di Tanah Papua dan demi rakyat Papua.

***

Bagian 4

MENYELAMI FAKTA, MERAJUT MASA DEPAN

DALAM bagian-bagian terdahulu di buku ini, telah diuraikan berbagai pengalaman, pikiran dan perasaan masyarakat Papua sepanjang tahun 2001. Uraian-uraian tersebut setidaknya menggambarkan peran sejumlah komponen dalam mewujudkan perubahan di Tanah Papua baik secara langsung maupun tidak langsung. Komponen-komponen yang dimaksud terdiri atas pemerintah pusat dan daerah, kalangan agama, adat, pejuang politik, LSM, pemuda, TNI dan POLRI. Para pelaku ekonomi turut pula mempengaruhi dinamika kemasyarakatan di Papua, khususnya mereka yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam. Aktivitas bisnis mereka berlangsung di dalam kesenjangan antara sistem hukum negara yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan pola kepemilikan ulayat yang dianut oleh komunitas adat di Papua.

KEKOSONGAN KEPEMIMPINAN

Sepanjang tahun 2001 masyarakat Papua, tidak ubahnya kawanan domba tak bergembala. Mereka tidak memiliki pemimpin-pemimpin yang bekerja efektif dan dapat dipercaya. Wakil masyarakat yang bertugas menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat tidak melakukan koordinasi dengan baik, membuat permasalahan di Papua tak juga terselesaikan. Tidak dapat disangkal bahwa selama tahun 2001 terdapat upaya-upaya dari pelbagai instansi untuk mengarahkan masyarakat. Baik dari kalangan LSM, agama maupun pemerintahan muncul suara-suara

prihatin dan ada pula pihak-pihak yang mencoba untuk memberikan arah bagi kehidupan di Papua. Namun demikian, upaya-upaya tersebut belum memadai untuk mengatasi krisis kepemimpinan di Papua. Baik karena krisis kepemimpinan mapun karena kekacauan hukum, Papua dirongrong berbagai masalah yang sukar dicarikan penyelesaiannya. Penyanderaan, pembunuhan terhadap pemimpin gerakan pro kemerdekaan, dan merajalelanya korupsi hanyalah sedikit contoh dari banyak masalah itu. Masyarakat seolah-olah dibiarkan menjalani hidup tanpa arah dengan kemarahan yang terpendam, yang mungkin saja meledak sewaktu-waktu dalam bentuk kekerasan massal.

Dampaknya pada masyarakat

Masyarakat yang frustrasi merindukan pemimpin yang mampu mengarahkan mereka ke luar dari kebuntuan. Frustrasi masyarakat Papua bisa disaksikan dari antara tingginya angka konsumen minuman keras dewasa ini, serta tindak kriminal yang mengikutinya atau dari sarkasme masyarakat setiap kali membicarakan kondisi wilayah mereka yang sebenarnya mereka cintai.

Dari frustrasi, masyarakat bisa menjadi apatis. Bila semua orang telah bersikap masa bodoh, bila tidak ada lagi yang bersikap kritis, Papua akan semakin terpuruk.

Pertanyaan kunci

Dengan kekosongan kepemimpinan sebagaimana dinyatakan di atas, siapa yang akhirnya mengendalikan Papua pada kurun waktu yang tak menguntungkan ini? Pertanyaan ini perlu diajukan agar menjadi salah satu butir refleksi bagi masyarakat Papua.

Kekosongan kepemimpinan dan kekuasaan yang semu

Krisis kepemimpinan berdampak pada serangkaian hal yang tidak diinginkan seperti dapat dilihat pada contoh-contoh berikut ini:

- Militer melihat peluang untuk mengendalikan keadaan dengan cara-cara yang hanya menguntungkan pihaknya. Walau tidak selalu sangat kentara, aparat keamanan turut mempengaruhi kebijaksanaan yang diterapkan di Papua. Hal ini berulang kali menjadi perhatian dan keberatan kalangan LSM dan pemuka

agama yang kemudian membuat aparat keamanan mengendurkan dominasinya. Namun demikian, ada satu hal yang sukar diatasi meski telah diajukan keberatan, yaitu kenyataan, bahwa aparat keamanan mempunyai kekebalan hukum (*impunity*). Dalam banyak kasus pelanggaran hukum di Papua yang melibatkan aparat keamanan, masyarakat tidak pernah berhasil membuktikannya. Sia-sia saja bila masyarakat berharap kasus pelanggaran hukum di Wamena, Merauke atau Wasior bisa dituntaskan dengan adil. Kasus pembunuhan Theys yang diakui pemerintah melibatkan anggota Kopassus belum terselesaikan hingga saat buku ini ditulis. Proses peradilan militer yang dijanjikan tidak kunjung mendatangkan hasil. Komandan Kopassus Tribuana X, Letkol Inf. Hartomo berkata pada. 28 Oktober 2001 atau sekitar 10 hari menjelang pembunuhan Theys, "Kopassus yang bertugas di Papua bukanlah pasukan yang harus ditakuti, sebab kehadiran pasukan khusus ini di Papua adalah untuk menjaga keamanan masyarakat bersama kesatuan-kesatuan lainnya. Dengan demikian Kopassus dimiliki juga oleh seluruh masyarakat, karena kesatuan ini lahir dari berada dalam masyarakat sendiri." Kelak terbukti, kata-katanya hanyalah retorika semu. Selain itu, sistem pemerintahan yang berwatak militeristik seperti di Papua membuktikan kemandekan penegakan hukum. Banyak kasus yang melibatkan pejabat lokal yang dipetieskan.

- Krisis kepemimpinan juga mendorong golongan-golongan tertentu untuk bermain di air keruh. Mereka bisa dengan mudah mengarahkan masyarakat Papua untuk masuk ke dalam rimba konflik yang menyesatkan. Kelompok-kelompok pencipta konflik ada di Maluku, Poso, Sambas dan di wilayah-wilayah lain di tanah air. Di Papua ada Laskar Jihad, Barisan Merah-Putih, Soranda[1] dan kelompok sejenis lain yang memulai aktivitas politik mereka dengan menyebarkan isu yang meresahkan masyarakat dan kemudian menimbulkan perasaan saling curiga yang akhirnya merusak relasi sosial antar masyarakat. Kemungkinan terburuk

[1] SORANDA merupakan sebuah gerakan politik di Papua yang dipimpin oleh Karel Waromi. Gerakan ini memakai bendera khusus (Bintang Bulan) yang membuat orang percaya bahwa organisasinya berhubungan erat dengan sebuah organisasi internasional, yakni ILO.

yang diakibatkan oleh kelompok-kelompok ini adalah jatuhnya masyarakat Papua ke dalam perselisihan terbuka.
Kekosongan kepemimpinan juga melahirkan wakil-wakil rakyat yang senang menonjolkan diri supaya dapat menguatkan posisi politis mereka. Padahal mereka biasanya tidak memahami kelompok yang mereka wakili. Akar masalah yang sama dapat pula menyuburkan kelompok-kelompok garis keras yang berangsur-angsur mengalihkan perhatian masyarakat ke pemecahan masalah yang diwarnai kekerasan ketimbang yang mengedepankan perdamaian. Dialog damai yang selama ini didambakan baik oleh pelopor gerakan aspirasi "M" maupun oleh komponen masyarakat lain bisa tinggal impian saja.

- Wakil-wakil rakyat yang tidak representatif hanya akan membuat praktek-praktek KKN merajalela. Maka sejumlah besar dana untuk pembangunan di Papua hanya akan dikucurkan untuk segelintir orang di Papua, sedangkan mayoritas masyarakat Papua tetap hidup dalam ketidakberdayaan.

Kedudukan Otonomi Khusus

Dalam kondisi yang sedemikian buruk, tawaran Otonomi Khusus atau dipendekkan menjadi otsus bagi rakyat Papua hampir tidak berdaya menembus kebekuan masyarakat. Tawaran itu ditolak begitu saja tanpa permenungan yang mendalam. Mengingat melimpahnya persediaan dana pembangunan untuk Papua dalam era otsus, praktek KKN mungkin akan makin subur. Pemberlakuan otonomi sebenarnya membuka banyak peluang untuk memperbaiki keadaan Papua sepanjang peluang-peluang itu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan seadil-adilnya.

JAWABAN-JAWABAN TENTATIF

Terlepas dari frustasi yang melanda masyarakat Papua, muncul keinginan masyarakat untuk terbebas dari kekerasan serta lepas dari tarik-menarik kepentingan. Keinginan itu terlontar dalam gerakan yang dengan gencar mencoba mendefinisikan kembali perjalanan

masyarakat Papua. Gerakan ini berusaha melakukan penggalian kekuatan suku-suku adat di Papua dan menciptakan "Papua Tanah Damai".[2]

Gerakan Kembali ke Adat

Keinginan masyarakat untuk mencari sebuah pegangan dengan melihat warisan adat para prinsipnya baik dan perlu. Namun demikian pencarian semacam ini bisa jadi berbahaya jika hanya sebatas gerakan nostalgia dan bukannya visioner. Tindakan nostalgis berpotensi menggiring masyarakat kembali ke fase tidak berdaya dalam menghadapi berbagai kesulitan yang tengah melanda Papua dewasa ini. Lebih lanjut kreasi masyarakat menjadi macet sehingga menjadi makin sulit bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar sekalipun.

Gerakan kembali ke adat perlu disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan dan informasi. Maka nilai-nilai adat perlu dipahami dalam perspektif baru tanpa harus meninggalkannya sama sekali. Inilah tantangan besar bagi masyarakat Papua.

Terwujudnya Papua Tanah Damai

Konflik berkelanjutan sebagaimana diuraikan dalam buku ini sesungguhnya dapat dicegah jika pihak-pihak yang terlibat mau duduk bersama dengan tenang dan damai dalam semangat keterbukaan. Pada prinsipnya setiap orang ingin hidup damai dan karenanya perlu diarahkan untuk mencintai budaya damai.

Membangun budaya damai itu membutuhkan *political will* pemerintah. Niat yang baik ini pasti dianggap sebagai ancaman oleh kelompok-kelopmpok yang memiliki keuntungan tertentu dari konflik. Tugas berat mewujudkan Papua yang damai akan menjadi semakin berat bila pemerintah dan masyarakat mengira hanya kekerasan yang harus dihilangkan dari Papua. Budaya damai hanya akan terwujud bila masyarakat juga sejahtera, berpartisipasi dalam

---

[2] Kami lebih suka memakai istilah Tanah Damai daripada istilah Zona Damai, mengingat istilah Zona Damai berkaitan erat dengan kamus perang, dan mengingat kita tidak berbicara mengenai sebuah wilayah geografis yang terbatas atau zona, namun mengenai wilayah Papua yang menyeluruh. Menciptakan Papua Tanah Damai merupakan suatu sarana menuju pembebasan dari segala bentuk penindasan, dan sekaligus merupakan kondisi mutlak yang memungkinkan suatu penyelesaian permasalahan tanpa kekerasan. Maka, Papua Tanah Damai adalah sebuah kondisi kemasyarakatan dan bukan sebuah medan geografis yang bebas kekerasan di tengah-tengah zona-zona perang.

sosial yang sesungguhnya selama ini mendera hidup mereka. Pengetahuan ini dapat membantu masyarakat untuk mempunyai pegangan. Hanya dengan demikian masyarakat bisa terhindar dari isu-isu yang sengaja dikembangkan untuk mengalihkan arah konflik menjadi bersifat SARA. Akar permasalahan yang ada di Papua adalah struktural, melibatkan pemerintah dan masyarakat Papua. Permasalahan struktural ini kadang tampak sebagai konflik horizontal, antar warga masyarakat Papua sendiri, maupun antara warga Papua dengan warga non-Papua yang hidup di tanah ini. Sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah niat kelompok-kelompok yang bertujuan memicu kekacauan.

Dengan mencatat beberapa saran ini kami mengakhiri refleksi kami atas perkembangan di Papua sepanjang tahun 2001. Seperti masyarakat Papua, kami berharap tahun 2002 akan membawa perkembangan yang lebih baik.

***

Lampiran 1

PERNYATAAN SIKAP PDP
Tanggal 27 November 2001

1. Menegaskan kembali bahwa seluruh rakyat Papua mengutuk perbuatan biadab penculikan dan pembunuhan terhadap Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay. Peristiwa ini adalah suatu kejahatan kekuasaan untuk menghabiskan lawan-lawan politik, karena dilakukan oleh satuan orang – orang terlatih, profesional serta berdasarkan komando yang terencana.
2. Demi keadilan dan harkat kemanusiaan rakyat Papua, Presidium Dewan Papua mendesak kepolisian Republik Indonesia untuk secara terbuka dan jujur mengusut tuntas tanpa peduli siapa pun pelakuknya, dari satuan nama termasuk *policy* yang mendasari perbuatan biadab ini. Mengingat determinasi kasus ini sudah sangat jelas di masyarakat, dan demi menghindari berbagai spekulasi ataupun konspirasi kekuatan, maka selayaknya Polisi Republik Indonesia segera mengumumkan hasil investigasi, sebelum hari Hak Asasi Manusia sedunia, 10 Desember 2001. Rakyat Papua terus menggalang solidaritas maupun dukungan moril bagi aparat kepolisian serta senantiasa mendoakan tugas mulia dan amanah yang dijalankan dengan jujur dan bersungguh-sungguh.
3. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Papua untuk segera menggelar sidang khusus (sesuai pernyataan sikap bersama DPRD dan PDP tanggal 12 November 2001) guna menetapkan: [a] jaminan hak hidup bagi seluruh rakyat Papua, dan seluruh penduduk sipil di tanah Papua; [b] membentuk tim investigasi yang bersifat independen (nasional dan internasional) untuk mengusut tuntas aksi-aksi teror pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan terhadap kemanusiaan di tanah Papua;

[c] merekomendasikan dilaksanakannya suatu dialog nasional bagi pelurusan sejarah Papua dalam kerangka solusi damai yang menyeluruh bagi penyelesaian sengketa politik tanah Papua.

4. Mendesak kembali bahwa isu-isu spekulatif yang menganggap penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay dilakukan oleh fraksi garis keras (TPN/OPM) atau oleh orang-orang Presidium Dewan Papua, adalah fitnah keji yang bertujuan membakar konflik horisontal antara sesama orang Papua. Tuduhan semacam ini sejak dulu merupakan politik provokatif untuk mengadu domba sesama rakyat Papua. Kepada seluruh komponen masyarakat Papua, termasuk para pejuang TPN/OPM diserukan untuk menghindari usaha-usaha pembusukan serta *divide et impera* yang pada gilirannya hanya akan melumpuhkan semangat nasionalisme bangsa Papua.
5. Presidium Dewan Papua memaklumkan kepada seluruh komponen rakyat Papua untuk terus berjuang menjaga dan melindungi keselamatan serta kehormatan diri, martabat bangsa Papua, beserta seluruh aset sumber daya alam. Untuk itu seluruh komponen harus meningkatkan komunikasi, saling memahami dan mendorong proses dialog serta kerjasama konstruktif, terutama demi menciptakan tanah Papua sebagai negeri yang aman dan damai yang berbasis pada prinsip dasar bahwa tanah Papua adalah zona damai yang bebas dari keserakahan dan kekerasan.

   Untuk itu, Presidium Dewan Papua menyerukan kepada seluruh pimpinan agama dan pimpinan adat di seluruh tanah Papua untuk menyatukan hati seraya memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Agung dalam satu acara doa bersama.
6. Menanggapi rencana pemerintah mengkosentrasikan 50 batalyon gabungan TNI dan Polri di Aceh dan Papua, Presidium Dewan Papua mendesak Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menjelaskan secara terbuka: ada rencana operasi militer apa yang hendak dilancarkan di tanah Papua? Sesuatu penyelesaian secara damai hendaknya tidak dilakukan dengan mengerahkan pasukan, tetapi dengan kearifan hati nurani dan sikap kenegarawanan untuk membuka suatu proses dialog politik yang setara, demokratis, jujur, dan bermartabat.

   Kepada seluruh masyarakat Papua diserukan untuk bersiap-siap

menghadapi keadaan terburuk dalam sejarah kemanusiaan di tanah Papua, karena 50 batalion gabungan merupakan suatu jumlah terbesar dalam sejarah kemiliteran di Indonesia (lebih dari 40% total personil TNI-Polri) .

7. Demi mempertahankan hak hidup dan martabat kemanusiaan rakyat bangsa Papua, maka Presidium Dewan Papua memohon perlindungan internasional (termasuk intervensi pasukan keamanan dan perdamaian). Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara anggota-anggota PBB yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, atas nama seluruh rakyat Papua kami mohon, "Dengarlah suara kami anak-anak ciptaan Tuhan yang sejak 40 tahun lalu dibantai, hingga kini masih terus dibunuh, termasuk yang akan dibantai lagi dihari-hari mendatang setelah pemerintah Indonesia melakukan mobilisasi 50 batalyon gabungan TNI-Polri".

Presidium Dewan Papua

Moderator — Sekjen

Pdt. Herman Awom, S.Th. — Thaha M. Alhamid

Lampiran 2

RANGKUMAN PERUBAHAN RUU OTONOMI KHUSUS

Bagian	Tema	RUU	UU	Perubahan	Komentar
Konsiderans	Identitas budaya	Ay. e	Ay. e	Isi[1]	Substansial
	Kebijakan	Ay. f	Ay. f	Isi[2]	Diperlemah
	pembangunan				
	Kebijakan khusus	Ay. h	Ay. h	Isi[3]	Membatasi
	Nama	Bab II, 2	Ay. k	Isi[4]	Redaksional
Rujukan		5 buah	15 buah	Isi[5]	Tambahan
		rujukan	rujukan		
Bab I	Ketentuan Umum	Ay. a	Ay. a	Isi[6]	Membatasi
		Ay. g	Ay. h	Isi[7]	Membatasi
		Ay. s	Ay. t	Isi[8]	Perluasan

---

[1] Naskah awal menegaskan bahwa kebudayaan Papua berakar dari pola budaya Melanesia dan karenanya berbeda dengan bagian terbesar jatidiri kultural masyarakat Indonesia. Naskah akhir menegaskan pertama-tama rakyat Papua adalah bagian dari masyarakat asli Indonesia sebelum akhirnya mengakui bahwa ada perbedaan budaya, bahasa, tradisi, dan sejarah.

[2] Ada perbedaan tipis dalam penafsiran: pada naskah awal menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan belum memuaskan rakyat Papua dalam sejumlah aspek, dalam naskah akhir pernyataan tersebut diperlemah dengan tambahan belum sepenuhnya .

[3] Naskah awal menyebutkan : rakyat Papua hendaknya memiliki pemerintahan sendiri; naskah akhir menetapkan batasan yang jelas dengan menyebutkan kebijakan khusus diperlukan dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia .

[4] Naskah akhir menambahkan satu pasal sebagai berikut bahwa perkembangan situasi dan kondisi daerah Irian Jaya, khususnya menyangkut aspirasi masyarakat menghendaki pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua sebagaimana tertuang dalam keputusan DPRD Irian Jaya .

[5] Dalam bagian mengingat , sejumlah keputusan pemerintah disebutkan. Dalam naskah awal terdapat 5 rujukan, sedangkan dalam naskah akhir terdapat 15. Naskah awal terbatas pada rujukan UUD 1945 dan sejumlah TAP MPR sejak 1998; sedangkan dalam naskah akhir daftar rujukan ketetapan dibentangkan sejak tahun 1962 selain rujukan ke UUD 1945.

[6] Naskah awal menyebutkan bahwa otonomi khusus diberikan kepada Propinsi Papua, sedangkan naskah akhir menyebutkan hal yang sama tetapi dengan tambahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia .

[7] Ayat ini membahas persoalan bendera, lagu kebangsaan, dan lambang tersendiri (burung Mambruk sebagai pengganti burung Garuda). Jika pada naskah awal disebutkan bahwa tiga unsur tersebut sebagai ungkapan jatidiri rakyat Papua , naskah akhir menilainya sebagai simbol-simbol kultural dan secara tegas menolaknya sebagai simbol kedaulatan .

[8] Dalam ayat ini didefinisikan siapa yang dimaksudkan orang asli Papua . Dalam naskah akhir definisi tersebut diperluas : Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang *terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.* (bagian cetak miring adalah tambahan dalam naskah akhir)

Bagian	Tema	RUU	UU	Perubahan	Komentar
Bab II	Lambang-lambang	Tidak ada	Ay. 2.1.	Isi[9]	Substansial
		Ps. 2,2	Ps. 2,2.	Isi[10]	Membatasi
Bab III	Pembagian daerah	Ps. 5,4	Ps. 3,4	Isi[11]	Membatasi
Bab IV	Kewenangan Daerah	Ps. 6,1	Ps. 4,1	Isi[12]	Membatasi
		Ps. 6,4	Ps. 4,8	Isi[13]	Membatasi
Bab V	Bentuk dan susunan pemerintahan	Ps. 8,1	Ps. 5,1; 6,1; & 20	Isi[14]	Substansial
		Tidak ada	Ps. 10, 14, & 23	Isi[15]	Substansial
Bab VI	Perangkat dan kepegawaian				
Bab VII	Partai politik				
Bab VIII	Peraturan Daerah khusus				
Bab IX	Keuangan	Ps. 32,2	Ps. 34	Isi[16]	Dirincikan

---

[9] Dalam naskah akhir pasal ini ditambah dengan: Provinsi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Sang Merah Putih sebagai Bendera Negara dan Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan .

[10] Kedua naskah mengakui hak untuk menggunakan simbol-simbol setempat (bendera dan lagu kebangsaan) tetapi dalam naskah akhir penggunaan simbol-simbol ini secara tegas digolongkan sebagai ungkapan kultural dan tidak dapat digunakan sebagai simbol-simbol kedaulatan . Dalam naskah akhir penggunaan burung Mambruk sebagai lambang daerah dihilangkan.

[11] Dalam kaitan dengan berbagai perubahan, susunan baru atau pemekaran wilayah dalam jenjang provinsi, naskah awal menyebutkan bahwa kewenangan untuk mengatur hal tersebut ada dalam tangan pemerintah provinsi. Tetapi naskah akhir mengubah kewenangan tersebut menjadi *hak untuk mengusulkan perubahan tersebut kepada* pemerintah pusat yang menentukan keputusan akhir.

[12] Naskah akhir menambah pengecualian bidang-bidang yang diserahkan kepada kewenangan daerah daripada yang diatur dalam naskah awal; pengecualian yang ditambahkan adalah urusan keagamaan.

[13] Naskah awal menyebutkan peran penentu di pihak parlemen dan gubernur dalam penempatan pasukan TNI, sementara naskah akhir mengurangi peran tersebut menjadi fungsi koordinasi dengan pemerintah pusat.

[14] Meskipun naskah awal mendudukan MRP (Majelis Rakyat Papua yang anggotanya terdiri dari pemimpin adat dan perwakilan kelompok kepentingan) sebagai *bagian dari lembaga legislatif*, naskah akhir membatasi lembaga legislatif hanya dalam bentuk DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua). Berdasarkan perubahan kedudukan yang bersifat mendasar ini, banyak bagian dalam naskah awal diubah sehingga akhirnya digariskan perbedaan antara kedudukan penentu kebijakan (DPRP) dan kedudukan penasihat (MRP). Namun demikian MRP diberi kewenangan untuk setuju atau menolak keputusan yang diambil oleh DPRP (pasal 20). Dengan demikian, kedudukan MRP yang sesungguhnya kabur. Tetapi perlu dicatat bahwa konsep parlemen dua kamar yang diajukan oleh naskah awal lenyap dalam naskah akhir.

[15] Dalam naskah akhir sebuah pasal ditambahkan berkaitan dengan kewajiban DPRP (pasal 10) dan MRP (pasal 23) yang menekankan kewajiban membela dan menjaga keutuhan NKRI ; dalam naskah awal tidak ada pasal yang menyatakan kewajiban semacam itu bagi DPRP. Tambahan serupa dikenakan pada kewajiban Gubernur (pasal 14).

[16] Dalam naskah awal, hasil dari sumber daya alam dicakup begitu saja tanpa perincian; naskah akhir merincikan: 80% dari hasil hutan, 80% dari hasil perikanan, 80% dari hasil tambang umum (barangkali juga mencakup tambang Freeport dan sejenisnya?), sementara 70% dari minyak bumi dan 70% dari gas alam. 70% pendapatan dari minyak bumi dan gas alam harus dibelanjakan (sekurang-kurangnya 30%) untuk pendidikan dan sebagian (sekurang-kurangnya 15%) untuk bidang kesehatan. Sesudah 25 tahun hasil pendapatan dari minyak bumi dan gas alam akan dikurangi menjadi 50%.

Bagian	Tema	RUU	UU	Perubahan	Komentar
Bab X	Perekonomian	Ps. 36,1	Ps. 39	Isi[17]	Membatasi
Bab XI	Perlindungan hak-hak masyarakat	Ps. 39	Ps. 43	Isi[18]	Membatasi
Bab XII	Hak asasi manusia	Ps. 41	Ps. 45	Isi[19]	Membatasi
		Ps. 42	Tidak ada	Perincian[20]	Diabaikan
		Ps. 43	Ps. 46	Isi[21]	Membatasi
Bab XIII	Kepolisian daerah	Ps. 47	Ps. 48, 49	Isi[22]	Substansial
Bab XIV	Kekuasaan Peradilan	Ps. 45	Ps. 51	Isi[23]	Membatasi
Bab XV	Keagamaan				
Bab XVI	Pendidikan dan kebudayaan				

---

[17] Dalam naskah awal dituntut agar bahan mentah hendaknya diolah secara lengkap di Papua; dalam naskah akhir tuntutan ini diperlemah dengan menjadikan proses pengolahan bergantung pada prinsip ekonomi yang efisien dan berdaya saing.

[18] Kedua naskah mengakui hak-hak ulayat seperti menyangkut tanah dan segala peruntukan lahan harus didasarkan pada perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak. Tetapi naskah akhir menetapkan dengan sangat jelas bahwa hak ulayat berada di bawah undang-undang dan peraturan negara. Dengan demikian, hal ini berlawanan dengan nada yang lebih tajam dalam naskah awal yang mengklaim pengakuan atas hak ulayat atas tanah, air dan segala kekayaannya secara hampir mutlak.

[19] Kedua naskah mendesak pembentukan komisi khusus Hak Asasi Manusia. Perbedaannya terletak pada status resminya (dan karenanya kewenangannya) yang ingin diraih. Dalam naskah awal dituntut sebuah komisi yang bersifat mandiri di Papua sementara dalam naskah akhir disetujui sebuah komisi yang menjadi *cabang* dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam naskah akhir komisi yang dimaksudkan dibentuk oleh pemerintah pusat dan bukan oleh pemerintah provinsi (seperti dirumuskan dalam naskah awal).

[20] Dalam naskah awal pasal khusus disisipkan mengenai kompensasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau (sejak 1 Mei 1963); aspek ini dihilangkan dalam naskah akhir

[21] Pasal ini bicara mengenai masalah yang amat sarat dengan muatan politik, yakni pelurusan sejarah. Dalam naskah awal, Komisi Pelurusan Sejarah Papua dituntut supaya berada dalam kewenangan sepenuhnya pemerintah Papua. Dalam naskah akhir, disetujui adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk oleh pemerintah pusat sesudah berunding dengan Gubernur Papua. Selain berada di bawah kekuasaan yang berbeda, rumusan (naskah akhir) tugas utama komisi : (1) melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (2) merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi . Dalam naskah awal tugas komisi pelurusan sejarah memang tidak disebutkan secara tegas tetapi keinginan untuk membentuk komisi tersebut merupakan bagian dari mencari penyelesaian akhir yang menyeluruh berkaitan dengan perbedaan pendapat mengenai sejarah integrasi Papua dengan Indonesia .

[22] Jika membandingkan dua naskah, terdapat perbedaan sangat mencolok mengenai kepolisian daerah, yakni dalam naskah awal dituntut agar polisi daerah berada di bawah kekuasaan pemerintah daerah, sedangkan dalam naskah akhir disetujui bahwa polisi daerah merupakan bagian integral dari kepolisian republik indonesia.

[23] Dalam kedua naskah peran Pengadilan Adat diakui. Dalam naskah awal kewenangan pengadilan adat berada di bawah pengadilan negara sejauh keputusannya melanggar hak asasi manusia. Dalam naskah akhir fungsi pengadilan adat disetujui tetapi dapat diambil alih oleh pengadilan negeri jika dalam suatu perkara salah satu pihak yang bertikai memilih pemeriksaan ulang dalam pengadilan negeri.

Bagian	Tema	RUU	UU	Perubahan	Komentar
Bab XVII	Kesehatan				
Bab XVIII	Kependudukan dan ketenagakerjaan	Ps. 55	Ps. 61	Isi[24]	Substansial
Bab XIX	Pembangunan dan Lingkungan hidup				
Bab XX	Sosial				
Bab XXI	Pengawasan	Tidak ada	Ps. 68	Isi[25]	Substansial
Bab XXII	Kerjasama dan penyelesaian perselisihan				
Bab XXIII	Ketentuan peralihan	Ps. 68	Ps. 75	Isi[26]	Membatasi
		Ps. 69	Tidak ada	Isi[27]	Penghilangan
Bab XXIV	Ketentuan penutup	Ps. 70	Ps. 76	Isi[28]	Substansial
		Tidak ada	Ps. 78	Isi[29]	Tambahan
		Ps. 74, 75	Tidak ada	Isi[30]	Penghilangan

---

[24] Dalam kebijakan pendudukan dalam naskah awal dituntut untuk menghentikan program transmigrasi manapun; dalam naskah akhir transmigrasi tetap disetujui hanya saja perlu persetujuan dengan Gubernur.

[25] Kedua naskah membicarakan pengawasan atau kontrol sosial. Naskah awal membicarakannya dengan sangat umum sementara dalam naskah akhir terdapat pasal khusus yang dengan jelas mengatur hak pemerintah pusat untuk mengawasi segala keputusan, peraturan, dsb. yang ditetapkan di tingkat daerah. Bahkan penggunaan represi diperbolehkan bagi pemerintah pusat dalam hal ini (pasal 68 ayat2). Penggunaan kata represif dalam naskah akhir ini mengisyaratkan kekuasaan pemerintah pusat yang jauh mengatasi (termasuk kekuasaan untuk mengambil alih?).

[26] Pasal ini dalam kedua naskah menetapkan batas akhir bagi penerapan efektif UU Otonomi Khusus. Dalam naskah awal disarankan selama 5 tahun, sementara dalam naskah akhir ditetapkan 2 tahun setelah disetujui.

[27] Pasal dari naskah awal dihapuskan dalam naskah akhir. Pasal ini berkaitan dengan kerja Komisi Pelurusan Sejarah: Apabila hasil pelurusan sejarah sebagaimana dimaksud oleh Komisi Pelurusan Sejarah terbukti menunjukkan bahwa proses integrasi Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di waktu lalu tidak sesuai dengan hukum internasional mengenai hak penentuan nasib sendiri suatu bangsa, maka Pemerintah dan rakyat Papua melalui Parlemen Papua akan mengambil langkah-langkah penyelesaian .

[28] Kalau dalam naskah awal pemekaran wilayah ke dalam wilayah-wilayah baru ditolak, naskah akhir tetap memberikan ruang terbuka.

[29] Kalau dalam naskah awal penilaian periodik tidak disebutkan, naskah akhir justru menetapkan evaluasi tahunan penerapan UU Otonomi khusus, dan untuk pertama kalinya evaluasi dilakukan pada akhir tahun ketiga pelaksanaan UU tersebut.

[30] Kedua pasal dalam naskah awal merujuk pada kemungkinan penggunaan referendum. Referendum kiranya diberlakukan jika perubahan substansial dalam UU Otonomi Khusus atau UUD 1945 berdampak mendasar (pasal 74), dan dalam kejadian di mana UU Otonomi Khusus terbukti tidak diterapkan sebagaimana mestinya setelah 5 tahun, referendum hendaknya dibuat untuk menentukan sikap politik rakyat Papua (pasal 75). Kedua pasal tersebut hilang dari naskah akhir.

Lampiran 3

Presidium Dewan Papua
MANIFESTO RAKYAT PAPUA

Syukur bagi-Mu Tuhan

Rapat Pleno Khusus Dewan Papua yang dihadiri oleh Anggota Presidium Dewan Papua serta Ketua dan Sekretaris Panel Dewan Papua telah diselenggarakan pada Jumat dan Sabtu, 19 dan 20 Oktober 2001, bertempat di Hotel Mutiara, Kotaraja.

Fokus utama Rapat Pleno Khusus ditekankan pada: 1) Penilaian terhadap pelaksanaan mandat rakyat; 2) Makin meluasnya operasi militer maupun perlawanan bersenjata yang melahirkan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan di tanah Papua; 3) Hak-hak dasar rakyat Papua; 4) Kehendak pemerintah pusat mengenai Otonomi Khusus Papua; serta 5) Kebijakan strategis Dewan Papua mengenai agenda politik, konsolidasi dan agenda pelurusan sejarah.

Melalui Mubes Papua 2000 dan Kongres Papua II – 2000, rakyat Papua secara bermartabat telah memberikan mandat kepada Presidium Dewan Papua. Karena itu, Presidium Dewan Papua merupakan kendaraan politik rakyat Papua yang sah dan representatif untuk mewakili rakyat Papua di dalam maupun di luar negeri, dalam perjuangan menegakkan hak-hak dasar, termasuk hak sipil dan politik demi pengembalian hak dan kedaulatan politik bangsa Papua melalui cara-cara damai dengan mengedepankan dialog pelurusan sejarah di tingkat nasional maupun internasional.

Berpegang pada ketetapan-ketetapan dan resolusi Kongres Papua II – 2000, dan dengan memperhatikan realita kondisi konflik di tingkat lokal, nasional dan internasional, maka Dewan Papua, selaku institusi pemegang mandat rakyat Papua, secara resmi mengeluarkan manifesto Rakyat Papua, sebagai berikut :

1. Rakyat Papua menyatakan penghargaan yang tinggi dan rasa terima kasih yang tulus kepada pemimpin dan seluruh rakyat di negara-negara Forum Kepulauan Pasifik atas solidaritas dan dukungan bagi perjuangan pengembalian hak dan kedaulatan politik bangsa Papua. Bersamaan dengan itu, rakyat Papua mendesak pemerintah Kerajaan Belanda, pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Amerika Serikat serta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk secara jujur dan bertanggung jawab, meninjau kembali peran dan keterlibatannya dalam konspirasi politik atas status tanah Papua (Netherlands Neuw Guinea atau Irian Barat).
2. Tentara Pembebasan Nasional - Organisasi Papua Merdeka sebagai kekuatan pertahanan yang selama 35 tahun telah bergerilya di hutan-hutan demi memperjuangkan kemerdekaan Papua, dari hati nurani yang tulus rakyat di seluruh tanah Papua menaruh rasa hormat yang tinggi, seraya menyerukan penghentian konfrontasi bersenjata dan secara bersama-sama mendorong upaya-upaya damai melalui dialog politik dalam perjuangan mengembalikan hak dan kedaulatan politik bangsa Papua.
3. Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia sebagai kekuatan pertahanan nasional Indonesia, yang selama ini sudah terbiasa dan masih terus menggunakan pendekatan operasi militer yang represif, dari lubuk hati yang terdalam kami serukan untuk secara konsisten menghentikan operasi militer yang terbukti telah memakan ratusan ribu korban nyawa orang Papua. Tanah Papua bukan lagi Daerah Operasi Militer. Dengan paradigma baru TNI/Polri harus secara konsisten mengedepankan pendekatan-pendekatan yang manusiawi, menghormati keberadaan, harkat dan martabat manusia Papua berikut Hak-hak dasarnya, serta secara proaktif mendorong diselesaikannya sengketa politik Papua melalui dialog politik yang setara, adil dan demokratis.
4. Otonomi Khusus yang sepenuhnya merupakan kehendak pemerintah pusat setelah rakyat Papua menuntut pengembalian hak dan kedaulatan politiknya, sungguh- sungguh bukan merupakan suatu bentuk penyelesaian yang bersifat

komprehensif dan damai atas sengketa politik Papua. Sebagai suatu bentuk kontrak sosial politik, pemerintah pusat bukan saja telah mengabaikan aspirasi rakyat Papua, akan tetapi dengan arogansi kekuasaan, pemerintah telah bertindak menihilkan substansi permasalahan Papua yang sesungguhnya sambil terus menerus memaksakan kehendak naluri kekuasaan.
Peristiwa Otonomi Khusus Papua adalah suatu peristiwa di mana nasib rakyat Papua sekali lagi ditentukan oleh orang lain, sama persis seperti perjanjian New York 1962 maupun Penentuan Pendapat Rakyat 1969.
Terhadap tragedi politik ini, rakyat Papua mendesak pemerintah pusat, DPR, pemerintah daerah dan DPRD Propinsi Papua agar setiap pengambilan keputusan politik yang menyangkut hak dan nasib rakyat Papua harus dikembalikan kepada kehendak dan kedaulatan rakyat Papua.
Dengan ini, Dewan Papua atas nama rakyat Papua menyatakan dengan tegas: menolak Otonomi Khusus Papua dan secara konsisten akan terus melancarkan perjuangan damai dan demokratis bagi pengembalian hak dan kedaulatan bangsa Papua. Pembangunan adalah hak rakyat dan kewajiban pemerintah, yang harus dilaksanakan tanpa ditawar-tawar dengan aspirasi politik rakyat. Esensi perjuangan rakyat Papua sama sekali tidak menuntut Otonomi Khusus, tetapi menuntut digelarnya suatu dialog pelurusan sejarah Papua demi menegakkan kebenaran sejarah, kebenaran hukum dan kebenaran politik atas tanah dan bangsa Papua.

5. Rakyat Papua sangat menyesal terhadap keputusan pemerintah Republik Indonesia yang nyata-nyata telah menerapkan politik diskriminasi. Kepada rakyat Aceh, pemerintah pusat terus berusaha menawarkan dialog. Sedangkan kepada rakyat Papua pemerintah terus menolak penyelesaian damai melalui dialog. Walaupun kenyataannya, semenjak Mubes Papua 2000, Kongres Papua II –2000, sampai saat ini, rakyat Papua tetap setia menuntut dialog politik antara rakyat Papua dengan pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia harus secara tegas menjelaskan latar belakang serta alasan bagi penggunaan politik diskriminasi dalam penyelesaian sengketa politik di Aceh dan di Papua.

6. Rakyat Papua menilai bahwa penahanan dan proses persidangan terhadap Presidium maupun Panel Dewan Papua yang didakwa telah melakukan perbuatan makar, pada hakekatnya merupakan proses hukum yang sedang mengadili hati nurani seluruh rakyat Papua. Rakyat Papua mendukung upaya penegakan supremasi hukum, tetapi secara adil pemerintah Republik Indonesia harus berkemauan dan lebih arif mendorong penyelesaian masalah Papua melalui proses politik sejalan dengan proses hukum (menangkap, menahan dan mengadili) rakyat Papua.
7. Kepada seluruh rakyat Papua, diserukan untuk berjuang melawan berbagai bentuk provokasi dan usaha-usaha pembusukan internal maupun *devide et impera*, serta terus berusaha memperkuat persatuan rakyat dalam semangat nasionalisme bangsa Papua. Dalam kesadaran ini, Dewan Papua mendesak seluruh komponen untuk secara proaktif melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi yang bertumpu pada semangat satu bangsa - satu jiwa. Setiap orang Papua harus berusaha menahan diri dan menghindar dan kecenderungan untuk saling mendiskreditkan, karena perjuangan untuk mengembalikan hak dan kedaulatan potitik bangsa Papua adalah perjuangan murni berdasarkan suara hati nurani setiap anak negeri Papua.

Jayapura, 20 Oktober 2001
Atas nama rakyat Papua
PRESIDIUM DEWAN PAPUA
Ketua,

Theys Hiyo Eluay

Pdt. Herman Awom, S.Th.
Moderator

Thaha Mohammad Alhamid
Sekretrais Jenderal

Lampiran 4

Profil SKP Jayapura

Sekretariat Keadilan & Perdamaian-SKP
Keuskupan Jayapura
Tanah Papua, Indonesia

SKP Keuskupan Jayapura adalah lembaga di bawah Gereja Katolik Keuskupan Jayapura yang memiliki empat bidang perhatian utama:

1. Advokasi pelanggaran HAM bersama dengan korban, kalangan agama, dan kalangan LSM.
2. Sosialisasi masalah Papua secara utuh melalui rangkaian publikasi seri *Memoria Passionis* dan seri *Political Notes.*
3. Upaya mencari solusi damai memulai jalan penguatan masyarakat sipil, rekonsiliasi, mediasi, atau negosiasi.
4. Bekerja sama dengan berbagai mitra kerja secara lintas-agama, lintas-budaya, lintas-keyakinan politis, tetapi memiliki keprihatinan, program, cara kerja, dan fokus perhatian yang sama baik di tingkat Papua, nasional, maupun internasional.

Tulisan-tulisan:

SKP menerbitkan dua seri tulisan yang menyangkut perkembangan-perkembangan aktual di Papua:

1. Seri Memoria Passionis; dan
2. Seri Socio-Political Notes.

Seri Memoria Passionis:

No. 1 *Agenda Rekonsiliasi Irian Jaya,* September 1998, 7 hlm.

No. 2 *Hak-Hak Azasi Manusia di Wilayah Paniai dan Tigi, Irian Jaya,* Oktober 1998, 20 hlm.

No. 3 *Returnees from Papua New Guinea to Irian Jaya: Dealing*

particular with returnees to the Waropko-Mindiptana area Survey report, Januari 1999, 32 hlm..

No. 4 *Dialog Nasional Papua: Sebuah kisah "Memoria Passionis"*, Maret 1999, 10 hlm.

No. 5 *Dampak Kehadiran Aparat Keamanan bagi Situasi Kemasyarakatan dan HAM di Wilayah Pegunungan Bintang, Tahun 1998 – awal 1999,* Juli 1999, 19 hlm.

No. 6 *Aspirasi "Merdeka" Masyarakat Tanah Papua, dan Perjuangan Demokrasi Bangsa Indonesia Awal Tahun 2000: Suatu Peta Sosio-Politik,* Februari 2000, 25 hlm.

No. 7 *Laporan Situasional Nabire, Kabupaten Paniai: Peristiwa 28 Februari serta Sebelum dan Sesudahnya,* Juli 2000, 20 hlm.

No. 8 *Sketsa Sejarah Perlawanan dan Penderitaan Masyarakat Paniai (A follow-up report; first report October 1998: Memoria Passionis No. 2),* November 2000, 23 hlm.

No. 9 *Memoria Passionis di Papua, Kondisi Hak Asasi Manusia dan Gerakan Aspirasi Merdeka: Gambaran 1999,* Jakarta, Januari 2001. 113 hlm. ISBN 979-9381-08-x (a chronolgy of events in the year 1999, an a analysis of the situation).

No. 10 *Memoria Passionis di Papua: Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia Gambaran 2000,* Jakarta, Januari 2002. 299 hlm. ISBN 979-9381-18-5 (a chronology of events in the year 2000, and a analysis of the situation).

No. 11 *Laporan Suasana Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Oksibili, berhubungan dengan dampaknya pemanfaatan penduduk mantan-OPM oleh Kopasuss* Jayapura, Februari 2002.

No. 12 *Laporan dan Analisis: Peristiwa Kekerasan 28 September 2001 di Kecamatan Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya,* Jayapura, April 2002.

Seri Socio-Political Notes:

No. 1. *Irian Jaya Post-Suharto: Perspectives for Reconciliation,* Juli 1999, 8 hlm.

No. 2. *Papuan Flag in Top: Especially December 1, 1999 Celebration,* Desember 1999, 13 hlm.

No. 3. *Notes on Recent Developments in Papua: Papua Pasca*

Mubes, April 2000, 16 hlm.

No. 4 *Notes on Recent Developments in Papua: Papua Congres II*, Januari 2001, 13 hlm.

No. 5 *Notes on Recent Developments in Papua: Special Autonomy, Its Process and Final Contents*, Desember 2001, 16 hlm. (Paper ini juga ditulis dalam bahasa Indonesia: *Mengatasi Perpecahan yang Melumpuhkan*, oleh Theo van den Broek ofm, Jakarta, Januari 2002, ISBN 979-9381-20-7)

Sejumlah Tulisan Varia :

1. *"Year Report 1999", Office for Justice & Peace*, Januari 2000, 10 hlm.
2. "Acuan Latihan Permasalahan & Rekonsiliasi", acuan kerangka lokakarya mengenai analisa masalah dan rekonsiliasi di Papua, April 2000, 16 hlm.
   English version: "Reflection Framework on Socio-Political Problems and Process Towards Reconciliation".
3. "Aspirasi M dan Eefek Obano", tulisan mengenai harapan-harapan yang kurang realisitis, diterbitkan dalam mingguan *Tifa Papua*, Th. 44, No. 10, 13-18 Maret 2000.
4. "Ada Apa di Papua? Ada Apa di Jakarta?", tulisan mengenai tanggapan pemerintah pusat atas Kongres Papua II di Papua. Diterbitkan di harian nasional *Suara Pembaruan*, Juni 2000.
5. "Gambaran Permasalahan di Papua", Juni 2000, 14 hlm.; makalah berhubungan dengan pertemuan tatap muka dengan Presiden di Jakarta.
   English version: "The Problems in Papua", 10 hlm.
6. "Reconciliation and Peace Building, West Papua Context", September 2000, 8 hlm.; makalah yang disajikan pada *workshop "The role of Churches in Human Rights Advocacy* di Biak".
7. "Seruan Kepada Komisi Nasional HAM", seruan berhubungan dengan peristiwa berdarah di Jayapura setelah 7 Desember 2000.
   English version: "Church Appeal", Desember 16, 2000.
8. *"Year Report 2000", Office for Justice & Peace*, Januari 2001, 10 hlm.
9. "Peristiwa Tragedi Kemanusiaan Wamena, 6 Oktober 2000,

Sebelum dan Sesudahnya", laporan investigasi oleh Tim Kemanusiaan Wamena di bawah koordinasi SKP, Januari 2001, 109 hlm.

10. "Bagaimana Kita Sebagai Gereja di Tanah Papua Menempatkan Diri dalam Situasi Konflik dan Kekerasan", 4 Februari 2001, 12 hlm. [makalah pada pertemuan para Delegat Sosial dan Pastoral keempat Keuskupan di Papua yang dilangsungkan di Merauke].
11. "Surat Kepada Gubernur Provinsi Papua", mengenai nasib para pengungsi yang berada di Vanimo. Surat ini ditandatangani oleh empat Uskup di Papua; 16 Februari 2001.
12. "MOU Cekungan Wanagon", suatu laporan atas proses serta isi kesepakatan yang diperoleh oleh PT Freeport dari masyarakat yang berkenpentingan. Sekaligus suatu protes, 21 Februari 2001.
13. "Papua, Ko Mau Kemanah?", diterbitkan dalam mingguan *Tifa Papua*, Maret 2001, Th. 45, No. 07 dan 08. 5 hlm.
14. *"Some Notes on Recent Socio-Political Condition in Papua"*, makalah yang disajikan pada UNHCR *Regional Consultative Contingency Planning Workshop*, Jakarta, 24 Juli 2001.
15. *"Papua Nowadays, Peacebuilding and Interreligius Coorperation"*, makalah yang disajikan pada *"Conference Towards Better Peace Building Practice, at Soesterberg"*, Netherlands, 24-27 Oktober 2001.
16. "Surat Kepada Kepala Polisi Republik Indonesia", ditandatangani oleh tiga pemimpin Gereja di Papua (Gereja Katolik, GKI and GKII), 22 November 2001.
17. "Surat Kepada Komnas HAM", ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin agama di Papua, 24 November 2001.
18. "Surat Kepada Komnas HAM", ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin agama di Papua, 4 Desember 2001.
19. "Perkara Abepura 7 Desember 2000: Masih 'KJ'", 10 Desember 2001 (diterbitkan dalam mingguan *Jubi*, 13 Desember 2001).
20. "Kasus Theys: Pelanggaran HAM?", 2 Desember 2001 (disebarluaskan kepada media nasional pada Desember 2001, dan diterbitkan oleh mingguan *Jubi*, No. 25, 18-24 Januari 2002).
21. *"Year Report 2001", Office for Justice & Peace*, Januari 2002,

13 hlm.
22. "Pernyataan Pers Mengenai Tim Investigasi Independen dalam Kasus Pembunuhan terhadap Theys Eluay", ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin agama di Papua, 22 Januari 2002.
23. "TIM Independen: Barang Apakah?", diterbitkan dalam mingguan *Jubi*, No. 29 Tahun III, 15-21 Januari 2002.
24. *"Human Right Condition in Papua and the Role of International Humanitarian Agencies"*, makalah yang disajikan pada "UNHCR Regional Seminar", Bali 26-28 Februari 2002, 10 hlm.
25. "Keluar dari Suasana Traumatis Menuju Rekonsiliasi", makalah yang disajikan pada "Konferensi Besar Masyarakat Adat", Jayapura, 25-28 Februari 2002, 14 hlm.
26. "Gereja-Gereja di Papua: Menjadi Nabi di Tanah Sendiri", makalah yang disajikan pada "Seminar Perpisahan dr. At Ipenburg", Abepura, 20 Maret 2002.
27. *"Statement to the 58th Session of the UN Comission on Human Rights"*, disajikan oleh Theo van den Broek ofm, Geneva, 9 April 2002.
28. "Pernyataan Sikap dan Seruan Bersama", seruan kepada Gubernur Propinsi Papua oleh pemimpin-pemimpin agama di Papua untuk mengungkapkan keprihatinan para pemimpin agama berhubungan dengan perkembangan-perkembangan aktual di Papua; menyangkut peningkatan kehadiran Laskar Jihad, Barisan Merah Putih di Papua, dan tidak terselesaikannya sejumlah kasus pelanggaran HAM. Jayapura, 10 April 2002.
29. "Serua Gabungan Kepada Presiden Republik Indonesia", oleh SKP Jayapura, Elsham Jayapura, LBH Jayapura and Kontras Jayapura, untuk mengungkapkan keprihatinan berhubungan dengan perkembangan-perkembangan aktual di Papua dan status investigasinya dalam kasus penculikan serta pembunuhan terhadap Theys H. Eluay serta penghilangan paksa sopirnya. Jayapura, 10 Mei 2002.
30. "Mengisi Gagasan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Konteks Papua", makalah yang disajikan pada lokakarya "Menggagas Masa Depan Penegakan HAM" yang diselenggarakan oleh Kontras Papua. Jayapura, Juni 2002, 9 hlm.
31. "Adat dan Demokrasi: Beberapa Pikiran", sebuah sumbangan pikiran kepada Musyawarah Besar Hedam Duliba, Sentani

Timur. Jayapura, Juni 2002, 10 hlm.
32. "Kejahatan Negara di Papua", makalah pada Pertemuan Wilayah III Forum Komunikasi Lembaga Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia, Maluku-Papua, yang diselenggarakan di STT IS-KEYNE, Jayapura, 7 Agustus 2002, 11 hlm.
33. "Surat Kepada Presiden Republik Indonesia", ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin agama di Papua (Gereja Katolik, GKI, GKII, MUI, Pansada Hindu Dharma, dan Majelis Budhayana), bertalian dengan mutlak perlunya suatu tim investigasi independen berhubungan dengan peristiwa berdarah pada 31 Agustus 2002, di Mile 62 (Timika/Tembagapura), 7 September 2002.
34. "Surat Kepada Jaksa Agung Republik Indonesia", ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin agama di Papua (Gereja Katolik, GKI, GKII, MUI, Pansada Hindu Dharma, dan Majelis Budhayana), bertalian dengan mutlak perlunya tindak lanjut atas Kasus Abepura (7 Desember 2000) dan supaya kasus ini diperlakukan secara efektif sebagai *"crime against humanity"* sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam UU No. 26/2000, 7 September 2002.
35. "Membangun Budaya Damai Menuju Papua Tanah Damai", acuan kerangka buat lokakarya yang diselenggarakan oleh SKP Jayapura pada 25 sampai 30 November 2002.

JIKA dilihat perkebangannya, apa yang terjadi di Papua selama 2001 merupakan kesinambungan dari perkembangan politik tahun-tahun sebelumnya. Namun jika dilihat kasus per kasus, banyak peristiwa-peristiwa yang merupakan penomena yang betul-betul baru. Yang paling mengguncangkan adalah terbunuhnya Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay.

Nampaknya, kekerasan demi kekerasan masih akan terus berlangsung di Papua, selama tidak ada itikad baik dari berbagai kalangan untuk melakukan perubahan demi terciptanya suasana yang lebih kondusif. Pendekatan represif-militeristik dari pihak keamanan dalam menghadapi aspirasi yang disuarakan masyarakat Papua, adalah salah satu contoh yang membuat Tanah Papua selalu berdarah-darah.

Buku ini, sebagaimana buku-buku seri Memoria Passinois sebelumnya, mencoba menggambarkan kondisi sosial politik dan Hak Asasi Manusia di Papua selama tahun 2001. Upaya penerbitan buku ini, berangkat dari niat untuk mendokumentasikan ingatan sosial masyarakat Papua, agar tidak mudah ditelan oleh "budaya melupakan" yang tetap bercokol kuat dalam masyarakat Indonesia.

ISBN 979-9381-32-0
9 789799 381323 >

Foto Sampul: Yayasan Sejati